



DJKA

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN I 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KATA PENGANTAR

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator transportasi perkeretaapian melaksanakan fungsi pembinaan meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian serta melaksanakan pembangunan infrastruktur perkeretaapian sesuai prioritas pada RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Penyelenggaraan perkeretaapian dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan transportasi massal kereta api yang handal dan berdaya saing baik di wilayah perkotaan maupun antar kota.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai regulator tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Program yang menjadi tolok ukur keberhasilan/kegagalan. Capaian Indikator Kinerja Program secara berkala dilakukan pemantauan kinerja dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan pemantauan kinerja dituangkan dalam Laporan Monitoring Kinerja Triwulan yang mencakup realisasi kinerja dalam periode triwulan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Selain informasi capaian kinerja, juga diidentifikasi permasalahan/kendala serta disusun rekomendasi sebagai upaya peningkatan kinerja untuk periode berikutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025.

Jakarta, April 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPU
NIP 196706081990031005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Monitoring Kinerja tersebut menggambarkan pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Program serta progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2025. **Rata-rata capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 diperoleh sebesar 102,329%** yang secara ringkas disampaikan pada Tabel berikut.

Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	100,000
2	SP2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100,000	99,617	99,617
3	SP3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IK3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740	3,810	101,872
		IK4 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100	97,415	101,368
		IK5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	4,465	4,515	101,120
4	SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	19,035	27,948	110,000
Rata-rata Capaian Kinerja						102,329

Selain itu, dilaporkan pula realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan I Tahun 2025 diperoleh sebesar Rp147.261.471.819,- atau 2,86% dari alokasi sebesar Rp 5.155.495.117.000,-. Realisasi anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran periode yang sama Tahun 2024 yaitu sebesar 5,90% serta juga lebih rendah dari Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar 6,71%. Terkait PNBPD Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dilaporkan realisasi sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp689.200.131.258,- atau 55,30% dari target Tahun 2025 sebesar Rp 1.246.326.325.000,- baik pendapatan fungsional maupun non fungsional.

Dengan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya serta memastikan target pada akhir tahun dapat terpenuhi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1-1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1-2
1.3 TUGAS DAN FUNGSI	1-2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	1-3
1.5 PERJANJIAN KINERJA	1-6
1.5.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	1-7
1.5.2 ALOKASI ANGGARAN.....	1-12
BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN	2-1
2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA.....	2-1
2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	2-3
2.2.1 KONEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	2-4
2.2.2 KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA YANG HANDAL	2-13
2.2.3 KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN YANG TERPERCAYA DAN SESUAI KEBUTUHAN ..	Error! Bookmark not defined.
2.3 CAPAIAN KINERJA LAINNYA	2-52
2.4 REALISASI ANGGARAN	2-55
2.4.1 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA	2-55
2.4.2 REALISASI PENDAPATAN UNIT KERJA	2-58
2.4.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA.....	2-59
BAB 3 PENUTUP	3-1
3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA	3-1
3.2 KESIMPULAN.....	3-9
3.3 REKOMENDASI	3-10
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1	Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025	1-7
Tabel 1-2	Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025	1-11
Tabel 1-3	Alokasi Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	1-12
Tabel 1-4	Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	1-12
Tabel 2-1	Pengukuran Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2-2
Tabel 2-2	Target dan Realisasi Lokasi PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubungan Jaringan Jalur Kereta Api pada Tahun 2025	2-5
Tabel 2-3	Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2025	2-8
Tabel 2-4	Nilai Rasio Konektivitas Antar Wilayah	2-12
Tabel 2- 5	Jumlah Kejadian Kecelakaan per Jenis Kejadian Tahun 2025	2-14
Tabel 2- 6	Jumlah Kejadian Kecelakaan per Wilayah Balai Tahun 2025	2-14
Tabel 2- 7	Capaian Kinerja Rasio Konektivitas antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2025	2-15
Tabel 2-8	Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian	2-18
Tabel 2-9	Kategori Kinerja Nilai IKM	2-21
Tabel 2-10	Hasil Survey Nilai IKM Bulan Januari s.d Maret Tahun 2025	2-21
Tabel 2-11	Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025	2-22
Tabel 2-12	Perbandingan Nilai IKM.....	2-24
Tabel 2-13	Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu Tahun 2025 ..	2-26
Tabel 2-14	Capaian Kinerja Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025.....	2-26
Tabel 2-15	Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025.....	2-34
Tabel 2-16	Jumlah Angkutan Penumpang Kereta Api	2-37
Tabel 2-17	Jumlah Angkutan Barang Kereta Api	2-38
Tabel 2-18	Uraian Target Triwulanan IKP Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian Tahun 2025.....	2-41
Tabel 2- 19	Realisasi PNBPDirektorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025	2-43
Tabel 2-20	Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025	2-46
Tabel 2-21	Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan	2-50
Tabel 2-22	Realisasi PNBPDirektorat Jenderal Perkeretaapian Per Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Triwulan I 2025	2-50
Tabel 2- 23	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Jenis Belanja Tahun 2025	2-56
Tabel 2-24	Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Kegiatan Tahun 2025	2-56

Tabel 2-25	Alokasi Anggaran Per Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2025	2-57
Tabel 2-26	Realisasi PNBK Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025	2-58
Tabel 2-27	Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Tahun 2025.....	2-63
Tabel 3-1	Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Kinerja Periode Sebelumnya.....	3-1
Tabel 3-2	Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025.....	3-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	1-5
Gambar 1-2	Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Unit Kerja	1-6
Gambar 2-1	Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2025	2-8
Gambar 2-2	Capaian Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan 2025	2-16
Gambar 2-3	Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan KA dengan Beberapa Negara	2-18
Gambar 2-4	Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025	2-22
Gambar 2-5	Capaian Kinerja Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025	2-27
Gambar 2-6	Perbandingan <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api dengan Beberapa Negara	2-29
Gambar 2-7	Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025	2-35
Gambar 2-8	Uraian Target Triwulanan IKP Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian Tahun 2025.....	2-41
Gambar 2-9	Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025.....	2-47
Gambar 2-10	Pendaftaran Angkutan Motis pada Masa Lebaran 2025	2-53
Gambar 2-11	Bogkar Muat Motis Angkutan Lebaran 2025	2-54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Lampiran 2. Komitmen Rekomendasi Peningkatan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
- Lampiran 3. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025
- Lampiran 4. Monitoring Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2025
- Lampiran 5. Data Dukung Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Kinerja
- Lampiran 6. Dokumentasi Pembahasan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diwajibkan setiap instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam rangka implementasi SAKIP dimaksud, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan beberapa tahapan termasuk memenuhi komponen SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Adapun salah satu wujud dari komponen pengukuran dan pelaporan kinerja adalah laporan monitoring kinerja secara berkala (setiap triwulan) untuk mengetahui kemajuan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai target yang telah ditetapkan dalam perencanaan atau perjanjian kinerja. Laporan monitoring kinerja secara berkala sangat diperlukan sebagai upaya memastikan pencapaian target kinerja melalui pengukuran kinerja untuk selanjutnya menjadi landasan dalam mengambil keputusan/tindakan yang diperlukan selanjutnya.

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk pengukuran terhadap capaian kinerja secara periodik dari setiap indikator kinerja program dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan monitoring kinerja memuat informasi dan evaluasi pencapaian kinerja dengan dilengkapi identifikasi kendala/permasalahan serta upaya-upaya peningkatan kinerja yang diperlukan untuk mencapai sasaran dalam kerangka pemenuhan tujuan unit kerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025 dilaksanakan dengan maksud:

1. Menyediakan informasi kinerja dan melakukan evaluasi capaian kinerja termasuk gambaran kemajuan pelaksanaan program/kegiatan pendukung.
2. Mengidentifikasi permasalahan/kendala dalam pencapaian target kinerja.
3. Menyusun rekomendasi untuk upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya guna memastikan pencapaian target yang ditetapkan pada perencanaan/perjanjian kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai tolok ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka pertanggungjawaban melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api.

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api.
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api.
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai struktur organisasi terdiri dari:

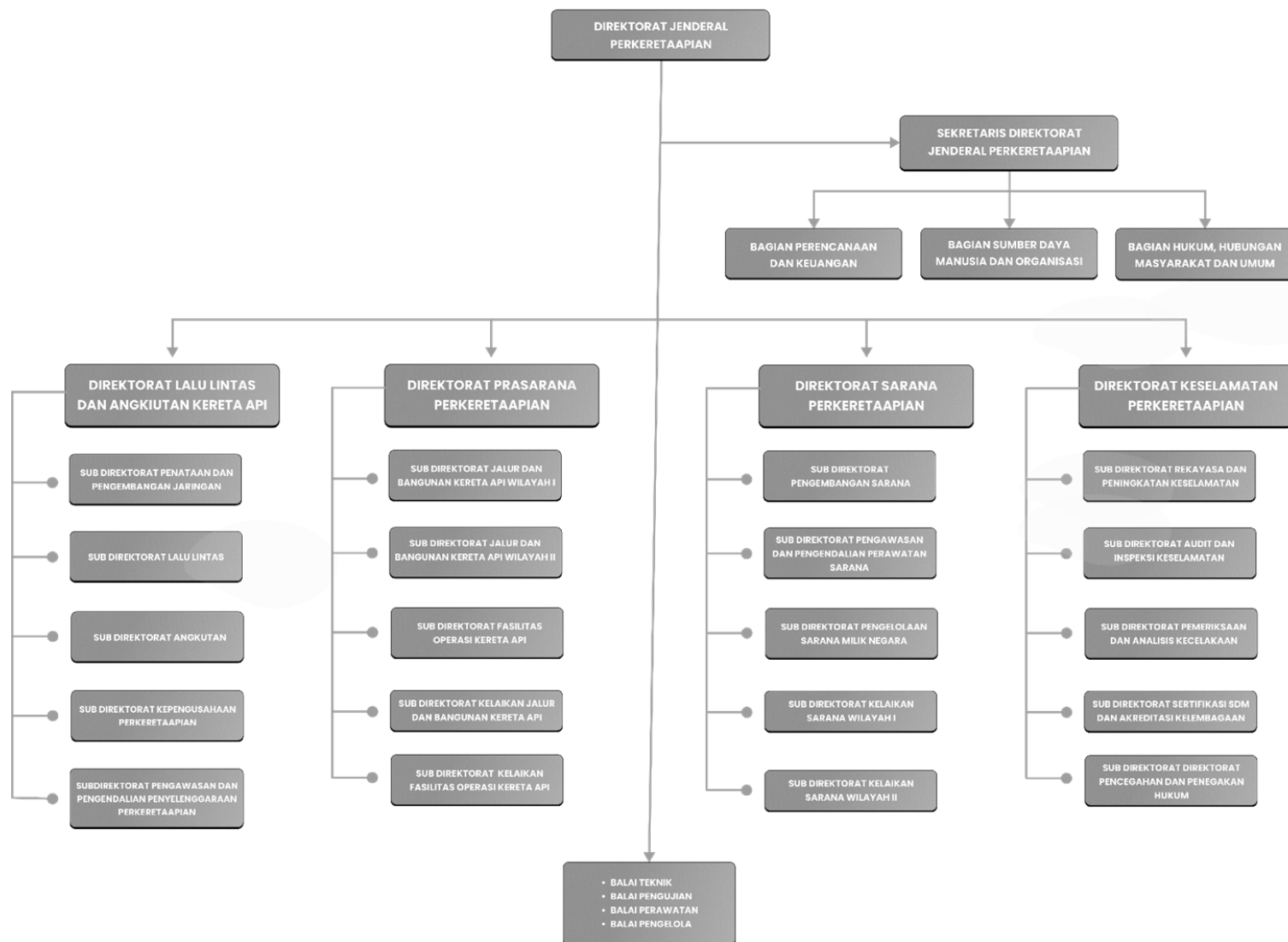
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Eselon II);
2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Eselon II);
3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian (Eselon II);
4. Direktorat Sarana Perkeretaapian (Eselon II);
5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Eselon II);
6. Unit Kerja Mandiri/Unit Pelaksana Teknis setingkat Eselon III, dengan rincian :
 - a. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
 - b. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
 - c. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
 - d. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya ;
 - e. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
 - f. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
 - g. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
 - h. Balai Pengujian Perkeretaapian (Badan Layanan Umum);
 - i. Balai Perawatan Perkeretaapian;

- j. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Badan Layanan Umum);
- k. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Untuk organisasi dan tata kerja Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian serta Balai Pengelola Kereta Api diatur melalui peraturan tersendiri yaitu:

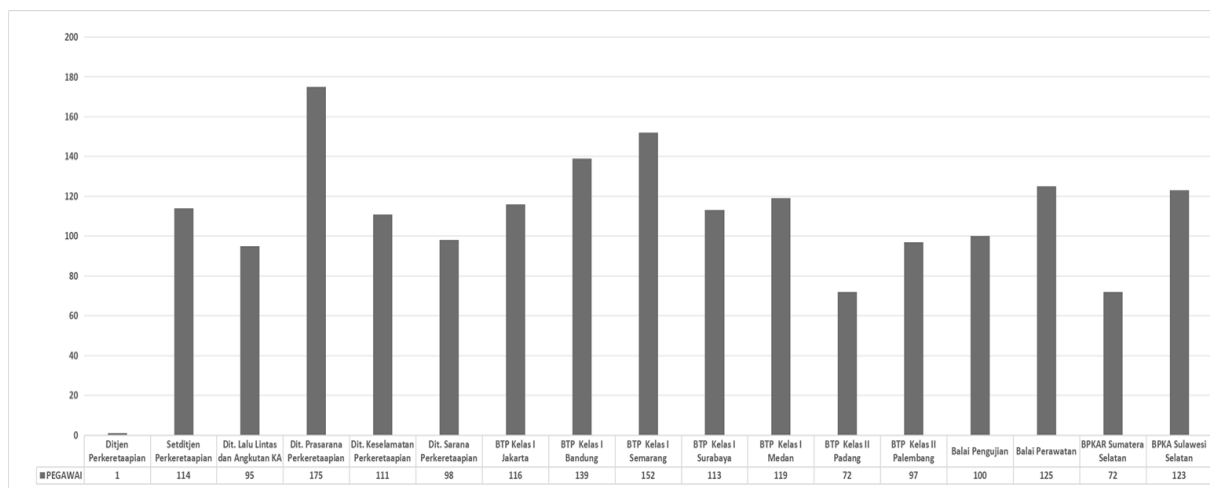
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian.

Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara umum dapat dilihat sebagaimana pada Gambar berikut:



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sumber Daya Manusia pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2025 berjumlah 1.822 dengan rincian berupa 594 pegawai pada Kantor Pusat (Sekretariat dan 4 Direktorat Teknis) dan 1.228 pegawai tersebar pada 11 Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Jumlah pegawai untuk masing-masing unit kerja diuraikan sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 1- 2 Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Unit Kerja

1.5 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki 4 Sasaran Program dan 6 Indikator Kinerja Program yang dicapai melalui Program Infrastruktur Konektivitas. Berikut uraian sasaran, indikator dan target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 termasuk uraian alokasi anggaran.

1.5.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*). Analisa indikator kinerja program diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1- 1 Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	<i>SPECIFIC (S)</i>	<i>MEASURABLE (M)</i>	<i>ACHIEVABLE (A)</i>	<i>RELEVANT (R)</i>	<i>TIME-BOUND (T)</i>
Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Konektivitas wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional terhubung dengan prasarana dan layanan perkeretaapian.	Jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A), Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA termasuk integrasi antar moda lainnya s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Industri/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) Tahun 2030 $\text{Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang terhubung Jaringan dan Layanan KA termasuk integrasi antar moda lainnya s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS Tahun 2030}}$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan RIPNAS 2030 serta Tugas Pokok dan Fungsi termasuk Core Bussiness Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah	Merupakan parameter untuk mengetahui tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di pada tahun berjalan.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan,	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART																													
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)																									
Keberangkatan KA		$\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per 1.000} = \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keberangkatan Kereta Api pada Tahun Berjalan}} \times 1.000 \times 100\%$	kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Ditjen Perkeretaapian																										
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table> Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Core Bussiness Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																										
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																										
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																										
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																										
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																										
Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	Merupakan salah satu parameter untuk mengukur tingkat pelayanan transportasi kereta api melalui rata-rata ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan KA	Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang. $\text{Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029																									

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	<i>SPECIFIC (S)</i>	<i>MEASURABLE (M)</i>	<i>ACHIEVABLE (A)</i>	<i>RELEVANT (R)</i>	<i>TIME-BOUND (T)</i>
	untuk angkutan penumpang dan barang		alokasi anggaran yang tersedia	Core Bussiness Ditjen Perkeretaapian	
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	Jumlah angkutan penumpang dan barang merupakan salah satu parameter keberhasilan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana perkeretaapian dan diharapkan dengan peningkatan angkutan penumpang dan barang kereta api dapat mengurangi jumlah kepadatan lalu lintas jalan raya termasuk pengurangan emisi.	Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis dengan bobot masing-masing 50%. $\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA} = \frac{\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang} + \text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Barang}}{2}$ Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Target Angkutan Penumpang Kereta Api Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$ Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Merupakan salah satu parameter kemanfaatan dari hasil pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian yang berkorelasi dengan semakin banyaknya jumlah angkutan penumpang dan barang yang terangkut serta selaras dengan target yang ditetapkan pada Renstra 2025-2029 dan RIPNAS 2030	Target ditetapkan secara bertahap pe rtahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
		$\frac{\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang}}{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}} \times 50\%$ $\frac{\text{Target Angkutan Barang Kereta Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}}{\text{Target Angkutan Barang Kereta Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}}$			
Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang mencakup Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBPN Bidang Perkeretaapian dan Indeks Profesional ASN	Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan rata-rata dari persentase pencapaian kinerja mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBPN Bidang Perkeretaapian dan Indeks Profesional ASN. Adapun rumusan sebagai berikut: $AKIP_{DJKA} + NKA_{DJKA} + NKA_{PNBP} + ASN_{DJKA} / 4$ $AKIP_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian nilai AKIP DJKA NKA_{DJKA} = Tingkat pencapaian Nilai Kinerja Anggaran DJKA $PNBP_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian realisasi PNBPN bidang perkeretaapian ASN_{DJKA} = Tingkat pencapaian Indeks Profesional ASN	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya serta kegiatan pendukung pada tahun berjalan	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan,	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

Target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja diuraikan per periode triwulan sebagai berikut :

Tabel 1-2 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
SP2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
SP3 Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan	IK3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	%	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740
	IK4 Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100
	IK5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api (%)	%	19,000	4,465	9,125	14,785	14,785
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000	19,035	20,555	40,000	100,000

1.5.2 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan pada Januari 2025 sebesar Rp5.119.295.134000,00 dan pada bulan Maret alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdapat perubahan menjadi Rp.5.155.495.117.000,- Adapun rincian alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut.

Tabel 1-3 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran Berdasarkan PK (Rp)	Alokasi Anggaran Posisi 31 Maret 2025 (Rp)
1.	Program infrastruktur konektivitas	4.424.660.689.000	4.460.860.672.000
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	813.226.191.000	813.126.191. 000
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	895.248.757.000	904.411.441.000
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.670.022.802.000	2.697.160.101. 000
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	46.162.939.000	46.162.939.000
2.	Program Dukungan Manajemen	694.634.445.000	694.634.445.000
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	22.069.026.000	22.099.026.000
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	637.851.276.000	637.821.276.000
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	17.498.737.000	17.498.737.000
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	14.149.348.000	14.149.348.000
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	3.066.058.000	3.066.058.000
TOTAL		5.119.295.134.000	5.155.495.117.000

Tabel 1-4 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Alokasi Anggaran Berdasarkan PK (Rp)	Alokasi Anggaran Posisi 31 Maret 2025 (Rp)
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	813.226.191.000	813.126.191.000
SP2 Meningkatnya Keselamatan	IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	2.716.185.741.000 (termasuk penunjang teknis)	2.743.323.040.000 (termasuk penunjang teknis)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Alokasi Anggaran Berdasarkan PK (Rp)	Alokasi Anggaran Posisi 31 Maret 2025 (Rp)
Transportasi Perkeretaapian	per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA		
SP3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	895.248.757.000	904.411.441.000
	IKP4 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api		
	IKP5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api		
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP5 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	694.634.445.000	694.634.445.000
Jumlah		5.119.295.134.000	5.155.495.117.000

BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja menggunakan formula sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Formula perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut :

1. Kondisi pertama, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left[\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right] \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%.

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target Tahun 2025 dan Triwulan I dengan realisasi kinerja dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2025.
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.
3. Rekomendasi atau alternatif solusi/upaya peningkatan kinerja.
4. Realisasi anggaran periode Triwulan I Tahun 2025 termasuk analisis efisiensi sumber daya.

Tata cara pengukuran capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-1 Pengukuran Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Program	Pengukuran																									
1	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A), Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang sudah terhubung jaringan dan layanan KA termasuk integrasi antar moda lainnya s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah wilayah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Industri/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan dan layanan KA sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) Tahun 2030. <i>Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang terhubung Jaringan dan Layanan KA termasuk integrasi antar moda lainnya s.d Tahun Berjalan</i> Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian = $\frac{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang Terhubung dengan Jaringan dan Layanan KA sesuai RIPNAS Tahun 2030}}{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Industri yang terhubung Jaringan dan Layanan KA termasuk integrasi antar moda lainnya s.d Tahun Berjalan}}$																									
2	IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di pada tahun berjalan. Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA = $\left[1 - \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keberangkatan Kereta Api pada Tahun Berjalan}} \times 1.000 \right] \times 100\%$																									
3	IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. <table><thead><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></tbody></table> Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																							
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																							
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																							
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																							
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																							
4	IKP4 Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang. Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian = $\frac{\text{Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}} \times 100\%$																									
5	IKP5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis dengan bobot masing-masing 50%.																									

No	Indikator Kinerja Program	Pengukuran
		$\frac{\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA}}{\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang} + \text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Barang}} =$ Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang}}{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}} = \frac{\text{Target Angkutan Penumpang Kereta Api Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}}{\text{Target Angkutan Penumpang Kereta Api Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$ Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\frac{\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang}}{\text{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}} = \frac{\text{Target Angkutan Barang Kereta Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}}{\text{Target Angkutan Barang Kereta Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} \times 50\%$
6	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan rata-rata dari persentase pencapaian kinerja mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBPN Bidang Perkeretaapian dan Indeks Profesional ASN. Adapun rumusan sebagai berikut: $AKIP_{DJKA} + NKA_{DJKA} + PNBPN_{DJKA} + ASN_{DJKA} / 4$ $AKIP_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian nilai AKIP DJKA NKA_{DJKA} = Tingkat pencapaian Nilai Kinerja Anggaran DJKA $PNBPN_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian realisasi PNBPN bidang perkeretaapian ASN_{DJKA} = Tingkat pencapaian Indeks Profesional ASN

2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 melaksanakan tugas dan pokok untuk mendukung 4 (empat) Sasaran Program dan 6 (enam) Indikator Kinerja Program melalui Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen. Berikut uraian pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2025.

2.2.1 KONEKTIVITAS JARINGAN PERKERETAAPIAN NASIONAL YANG DIWUJUDKAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

Dasar penentuan PKN, PKW dan Simpul Transportasi (pelabuhan dan bandara) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sedangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang disandingkan dengan jalur kereta api terhubung (*eksisting*) maupun yang akan terhubung dengan jalur kereta api s.d periode Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030.

Baseline rasio konektivitas Tahun 2024 sebesar 0,46 dengan jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional sebanyak 68 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 52 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 10 lokasi) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 149 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 104 lokasi, simpul bandara 16 lokasi, simpul pelabuhan 29 lokasi). Penambahan konektivitas jaringan kereta api pada Tahun 2024 yaitu akses menuju PKW Lhokseumawe Provinsi Aceh.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan target rasio konektivitas antar wilayah transportasi perkeretaapian sebesar 0,460 dengan jumlah target PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan kereta api sebanyak 68 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 10 lokasi dan simpul terminal tipe A 1 lokasi dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 150 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 104 lokasi, simpul bandara 16 lokasi, simpul pelabuhan 29 lokasi dan simpul terminal tipe A 1 lokasi).

Sehubungan dengan hal tersebut, capaian pada periode Triwulan I Tahun 2025 masih sama dengan *baseline* rasio konektivitas dengan rincian target dan realisasi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-2 Target dan Realisasi Lokasi PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang Terhubungan Jaringan Jalur Kereta Api pada Tahun 2025

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2025	
		Target PK	Realisasi
Pusat Kegiatan Nasional / Pusat Kegiatan Wilayah/ Kawasan Strategis Nasional			
1	Mebidangro	√	√
2	Perkotaan Padang – Lubuk Agung – Pariaman	√	√
3	Patungraya Agung	√	√
4	Bandar Lampung	√	√
5	Serang	√	√
6	Cilegon	√	√
7	Jabodetabek	√	√
8	Cirebon	√	√
9	Bandung Raya	√	√
10	Kedungsepur	√	√
11	Cilacap	√	√
12	Surakarta	√	√
13	Yogyakarta	√	√
14	Malang	√	√
15	Gebangkertosusila	√	√
16	Rantau Prapat	√	√
17	Pematang Siantar	√	√
18	Tebing Tinggi	√	√
19	Kisaran	√	√
20	Pariaman	√	√
21	Lubuklinggau	√	√
22	Muara enim	√	√
23	Baturaja	√	√
24	Prabumulih	√	√
25	Lahat	√	√
26	Kotabumi	√	√
27	Rangkasbitung	√	√
28	Cikampek	√	√
29	Sukabumi	√	√

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2025	
		Target PK	Realisasi
30	Indramayu	√	√
31	Tasikmalaya	√	√
32	Cikampek-cikopo	√	√
33	Tegal	√	√
34	Pekalongan	√	√
35	Cepu	√	√
36	Purwokerto	√	√
37	Kebumen	√	√
38	Klaten	√	√
39	Sleman	√	√
40	Bojonegoro	√	√
41	Madiun	√	√
42	Jember	√	√
43	Banyuwangi	√	√
44	Probolinggo	√	√
45	Blitar	√	√
46	Pasuruan	√	√
47	Tulungagung	√	√
48	Kediri	√	√
49	Baru	√	√
50	Pangkajene	√	√
51	Maros/Mamminasata	√	√
52	Muara Satu	√	√
Simpul Transportasi Bandara			
1	Bandar Udara Kualanamu	√	√
2	Bandar Udara Internasional Minangkabau	√	√
3	Bandar Udara Soekarno Hatta	√	√
4	Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II	√	√
5	Bandar Udara Adi Soemarmo	√	√
6	Bandar Udara NYIA	√	√
Simpul Transportasi Pelabuhan			
1	Pelabuhan Tj. Priok	√	√
2	Pelabuhan Kuala Tanjung	√	√
3	Pelabuhan Merak	√	√
4	Pelabuhan Sungai Kertapati	√	√

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2025	
		Target PK	Realisasi
5	Pelabuhan Teluk Bayur	√	√
6	Pelabuhan Cilacap	√	√
7	Pelabuhan Tarahan	√	√
8	Pelabuhan Garongkong	√	√
9	Pelabuhan Tanjung Mas	√	√
10	Pelabuhan Tanjung Perak	√	√
Simpul Transportasi Terminal Tipe A			
1	Terminal Kampung Rambutan	√	√
TOTAL		69	69

Berdasarkan Tabel di atas, rasio konektivitas pada Triwulan I Tahun 2025 diperoleh sebesar 0,460 dengan jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional sebanyak 69 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 52 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 10 lokasi dan simpul terminal tipe A 1 lokasi) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 150 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 104 lokasi, simpul bandara 16 lokasi, simpul pelabuhan 29 lokasi dan simpul terminal tipe A 1 lokasi), dengan perhitungan sebagai berikut :

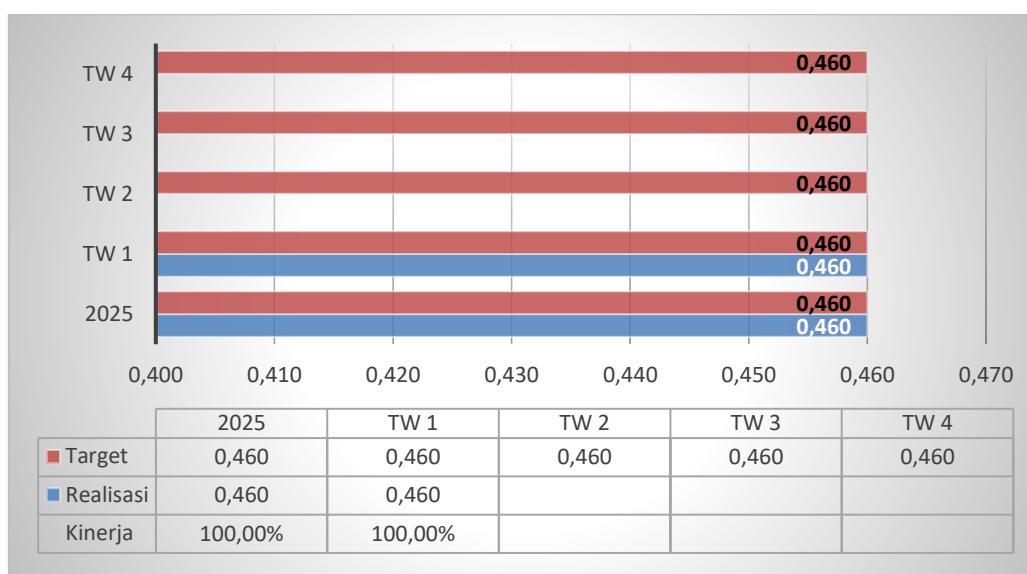
$$\text{Rasio Konektivitas Antar Wilayah} = \frac{69 \text{ Lokasi PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional}}{150 \text{ PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional}}$$

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi rasio konektivitas antar wilayah pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 0,460, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Triwulan I maupun Tahun 2025 sebesar 0,460. Pada masing-masing periode triwulan, keseluruhan capaian kinerja dapat terpenuhi sesuai target triwulan (kinerja = 100%). Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2- 3 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	-	-	-	100	-	-	-	100



Gambar 2-1 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pada Tahun 2025 belum ditargetkan penambahan konektivitas dikarenakan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang membatasi ruang fiskal kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian. Selain itu, kegiatan yang dapat dilaksanakan Ditjen Perkeretaapian pada Tahun 2025 lebih banyak mendukung pada pelayanan. Pada Triwulan I Tahun 2025 juga terdapat beberapa kegiatan pendukung peningkatan konektivitas transportasi perkeretaapian lainnya antara lain:

- Konektivitas PKW Sawahlunto didukung dengan kegiatan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban.

PKW Sawahlunto masih dalam proses melengkapi data dukung pengujian dimana sampai dengan Triwulan I 2025 masih terdapat kekurangan data dukung pengujian Prasarana Perkeretaapian sehingga proses pengujian Prasarana Perkeretaapian tidak dapat dilanjutkan.

Dokumen Gambar teknis (*as built drawing*) normalisasi jalur sawahlunto, *Shop Drawing* Normalisasi dengan hasil verifikasi untuk *as built drawing* dan *shop drawing* yang sudah diserahkan sesuai PM 30 tahun 2011 belum memenuhi ketentuan sehingga belum mendapatkan persetujuan dari Direktorat Teknis. Terdapat 2 dokumen yang menjadi persyaratan pengujian Prasarana yang belum diserahkan yaitu *Detail Engineering Design* dan Spesifikasi Teknis.

Telah dilaksanakan Pembahasan bersama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, Balai Pengujian Perkeretaapian, PT. Kereta Api Indonesia, dan pemerintah daerah Sawahlunto terkait percepatan penyelesaian reaktivasi jalur KA antara Sawahlunto – Muarokalaban, dengan hasil sebagai berikut :

- 1) BTP Kelas II Padang telah melakukan *self assesment* pada jalur kereta tersebut dengan hasil masih banyak temuan yang tidak sesuai dengan standar teknis;
 - 2) PT.KAI sebagai pelaksana pekerjaan reaktivasi belum dapat melengkapi persyaratan data dukung pengujian prasarana KA, dokumen yang telah disampaikan berupa *Shop Drawing*, *Asbuilt Drawing* (belum ditandatangani), spesifikasi teknis PT.KAI (Persero).
 - 3) Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan memberikan teguran kepada PT. KAI (Persero) untuk memenuhi peraturan – peraturan yang berlaku terkait dengan kegiatan reaktivasi jalur KA antara Sawahlunto – Muarokalaban.
- b. Konektivitas PKW Lhokseumawe (Kecamatan Muara Satu) dengan kegiatan pendukung berupa pembangunan jalur kereta api lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu telah selesai 100% yang terdiri dari pembangunan jalur KA sepanjang 8 km'sp dengan lebar spoor 1.435 mm.
- Posisi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, telah dilaksanakan Pengujian Pertama Rancang Bangun Fisik Jalur dan Stasiun Kereta Api

antara Stasiun Krueng Geukueh - Stasiun Muara Satu pada tanggal 2 s.d. 7 Maret 2025 sesuai dengan Berita Acara yang telah ditandatangani bersama oleh Tim Pengujian dan BTP Kelas I Medan Nomor : 45/BA/K2/BP-UJI/JALBANG/IX/2025 tanggal 7 Maret 2024. Saat ini masih Menunggu Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan menyelesaikan temuan pengujian dan melaporkan tindak lanjut kepada Direktur Prasarana Perkeretaapian dan Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian dengan tembusan Direktur Jenderal Perkeretaapian.

- c. Pekerjaan utilitas dan penyempurnaan lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung untuk mendukung konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung sudah selesai dilaksanakan, sebelumnya terdapat kendala dalam pembebasan lahan untuk *frontage road* yang sebelumnya direncanakan pada 532 bidang menjadi 479 bidang, sehingga direncanakan pengusulan kembali untuk pekerjaan *frontage road* dengan meninjau kembali kemampuan fiskal yang dimiliki Ditjen Perkeretaapian.
- d. Kegiatan lanjutan pembangunan jalur KA Rantauprapat – Pondok S5 – Kotapinang, dimana saat ini masih dalam tahap persiapan pengoperasian KA perintis segmen Rantauprapat – Pondok S5 (tindak lanjut pengujian, *safety assessment*). Sedangkan untuk segmen lanjutan Pondok S5 – Kota Pinang masih dalam tahap penyelesaian pengadaan lahan melalui anggaran LMAN (progress 93,30%) yaitu sebanyak 710 dari 762 bidang telah dibebaskan.
- e. Dukungan konektivitas di wilayah IKN, diantaranya penyiapan dokumen perencanaan teknis untuk rencana jalur kereta api Bandara Sepinggan – KIPP IKN dan kereta api perkotaan Balikpapan – IKN dialihkan dan dilaksanakan oleh Otorita IKN. Saat ini sedang dilaksanakan *Proof Of Capacity* (PoC) dan *Show Case* dari tanggal 10 Agustus s.d 09 Oktober 2025 oleh Norinco International Cooperation dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap PoC untuk menentukan kelayakan sebagai sarana transportasi di IKN pada tahun 2025.

Berdasarkan hal di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain:

- a. Keterhubungan dalam pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian pada jalur kereta api lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu, diantaranya dengan koordinasi pihak internal (Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan, Balai Pengujian) dan pihak eksternal (PT. KAI/BUPP/BUPS).
- b. Koordinasi dengan PT. KAI dan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelesaian kegiatan reaktivasi jalur KA Sawahlunto – Muarokalaban.
- c. Konsolidasi dalam penyiapan lahan mendukung pembangunan perkeretaapian dengan melibatkan LMAN Kementerian Keuangan, BPN, Pemerintah Daerah dan instansi lainnya.
- d. Koordinasi dengan OIKN dan pihak Badan Usaha (*Norinco International Cooperation*) terkait rencana penyelenggaraan trem otonom di wilayah IKN.

Adapun pencapaian kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah dengan penambahan keterhubungan jaringan jalur dan layanan kereta api diharapkan dapat menghasilkan *outcome* diantaranya:

- a. Peningkatan mobilitas penduduk berupa kemampuan masyarakat untuk bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih mudah dan efisien.
- b. Pengurangan biaya logistik dengan pengiriman barang yang efisien dan distribusi cepat dengan dukungan integrasi antar moda transportasi.
- c. Peningkatan ekonomi wilayah dan kualitas hidup Masyarakat dengan kemudahan mengakses lebih banyak pilihan dan layanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan hiburan.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa perbandingan kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah bidang perkeretaapian dengan Rasio Konektivitas level Kementerian Perhubungan/Nasional. Nilai Rasio Konektivitas Nasional dihitung berdasarkan bobot rasio konektivitas yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 meliputi transportasi perkotaan bobot 5% dan transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi perkeretaapian dengan

masing-masing bobot 23,75%. Perbandingan nilai rasio Tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2-4 Nilai Rasio Konektivitas Antar Wilayah

No	Level / Moda	Rasio Konektivitas
1	Nasional (Seluruh Moda)	0,772
2	Perkeretaapian	0,460

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh bahwa rasio konektivitas transportasi perkeretaapian masih lebih rendah apabila dibandingkan pada level nasional sehingga perlu peningkatan dengan prioritas pengembangan jaringan dan layanan kereta api di wilayah Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Terkait perbandingan titik yang terkoneksi, transportasi perkeretaapian memberikan dukungan konektivitas wilayah sebanyak 68 titik dari jumlah 1.039 titik (6,54%) yang terhubung secara nasional (134 titik Kawasan Strategis Nasional, Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan dan Pusat Kegiatan Nasional, 603 Pelabuhan serta 302 Bandar Udara).

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja terhadap pencapaian rasio konektivitas antar wilayah pada periode berikutnya dengan pelaksanaan penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran sebagai berikut :

- Lanjutan koordinasi (asistensi DED) BTP Medan dengan Direktorat Prasarana terkait dengan Pengoperasian KA Nurmala lintas Rantau Prapat Baru-Pondok S5.
- Akan dilakukan DPPT Ulang dan Pengusulan kembali Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Antara Rantau Prapat - Kota Pinang.
- Exercise* terhadap target Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian periode Rencana Strategis menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- Lanjutan pembangunan kegiatan pendukung Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian.
- Pengusulan kegiatan studi Reviu Rencana Induk Perkeretaapian Nasional pada tahun anggaran 2026.

- f. Monitoring penyelesaian readiness criteria kegiatan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban oleh PT. KAI untuk memenuhi peraturan yang berlaku.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

a. *Penyesuaian Strategi/Kebijakan:*

Penyesuaian rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 terkait kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian mengacu perkembangan kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan serta efisiensi anggaran.

b. *Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:*

- 1) Pengusulan buka blokir/Pelepasan Efisiensi pada beberapa kegiatan mendukung indikator kinerja kegiatan rasio keterhubungan jalur KA.
- 2) Mendorong pendanaan kegiatan pendukung konektivitas infrastruktur melalui alternatif pendanaan/KPBU/pemanfaatan aset/konsesi/lainnya.
- 3) Melakukan revisi perjanjian kinerja tahun 2025 untuk seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebagai tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2.2.2 KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA YANG HANDAL

TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA

Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian merupakan salah satu ukuran untuk mengkaji kinerja perkeretaapian di Indonesia dengan menganalisis keselamatan perkeretaapian mengacu pada jumlah kecelakaan kereta api dalam 1.000 keberangkatan KA baik penumpang maupun barang pada periode tersebut. Kategori kecelakaan kereta api mencakup anjlokkan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan terbakar. Secara lebih detail, terdapat

pengecualian kategori kecelakaan kereta api khususnya yang disebabkan oleh pelanggaran pada perpotongan/perlintasan sebidang tidak dihitung sebagai kecelakaan kereta api dengan mengacu:

1. PP 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Pasal 110 Ayat (3) yaitu “Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menyebabkan kecelakaan, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan perkeretaapian”, dimana:
 - a. Ayat (1) yaitu Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang selanjutnya disebut dengan perpotongan sebidang yang digunakan untuk lalu lintas umum atau lalu lintas khusus, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
 - b. Ayat (2) yaitu Pemakai jalan wajib mematuhi semua rambu-rambu jalan di perpotongan sebidang.
2. PM Nomor 69 Tahun 2018 dimana Kecelakaan KA adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tidak terjadi kecelakaan kereta api sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2- 5 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Jenis Kejadian Tahun 2025

No	Jenis Kecelakaan	Jumlah Kejadian
1	Tabrakan KA dengan KA	-
2	Anjlokkan	1
3	Terguling	-
4	Lain-lain (Terbakar)	-
Jumlah		0

Tabel 2- 6 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Wilayah Balai Tahun 2025

Wilayah Balai	DAOP/ DIVRE	Bulan			Jumlah
		Jan	Feb	Mar	
BTP Jakarta	Jakarta	-	-	-	-
BTP Bandung	Bandung	-	-	-	-
	Cirebon	-	-	-	-
BTP Semarang	Semarang	-	-	-	-
	Purwokerto	-	-	-	-
	Yogyakarta	-	-	-	-
BTP Surabaya	Madiun	-	-	-	-
	Surabaya	-	-	-	-
	Jember	-	-	-	-

Wilayah Balai	DAOP/ DIVRE	Bulan			Jumlah
		Jan	Feb	Mar	
Pulau Jawa		-	-	-	-
BTP Medan	Aceh dan Sumatera Utara	-	-	-	-
BTP Padang	Sumatera Barat	-	-	-	-
BTP Palembang	Sumatera Selatan	-	-	1	1
	Lampung	-	-	-	-
Pulau Sumatera		-	-	1	1
Jumlah (Jawa + Sumatera)		-	-	1	1

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

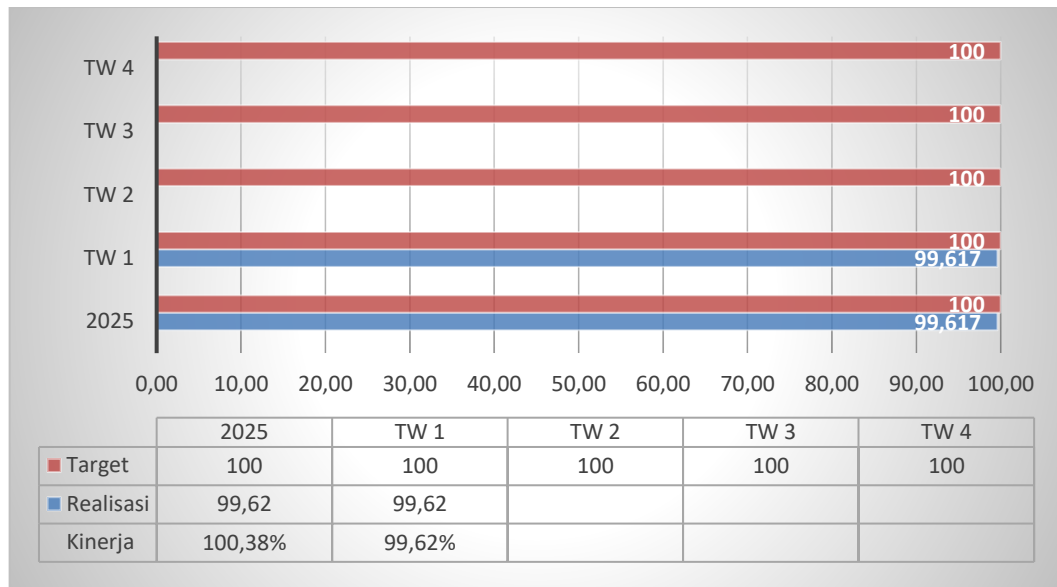
Dengan kejadian 0 kecelakaan kereta api dan jumlah keberangkatan sebanyak 261.332 KA, maka diperoleh Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA periode Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100% dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian} = \left[1 - \frac{1}{261.332} \times 1.000 \right] \times 100\%$$

Berdasarkan realisasi tersebut, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada periode Triwulan I dan Tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2- 7 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100	100	100	100	100	99,617	-	-	-	99,617	-	-	-	99,617



Gambar 2-2 Capaian Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pada Triwulan I 2025 terjadi satu kejadian anjlokkan kereta api barang pada emplasemen Stasiun Ujan Mas. Beberapa upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan keselamatan perkeretaapian pada Triwulan I Tahun 2025 diantaranya:

- Pelaksanaan inspeksi keselamatan guna mendukung keselamatan operasional kereta api dalam rangka angkutan Lebaran tahun 2025 di beberapa wilayah Balai Teknik Perkeretaapian antara lain Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya pada tanggal 19 s.d 21 Maret 2025;
- Pelaksanaan rapat koordinasi teknis persiapan angkutan lebaran dengan operator (PT. KAI, PT. KCI, PT. MRT, LRT dan PT. KCIC) terkait persiapan operasional (kesiapan sarana, prasarana dan SDM);
- Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan dan kesiapoperasian (*rampcheck*) sarana perkeretaapian guna mendukung angkutan lebaran 2025 yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari s.d 14 Maret 2025;
- Penempatan kereta penolong, *crane* dan gerbong datar di beberapa wilayah Balai Teknik sehingga dapat segera dilaksanakan penanganan kecelakaan dan evakuasi agar jalur dapat segera dilalui dalam rangka mendukung operasional Angkutan Lebaran;

Selain itu, juga terdapat beberapa kendala/permasalahan yang perlu penyelesaian diantaranya:

- a. Pelaksanaan IMO Tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Balai Teknik Perkeretaapian belum dapat dilaksanakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 karena dalam tahap usulan revisi relaksasi blokir anggaran;
- b. Masih terdapat fasilitas operasi yang digunakan dengan kondisi telah melewati umur teknis;
- c. Prosedur dalam pengoperasian sistem persinyalan mekanik dan elektrik tidak dilaksanakan dengan baik termasuk kurangnya pengawasan dan perawatan sistem persinyalan dan telekomunikasi;
- d. Keterbatasan anggaran untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan bencana alam/longsoran/amblesan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan dengan bekerjasama dengan lembaga bidang pendidikan/akademisi/ perguruan tinggi, pelaksanaan inspeksi keselamatan, audit SMKP dan himbauan keselamatan dengan hubungan kerja Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Sarana/operator perkeretaapian, pelaksanaan posko terpadu angkutan lebaran di kantor pusat dan daerah dengan mencakup kerjasama instansi multisektor (Kepolisian, BMKG, Badan SAR, Pemerintah Daerah, PUPR, dan lainnya).

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Jumlah kejadian kecelakaan dilakukan perbandingan dengan beberapa negara lain mengacu pada publikasi Pemerintah Amerika Serikat dan Belgia dengan kejadian kecelakaan kereta api yang dihitung berupa *derailment* (anjlok) dan *collision* (tabrakan). Dikarenakan keterbatasan data *benchmarking*, perbandingan kinerja dilakukan antara data periode Tahun 2024 dengan data Triwulan I Tahun 2025 di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa kejadian kecelakaan kereta api di Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat dan sama dengan Belgia, begitu juga jika

mempertimbangkan panjang jalur kereta api, maka kinerja Indonesia masih lebih baik.

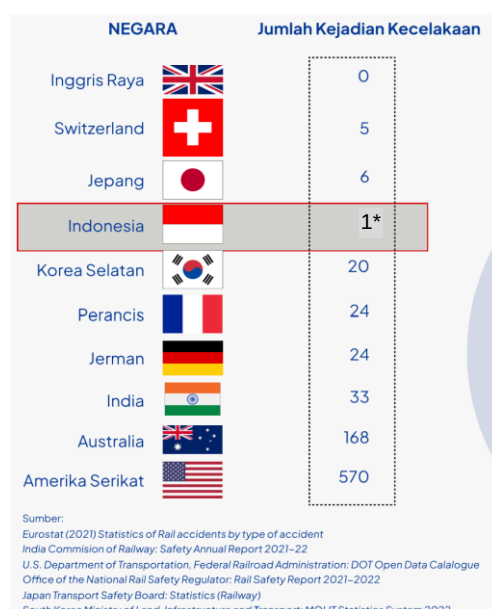
Tabel 2-8 Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Kejadian Kecelakaan	Jumlah Kecelakaan/ Panjang Jalur KA
1	Amerika Serikat	148.574	1.098	0,0074
2	Belgia	8.298	1	0,0001
3	Indonesia	6.945	1	0,0001

Sumber No.1 : Website U.S. Department of Transportation

Sumber No.2 : Portal Open Data Infrabel

Mengacu beberapa sumber lain, juga diperoleh perbandingan jumlah kejadian kecelakaan KA dengan beberapa negara sebagaimana Gambar berikut.



Keterangan: *) kinerja periode Triwulan I 2025 dibandingkan kinerja 2024

Gambar 2-3 Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan KA dengan Beberapa Negara

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja terhadap indikator Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian pada periode berikutnya diantaranya:

- Lanjutan peningkatan sistem persinyalan untuk wilayah Jabodetabek, lintas Cirebon-Kroya segmen Prupuk-Purwokerto, lintas Cirebon-Semarang segmen Tegal-Pekalongan dan Segmen Kertosono - Talun Lintas Kertosono – Ketapang.
- Lanjutan peningkatan jalur KA segmen Jember-Kalisat lintas Surabaya-Banyuwangi.

- c. Lanjutan penyelesaian audit SMKP terhadap badan usaha perkeretaapian.
- d. Percepatan pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api (IMO).

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas, anggaran, serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

- 1) Diperlukan kajian awal untuk strategis penerapan pengawasan kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian berbasis teknologi informasi didukung dengan uji coba pada segmen tertentu.
- 2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Perawatan dan Pemeriksaan Jalur KA.

b. Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:

Usulan revisi relaksasi blokir efisiensi untuk kegiatan IMO dan usulan perpanjangan MYC untuk kegiatan peningkatan jalur KA

c. Penyesuaian penempatan jabatan/pegawai:

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian termasuk inspeksi dan monitoring keselamatan bersama dengan Inspektur Prasarana dan Sarana Perkeretaapian serta penempatan/penugasan inspektur ke unit kerja terkait guna mendukung.

Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA diharapkan dapat seminimal mungkin untuk menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

- a. Peningkatan keselamatan perjalanan angkutan penumpang, dimana penumpang dapat merasa lebih aman dan nyaman selama perjalanan dengan meminalkan risiko kecelakaan.
- b. Peningkatan kepercayaan publik, dimana masyarakat akan lebih cenderung memilih kereta api sebagai moda transportasi yang handal dan selamat.
- c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pelayanan angkutan kereta api, dimana diketahui kejadian kecelakaan akan mengakibatkan jalur kereta

api tidak dapat dilalui sehingga mengganggu operasional kereta api dan mengakibatkan keterlambatan perjalanan kereta api. Selain itu, juga berbanding lurus dengan minimnya anggaran yang diperlukan guna perbaikan prasarana dan sarana kereta api sehingga terjadi penghematan biaya pemeliharaan dan perbaikan operasional kereta api.

2.2.3 MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Sasaran program kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan diukur dengan 3 Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian, Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) dan Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintahan sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh unit kerja/Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Ringan (BPKAR) Sumatera Selatan, Balai Pengujian Perkeretaapian dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan. Adapun nilai IKM dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

Tabel 2-9 Kategori Kinerja Nilai IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,000 – 2,599	D	Tidak Baik
2	2,600 – 3,064	C	Kurang Baik
3	3,065 – 3,532	B	Baik
4	3,533 – 4,000	A	Sangat Baik

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan target kinerja nilai IKM Tahun 2025 dan periode Triwulan I sebesar 3,740. Adapun hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada Triwulan I 2025 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2-10 Hasil Survey Nilai IKM Bulan Januari s.d Maret Tahun 2025

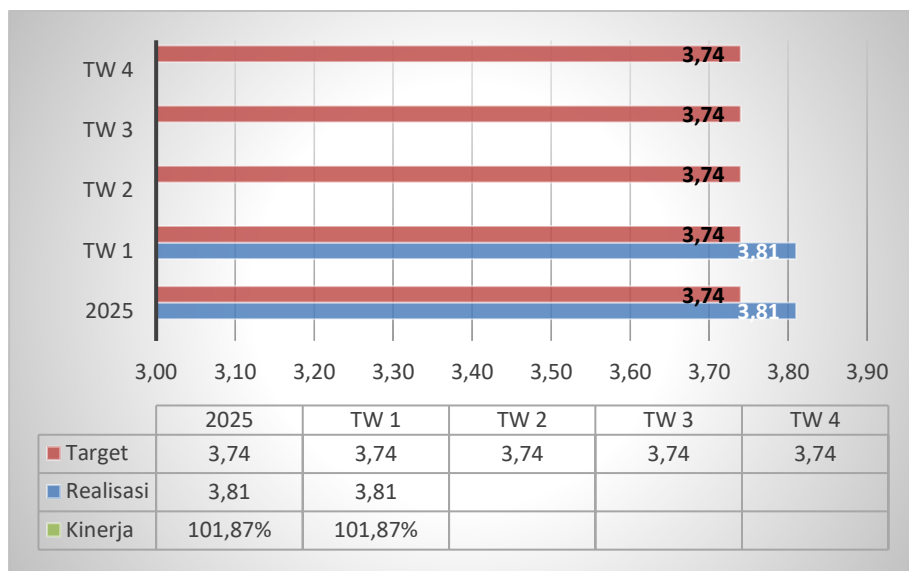
Unit Kerja	Jan	Feb	Mar
Dit LLAKA	3,73	3,94	3,81
Dit Prasarana	3,75	4,00	3,91
Dit Sarana	4,00	4,00	3,34
Dit Keselamatan	3,64	4,00	3,70
BPKAR Sumatera Selatan	3,58	3,58	3,57
BPKAR Sumatera Selatan PPTB	3,97	3,94	4,00
Balai Pengujian	3,88	3,88	3,80
BPKA Sulawesi Selatan	3,37	3,28	3,38
Rata-rata per bulan	3,79	3,91	3,73
Rata-rata Triwulan I	3,810		

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian pada Triwulan I 2025, diperoleh nilai IKM sebesar 3,810. Nilai tersebut dibandingkan dengan target nilai IKM berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 3,740, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 101,872%. Realisasi kumulatif per triwulan sebagaimana dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-11 Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,810	-	-	-	101,872	-	-	-	101,872



Gambar 2-4 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Nilai IKM Ditjen Perkeretaapian merupakan nilai rata-rata IKM perbulan selama periode Triwulan I 2025 dimana diperoleh nilai 3,810 atau dapat diinterpretasikan bahwa kinerja unit pelayanan menjadi sangat baik.

Pelayanan publik bidang perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintahan sebagai regulator (perijinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh unit kerja/BLU di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pada Triwulan I 2025, pelaksanaan survey IKM dilaksanakan secara parsial menggunakan aplikasi 3A IPK yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dan menggunakan *google form* (BPKAR Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan).

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja didukung beberapa faktor diantaranya:

- a. Pada 2025 direncanakan pengembangan modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian dengan lingkup pengembangan dan hingga Triwulan I 2025 masih dalam tahap persiapan seleksi (*menunggu clearance*).
- b. Pengesahan terhadap pembaharuan/penyusunan SOP Ditjen Perkeretaapian sebagai dasar pelayanan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan Ditjen Perkeretaapian.
- c. Beberapa kesulitan yang dihadapi pada saat pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat diantaranya adalah beberapa responden mengalami kesulitan dalam mengakses *link* survei dikarenakan alat komunikasi responden yang kurang mendukung.
- d. Telah dilakukan sinkronisasi *Single Sign On* (SSO) untuk Aplikasi Perizinan Perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dan aplikasi Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian.
- e. Pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi diantaranya terkait layanan pengujian perkeretaapian, sertifikasi sarana perkeretaapian serta sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian, sehingga terjamin ketepatan waktu penyelesaian layanan dan menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan.
- f. Pelaksanaan sosialisasi layanan dan pelaksanaan survei IKM kepada *stakeholder*, termasuk upaya penambahan jumlah responden dengan perluasan pelaksanaan survei melalui *google form* untuk mempermudah pengisian responden.
- g. Kehandalan SDM dalam memberikan layanan serta pemenuhan kualitas dan tahapan pelayanan sesuai proses bisnis/SOP yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain hubungan kerja dengan badan usaha/operator perkeretaapian/pemerintah daerah dalam pelaksanaan layanan bidang perkeretaapian termasuk survei IKM yang melibatkan masyarakat pengguna KA dan sektor terkait lainnya seperti sektor industri perkeretaapian.

Pencapaian target kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian diharapkan menghasilkan *outcome*

berupa peningkatan kepercayaan publik yang menggambarkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap layanan penyelenggaraan perkeretaapian.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Terkait analisa perbandingan dilakukan terhadap capaian kinerja IKM dibandingkan dengan level Kementerian Perhubungan/Nasional selama Triwulan I 2025 dengan uraian sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2-12 Perbandingan Nilai IKM

No	Unit Kerja	Nilai IKM
1	Kementerian Perhubungan	3,830
2	Ditjen Perkeretaapian	3,810

Catatan: Nilai IKM dihitung kumulatif pada Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih sedikit lebih rendah dari Nilai IKM Kementerian Perhubungan sehingga perlu peningkatan kinerja untuk memenuhi capaian di level Kementerian Perhubungan.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang meliputi beberapa langkah, antara lain:

- Lanjutan pengembangan modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian.
- Pengusulan kegiatan pengembangan modul layanan sertifikasi penyelenggaraan perkeretaapian pada tahun anggaran 2026.
- Direncanakan penambahan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan yang dilaksanakan oleh Balai Perawatan. Untuk saat ini masih dalam proses kajian dan direncanakan sudah dapat diimplementasikan pada Triwulan III 2025.
- Menjaga kualitas pelayanan dan proses bisnis sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan.
- Melakukan pendampingan kepada responden pada saat pengisian kuesioner survei kepuasan masyarakat.
- Menyusun laporan setiap triwulan yang dilaporkan kepada PPTB untuk mempermudah koordinasi pengelolaan survei kepuasan masyarakat.

- g. Akan dilakukan *Launching* Modul Layanan Perizinan Perpotongan dan/atau persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain serta Modul Layanan Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian.
- h. Penyelesaian permohonan perizinan dan sertifikasi yang telah disampaikan kepada Ditjen Perkeretaapian.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

a. *Penyesuaian strategi/kebijakan:*

Diusulkan *benchmarking* pelaksanaan layanan penyelenggaraan transportasi termasuk pelaksanaan survei IKM pada unit kerja yang berkinerja lebih baik di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk masukan strategi/kebijakan, termasuk koordinasi dengan pembina survei IKM (Kementerian PANRB) guna pembinaan/sosialisasi terkait IKM.

b. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

Antisipasi kegiatan pendukung yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan optimalisasi anggaran dan/atau pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

c. *Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai:*

Diusulkan pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM dalam pemberian layanan kepada masyarakat guna mendukung peningkatan nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

PERSENTASE CAPAIAN ON TIME PERFORMANCE (OTP)

Target persentase *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 96,100% baik untuk angkutan kereta api penumpang dan barang serta juga mencakup keberangkatan dan kedatangan dalam perjalanan kereta api.

Pada periode Triwulan I 2025 diperoleh jumlah realisasi kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) tepat waktu sebanyak 254.576 KA dibandingkan dengan total kedatangan dan keberangkatan kereta api (penumpang dan barang) sebanyak 261.332 KA, maka diperoleh realisasi

persentase capaian *On Time Performance* (OTP) Triwulan I Tahun 2025 sebesar 97,415%.

Tabel 2-13 Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu Tahun 2025

Bulan	Realisasi Perjalanan		Realisasi KA Datang Tepat Waktu		Realisasi KA Berangkat Tepat Waktu		Rata-Rata		Persentase Capaian	
	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif
Jan	88.509	88.509	85.101	85.101	87.587	87.587	86.344	86.344	97,554%	97,554%
Feb	82.109	170.618	78.276	163.377	81.000	168.587	79.638	165.982	96,991%	97,283%
Mar	90.714	261.332	87.408	250.785	89.779	258.366	88.594	254.576	97,662%	97,415%

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

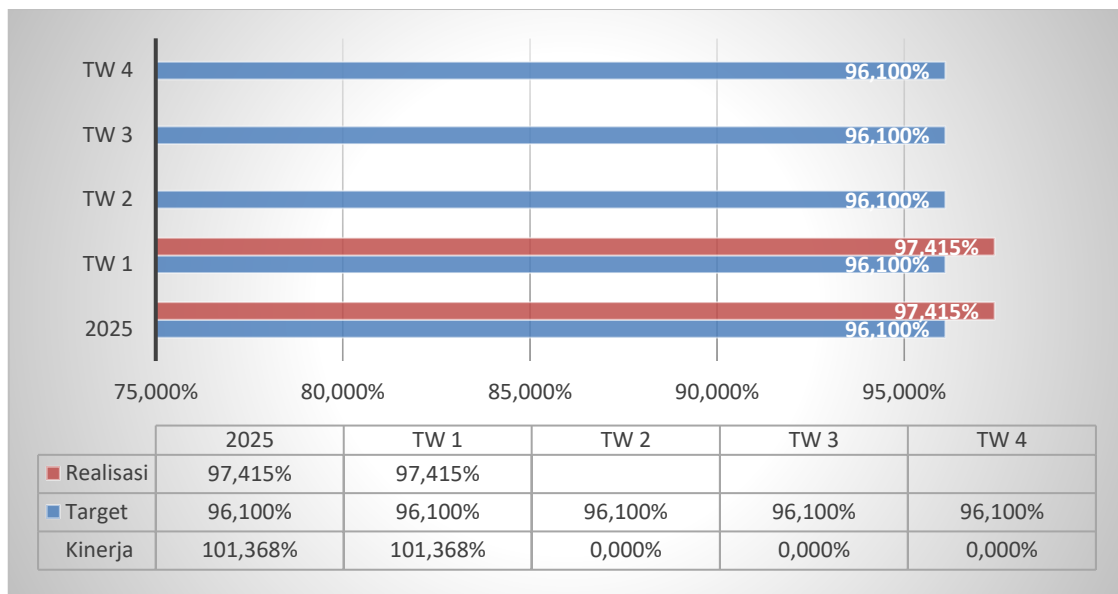
Realisasi *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 97,415%, dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian} = \frac{254.576 \text{ KA}}{261.332 \text{ KA}} \times 100\%$$

Dengan realisasi OTP tersebut, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 101,368% dibandingkan dengan target Triwulan I dan target Tahun 2025 sebesar 96,100%. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-14 Capaian Kinerja Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	97,415	-	-	-	101,368	-	-	-	101,368



Gambar 2-5 Capaian Kinerja Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Beberapa faktor tercapainya target kinerja pada periode Triwulan I Tahun 2025 diantaranya:

- Terpenuhinya target didukung oleh tingginya perolehan *on time performance* Triwulan I 2025 pada beberapa jenis pelayanan kereta api (khususnya angkutan KA perkotaan) seperti LRT Jabodebek (99,28%), LRT Sumatera Selatan (99,57%), MRT Jakarta (99,98%) dan LRT Jakarta (99,99%).
- Telah dilakukan perubahan GAPEKA pada jaringan jalur kereta api nasional di Jawa, Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Barat, Sumatera Bagian Selatan, dan Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan perjalanan kereta api, terhitung berlaku sejak 1 Februari 2025.
- Koordinasi secara aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian terhadap penanganan kejadian penyebab kelambatan perjalanan kereta api serta mengantisipasi potensi adanya rintang jalan yang dapat mengakibatkan kelambatan perjalanan kereta api. Sebagai contoh, pada masa angkutan lebaran 2025 telah dilaksanakan koordinasi teknis dengan *stakeholders* (PT. KAI, PT. MRT, PT. KCI, PT. KCIC) terkait persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran

- yang mencakup rencana operasi, kesiapan sarana, prasarana dan SDM termasuk identifikasi daerah rawan dan upaya preventif dan mitigasinya.
- d. Secara rutin melaksanakan evaluasi (triwulan) terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai dengan GAPEKA yang berlaku sehingga perjalanan KA sesuai jadwal dan keterlambatan KA dapat diminimalisir terutama andil keterlambatan dari operasional/ persilangan/ penambahan/ pelepasan sarana/lainnya.

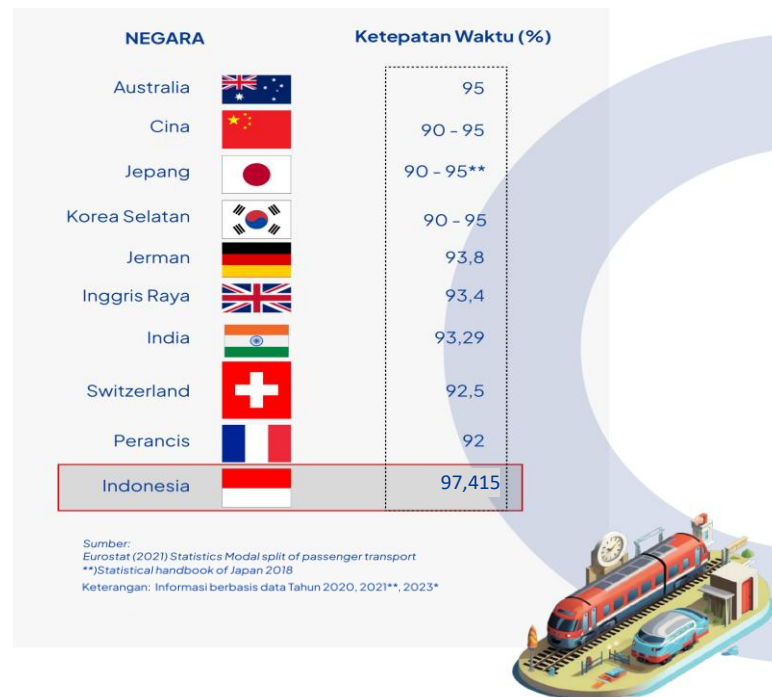
Selain itu juga terdapat kendala/permasalahan mengacu data andil keterlambatan perjalanan kereta api periode Triwulan I Tahun 2025 antara lain faktor operasi perjalanan KA seperti taktis pengendalian perjalanan KA, penambahan/pelepasan sarana di stasiun antara, penentuan pemindahan persilangan dan lain-lain. Selain itu, faktor cuaca/alam juga berpengaruh dengan adanya gangguan operasional berupa bencana banjir di beberapa lokasi yang dilalui layanan KA.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain koordinasi teknis dengan *stakeholders* (PT. KAI, PT. MRT, PT. KCI, PT. KCIC) terkait persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran yang mencakup rencana operasi, kesiapan sarana, prasarana dan SDM termasuk identifikasi daerah rawan dan upaya preventif dan mitigasinya. Selain itu, koordinasi pengamanan posko angkutan lebaran Tahun 2025 melalui pelaksanaan posko terpadu di kantor pusat dan daerah dengan mencakup kerjasama instansi multisektor (Kepolisian, BMKG, Badan SAR, Pemerintah Daerah, PUPR, dan lainnya), serta penetapan dan pengelolaan GAPEKA dengan hubungan kerja badan usaha/operator perkeretaapian.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perbandingan capaian kinerja *On Time Performance* (OTP) dilakukan dengan membandingkan OTP di beberapa negara lain diantaranya mengacu pada publikasi *Eurostat (Statistics Modal Split of Passenger Transport)* dan *Statistical Handbook of Japan*. Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa kinerja OTP perjalanan kereta api di Indonesia cukup baik dan setara apabila dibandingkan dengan OTP layanan perkeretaapian di negara-negara Eropa,

Jepang, Cina, Korea Selatan, India dan Australia yang mencapai kinerja 90-95%. Data kinerja OTP di beberapa negara disampaikan sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 2-6 Perbandingan On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api dengan Beberapa Negara

Capaian OTP Indonesia sebesar 97,415% pada Triwulan I 2025 menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat kompetitif secara global. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi operasional, pemeliharaan infrastruktur, dan manajemen risiko yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, serta mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara dengan performa OTP tertinggi.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya diantaranya:

- Monitoring perjalanan kereta api agar sesuai dengan yang telah diprogramkan pada GAPEKA dan perjalanan di luar GAPEKA.
- Melakukan evaluasi berkala (triwulan) terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai dengan GAPEKA yang berlaku sehingga perjalanan KA sesuai jadwal dan keterlambatan KA dapat diminimalisir terutama andil

keterlambatan dari operasional/persilangan/penambahan/pelepasan sarana/lainnya.

- c. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian untuk melakukan aksi pencegahan/mitigasi terhadap potensi terjadinya keterlambatan perjalanan kereta api seperti melakukan pemantauan operasional kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan dimana terdapat taspat yang mempengaruhi ketepatan waktu perjalanan kereta api.
- d. Lanjutan kegiatan peningkatan jalur dan jembatan kereta api segmen Jember – Kalisat, segmen Semarang-Gambringan (penggantian 2 jembatan BH 46 dan BH 59), dan segmen Cirebon-Kroya (penggantian 2 jembatan BH 1109 dan BH 1164) untuk meningkatkan kehandalan dan kecepatan operasional kereta api termasuk menghindari gangguan perjalanan kereta api.
- e. Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA *elevated* Medan – Binjai dan Solo-Semarang) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu.
- f. Lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian untuk mendukung pengoperasian KA Makassar-Pare-Pare antara Mandai-Palanro.
- g. Lanjutan peningkatan Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Rongkasbitung guna mendukung pelayanan operasional KA;
- h. Lanjutan pembangunan dan peningkatan sistem persinyalan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek, Prupuk-Purwokerto dan Tegal-Pekalongan guna mendukung efisiensi operasional kereta api;

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran, serta penyesuaian penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

a. *Penyesuaian Strategi/Kebijakan:*

Melakukan penyesuaian tata kelola organisasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA sebagaimana diamanahkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dimana terdapat penambahan

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perkeretaapian.

b. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

Penyesuaian pelaksanaan kegiatan pendukung menyesuaikan alokasi anggaran pasca pelaksanaan efisiensi anggaran.

Adapun pencapaian target *On Time Performance* (OTP) diharapkan dapat menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

- a. Peningkatan kepercayaan publik, dimana dengan layanan dan perjalanan kereta api yang tepat waktu maka dapat meningkatkan kepercayaan penumpang terhadap perkeretaapian serta meningkatkan daya saing dengan moda transportasi lain.
- b. Mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum massal kereta api sehingga dapat menurunkan kemacetan lalu lintas dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketepatan waktu perjalanan merupakan salah satu aspek yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih moda transportasi untuk mobilitas keseharian.

PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API

Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api diukur melalui persentase antara realisasi jumlah angkutan penumpang dan barang kereta api dibandingkan dengan jumlah angkutan penumpang dan barang kereta api yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api sebesar 19,00% untuk Tahun 2025 dan sebesar 4,465% untuk periode Triwulan I Tahun 2025.

Realisasi jumlah penumpang terangkut dengan kereta api pada Triwulan I Tahun 2025 diperoleh sebanyak 127.048.469 penumpang dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah penumpang kereta api komersial (KA jarak Jauh eksekutif, bisnis, priority, ekonomi non PSO dan KA lokal eksekutif, bisnis dan ekonomi non PSO, KA Bandara SHIA) sebanyak 8.724.508 penumpang.

2. Jumlah penumpang kereta api ekonomi/PSO (non KRL Jabodetabek) sebanyak 16.451.963 penumpang.
3. Jumlah penumpang KRL Jabodetabek sebanyak 82.114.334 penumpang.
4. Jumlah penumpang kereta api perintis sebanyak 1.132.107 penumpang.
5. Jumlah penumpang MRT Jakarta sebanyak 10.282.372 penumpang.
6. Jumlah penumpang LRT Jakarta sebanyak 278.563 penumpang.
7. Jumlah penumpang kereta api *Railink* (kereta api Bandara Kualanamu, Yogyakarta Ekspres dan KA Srilawangsa) sebanyak 359.579 penumpang.
8. Jumlah penumpang LRT Jabodebek sebanyak 6.351.283 penumpang.
9. Jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebanyak 1.353.760 penumpang.

Persentase pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari perbandingan antara realisasi angkutan penumpang pada Triwulan I 2025 sebanyak 127.048.469 penumpang dengan target produksi angkutan penumpang kereta api Tahun 2025 - 2029 berdasarkan Rencana Strategis yaitu sebanyak 2.798.554.050 penumpang dan selanjutnya dilakukan pembobotan sebesar 50% sehingga diperoleh nilai sebesar 2,270%. Rincian perhitungan sebagaimana berikut :

Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	=	$\frac{\text{Jumlah angkutan penumpang s.d TW 1 2025}}{\text{Target angkutan penumpang 2025 – 2029}} \times 50\%$
---	---	---

Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	=	$\frac{127.048.469}{2.798.554.050} \times 50\% = 2,270\%$
--	---	---

Pada Triwulan I Tahun 2025, diperoleh realisasi angkutan barang kereta api sebesar **16.114.092 ton** dengan uraian realisasi per wilayah sebagai berikut:

- a. Angkutan barang kereta api di pulau Jawa sebanyak **1.847.118 ton**, dengan rincian per komoditi sebagai berikut:
 - 1) Peti kemas sebanyak 1.102.253 ton.
 - 2) BBM sebanyak 408.269 ton.

- 3) Semen sebanyak 245.560 ton.
 - 4) Batu bara (belum ada realisasi).
 - 5) Retail (ONS parcel, BHP) sebanyak 57.400 ton.
 - 6) Pupuk sebanyak 6.780 ton.
 - 7) Lainnya (Bank Indonesia, Bea KLB, angkutan dinas, angkutan Satuan Kerja, Motis, Bea langsir) sebanyak 26.856 ton.
- b. Angkutan barang kereta api di pulau Sumatera sebanyak **14.266.974** ton, dengan rincian per komoditi sebagai berikut:
- 1) Batu bara sebanyak 13.345.277 ton.
 - 2) Semen sebanyak 227.250 ton.
 - 3) Hasil perkebunan (CPO, pulp, kayu, latex) sebanyak 156.410 ton.
 - 4) BBM sebanyak 199.807 ton.
 - 5) Peti kemas sebanyak 104.368 ton.
 - 6) Karet dan klinker sebanyak 231.600 ton.
 - 7) Lainnya (Bank Indonesia, Bea KLB, angkutan dinas, angkutan Satuan Kerja, Motis, Bea langsir) sebanyak 750 ton.
 - 8) Retail (ONS Parcel, BHP) sebanyak 1.512 ton.

Persentase pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari perbandingan antara realisasi angkutan barang pada Triwulan I 2025 sebanyak 16.114.092 ton dengan target produksi angkutan barang kereta api Tahun 2025 - 2029 berdasarkan Rencana Strategis yaitu sebanyak 358.912.917 ton dan selanjutnya dilakukan pembobotan sebesar 50% sehingga diperoleh nilai sebesar 2,245%. Rincian perhitungan sebagaimana berikut :

Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	=	$\frac{\text{Jumlah angkutan barang s. d TW 1 2025}}{\text{Target angkutan barang 2025 – 2029}} \times 50\%$
---	---	--

Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	=	$\frac{16.114.092}{358.912.917} \times 50\% = 2,245\%$
--	---	--

Selanjutnya dilakukan, Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis dengan bobot masing-masing 50% dan diperoleh nilai Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api sebesar **4,515%**

Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	=	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang KA + Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang KA
---	---	---

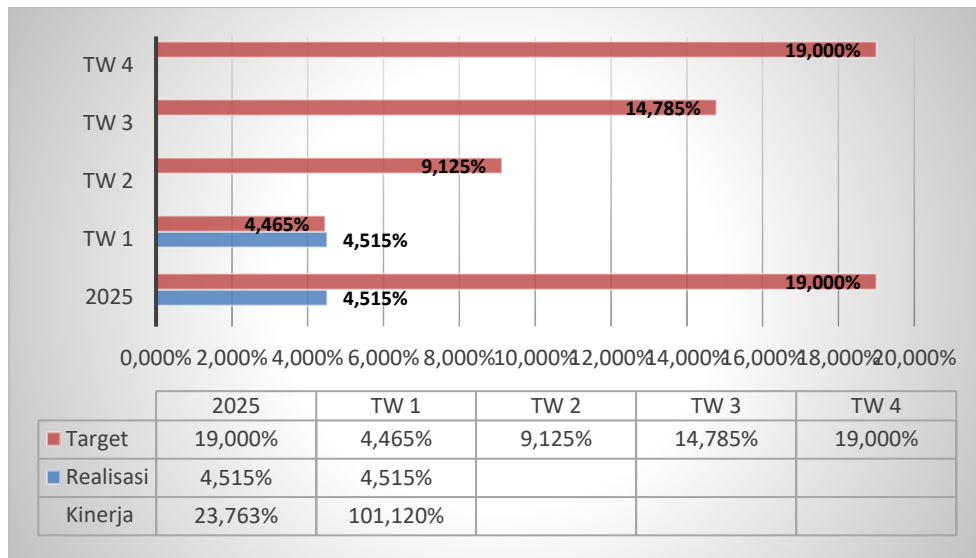
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	=	2,270% + 2,245% = 4,515%
--	---	--------------------------

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api sebesar 4,515%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 101,120% terhadap target Triwulan I sebesar 4,465% dan capaian kinerja sebesar 23,763% terhadap target Tahun 2025 sebesar 19,000%. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-15 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,000	4,465	9,125	14,785	19,000	4,515	-	-	-	101,120	-	-	-	23,763



Gambar 2-7 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api diantaranya:

Angkutan Penumpang:

- Peningkatan jumlah perjalanan kereta api dibandingkan tahun sebelumnya dari 226 perjalanan/hari menjadi 246 perjalanan/hari dengan diterapkannya GAPEKA tahun 2025 sejak 1 Februari 2025
- Penambahan 16 layanan baru kereta api sejak ditetapkan GAPEKA baru diantaranya:
 - KA Batara Kresna (rute Purwosari–Wonogiri dengan rangkaian baru jenis kereta diesel)
 - KA Jayakarta (rute Surabaya Gubeng–Pasar Senen)
 - KA Singasari (rute Blitar–Pasar Senen)
 - KA Dharmawangsa (rute Surabaya Pasarturi–Pasar Senen)
 - KA Mataram (rute Solo Balapan–Pasar Senen)
- Peningkatan layanan KA kepada masyarakat, diantaranya melalui peningkatan akses dan layanan *feeder* yang terintegrasi di stasiun KA (LRT Jabodebek, LRT Sumatera Selatan, Kereta Cepat Jakarta – Bandung), pengawasan layanan kereta api di stasiun dan perjalanan sesuai Standar Pelayanan Minimum.

- d. Realisasi Angkutan Penumpang KRL Jabodetabek Selama Triwulan I Tahun 2025 sebesar 82.114.334 penumpang dengan rata-rata penumpang *weekday* sebesar 1.017.929 penumpang;
- e. Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung Selama Triwulan I Tahun 2025 sebesar 1.353.760 penumpang dengan rata-rata penumpang sebesar 15.042 penumpang;
- f. Realisasi Angkutan penumpang LRT Jabodebek Selama Triwulan I Tahun 2025 sebesar 6.351.283 penumpang dengan rata-rata Volume Penumpang penumpang sebesar 89.876 penumpang;
- g. Penambahan Frekuensi Perjalanan LRT Jabodebek mulai Bulan Maret 2025 menjadi 366 KA untuk Weekday dan 270 KA saat Weekend;
- h. Persentase Realisasi Angkutan Penumpang terhadap Target Penumpang pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 106%.

Angkutan barang:

- a. Realisasi Angkutan Barang Triwulan I Tahun 2025 sebesar 16.114.092 Ton, bila disandingkan dengan realisasi Triwulan I Tahun 2024 terdapat peningkatan sebesar 15.830.337 Ton. Namun bila dibandingkan dengan program yang ada di 2025, belum mencapai target.
- b. Penyelenggaraan angkutan motis guna mendukung angkutan lebaran tahun 2025 dengan realisasi 7.609 motor dan 12.553 penumpang

Selain itu disampaikan pula beberapa kegiatan pendukung khususnya berupa kegiatan sosialisim tinjauan lapangan maupun peningkatan stasiun kereta api dengan tujuan mendukung peningkatan layanan angkutan penumpang, diantaranya:

- a. Telah dilakukan sosialisasi pada media sosial untuk meningkatkan pengguna transportasi kereta api;
- b. Telah dilakukan tinjauan lapangan dalam rangka integrasi Stasiun Karet dan Stasiun Sudirman Baru (BNI City) pada tanggal 9 Februari 2025;
- c. Telah dilakukan Rapat Pembahasan Rencana Perpanjangan Pengoperasian *Commuter Line* Prambanan *Ekspress* (Prameks) ke Stasiun Kebumen pada tanggal 12 Februari 2025;

- d. Telah dilakukan *Joint Survey* Stasiun Tanah Abang Bersama Tim Inklusi Disabilitas Kementerian Perhubungan pada tanggal 12 Maret 2025.
- e. Peningkatan Stasiun Rangkasbitung dengan progres 81,89%.
- f. Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I dengan progres 98,33%.
- g. Kegiatan beautifikasi Stasiun Klaten dengan progres 100%.
- h. Pemanfaatan market bersama untuk meningkatkan angkutan barang ekspor Gedebage menuju Tanjung Priok termasuk perlunya *intervensi* biaya dari masing-masing stakeholder agar tarif angkutan barang kereta api lebih kompetitif.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain penambahan frekuensi layanan kereta api dengan memperhatikan usulan dari badan usaha/operator perkeretaapian dan masukan/*demand* masyarakat, penyelenggaraan angkutan Lebaran dengan kerjasama instansi multisektor (Kepolisian, BMKG, Badan SAR, Pemerintah Daerah, PUPR, dan lainnya), serta pelaksanaan pengawasan standar pelayanan minimum terkait hubungan kerja dengan badan usaha/operator perkeretaapian dan masyarakat/pengguna kereta api.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa kinerja angkutan penumpang dan barang di Indonesia dilakukan perbandingan dengan Malaysia, Singapura dan Britania Raya sesuai referensi pada tahun 2024-2025. Perbandingan jumlah angkutan penumpang dan barang diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2-16 Jumlah Angkutan Penumpang Kereta Api

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Rata-Rata Jumlah Penumpang per Bulan (orang)	Rata-Rata Jumlah Penumpang/ Panjang Jalur KA per Bulan
1	Britania Raya	31.203	148.666.667	4.756
2	Malaysia	1.799	8.622.901	4.792
3	Singapura	259	15.789.000	61.079
4	Indonesia	6.927	42.349.490*	6.114

Sumber No.1 : Office of Rail and Road Publication (diolah, rata-rata per bulan)

Sumber No.2 : Portal Prasarana Malaysia Berhad (diolah, rata-rata per bulan)

Sumber No.3 : Website Departement of Statistics Singapore (diolah, rata-rata per bulan)

*) Rata-rata jumlah penumpang per bulan pada Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa jumlah angkutan penumpang kereta api rata-rata per bulan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Britania Raya namun lebih tinggi dari Singapura dan Malaysia. Apabila jumlah angkutan penumpang dibandingkan dengan panjang jalur kereta api masing-masing negara, terlihat bahwa kinerja angkutan kereta api penumpang di Indonesia masih lebih tinggi dari dari Britania Raya dan Malaysia namun jauh lebih rendah dari Singapura. Hal tersebut menunjukkan tingkat utilitas/penggunaan jalur kereta api di Indonesia masih rendah berbeda dengan Singapura yang sangat optimal mengangkut jumlah penumpang.

Analisa kinerja angkutan barang dibandingkan dengan kinerja negara lain yaitu Britania Raya mengacu pada jurnal publikasi *Office of Rail and Road*. Perbandingan jumlah angkutan barang menggunakan kereta api diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2-17 Jumlah Angkutan Barang Kereta Api

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Jumlah Angkutan Barang per Bulan(Ton)	Rata-Rata Jumlah Angkutan Barang Per Bulan/ Panjang Jalur KA per Bulan
1	Britania Raya	31.258	18.000.000	48
2	Indonesia	6.927	5.371.364	65

Sumber No. 1 : *Office of Rail and Road Publication (diolah, rata-rata per bulan)*

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa rata-rata produksi angkutan barang kereta api di Indonesia per bulan lebih rendah apabila dibandingkan dengan Britania Raya. Namun apabila dibandingkan dengan panjang jalur KA yang beroperasi, kinerja angkutan kereta api barang di Indonesia lebih baik dibandingkan Britania Raya dengan rata-rata mencapai 65 Ton/Km per bulan.

Hal tersebut menunjukkan tingkat utilitas/penggunaan jalur kereta api di Indonesia untuk angkutan barang cukup optimal dan juga didukung kekayaan sumber daya alam (terutama angkutan batubara di Sumatera Bagian Selatan) yang sudah secara masif menggunakan kereta api untuk transportasi baik logistik/batubara keperluan dalam negeri maupun keperluan ekspor.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya:

- a. Pelaksanaan angkutan perintis lintas Purwosari-Wonogiri, Muara Satu - Kuta Blang, Lubuk Alung-Kayu Tanam, LRT Sumatera Selatan dan Makassar-Pare-Pare.
- b. Rencana penambahan sarana KRL baru pada tahun 2025 antara lain :
 - 11 *trainset* impor dari China
 - 12 *trainset* baru produksi PT INKA
 - 2 *trainset* hasil retrofit oleh PT INKA
- c. Lanjutan kegiatan peningkatan stasiun kereta api termasuk program beautifikasi dalam upaya peningkatan layanan angkutan penumpang (Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Rangkasbitung).
- d. Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran diantaranya:
 - a. **Penyesuaian strategi/kebijakan:**
Pemberlakuan GAPEKA baru pada 1 Februari 2025
 - b. **Penyesuaian aktivitas dan anggaran:**
Revisi relaksasi blokir efisiensi untuk kegiatan angkutan perintis di beberapa wilayah antara lain : lintas Purwosari-Wonogiri, Muara Satu-KutaBlang, Lubuk Alung-Kayu Tanam, LRT Sumatera Selatan dan Makassar-Pare-Pare.
 - c. **Penyesuaian/Penataan/Refocusing Organisasi:**
Perubahan organisasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA yang dengan adanya penambahan Subdirektorat Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perkeretaapian melalui Permenhub Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Adapun pencapaian Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api diharapkan menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

- a. Reduksi kemacetan jalan raya dan pengurangan emisi gas rumah kaca dengan meningkatnya penggunaan kereta api yang mengindikasikan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan kendaraan pribadi sehingga dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas yang berbanding lurus dengan penurunan emisi gas rumah kaca.
- b. Peningkatan investasi infrastruktur, dimana dengan tingginya permintaan transportasi kereta api dapat mendorong investasi dalam infrastruktur kereta api, termasuk pengembangan dan peningkatan jalur, stasiun, dan fasilitas terkait lainnya.

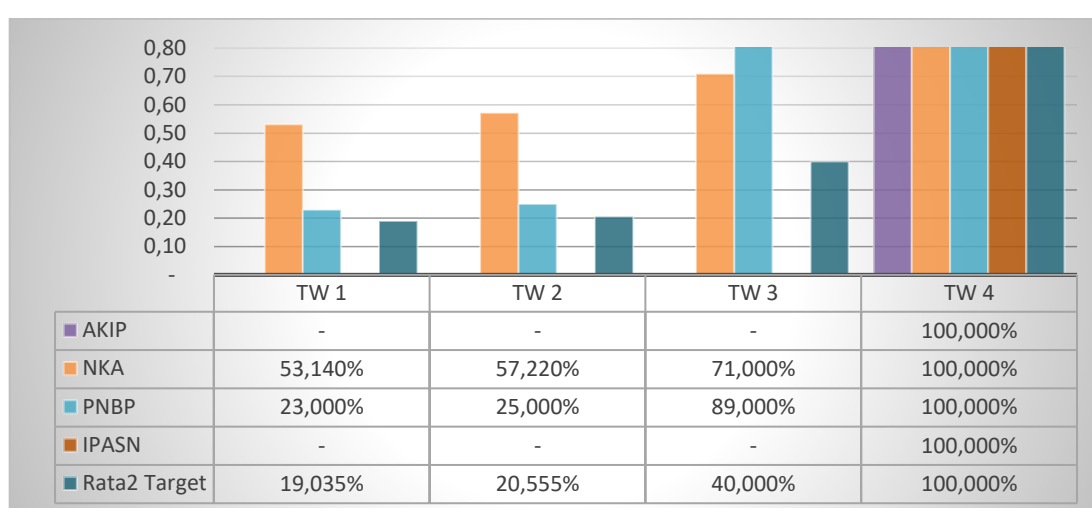
2.2.4 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Persentase ini bisa digunakan untuk mengevaluasi akuntabilitas, efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari rata-rata dari persentase tingkat pencapaian kinerja yang mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBPN Bidang Perkeretaapian dan Indeks Profesional ASN. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditargetkan sebesar 100,000% pada Tahun 2025 dan sebesar 19,035% pada Triwulan I 2025. Adapun uraian target sebagaimana Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-18 Uraian Target Triwulanan IKP Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian Tahun 2025

No	Komponen Penilaian	Target							
		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Nilai AKIP	-	-	-	-	-	-	83,000	100
2	Nilai Kinerja Anggaran	43,043	53,140	46,348	57,220	57,510	71,000	81,000	100
3	Perolehan PNBP	286,655M	23,000	311,582M	25,000	1.109,230M	89,000	1.246,326M	100
4	Indeks Profesional ASN	-	-	-	-	-	-	89,000	100
Rata-Rata Target		19,035%		20,555%		40,000%		100,000%	



Gambar 2-8 Uraian Target Triwulanan IKP Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian Tahun 2025

Tingkat Pencapaian Nilai AKIP

Evaluasi AKIP dilakukan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Variabel-variabel dalam LKE tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. **Komponen** terdiri dari Perencanaan Kinerja (bobot 30), Pengukuran Kinerja (bobot 30), Pelaporan Kinerja (bobot 15), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25).
2. **Sub-komponen** dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.

3. **Kriteria** merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Target Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 83,000 dan pada Triwulan I 2025 belum ditetapkan target kinerja (target ditetapkan pada Triwulan IV) dikarenakan evaluasi/penilaian akan mulai dilaksanakan secara berjenjang pada Triwulan II dimulai dari penilaian mandiri oleh Tim Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian kemudian dilaksanakan *assessment* oleh Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, pada Triwulan I 2025 belum dilakukan pengukuran Tingkat Pencapaian Nilai AKIP (**Tingkat Pencapaian = 0,00%**)

Tingkat Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori:

1. Lebih dari 90: Kategori Sangat Baik;
2. 80 - 90: Kategori Baik;
3. 60 - 80: Kategori Cukup;
4. 50 - 60: Kategori Kurang;
5. Kurang dari 50: Kategori Sangat Kurang.

Target Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 81,000 dan pada Triwulan I 2025 ditargetkan sebesar 43,043 (atau sebesar 53,140% dari target Tahun 2025). Adapun realisasi Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan I 2025 yang diperoleh melalui aplikasi Monev Kemenkeu sebesar 45,760 dengan rincian:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: 2,62;
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran: 88,89.

Dengan realisasi sebesar 45,760, maka diperoleh tingkat pencapaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I 2025 sebesar 56,494% dari target Tahun 2025 sebesar 81,000 (**Tingkat Pencapaian = 56,494%**)

Tingkat Pencapaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Tingkat pencapaian PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar realisasi penerimaan PNBP dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Target Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar Rp1.246.326.325.000,00 dan pada Triwulan I 2025 ditargetkan sebesar Rp286.655.054.750,00 atau sebesar 23,000%. Berdasarkan data pada aplikasi SPAN dan SIMPONI Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan I 2025 sebesar Rp689.200.131.258,00.

Adapun rincian realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatannya sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2- 19 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)	1.028.700.863.000	535.635.646.249	52,07
	a. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.528.160.000	296.354.000	19,39
	b. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	2.789.250.000	1.023.175.000	36,68
	c. Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/ <i>Track Access Charge</i>	1.023.132.453.000	532.890.117.249	52,08
	d. Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.251.000.000	1.426.000.000	113,99
2	Pendapatan BLU	89.826.325.000	16.165.000.171	18,00
	a. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	79.097.734.000	15.753.750.000	19,92
	b. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	9.546.423.000	63.747.000	0,67
	c. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	281.353.171	-
	d. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruang	1.182.168.000	66.150.000	5,60
3	Pendapatan Non Fungsional	127.799.137.000	137.399.484.838	107,51
	a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000	836.938.500	557,96%

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.065.000.000	-	-
	c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	98.335.137.000	80.658.000	0,08%
	d. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	26.249.000.000	6.477.664	0,02%
	e. Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	-	248.614	-
	f. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	1.604.752.980	-
	g. Pendapatan Denda Lainnya	-	212.070.202	-
	h. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	6.451	-
	i. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	92.798.742.026	-
	j. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	41.294.467.401	-
	k. Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	565.123.000	-
JUMLAH		1.246.326.325.000	689.200.131.258	55,299

Dengan realisasi sebesar Rp689.200.131.258,00, maka diperoleh tingkat pencapaian kinerja PNPB Triwulan I 2025 sebesar 55,299% dari target Tahun 2025 sebesar Rp1.246.326.325.000,00. → **(Tingkat Pencapaian = 55,299%)**

Tingkat pencapaian Indeks Profesional ASN

Indeks Profesional ASN merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar birokrasi yang ideal, seperti kompetensi, integritas, netralitas, dan akuntabilitas.

Tata cara perhitungan mengacu pada Peraturan MENPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Indeks Profesional ASN dikelompokkan pada kategori:

1. 91 – 100: Kategori Sangat Tinggi;
2. 81 – 90: Kategori Tinggi;
3. 71 – 80: Kategori Sedang;
4. 61 – 70: Kategori Rendah;
5. 60 ke bawah: Kategori Sangat Rendah.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Penilaian indeks profesional ASN diukur melalui 4 kriteria/dimensi penilaian, yakni:

1. **Kualifikasi (Bobot 25)**, berupa data/informasi riwayat jenjang pendidikan formal;
2. **Kompetensi (Bobot 40)**, berupa data/informasi riwayat pengembangan kompetensi;
3. **Kinerja (Bobot 30)**, berupa data/informasi riwayat penilaian kinerja;
4. **Disiplin (Bobot 5)**, berupa data/informasi riwayat hukuman disiplin.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditargetkan indeks profesional ASN sebesar 89,00 dan pada periode Triwulan I 2025 belum ditetapkan target, adapun target direncanakan akan direalisasikan pada periode Triwulan IV 2025.

Hingga Triwulan I 2025 belum terdapat realisasi karena masih dalam proses optimalisasi nilai indeks profesional ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi SIASN BKN. Namun demikian, pada 7 Maret 2025 telah disampaikan nilai sementara indeks profesional ASN sebagaimana surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor: KP.111/1/1/STJ/2025 tanggal 13 Maret 2025 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 Posisi 7 Maret 2025 dimana Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih dalam kategori "Rendah" atau indeks sebesar 64,36 dari 100 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kualifikasi = 23,73 (dari 25);
2. Kompetensi = 18,74 (dari 40);
3. Kinerja = 17,48 (dari 30);
4. Disiplin = 4,99 (dari 5).

Dengan demikian, pada Triwulan I 2025 belum dilakukan pengukuran Tingkat Pencapaian Indeks Profesional ASN. → **(Tingkat Pencapaian = 0,00%)**.

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

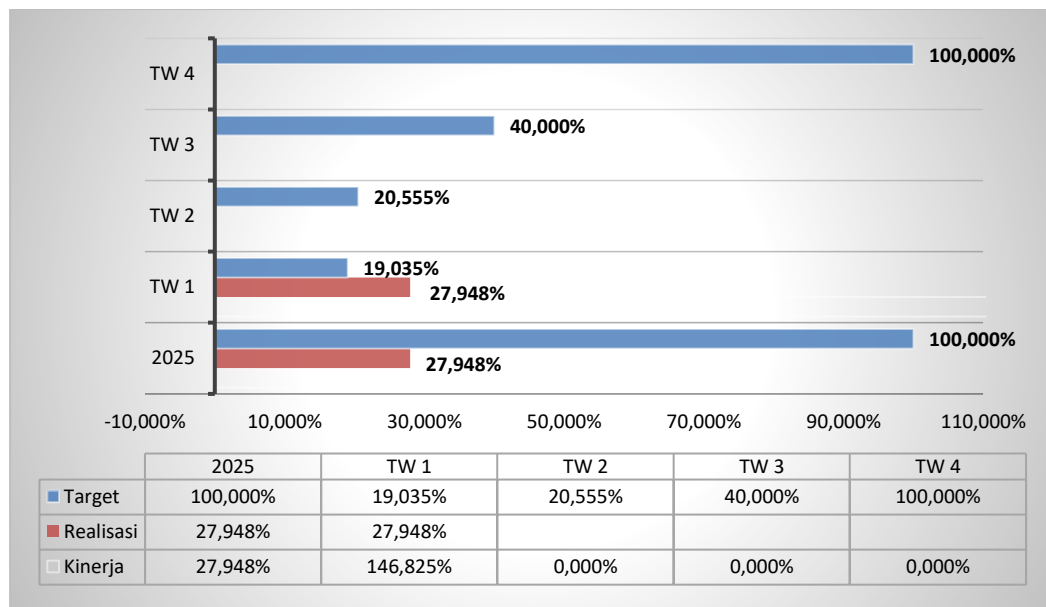
Mengacu pada perolehan tingkat pencapaian kinerja dari masing-masing komponen penilaian di atas (AKIP, NKA, PNBP, Indeks Profesional ASN), maka diperoleh realisasi Persentase Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan I 2025 sebesar 27,948% yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{\% Pencapaian Tata Kelola} \\ \text{Pemerintahan Direktorat Jenderal} \\ \text{Perkeretaapian} \end{aligned} = \frac{(TP\ AKIPDJKA + TP\ NKADJKA + TP\ PNBP + TP\ ASNDJKA) / 4}{(0,000\% + 56,494\% + 55,299\% + 0,000\%) / 4}$$

Dengan realisasi tersebut, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 146,825% terhadap target Triwulan I dan sebesar 27,948% terhadap target Tahun 2025. Realisasi kumulatif per triwulan sebagaimana dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-20 Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000	19,035	20,555	40,000	100,000	27,948	-	-	-	146,825	-	-	-	27,948



Gambar 2-9 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan bagian strategis dalam memperkuat prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan profesional melalui pembenahan menyeluruh terhadap sistem manajemen kinerja, pengelolaan anggaran, pelayanan publik, serta kompetensi dan integritas aparatur sipil negara.

Pada Triwulan I Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menunjukkan capaian yang sangat positif dalam pelaksanaan program peningkatan tata kelola pemerintahan. Terlepas dari belum dilakukannya pengukuran terhadap Nilai AKIP dan Indeks Profesional ASN, pencapaian signifikan pada Nilai Kinerja Anggaran dan PNPB telah mampu mendorong realisasi IKP di atas target triwulanan. Hal ini mengindikasikan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian berada pada jalur yang tepat dalam memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional, serta perlu mempertahankan momentum ini dengan optimalisasi dua komponen lainnya pada periode berikutnya. Pemutakhiran data, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja, serta penguatan kompetensi ASN perlu terus menjadi fokus prioritas untuk memastikan pencapaian target tahunan secara menyeluruh.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja diantaranya:

a. Faktor Kelembagaan dan Perencanaan Strategis.

- 1) Kelengkapan Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas: Seperti tersusunnya Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan SOP yang sistematis dan terdokumentasi baik. Adapun terkait dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 saat ini dalam tahap penyesuaian kebijakan/strategi dengan RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan termasuk penyesuaian kegiatan dampak kebijakan efisiensi belanja anggaran Tahun 2025. Selanjutnya direncanakan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 akan ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2025.
- 2) Koordinasi Internal yang Efektif: Terlihat dari pembahasan yang mengikutsertakan Direktorat, Balai dan Bagian dalam pembahasan dan penyusunan laporan kinerja dan evaluasi capaian, serta penetapan target yang realistis dan sinergis.
- 3) Penyelarasan Kinerja Individu dan Organisasi: Melalui integrasi target PK dengan SKP masing-masing pegawai, mendukung prinsip akuntabilitas personal dan kolektif.

b. Faktor Kebijakan dan Regulasi Eksternal.

- 1) Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja anggaran yang berdampak langsung pada penundaan hingga pembatalan kegiatan dan anggaran.
- 2) Persetujuan dari instansi lain seperti DJKN Kementerian Keuangan dalam pemanfaatan BMN termasuk perolehan realisasi PNBPN TAC Tahun 2024 turut memengaruhi realisasi PNBPN.

c. Faktor Manajerial dan Tata Laksana.

- 1) Ketepatan dan Ketertiban Pelaporan: Penggunaan aplikasi seperti e-SAKIP Reviu, e-Kinerja, SILAKI, SAKTI, dan lainnya menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang terintegrasi dan disiplin administratif turut memengaruhi pencapaian kinerja pada beberapa komponen penilaian.

- 2) Ketersediaan dan Pemanfaatan SDM yang Profesional: Penurunan nilai IP ASN memperlihatkan pentingnya pelatihan, validasi kompetensi, dan kelengkapan data ASN.

d. Faktor Pengelolaan Anggaran.

- 1) Efektivitas dan Ketepatan Perencanaan Anggaran: Termasuk penyusunan dan revisi DIPA, penyesuaian RPD, dan pelaporan *output* yang rutin dan tepat waktu.
- 2) Kemampuan Adaptasi terhadap Efisiensi Fiskal: Menunjukkan bahwa organisasi harus fleksibel dan tetap menjaga keberlangsungan kegiatan prioritas meskipun pagu mengalami pemangkasan drastis.

e. Faktor Teknologi dan Digitalisasi.

- 1) Pemanfaatan Sistem Digital yang Konsisten: Implementasi aplikasi e-Kinerja, e-SAKIP, SILAKI, SAKTI, dll., memberikan keunggulan jika digunakan secara optimal, tetapi juga bisa menjadi kendala jika data tidak tersinkronisasi atau tidak diinput sesuai ketentuan.
- 2) Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Aplikasi: Minimnya pemahaman atau keterlambatan input oleh admin berdampak pada rendahnya nilai kinerja ASN maupun pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) baik secara internal maupun eksternal. Pada tingkat internal, hal ini tercermin dalam sinergi antara Direktorat dan Balai dalam proses penetapan target Perjanjian Kinerja (PK), penyusunan laporan kinerja, serta pelaksanaan kegiatan strategis lainnya yang membutuhkan koordinasi lintas unit termasuk melibatkan narasumber yang kompeten unit dan K/L lain seperti Biro Perencanaan Kemenhub, Inspektorat Jenderal Kemenhub, KemenPAN RB, dll. Sementara itu, di tingkat eksternal, kerja sama dan hubungan dengan instansi seperti DJKN Kementerian Keuangan, BKN, ATR/BPN, dan lembaga terkait lainnya menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan pensertifikatan aset, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), integrasi dan sinkronisasi data kepegawaian, serta pemanfaatan aplikasi kinerja dan pelaporan. Kolaborasi ini

menunjukkan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang berkualitas, efisien, dan akuntabel.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Terkait analisa perbandingan dilakukan terhadap capaian dari 2 komponen penilaian yaitu Nilai Kinerja Anggaran dan perolehan PNBPN. Untuk 2 komponen lainnya (Nilai AKIP dan Indeks Profesional ASN) pada Triwulan I 2025 belum terdapat realisasi kinerja sehingga tidak dilakukan perbandingan kinerja.

Untuk komponen Nilai Kinerja Anggaran dan perolehan PNBPN, dilakukan perbandingan terhadap realisasi antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu (untuk NKA) dan OMSPAN (untuk PNBPN). Adapun perbandingannya sebagai berikut:

**Tabel 2-21 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Periode Triwulan I 2025**

No	Unit Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	Sekretariat Jenderal	1,48	90,33	45,91
2	Inspektorat Jenderal	1,14	100,00	50,57
3	Ditjen Perhubungan Darat	4,11	87,29	45,70
4	Ditjen Perhubungan Laut	2,47	85,37	43,92
5	Ditjen Perhubungan Udara	2,55	88,68	45,62
6	Ditjen Perkeretaapian	2,62	88,89	45,76
7	Badan Kebijakan Transportasi	1,20	99,62	50,41
8	BPSDM Perhubungan	6,81	94,23	50,52
9	BPTJ	0,00	100,00	50,00

**Tabel 2-22 Realisasi PNBPN Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Periode Triwulan I 2025**

No	Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	3.510.000.000	1.167.023.705	33,249
2	Inspektorat Jenderal	0	7.353.980	0,000
3	Ditjen Perhubungan Darat	1.400.066.326.000	362.286.795.013	25,876
4	Ditjen Perhubungan Laut	5.339.531.810.000	1.775.314.428.155	33,249
5	Ditjen Perhubungan Udara	1.834.852.348.000	452.027.865.436	24,636

No	Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	Ditjen Perkeretaapian	1.246.326.325.000	689.200.131.258	55,299
7	Badan Kebijakan Transportasi	0	8.647.530	0,000
8	BPSDM Perhubungan	1.393.680.517.000	371.789.230.379	26,677
9	BPTJ	13.770.000.000	3.149.639.711	22,873

Mengacu Tabel di atas, diperoleh bahwa capaian nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian menduduki peringkat ke-6 dari 8 unit eselon I lainnya dengan realisasi sebesar 45,760. Untuk komponen perolehan PNBPN antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, diperoleh informasi bahwa perolehan PNBPN Direktorat Jenderal Perkeretaapian menduduki peringkat pertama dari 8 unit eselon I lainnya dengan persentase capaian sebesar 55,299% (realisasi sebesar Rp689.200.131.258,00 dari target Tahun 2025).

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang meliputi beberapa langkah, antara lain:

- Melakukan finalisasi dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 termasuk sinkronisasi/penyesuaian kebijakan/strategi dengan RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan serta penyesuaian rencana kegiatan dampak kebijakan efisiensi belanja anggaran Tahun 2025.
- Melakukan publikasi berkala dokumen kinerja pada aplikasi kinerja (e-SAKIP Reviu, e-Performance, SILAKI) dan eksternal (*website* Ditjen Perkeretaapian).
- Meningkatkan ketepatan revisi DIPA dan akurasi Halaman III DIPA dengan penerapan standar biaya keluaran (SBK).
- Meningkatkan kualitas pelaporan realisasi *output* pada SAKTI secara berkala.
- Mempercepat proses pensertifikatan aset tanah melalui sinergi dengan ATR/BPN dan aparat pemerintah daerah.
- Melanjutkan proses persetujuan pemanfaatan BMN yang potensial menjadi sumber PNBPN.

- g. Melakukan sinkronisasi dan updating data kinerja serta kompetensi ASN secara berkala melalui e-Kinerja dan SIK.
- h. Mendorong seluruh ASN untuk mengikuti pelatihan/diklat/fungsional dan mengunggah sertifikat sebagai bukti kompetensi.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

a. *Penyesuaian strategi/kebijakan:*

- 1) Melakukan finalisasi dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 termasuk sinkronisasi/penyesuaian kebijakan/strategi dengan RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan serta penyesuaian rencana kegiatan dampak kebijakan efisiensi belanja anggaran Tahun 2025.
- 2) Akselerasi proses legalisasi aset melalui percepatan sertifikasi tanah bekerja sama dengan ATR/BPN dan DJKN.

b. *Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*

- 1) Penyesuaian kebijakan efisiensi anggaran yang berfokus pada output prioritas dan berdampak langsung.
- 2) Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SAKTI dan e-Kinerja melalui pelatihan teknis dan evaluasi berkala.

c. *Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai:*

- 1) Penempatan pegawai yang kompeten pada unit pengelola data kinerja, keuangan, dan kepegawaian untuk mendukung kualitas data dan pelaporan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, diklat fungsional/teknis, dan penyusunan rencana pengembangan karier berbasis kompetensi.

2.3 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pada periode Triwulan I Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan unit kerja dibawahnya memperoleh beberapa capaian kinerja lainnya, diantaranya:

- 1. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2025 (1446 H)

- a. Pada Kereta Api Antarkota (PT KAI, PT Railink dan PT KCIC) pada 21 Maret - 11 April 2025 diketahui total perjalanan Kereta Api sebanyak 7.109 regular dan 1.068 tambahan dengan *on time performance (OTP)* 93,40% regular dan 98,00% tambahan. Pada Kereta Api Antarkota periode 21 Maret s.d 11 April 2025 rerata harian volume penumpang sebanyak 198.032 penumpang dengan jumlah kumulatif 4.356.699 penumpang;
 - b. Pada Kereta Api Perkotaan Regional (PT KAI, PT Railink dan PT KCIC) pada 21 Maret - 11 April 2025 diketahui total perjalanan Kereta Api sebanyak 7.740 regular dan 60 tambahan dengan *on time performance (OTP)* 99,30% regular dan 97,70% tambahan. Pada Kereta Api Perkotaan Regional periode 21 Maret s.d 11 April 2025 rerata harian volume penumpang sebanyak 179.299 penumpang dengan jumlah kumulatif 3.944.575 penumpang;
 - c. Pada Kereta Komuter (PT KAI, PT KCI, PT MRT dan PT LRTJ) pada 21 Maret - 11 April 2025 diketahui total perjalanan Kereta Api sebanyak 44.478 regular dengan *on time performance (OTP)* 98,20% regular. Pada Kereta Api Perkotaan Komuter periode 21 Maret s.d 11 April 2025 rerata harian volume penumpang sebanyak 980.632 penumpang dengan jumlah kumulatif 21.573.909 penumpang.
2. Penyelenggaraan Angkutan Motor Gratis (Motis) Lebaran Tahun 2025
 - a. Jadwal penyelenggaraan Angkutan Motis pada Masa Lebaran 2025:
 - 1) Periode pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 8 Maret s.d 6 April 2025;



Gambar 2-10 Pendaftaran Angkutan Motis pada Masa Lebaran 2025

- 2) Periode pengangkutan dilaksanakan selama 8 (delapan) hari yang terbagi menjadi 2 (dua) sesi yaitu arus mudik pada tanggal 26 s.d 29 Maret 2025 dan arus balik pada tanggal 4 s.d 7 April 2025.

- b. Posko Pendaftaran meliputi Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Tangerang, Stasiun Depok Baru, Stasiun Cibinong, Stasiun Bekasi, Stasiun Cirebon Prujakan, Stasiun Tegal, Stasiun Pekalongan, Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Purwokerto, Stasiun Kroya, Stasiun Gombong, Stasiun Kebumen, Stasiun Kutoarjo dan Stasiun Lempuyangan.
- c. Lintas pelayanan Angkutan Motis Masa Lebaran 2025:
- 1) Lintas Utara, yang melayani Stasiun Jakarta Gudang - Stasiun Pasar Senen (naik turun penumpang) - Stasiun Bekasi (naik turun penumpang) - Stasiun Cirebon Prujakan - Stasiun Tegal- Stasiun Pekalongan - Stasiun Semarang Tawang (1xPP), dengan kapasitas per hari sebesar 232 unit motor (disediakan 530 tempat duduk untuk penumpang KA Motis);
 - 2) Lintas Tengah, yang melayani Stasiun Jakarta Gudang - Stasiun Pasar Senen (naik turun penumpang) - Stasiun Cirebon Prujakan - Stasiun Purwokerto - Stasiun Kroya - Stasiun Gombong - Stasiun Kebumen - Stasiun Kutoarjo - Stasiun Lempuyangan (3xPP), dengan kapasitas per hari sebesar 696 unit motor (disediakan 1.590 tempat duduk untuk penumpang KA Motis).
- d. Realisasi pengangkutan motor pada Angkutan Motis Lebaran 2025 sebanyak 7.609 unit motor (102,49% dari target 7.424 unit motor), dengan penumpang yang diangkut sebanyak 12.553 orang (peserta motis). Jika dibandingkan tahun sebelumnya pada masa durasi pelayanan yang sama yaitu sebanyak 6.711 unit motor (YoY 2024), terjadi peningkatan sebesar 898 unit motor (13,38%).



Gambar 2-11 Bongkar Muat Motis Angkutan Lebaran 2025

2.4 REALISASI ANGGARAN

2.4.1 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar Rp5.119.295.134000,- sedangkan untuk posisi akhir Triwulan I 2025 terdapat perubahan menjadi sebesar Rp5.155.495.117.000,- dengan uraian sebagai berikut:

1. Revisi Lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (TA 2024) yang dilanjutkan ke TA 2025 tersebar di 4 (empat) satker sebesar Rp36.199.983.000,00 pada tanggal 20 Februari 2025;
2. Revisi anggaran TA 2025 lingkup Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dalam rangka memenuhi kewajiban efisiensi belanja Kementerian Perhubungan berupa pencantuman catatan halaman IV A DIPA/blokir sebesar Rp3.807.993.637.000,00 pada tanggal 21 Februari 2025 (tidak merubah pagu);
3. Revisi anggaran TA 2025 lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan berupa Revisi Administrasi Ralat Kode Blokir sebesar Rp6.300.340.000,00 pada tanggal 16 Maret 2025 (tidak merubah pagu);
4. Revisi anggaran TA 2025 lingkup Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada tanggal 24 Maret 2025 berupa buka blokir catatan halaman IV A DIPA dalam rangka relaksasi blokir efisiensi anggaran untuk pemenuhan anggaran kegiatan prioritas (tidak merubah pagu) sebagai berikut:
 - a. Subsidi Perintis sebesar Rp96.186.766.000,00.
 - b. Mudik Gratis, Angkutan Lebaran, dan Nataru sebesar Rp10.548.315.000,00
 - c. Kebutuhan IMO sebesar Rp2.130.635.381.000,00

Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2025 diperoleh sebesar Rp147.261.471.819,- (2,86%), dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 2- 23 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Jenis Belanja Tahun 2025

No.	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu Awal	Pagu Triwulan I	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	203.084.303.000	203.855.152.000	61.706.104.472	30,27	142.149.047.528	69,73
2	Belanja Barang	3.612.244.204.000	3.613.752.147.000	75.768.253.645	2,10	3.537.983.893.355	97,90
3	Belanja Modal	1.303.966.627.000	1.337.887.818.000	9.787.113.702	0,73	1.328.100.704.298	99,27
Total		5.119.295.134.000	5.155.495.117.000	147.261.471.819	2,86	5.008.233.645.181	97,14

Tabel 2-24 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran	
		Pagu Awal	Pagu Triwulan I	Nilai (Rp)	%
1.	Program infrastruktur konektivitas	4.424.660.689.000	4.460.860.672.000	46.297.303.509	1,04
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	813.226.191.000	813.126.191.000	2.873.423.028	0,35
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	895.248.757.000	904.411.441.000	11.828.891.950	1,31
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.670.022.802.000	2.697.160.101.000	29.555.723.620	1,10
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	46.162.939.000	46.162.939.000	2.039.264.911	4,42
2.	Program Dukungan Manajemen	694.634.445.000	694.634.445.000	100.964.168.310	14,53
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	22.069.026.000	22.099.026.000	790.937.869	3,58
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	637.851.276.000	637.821.276.000	98.941.938.221	15,51
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	17.498.737.000	17.498.737.000	1.048.667.000	5,99
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	14.149.348.000	14.149.348.000	106.114.720	0,75
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	3.066.058.000	3.066.058.000	76.510.500	2,50
TOTAL		5.119.295.134.000	5.155.495.117.000	147.261.471.819	2,86

Tabel 2-25 Alokasi Anggaran Per Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran	
		Pagu Awal	Pagu Triwulan I	Nilai (Rp)	%
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	813.226.191.000	813.126.191.000	2.873.423.028	0,35
SP2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	2.716.185.741.000	2.697.160.101.000	29.555.723.620	1,10
SP3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	895.248.757.000	904.411.441.000	895.248.757.000	1,31
	IKP4 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api				
	IKP5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api				
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP5 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	694.634.445.000	694.634.445.000	100.964.168.310	14,53
Jumlah		5.119.295.134.000	5.109.332.178.000	147.261.471.819	2,86

Keterangan: Jumlah Alokasi Anggaran untuk Program Infrastruktur Konektivitas (tidak termasuk Program Dukungan Manajemen)

2.4.2 REALISASI PENDAPATAN UNIT KERJA

Berdasarkan data pada aplikasi SPAN Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP pada Triwulan I 2025 sebesar Rp.689.200.131.258,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.246.326.325.000,- maka diperoleh capaian persentase realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 55,30%.

Rincian realisasi PNBP periode Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatannya sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-26 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)	1.028.700.863.000	535.635.646.249	52,07
	a. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.528.160.000	296.354.000	19,39
	b. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	2.789.250.000	1.023.175.000	36,68
	c. Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/ <i>Track Access Charge</i>	1.023.132.453.000	532.890.117.249	52,08
	d. Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.251.000.000	1.426.000.000	113,99
2	Pendapatan BLU	89.826.325.000	16.165.000.171	18,00
	a. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	79.097.734.000	15.753.750.000	19,92
	b. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	9.546.423.000	63.747.000	0,67
	c. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	281.353.171	-
	d. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.182.168.000	66.150.000	5,60
3	Pendapatan Non Fungsional	127.799.137.000	137.399.484.838	107,51
	a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000	836.938.500	557,96%
	b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.065.000.000	-	-
	c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	98.335.137.000	80.658.000	0,08%
	d. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	26.249.000.000	6.477.664	0,02%
	e. Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	-	248.614	-
	f. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	1.604.752.980	-
	g. Pendapatan Denda Lainnya	-	212.070.202	-
	h. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	6.451	-
	i. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	92.798.742.026	-
	j. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	41.294.467.401	-

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	k. Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	565.123.000	-
JUMLAH		1.246.326.325.000	689.200.131.258	55,30

2.4.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan potensi secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dari sisi ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), merupakan hal penting dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja unit kerja sehingga perlu untuk dipenuhi sesuai kebutuhan dan didukung dengan kompetensi/keahlian yang memadai. Pada Triwulan I 2025, jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 1.822 dengan rincian berupa 594 pegawai pada Kantor Pusat (Sekretariat dan 4 Direktorat Teknis) dan 1.228 pegawai tersebar pada 11 Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Untuk kebutuhan pegawai berdasarkan Analisa Kebutuhan Kerja (ABK) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025 s.d 2029 sebanyak 2.446 pegawai sehingga kebutuhan SDM Ditjen Perkeretaapian s.d 2029 sebesar 4.024 pegawai dan diperoleh Efisiensi SDM sebesar 34,47%, dengan rincian sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi SDM} = \left(\frac{\text{SDM Tersedia}}{\text{Kebutuhan SDM sesuai ABK}} \times \frac{\text{Output Aktual}}{\text{Target Output}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Rasio SDM} = \frac{1.822}{4.024} = 0,4528$$

$$\text{Rasio Output*} = 0,9178$$

$$\text{Efisiensi SDM} = 0,4528 \times 0,9178 \times 100\% = 41,558\%$$

*) Rasio output diperoleh dari aplikasi SPAN Kementerian Keuangan

Dari sisi penggunaan sumber daya anggaran, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan efisiensi anggaran dimana beberapa target Indikator Kinerja Program yang tercapai dengan capaian lebih dari 100%. Hasil perhitungan analisis efisiensi sumber daya anggaran mengacu pada Rencana Penyerapan Dana (RPD) pada Triwulan I 2025 yaitu sebesar 6,71% dari alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau sebesar Rp343.504.703.491 dan diperoleh efisiensi posisi Triwulan I 2025 sebesar 29,09% terhadap sasaran/indikator kinerja yang tercapai sesuai target sebagaimana secara rinci pada Tabel berikut.

Tabel 2-27 Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Keuangan				Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu Triwulan I 2025	Realisasi	Penye-rapan Angga-ran	Sisa Anggaran/ Efisiensi Pada Indikator yang Tercapai (Rp)	
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,460	0,460	100,000%	54.567.477.416	2.873.423.028	5,27%	51.694.054.388	Pada Sasaran Konektivitas Transportasi Perkeretaapian diperoleh realisasi kinerja tercapai 100% dengan adanya sisa anggaran/efisiensi sebesar Rp51,69M.
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	Rasio	100	99,617	99,617%	182.256.063.221	31.594.988.531	17,34%	-	Pada Sasaran Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Konektivitas, target kinerja tidak tercapai sehingga tidak terdapat efisiensi sumber daya
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740	3,810	101,872%	60.071.191.595	11.828.891.950	19,69%	48.242.299.645	Pada Sasaran Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan, pada ketiga realisasi kinerja tercapai diatas 100% dengan adanya sisa anggaran/efisiensi sebesar Rp48,24M.
Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100%	97,415%	101,368%					
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	4,465	4,515	101,120%					
Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di	%	19,035	27,948	110,000%	46.609.971.260	100.964.168.310	216,61%	-	Pada Sasaran Kinerja Tata Kelola Pemerintahan realisasi kinerja tercapai diatas 100%

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Keuangan				Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu Triwulan I 2025	Realisasi	Penye-rapan Angga-ran	Sisa Anggaran/ Efisiensi Pada Indikator yang Tercapai (Rp)	
Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian									namun realisasi anggaran lebih dari RPD pada Triwulan I 2025 sehingga tidak terdapat efisiensi anggaran.
Jumlah					296.894.732.232	46.297.303.509	49,60%	99.936.354.033	

Tabel 2-1 Analisis Efisiensi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I 2025 Berdasarkan Pendekatan PMK Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2025	Realisasi TW 1	Capaian IKP (CIKP)	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x CIKP	(AA x CIKP) - RA
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (8) x (7)	(11) = (10) - (9)
1	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	100,000%	813.226.191.000	2.873.423.028	813.226.191.000	810.352.767.972
2	IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100,00	99,617	99,617%	2.716.185.741.000	31.594.988.531	2.705.782.749.612	2.674.187.761.081
3	IKP3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740	3,810	101,872%	895.248.757.000	11.828.891.950	677.414.388.204	665.585.496.254
4	IKP4 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100	97,415	101,368%				

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2025	Realisasi TW 1	Capaian IKP (CIKP)	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x CIKP	(AA x CIKP) - RA
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (8) x (7)	(11) = (10) - (9)
5	IKP5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,000	4,515	23,763%				
6	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,00	27,948	27,948%	694.634.445.000	100.964.168.310	194.136.434.689	93.172.266.379
						5.119.295.134.000	147.261.471.819	4.390.559.763.505	4.243.298.291.686

Nilai Efisiensi Ditjen Perkeretaapian

Efisiensi Output Program = $\frac{\sum((Alokasi\ Anggaran\ Program \times Capaian\ Output\ Program) - Realisasi\ Anggaran)}{\sum(Alokasi\ Anggaran\ program)} \times 100\%$

Efisiensi Output Program = $\frac{4.243.298.291.686}{5.119.295.134.000} \times 100\% = 82,89\%$

Sehingga berdasarkan Pendekatan PMK Tahun 2021 diperoleh Efisiensi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I 2025 sebesar Rp4.243.298.291.686 atau sebesar 82,89%.

BAB 3 PENUTUP

3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada Laporan Kinerja periode sebelumnya (LKIP 2024) sebagai berikut:

Tabel 3-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Kinerja Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	- Koordinasi terkait kelanjutan program/kegiatan pendukung konektivitas yang tidak dapat selesai Tahun 2024 (peningkatan akses stasiun KA Makassar – Parepare, pekerjaan utilitas dan penyempurnaan Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, kelanjutan pengadaan lahan segmen Pondok S5-Kotapinang). - Monitoring penyelesaian <i>readiness criteria</i> kegiatan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban oleh PT. KAI untuk memenuhi peraturan yang berlaku. - Evaluasi dan identifikasi secara komprehensif terkait potensi konektivitas jaringan jalur dan layanan kereta api yang terhubung dengan kawasan industri, kawasan pariwisata dan simpul transportasi darat (terminal tipe A). - Percepatan penyelesaian regulasi teknis terkait trem otonom. - Penyesuaian rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 terkait kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian mengacu perkembangan kebijakan pada RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan.	- Kelanjutan program/kegiatan pendukung konektivitas berupa peningkatan akses stasiun KA dengan progress sebagai berikut : - lintas Makassar-Pare-Pare antara Mandai-Palanro sebesar 91,86% - pekerjaan utilitas dan penyempurnaan Bandar Tinggi-Kuala Tanjung pekerjaan telah selesai - lanjutan pengadaan lahan segmen Pondok S5-Kotapinang sebesar 93,3% telah terbayar 710 dari 762 bidang) melalui LMAN. Total 52 bidang yang belum dibayarkan: 8 bidang, rencana pengajuan pembayaran LMAN; 30 bidang, revisi peta bidang dan daftar nominatif oleh BPN; 1 bidang tanah instansi; 13 bidang masih dilakukan pendekatan persuasif untuk bidang/warga yang belum setuju. Pada bulan Januari s.d April 2025 akan dilakukan DPPT ulang dan pengusulan Kembali penetapan lokasi pengadaan

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		tanah antara Rantau Prapat-Kota Pinang - Progress penyelesaian <i>readiness criteria</i> kegiatan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban oleh PT. KAI... - Evaluasi dan identifikasi secara komprehensif terkait potensi konektivitas jaringan jalur dan layanan kereta api yang terhubung dengan kawasan industri, kawasan pariwisata dan simpul transportasi darat (terminal tipe A). - Terkait progres regulasi teknis trem otonom masih dalam pembahasan dan perlu dilakukan kajian ulang - Telah dilaksanakan penyesuaian terhadap rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 antara lain mencakup kerangka pendanaan dan target kegiatan strategis serta kerangka regulasi mengacu pada arah kebijakan pada RPJMN 2025-2029 dan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025
IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA:	- Melanjutkan pengawasan keselamatan perkeretaapian secara periodik sebagai regulator, termasuk pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan/<i>rampcheck</i> guna memastikan kehandalan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2025. - Identifikasi daerah rawan bencana alam dengan kondisi cuaca ekstrim di beberapa wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian serta menugaskan Satuan Pelayanan untuk melakukan pengawasan intensif termasuk koordinasi penyelesaian penanganan rintang jalan/amblesan dan penggantian jembatan yang kritis yang telah terdampak. - Koordinasi kelanjutan kegiatan peningkatan/modernisasi fasilitas operasi perkeretaapian baik yang bersumber dari APBN/SBSN (luncuran	- Telah dilaksanakan inspeksi keselamatan dan <i>rampcheck</i> guna mendukung penyelenggaraan angkutan lebaran dengan rincian : - Inspeksi keselamatan dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 21 Maret 2025 di beberapa wilayah Balai Teknik Perkeretaapian untuk wilayah Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya; - Pemeriksaan kelaikan dan kesiapoperasian (<i>Rampcheck</i>) dilaksanakan pada 24 Februari s.d 14 Maret 2025 di seluruh DAOP dan DIVRE wilayah kerja PT. KAI dengan lingkup pemeriksaan meliputi lokomotif (yang digunakan untuk penumpang dan KRL)

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	2024) maupun yang dilaksanakan oleh PT. KAI. Koordinasi persiapan penyelenggaraan IMO Tahun 2025 yang kemungkinan terdampak kebijakan penghematan anggaran.	- Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah menyampaikan Himbauan Antisipasi Kondisi Cuaca Ekstrem kepada Operator Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Surat Direktur Keselamatan No. PS.006/15/K5/DJKA/2025 tanggal 5 Februari 2025 - Lanjutan kegiatan peningkatan/modernisasi fasilitas operasi perkeretaapian dengan progress s.d Maret 2025 sebagai berikut : - Peningkatan stasiun Tanah Abang progress fisik sebesar 98,33% dan stasiun Rangkasbitung sebesar 81,89% - Peningkatan sistem elektrifikasi Jabodetabek progress sebesar 91,73% - Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi: - Lintas Cirebon - Kroya segmen Prupuk – Purwokerto dan Lintas Cirebon - Semarang segmen Tegal – Pekalongan progress fisik 0%, saat ini masih dalam proses pelelangan dan telah ditetapkan persetujuan revisi Lanjutan/luncuran TA 2024 ke TA 2025 - Telah diusulkan revisi relaksasi buka blokir efisiensi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian melalui surat Sekretaris Jenderal Kemenhub No. KU.002/2/SKJ/2025 tanggal 19 Maret 2025 termasuk kebutuhan untuk kegiatan IMO Rp.2,130 triliun dan telah mendapat persetujuan melalui Surat Dirjen Anggaran

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		No.S-302/AG/AG.3/2025 pada tanggal 24 Maret 2025
IKP3 Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	▪ Lanjutan kegiatan peningkatan jalur dan jembatan KA (diantaranya Jember – Kalisat, Semarang – Gambiringan, Cirebon – Kroya) guna meningkatkan kehandalan dan kecepatan operasional kereta api termasuk menghindari gangguan perjalanan kereta api. ▪ Lanjutan pembangunan jalur ganda KA (diantaranya Solo Balapan-Kalioso, Medan – Binjai/elevated) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu. ▪ Pemantauan operasional kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsor/amblesan dimana terdapat taspat yang mempengaruhi ketepatan waktu perjalanan kereta api. ▪ Koordinasi dengan stakeholder terkait persiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2025. ▪ Penetapan dan pengawasan intensif terhadap implementasi GAPEKA Tahun 2025 agar perjalanan KA sesuai jadwal dan keterlambatan KA dapat diminimalisir terutama andil keterlambatan dari operasional/persilangan/penambahan/pelepasan sarana/lainnya.	▪ Lanjutan kegiatan peningkatan jalur dan jembatan KA dengan progress s.d Maret 2025 sebagai berikut: ○ Segmen Jember-Kalisat sebesar 62,05% ○ Segmen Semarang-Gambiringan (penggantian 2 jembatan BH 46 dan BH 59) progress 0% ○ Segmen Cirebon-Kroya (penggantian 2 jembatan BH 1109 dan BH 1164 progress 0%) ▪ Lanjutan pembangunan jalur ganda KA dengan progress fisik s.d Maret 2025 sebagai berikut: ○ Segmen Solo Balapan-Kalioso sebesar 88,68% ○ Segmen Medan-Binjai sebesar 65,02% ▪ Koordinasi secara aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian terhadap penanganan kejadian penyebab kelambatan perjalanan kereta api serta mengantisipasi potensi adanya rintang jalan yang dapat mengakibatkan kelambatan perjalanan kereta api. ▪ Telah dilaksanakan koordinasi teknis dengan stakeholder (PT. KAI, PT. MRT, PT. KCI, PT. KCIC) terkait persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran yang mencakup rencana operasi, kesiapan sarana, prasarana dan SDM termasuk identifikasi daerah rawan dan upaya preventif dan mitigasinya ▪ Telah dilakukan perubahan/penetapan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional di Jawa, Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Barat, Sumatera Bagian Selatan, dan Kereta Api Kecepatan Tinggi

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Jakarta - Bandung sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan perjalanan kereta api, terhitung berlaku sejak 1 Februari 2025; Telah dilaksanakan evaluasi harian kinerja operasi pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta – Bandung.
IKP4 Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api:	- Percepatan pengoperasian hasil-hasil pembangunan prasarana perkeretaapian diantaranya Krueng Geukeuh – Muara Satu, Rantauprapat – Pondok S5, serta layanan KA lainnya didukung dengan akses dan integrasi antar moda yang memadai. - Penyelenggaraan layanan subsidi KA perintis sesuai kebutuhan dan layanan terus berkelanjutan, serta pengelolaan PSO Tahun 2025 yang mencakup subsidi untuk LRT Jabodebek, KA Perkotaan dan KA antar kota dengan dukungan kajian subsidi PSO tepat sasaran. - Dukungan peningkatan stasiun kereta api guna mendukung kapasitas yang memadai terhadap layanan penumpang (diantaranya Stasiun Rangkasbitung dan Stasiun Tanah Abang). - Evaluasi dan pemantauan kinerja layanan KA secara <i>realtime</i> serta pengawasan penerapan SPM secara berkala guna memastikan layanan sesuai ketentuan. - Antisipasi kegiatan pendukung peningkatan layanan angkutan KA (termasuk subsidi perintis) yang terdampak kebijakan <i>Automatic Adjustment</i> (AA) atau blokir dengan optimalisasi anggaran dan/atau pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.	- Percepatan pengoperasian hasil-hasil pembangunan prasarana perkeretaapian.... - Telah dilaksanakan penyelenggaraan angkutan penumpang KA melalui skema perintis dan PSO pada tahun 2025 dengan jumlah angkutan penumpang s.d Maret sebagai berikut : - Angkutan subsidi perintis sebanyak 1.132.107 penumpang; - Angkutan penumpang PSO sebanyak 98.566.297 penumpang Sedang untuk progress kajian subsidi PSO tepat sasaran tidak dapat dilaksanakan karena blokir/efisiensi anggaran - Peningkatan stasiun Tanah Abang dengan progress 98,33% dan stasiun Rangkasbitung sebesar 81,89% - Telah dilakukan evaluasi dan kinerja layanan KA meliputi: - Tinjauan lapangan dalam rangka integrasi Stasiun Karet dan Stasiun Sudirman Baru (BNI City) pada tanggal 9 Februari 2025; - Telah dilakukan Rapat Pembahasan Rencana Perpanjangan Pengoperasian Commuter Line Prambanan

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Ekspress (Prameks) ke Stasiun Kebumen pada tanggal 12 Februari 2025 Telah disetujui usulan revisi relaksasi blokir untuk kegiatan penyelenggaraan layanan subsidi KA perintis melalui surat Direktur Jenderal Anggaran No.S-302/AG/AG.3/2025 tanggal 24 Maret 2025 sebesar Rp. 96,186 milyar untuk penyelenggaraan beberapa lintas antara lain lintas Purwosari-Wonogiri, Muara Satu-Kuta Blang, Lubuk Alung-Kayu Tanam, LRT Sumatera Selatan dan Makassar-Pare-Pare
Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	- Pengoptimalan pemanfaatan akses jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Priok. - Pelaksanaan konsultasi publik penyelenggaraan angkutan logistik terintegrasi dengan moda kereta api pada Tahun 2025 guna mendukung peningkatan <i>modal share</i> angkutan barang. - Pemanfaatan market bersama untuk meningkatkan angkutan barang ekspor Gedebage menuju Tanjung Priok termasuk perlunya intervensi biaya dari masing-masing stakeholder agar tarif angkutan barang kereta api lebih kompetitif. - Penyiapan regulasi dan koordinasi dengan operator perkeretaapian untuk implementasi angkutan barang kereta api dengan skema ROLA (<i>rolling highway</i>).	- Pengoptimalan pemanfaatan akses jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Priok telah dilaksanakan uji coba angkutan peti kemas dari Gede Bage ke Tanjung Priok pada tanggal 28 September 2024 dengan hasil : - Ruang bebas di terowongan Sasaksaat aman untuk dilewati peti kemas 40 <i>feet high cube (HC)</i> menggunakan gerbong datar - Stamformasi 1 unit lokomotif dengan 5 gerbong datar (berisi 3 peti kemas 40 <i>feet HC</i> dan 1 peti kemas 20 <i>feet</i>) - Waktu perjalanan dari Stasiun Gedebage ke stasiun Pasoso adalah 5 jam 5 menit - Konsultasi publik merupakan bagian dari studi analisis penyelenggaraan angkutan logistik terintegrasi dengan moda KA yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 dan diusulkan kembali pada alokasi anggaran tahun 2026 - Telah dilaksanakan penetapan <i>single tarif</i> angkutan peti kemas TPK Gedebage-Stasiun Pasoso-CY NPCT1 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		- o <i>Single tariff</i> untuk kontainer 20 feet sebesar Rp.4.800.000,- - o <i>Single tariff</i> untuk kontainer 40 feet sebesar Rp.5.400.000,- Terkait pemanfaatan market bersama, telah terdapat utilisasi layanan angkutan barang komoditas ekspor oleh PT. Bintang laut Platinum sebagai berikut: - o Stasiun Semarang Tawang Cargo-Stasiun Surabaya Benteng-Pelabuhan Tanjung Perak; - o Stasiun Semarang Tawang Cargo-Stasiun Kampung Bandan Jakarta Gudang-Pelabuhan Tanjung Priok - o Stasiun Surabaya Benteng-Stasiun Kamung bandan Jakarta Gudang-Pelabuhan Tj, Priok. Terkait penyusunan kajian peningkatan utilisasi jalur KA pelayanan angkatan barang yang terhubung dengan pusat logistik telah selesai dilaksanakan pada tahun 2024.
Persentase Pengoperasian Jalur KA Yang Sesuai Dengan TQI	▪ Pembahasan lanjutan terkait penyusunan standar TQI termasuk apabila dibutuhkan pelaksanaan FGD dengan operator perkeretaapian untuk percepatan penyelesaian standar TQI. ▪ Koordinasi dan evaluasi hasil pengukuran TQI periode IV Tahun 2024 termasuk pembahasan hasil pengukuran Track Geometry Trolley di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan serta pembahasan jadwal pengukuran TQI Tahun 2025. ▪ Melakukan percepatan proses revisi anggaran luncturan SBSN Tahun 2024 ke Tahun 2025 (termasuk kegiatan pendukung peningkatan TQI) dengan dilengkapi data dukung sesuai PMK 107 Tahun 2024.	▪ Pembahasan lanjutan terkait Standar Pedoman TQI akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025 ▪ telah dilakukan monitoring dan evaluasi laporan antara antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian, PT. Kereta Api Indonesia (persero) dan Balai dilingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terhadap hasil pengukuran periode 4 tahun 2024 pada tanggal 4 s,d 7 Januari 2025 ▪ Telah diusulkan revisi anggaran luncturan SBSN Tahun 2024 ke Tahun 2025 kepada Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan melalui Surat Sekretaris Jenderal Kemenhub No. KU.002/2/22/SKJ/2025 tanggal 27 Maret 2025 dan telah disahkan melalui surat Direktur Jenderal

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Anggaran no. S-352/AG/AG.3/2025 tanggal 15 April 2025
IKP7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	- Tindak lanjut dan monitoring pengaduan/masukan/saran dari masyarakat/pengguna layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk analisa berkala terhadap hasil survey untuk perbaikan kualitas pelayanan pada periode berikutnya di masing-masing unit kerja. - Optimalisasi pemanfaatan sistem TIK/digitalisasi berupa integrasi data, persetujuan terpusat dan pemantauan melalui <i>dashboard</i> terpadu terhadap pemberian layanan bidang perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian, lainnya). - Pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM dalam pemberian layanan kepada masyarakat guna mendukung peningkatan nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	- Masing-masing Direktorat dan Balai (BPKAR Sumsel, Balai Pengujian dan BPKA Sulsel) sebagai unit kerja yang melaksanakan pelayanan telah menyertakan IKM sebagai indikator kinerja sehingga setiap triwulan telah dilaksanakan evaluasi pada IKM itu. - Proses pengujian, perijinan, sertifikasi perkeretaapian telah terintegrasi melalui aplikasi Portal Layanan Ditjen Perkeretaapian. - Telah dilaksanakan pelatihan kompetensi SDM Pelayanan pada BPKAR Sumatera Selatan secara berkala, yaitu pada 23 Januari 2025, 3 Februari 2025 dan 6 Maret 2025.

Selain itu juga dilaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendorong perbaikan budaya kinerja organisasi diantaranya:

1. Penggunaan absensi *fingerprint* di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Penggunaan aplikasi *survey 3AS Case Survey Management System* untuk survei IKM Balai Pengujian Perkeretaapian;
3. Pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi peningkatan keselamatan yang disampaikan kepada *stakeholder* terkait;
4. Penggunaan aplikasi e-Kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyusunan SKP dan pelaporan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps* yang terintegrasi untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

6. Penggunaan fitur pada Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk proses pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Penggunaan *Dashboard* Manajemen Risiko untuk penerapan manajemen risiko mencakup penetapan konteks, penilaian risiko dan pemantauan rencana tindak pengendalian di internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
8. Penggunaan *google form* yang disematkan pada Portal Layanan dan Data Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pelaksanaan survei kepuasan layanan perkantoran.

3.2 KESIMPULAN

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Monitoring Kinerja tersebut menggambarkan pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Rata-rata capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 sebesar 102,329% yang secara ringkas disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 3-2 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	100,000
2	SP2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100,00	99,617	99,617
3	SP3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IK3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik	Nilai	3,740	3,810	101,872

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Bidang Perkeretaapian				
		IK4 Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100	97,415%	101,368
		IK5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	4,465	4,515	101,120
4	SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	19,035	27,948	110,000
Rata-rata Capaian Kinerja						102,329

3.3 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan I 2025, diperlukan upaya peningkatan kinerja guna memastikan target dapat terpenuhi pada periode berikutnya. Untuk itu, berikut disampaikan beberapa rekomendasi untuk masing-masing Indikator Kinerja Program:

1. IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah:

- Lanjutan koordinasi (asistensi DED) BTP Medan dengan Direktorat Prasarana terkait dengan Pengoperasian KA Nurmala lintas Rantau Prapat Baru-Pondok S5.
- Akan dilakukan DPPT Ulang dan Pengusulan kembali Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Antara Rantau Prapat - Kota Pinang.
- Exercise* terhadap target Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian periode Rencana Strategis menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- Lanjutan pembangunan kegiatan pendukung Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian.
- Pengusulan kegiatan studi Reviu Rencana Induk Perkeretaapian Nasional pada tahun anggaran 2026.

- f. Monitoring penyelesaian *readiness criteria* kegiatan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban oleh PT. KAI untuk memenuhi peraturan yang berlaku.

2. IKP2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA:

- a. Lanjutan peningkatan sistem persinyalan untuk wilayah Jabodetabek, lintas Cirebon-Kroya segmen Prupuk-Purwokerto, lintas Cirebon-Semarang segmen Tegal-Pekalongan dan Segmen Kertosono - Talun Lintas Kertosono – Ketapang.
- b. Lanjutan peningkatan jalur KA segmen Jember-Kalisat lintas Surabaya-Banyuwangi.
- c. Lanjutan penyelesaian audit SMKP terhadap badan usaha perkeretaapian.
- d. Percepatan pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api (IMO).

3. IKP5 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian

- a. Lanjutan pengembangan modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian.
- b. Pengusulan kegiatan pengembangan modul layanan sertifikasi penyelenggaraan perkeretaapian pada tahun anggaran 2026.
- c. Direncanakan penambahan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan yang dilaksanakan oleh Balai Perawatan.
- d. Menjaga kualitas pelayanan dan proses bisnis sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan pendampingan kepada responden pada saat pengisian kuesioner survei kepuasan masyarakat.
- f. Menyusun laporan setiap triwulan yang dilaporkan kepada PPTB untuk mempermudah koordinasi pengelolaan survei kepuasan masyarakat.
- g. Akan dilakukan Launching Modul Layanan Perizinan Perpotongan dan/atau persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain serta Modul Layanan Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian.

- h. Penyelesaian permohonan perizinan dan sertifikasi yang telah disampaikan kepada Ditjen Perkeretaapian.

4. IKP3 Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api:

- a. Monitoring perjalanan kereta api agar sesuai dengan yang telah diprogramkan pada GAPEKA dan perjalanan di luar GAPEKA.
- b. Melakukan evaluasi berkala (triwulan) terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai dengan GAPEKA yang berlaku sehingga perjalanan KA sesuai jadwal dan keterlambatan KA dapat diminimalisir terutama andil keterlambatan dari operasional/persilangan/penambahan/pelepasan sarana/lainnya.
- c. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian untuk melakukan aksi pencegahan/mitigasi terhadap potensi terjadinya keterlambatan perjalanan kereta api seperti melakukan pemantauan operasional kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan dimana terdapat taspas yang mempengaruhi ketepatan waktu perjalanan kereta api.
- d. Lanjutan kegiatan peningkatan jalur dan jembatan kereta api segmen Jember – Kalisat, segmen Semarang-Gambringan (penggantian 2 jembatan BH 46 dan BH 59), dan segmen Cirebon-Kroya (penggantian 2 jembatan BH 1109 dan BH 1164) untuk meningkatkan kehandalan dan kecepatan operasional kereta api termasuk menghindari gangguan perjalanan kereta api.
- e. Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai dan Solo-Semarang) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu.
- f. Lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian untuk mendukung pengoperasian KA Makassar-Pare-Pare antara Mandai-Palanro.
- g. Lanjutan peningkatan Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Rangkasbitung guna mendukung pelayanan operasional KA.
- h. Lanjutan pembangunan dan peningkatan sistem persinyalan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek, Prupuk-Purwokerto dan Tegal-Pekalongan guna mendukung efisiensi operasional kereta api.

5. IKP4 Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api:

- a. Pelaksanaan angkutan perintis lintas Purwosari-Wonogiri, Muara Stau-Kuta Blang, Lubuk Alung-Kayu Tanam, LRT Sumatera Selatan dan Makassar-Pare-Pare;
- b. Rencana penambahan sarana KRL baru pada tahun 2025 antara lain 11 *trainset* impor dari China, 12 *trainset* baru produksi PT INKA, dan 2 *trainset* hasil retrofit oleh PT INKA.
- c. Lanjutan kegiatan peningkatan stasiun kereta api termasuk program beautifikasi dalam upaya peningkatan layanan angkutan penumpang (Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Klaten).

6. Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

- a. Melakukan finalisasi dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 termasuk sinkronisasi/penyesuaian kebijakan/strategi dengan RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan serta penyesuaian rencana kegiatan dampak kebijakan efisiensi belanja anggaran Tahun 2025.
- b. Melakukan publikasi berkala dokumen kinerja pada aplikasi kinerja (e-SAKIP Reviu, e-Performance, SILAKI) dan eksternal (website Ditjen Perkeretaapian).
- c. Meningkatkan ketepatan revisi DIPA dan akurasi Halaman III DIPA dengan penerapan standar biaya keluaran (SBK).
- d. Meningkatkan kualitas pelaporan realisasi output pada SAKTI secara berkala.
- e. Mempercepat proses pensertifikatan aset tanah melalui sinergi dengan ATR/BPN dan aparat pemerintah daerah.
- f. Melanjutkan proses persetujuan pemanfaatan BMN yang potensial menjadi sumber PNBK.
- g. Melakukan sinkronisasi dan updating data kinerja serta kompetensi ASN secara berkala melalui e-Kinerja dan SIK.
- h. Mendorong seluruh ASN untuk mengikuti pelatihan/diklat/fungsional dan mengunggah sertifikat sebagai bukti kompetensi.

Selanjutnya dengan disusunnya Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

LAMPIRAN

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN I 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



ditjenperkeretaapian



@ditjenperkeretaapian

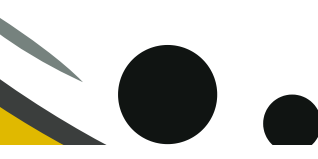


djka.kemenhub.go.id



LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Risal Wasal
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dudy Purwagandhi
Jabatan : Menteri Perhubungan
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Perhubungan

DUDY PURWAGANDHI

Jakarta, Januari 2025
Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Perkeretaapian

MOHAMAD RISAL WASAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

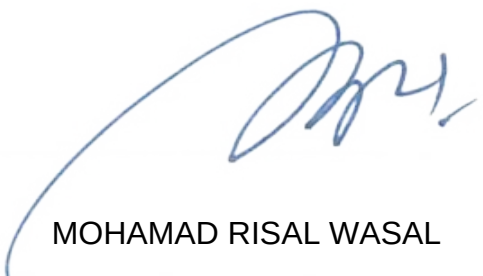
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460
SP2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP2	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100,000
SP3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740
		IKP4	Persentase <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100
		IKP5	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,000
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000

Kegiatan		Anggaran
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp	813.226.191.000
2. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	895.248.757.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.670.022.802.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	Rp	46.162.939.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp	22.069.026.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp	637.851.276.000
7. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp	17.498.737.000
8. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp	14.149.348.000
9. Legislasi dan Litigasi Transportasi	Rp	3.066.058.000

Disetujui
Menteri Perhubungan

DUDY PURWAGANDHI

Jakarta, Januari 2025
Direktur Jenderal Perkeretaapian

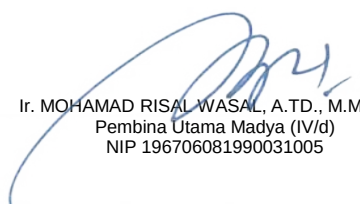


MOHAMAD RISAL WASAL

RENCANA AKSI PADA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SP1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	813.226.191.000	Setditjen Perkeretaapian, Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
SP2 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.716.185.741.000	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, BTP, BPKA
SP3 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IK3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	%	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	895.248.757.000	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
	IK4 Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	%	0,961		96,100%	96,100%	96,100%	96,100%	96,100%	96,100%	96,100%	96,100%	96,100%	96,100%	96,100%	96,100%		
	IK5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,000		1,540	2,955	4,465	5,995	7,575	9,125	11,580	13,170	14,785	16,340	17,905	19,000		
SP4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK7 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	100,000	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNPB dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM	5,060	6,325	19,035	19,368	19,578	20,555	34,630	35,505	40,000	40,960	42,820	100,000	694.634.445.000	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Jakarta, Januari 2025
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196706081990031005



LAMPIRAN II

REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA



**KOMITMEN REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA
BERDASARKAN LAPORAN MONITORING KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TRIWULAN I TAHUN 2025**

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
A	SASARAN : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian INDIKATOR KINERJA: Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian		
1	Lanjutan koordinasi (asistensi DED) BTP Medan dengan Direktorat Prasarana terkait dengan Pengoperasian KA Nurmala lintas Rantau Prapat Baru-Pondok S5.	Triwulan II Tahun 2025	• Direktorat Prasarana • Balai terkait
2	Akan dilakukan DPPT Ulang dan Pengusulan kembali Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Antara Rantau Prapat - Kota Pinang.	Triwulan II Tahun 2025	• Direktorat Prasarana • Balai terkait
3	<i>Exercise</i> terhadap target Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian periode Rencana Strategis menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.	Triwulan II Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Seluruh Direktorat di lingkungan Ditjen Perkeretaapian • Seluruh Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
4	Lanjutan pembangunan kegiatan pendukung Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian.	Triwulan II-IV Tahun 2025	• Direktorat Prasarana • Balai terkait
5	Pengusulan kegiatan studi Reviu Rencana Induk Perkeretaapian Nasional pada tahun anggaran 2026.	Triwulan II-III Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian
6	Monitoring penyelesaian <i>readiness criteria</i> kegiatan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban oleh PT. KAI untuk memenuhi peraturan yang berlaku.	Triwulan II-IV Tahun 2025	• Direktorat Prasarana • Balai terkait
B.	SASARAN : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian INDIKATOR KINERJA: Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA		
1	Lanjutan peningkatan sistem persinyalan untuk wilayah Jabodetabek, lintas Cirebon-Kroya segmen Prupuk-Purwokerto, lintas Cirebon-Semarang segmen Tegal-Pekalongan dan Segmen Kertosono - Talun Lintas Kertosono – Ketapang.	Triwulan II-IV Tahun 2025	• Direktorat Prasarana • Balai terkait

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
2	Lanjutan peningkatan jalur KA segmen Jember-Kalisat lintas Surabaya-Banyuwangi.	Triwulan II-IV Tahun 2025	- Direktorat Prasarana - Balai terkait
3	Lanjutan penyelesaian audit SMKP terhadap badan usaha perkeretaapian.	Triwulan II-IV Tahun 2025	Direktorat Keselamatan
4	Percepatan pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api (IMO).	Triwulan II-IV Tahun 2025	- Direktorat Prasarana - Balai terkait
C	SASARAN : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian INDIKATOR KINERJA: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian		
1	Lanjutan pengembangan modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian.	Triwulan II-IV Tahun 2025	- Setditjen Perkeretaapian - Direktorat terkait
2	Pengusulan kegiatan pengembangan modul layanan sertifikasi penyelenggaraan perkeretaapian pada tahun anggaran 2026.	Triwulan II-IV Tahun 2025	Setditjen Perkeretaapian
3	Direncanakan penambahan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan yang dilaksanakan oleh Balai Perawatan.	Triwulan II-IV Tahun 2025	- Setditjen Perkeretaapian - Balai terkait
4	Menjaga kualitas pelayanan dan proses bisnis sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan.	Triwulan II-IV Tahun 2025	- Direktorat di lingkungan Ditjen Perkeretaapian - Balai terkait
5	Melakukan pendampingan kepada responden pada saat pengisian kuesioner survei kepuasan masyarakat.	Triwulan II-IV Tahun 2025	- Direktorat di lingkungan Ditjen Perkeretaapian - Balai terkait
6	Menyusun laporan setiap triwulan yang dilaporkan kepada PPTB untuk mempermudah koordinasi pengelolaan survei kepuasan masyarakat.	Triwulan II-IV Tahun 2025	- Direktorat di lingkungan Ditjen Perkeretaapian - Balai terkait
7	Akan dilakukan <i>Launching</i> Modul Layanan Perizinan Perpotongan dan/atau persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain serta Modul Layanan Sertifikasi Prasarana Perkeretaapian.	Triwulan II-IV Tahun 2025	- Setditjen Perkeretaapian - Direktorat Prasarana

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
8	Penyelesaian permohonan perizinan dan sertifikasi yang telah disampaikan kepada Ditjen Perkeretaapian.	Triwulan II-IV Tahun 2025	Direktorat di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
D.	SASARAN : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian INDIKATOR KINERJA: Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Kereta Api		
1	Monitoring perjalanan kereta api agar sesuai dengan yang telah diprogramkan pada GAPEKA dan perjalanan di luar GAPEKA.	Triwulan II-IV Tahun 2025	- Direktorat LLAKA - Balai terkait
2	Melakukan evaluasi berkala (triwulan) terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai dengan GAPEKA yang berlaku sehingga perjalanan KA sesuai jadwal dan keterlambatan KA dapat diminimalisir terutama andil keterlambatan dari operasional/ persilangan/ penambahan/ pelepasan sarana/ lainnya.	Triwulan II-IV Tahun 2025	- Direktorat LLAKA - Balai terkait
3	Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian untuk melakukan aksi pencegahan/mitigasi terhadap potensi terjadinya keterlambatan perjalanan kereta api seperti melakukan pemantauan operasional kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsor/amblesan dimana terdapat taspas yang mempengaruhi ketepatan waktu perjalanan kereta api.	Triwulan II-IV Tahun 2025	- Direktorat LLAKA - Direktorat Keselamatan - Balai terkait
4	Lanjutan kegiatan peningkatan jalur dan jembatan kereta api segmen Jember – Kalisat, segmen Semarang-Gambringan (penggantian 2 jembatan BH 46 dan BH 59), dan segmen Cirebon-Kroya (penggantian 2 jembatan BH 1109 dan BH 1164) untuk meningkatkan kehandalan dan kecepatan operasional kereta api termasuk menghindari gangguan perjalanan kereta api.	Triwulan II-IV Tahun 2025	- Direktorat Prasarana - Balai terkait
5	Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai dan Solo-Semarang) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu.	Triwulan II-IV Tahun 2025	- Direktorat Prasarana - Balai terkait
6	Lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian untuk mendukung pengoperasian KA Makassar-Pare-Pare antara Mandai-Palanro.	Triwulan II-IV Tahun 2025	- Direktorat Prasarana - Balai terkait
7	Lanjutan peningkatan Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Rangkasbitung guna mendukung pelayanan operasional KA.	Triwulan II-IV Tahun 2025	- Direktorat Prasarana - Balai terkait
8	Lanjutan pembangunan dan peningkatan sistem persinyalan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek, Prupuk-Purwokerto dan Tegal-Pekalongan guna mendukung efisiensi operasional kereta api.	Triwulan II-IV Tahun 2025	- Direktorat Prasarana - Balai terkait

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
E.	SASARAN : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian INDIKATOR KINERJA: Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api		
1	Pelaksanaan angkutan perintis lintas Purwosari-Wonogiri, Muara Stau-Kuta Blang, Lubuk Alung-Kayu Tanam, LRT Sumatera Selatan dan Makassar-Pare-Pare.	Triwulan II-IV Tahun 2025	• Direktorat LLAKA • Balai terkait
2	Rencana penambahan sarana KRL baru pada tahun 2025 antara lain 11 <i>trainset impor</i> dari China, 12 <i>trainset</i> baru produksi PT INKA, dan 2 <i>trainset</i> hasil <i>retrofit</i> oleh PT INKA.	Triwulan II-IV Tahun 2025	• Direktorat Sarana • Balai terkait
3	Lanjutan kegiatan peningkatan stasiun kereta api termasuk program beautifikasi dalam upaya peningkatan layanan angkutan penumpang (Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Klaten).	Triwulan II-IV Tahun 2025	• Direktorat Prasarana • Balai terkait
F.	SASARAN : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian INDIKATOR KINERJA: Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian		
1	Melakukan finalisasi dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 termasuk sinkronisasi/penyesuaian kebijakan/strategi dengan RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan serta penyesuaian rencana kegiatan dampak kebijakan efisiensi belanja anggaran Tahun 2025.	Triwulan II-III Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Direktorat terkait • Balai terkait
2	Melakukan publikasi berkala dokumen kinerja pada aplikasi kinerja (e-SAKIP Reviu, e- <i>Performance</i> , SILAKI) dan eksternal (website Ditjen Perkeretaapian).	Triwulan II-III Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
3	Meningkatkan ketepatan revisi DIPA dan akurasi Halaman III DIPA dengan penerapan standar biaya keluaran (SBK).	Triwulan II-III Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
4	Meningkatkan kualitas pelaporan realisasi output pada SAKTI secara berkala.	Triwulan II-III Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
5	Mempercepat proses pensertifikatan aset tanah melalui sinergi dengan ATR/BPN dan aparat pemerintah daerah.	Triwulan II-III Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Balai terkait
6	Melanjutkan proses persetujuan pemanfaatan BMN yang potensial menjadi sumber PNBK.	Triwulan II-III Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian • Balai terkait
7	Melakukan sinkronisasi dan <i>updating</i> data kinerja serta kompetensi ASN secara berkala melalui e-Kinerja dan SIK.	Triwulan II-III Tahun 2025	• Setditjen Perkeretaapian

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
			Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
8	Mendorong seluruh ASN untuk mengikuti pelatihan/diklat/fungsional dan mengunggah sertifikat sebagai bukti kompetensi.	Triwulan II-III Tahun 2025	- Setditjen Perkeretaapian - Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Jakarta, April 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,



Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPU
NIP 196706081990031005



LAMPIRAN III

REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I
TAHUN 2025





REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

Bulan : 01 s.d. 03

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	22,099,026,000 790,937,869 (3.58%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	22,099,026,000 790,937,869 (3.58%)
		SISA	0	21,308,088,131	0	0	0	0	0	0	0	21,308,088,131
2	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	203,855,152,000 61,706,104,472 (30.27%)	408,088,567,000 37,219,960,749 (9.12%)	25,877,557,000 15,873,000 (0.06%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	637,821,276,000 98,941,938,221 (15.51%)
		SISA	142,149,047,528	370,868,606,251	25,861,684,000	0	0	0	0	0	0	538,879,337,779
3	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	14,853,308,000 1,048,667,000 (7.06%)	2,645,429,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	17,498,737,000 1,048,667,000 (5.99%)
		SISA	0	13,804,641,000	2,645,429,000	0	0	0	0	0	0	16,450,070,000
4	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	14,149,348,000 106,114,720 (0.75%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	14,149,348,000 106,114,720 (0.75%)
		SISA	0	14,043,233,280	0	0	0	0	0	0	0	14,043,233,280
5	4604 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	3,066,058,000 76,510,500 (2.50%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	3,066,058,000 76,510,500 (2.50%)
		SISA	0	2,989,547,500	0	0	0	0	0	0	0	2,989,547,500
6	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	344,187,519,000 8,646,400,000 (2.51%)	560,223,922,000 3,182,491,950 (0.57%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	904,411,441,000 11,828,891,950 (1.31%)
		SISA	0	335,541,119,000	557,041,430,050	0	0	0	0	0	0	892,582,549,050
7	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	2,466,905,382,000 24,383,537,896 (0.99%)	230,254,719,000 5,172,185,724 (2.25%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,697,160,101,000 29,555,723,620 (1.10%)
		SISA	0	2,442,521,844,104	225,082,533,276	0	0	0	0	0	0	2,667,604,377,380



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

8	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	299,011,410,000 1,456,860,000 (0.49%)	514,114,781,000 1,416,563,028 (0.28%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	813,126,191,000 2,873,423,028 (0.35%)
		SISA	0	297,554,550,000	512,698,217,972	0	0	0	0	0	0	810,252,767,972
9	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	41,391,529,000 2,039,264,911 (4.93%)	4,771,410,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	46,162,939,000 2,039,264,911 (4.42%)
		SISA	0	39,352,264,089	4,771,410,000	0	0	0	0	0	0	44,123,674,089
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	203,855,152,000 61,706,104,472 (30.27%)	3,613,752,147,000 75,768,253,645 (2.10%)	1,337,887,818,000 9,787,113,702 (0.73%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	5,155,495,117,000 147,261,471,819 (2.86%)
		SISA	142,149,047,528	3,537,983,893,355	1,328,100,704,298	0	0	0	0	0	0	5,008,233,645,181



REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

Bulan : 01 s.d. 03

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU REALISASI	203,855,152,000 61,706,104,472 (30.27%)	3,546,684,003,000 71,727,072,456 (2.02%)	767,946,448,000 1,432,436,028 (0.19%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	4,518,485,603,000 134,865,612,956 (2.98%)
		SISA	142,149,047,528	3,474,956,930,544	766,514,011,972	0	0	0	0	0	0	4,383,619,990,044
2	(B) PINJAMAN LUAR NEGERI	PAGU REALISASI	0 0.00%	0 0.00%	148,519,217,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	148,519,217,000 (0.00%)
		SISA	0	0	148,519,217,000	0	0	0	0	0	0	148,519,217,000
3	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU REALISASI	0 0.00%	11,724,035,000 (0.00%)	850,000,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	12,574,035,000 (0.00%)
		SISA	0	11,724,035,000	850,000,000	0	0	0	0	0	0	12,574,035,000
4	(F) BADAN LAYANAN UMUM	PAGU REALISASI	0 0.00%	55,344,109,000 4,041,181,189 (7.30%)	22,525,856,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	77,869,965,000 4,041,181,189 (5.19%)
		SISA	0	51,302,927,811	22,525,856,000	0	0	0	0	0	0	73,828,783,811
5	(I) HIBAH LUAR NEGERI	PAGU REALISASI	0 0.00%	0 0.00%	5,237,190,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	5,237,190,000 (0.00%)
		SISA	0	0	5,237,190,000	0	0	0	0	0	0	5,237,190,000
6	(T) SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	PAGU REALISASI	0 0.00%	0 0.00%	392,809,107,000 8,354,677,674 (2.13%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	392,809,107,000 8,354,677,674 (2.13%)
		SISA	0	0	384,454,429,326	0	0	0	0	0	0	384,454,429,326
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	203,855,152,000 61,706,104,472 (30.27%)	3,613,752,147,000 75,768,253,645 (2.10%)	1,337,887,818,000 9,787,113,702 (0.73%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	5,155,495,117,000 147,261,471,819 (2.86%)
		SISA	142,149,047,528	3,537,983,893,355	1,328,100,704,298	0	0	0	0	0	0	5,008,233,645,181



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 03

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	445572 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	0 0.00%	48,171,430,000 1,835,757,908 (3.81%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	48,171,430,000 1,835,757,908 (3.81%)
		SISA	0	46,335,672,092	0	0	0	0	0	0	0	46,335,672,092
2	467005 BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	PAGU REALISASI	4,933,182,000 2,288,968,464 (46.40%)	338,686,670,000 19,262,633,252 (5.69%)	21,057,708,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	364,677,560,000 21,551,601,716 (5.91%)
		SISA	2,644,213,536	319,424,036,748	21,057,708,000	0	0	0	0	0	0	343,125,958,284
3	467006 BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	PAGU REALISASI	15,573,003,000 3,662,087,375 (23.52%)	377,785,088,000 7,543,661,050 (2.00%)	22,148,597,000 29,531,250 (0.13%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	415,506,688,000 11,235,279,675 (2.70%)
		SISA	11,910,915,625	370,241,426,950	22,119,065,750	0	0	0	0	0	0	404,271,408,325
4	467309 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	PAGU REALISASI	10,730,405,000 3,586,770,757 (33.43%)	406,233,254,000 5,583,705,597 (1.37%)	131,445,403,000 1,387,031,778 (1.06%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	548,409,062,000 10,557,508,132 (1.93%)
		SISA	7,143,634,243	400,649,548,403	130,058,371,222	0	0	0	0	0	0	537,851,553,868
5	467321 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	PAGU REALISASI	14,786,434,000 4,960,155,902 (33.55%)	704,237,968,000 2,395,352,650 (0.34%)	439,562,902,000 5,172,185,724 (1.18%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,158,587,304,000 12,527,694,276 (1.08%)
		SISA	9,826,278,098	701,842,615,350	434,390,716,276	0	0	0	0	0	0	1,146,059,609,724
6	467337 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	PAGU REALISASI	11,933,665,000 3,445,664,480 (28.87%)	195,376,810,000 3,830,245,125 (1.96%)	42,136,466,000 3,182,491,950 (7.55%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	249,446,941,000 10,458,401,555 (4.19%)
		SISA	8,488,000,520	191,546,564,875	38,953,974,050	0	0	0	0	0	0	238,988,539,445
7	467345 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	PAGU REALISASI	17,028,649,000 3,638,957,269 (21.37%)	145,459,553,000 2,623,893,116 (1.80%)	128,335,611,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	290,823,813,000 6,262,850,385 (2.15%)
		SISA	13,389,691,731	142,835,659,884	128,335,611,000	0	0	0	0	0	0	284,560,962,615

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

8	467352 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	PAGU REALISASI	8,196,883,000 2,258,185,649 (27.55%)	98,013,017,000 2,257,858,289 (2.30%)	2,647,000,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	108,856,900,000 4,516,043,938 (4.15%)
		SISA	5,938,697,351	95,755,158,711	2,647,000,000	0	0	0	0	0	0	104,340,856,062
9	467364 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	PAGU REALISASI	11,342,346,000 3,228,249,821 (28.46%)	255,576,774,000 1,704,462,140 (0.67%)	29,154,208,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	296,073,328,000 4,932,711,961 (1.67%)
		SISA	8,114,096,179	253,872,311,860	29,154,208,000	0	0	0	0	0	0	291,140,616,039
10	467373 BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	12,677,701,000 3,644,087,138 (28.74%)	62,544,991,000 1,523,776,092 (2.44%)	1,998,085,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	77,220,777,000 5,167,863,230 (6.69%)
		SISA	9,033,613,862	61,021,214,908	1,998,085,000	0	0	0	0	0	0	72,052,913,770
11	467385 BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	17,163,087,000 3,409,951,921 (19.87%)	76,724,610,000 5,708,922,486 (7.44%)	20,663,356,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	114,551,053,000 9,118,874,407 (7.96%)
		SISA	13,753,135,079	71,015,687,514	20,663,356,000	0	0	0	0	0	0	105,432,178,593
12	467462 PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	PAGU REALISASI	0 0.00%	142,786,186,000 6,468,550,292 (4.53%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	142,786,186,000 6,468,550,292 (4.53%)
		SISA	0	136,317,635,708	0	0	0	0	0	0	0	136,317,635,708
13	467478 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	0 0.00%	61,110,370,000 1,471,321,042 (2.41%)	243,000,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	61,353,370,000 1,471,321,042 (2.40%)
		SISA	0	59,639,048,958	243,000,000	0	0	0	0	0	0	59,882,048,958
14	467484 PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	0 0.00%	44,086,820,000 4,527,701,632 (10.27%)	464,442,816,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	508,529,636,000 4,527,701,632 (0.89%)
		SISA	0	39,559,118,368	464,442,816,000	0	0	0	0	0	0	504,001,934,368
15	467504 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	69,754,600,000 23,231,823,088 (33.31%)	110,547,069,000 6,986,945,077 (6.32%)	13,119,553,000 15,873,000 (0.12%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	193,421,222,000 30,234,641,165 (15.63%)
		SISA	46,522,776,912	103,560,123,923	13,103,680,000	0	0	0	0	0	0	163,186,580,835



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

16	467515 BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	PAGU REALISASI	9,735,197,000 4,351,202,608 (44.70%)	546,411,537,000 2,043,467,897 (0.37%)	20,933,113,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	577,079,847,000 6,394,670,505 (1.11%)
		SISA	5,383,994,392	544,368,069,103	20,933,113,000	0	0	0	0	0	0	570,685,176,495
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	203,855,152,000 61,706,104,472 (30.27%)	3,613,752,147,000 75,768,253,645 (2.10%)	1,337,887,818,000 9,787,113,702 (0.73%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	5,155,495,117,000 147,261,471,819 (2.86%)
		SISA	142,149,047,528	3,537,983,893,355	1,328,100,704,298	0	0	0	0	0	0	5,008,233,645,181



LAMPIRAN IV

MONITORING RENAKSI
PERIODE JANUARI - MARET 2025





MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Januari, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 1			Realisasi Bulan 1		Realisasi Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab			
							Target Output		%	Target Anggaran		%	Realisasi Output				%	Capaian Output/Capaian Anggaran	
							Volume	%		Volume	%		Volume						%
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	-	-	0.46	-	67.768.849.250	1.28	0.46	532.860.000	100%	0.79%	Pencapaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah pada Januari 2025 belum ada penambahan. Pada tahun 2024 terdapat penambahan konektivitas PKW Lhokseumawe (Kecamatan Muara Satu) dengan kegiatan pendukung berupa pembangunan jalur kereta api lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu sepanjang 8 Km/sp yang telah selesai 100% telah dilaksanakan rangkaian proses pengujian kelaikan prasarana perkeretaapian. Pada Tahun 2024 juga terdapat beberapa kegiatan pendukung peningkatan konektivitas perkeretaapian lainnya antara lain: a. Kegiatan koordinasi untuk mendukung konektivitas PKW Sawahlunto melalui penyelesaian reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban. Posisi saat ini masih dalam proses melengkapi data dukung pengujian dimana terdapat kekurangan data dukung pengujian prasarana Perkeretaapian sehingga proses pengujian belum dapat dilanjutkan. Beberapa data dukung yang sudah diserahkan sesuai PM 30 tahun 2011 belum memenuhi ketentuan sehingga belum mendapatkan persetujuan dari Direktorat Teknis diantaranya dokumen Gambar teknis (as built drawing) dan Shop Drawing. Selain itu terdapat 2 dokumen yang menjadi persyaratan pengujian Prasarana yang belum diserahkan yaitu Detail Engineering Design dan Spesifikasi Teknis. Hal lain yang telah dilaksanakan adalah pembahasan bersama BTP Padang, Balai Pengujian Perkeretaapian, PT. KAI dan Pemerintah Daerah Sawahlunto terkait percepatan penyelesaian reaktivasi jalur KA antara Sawahlunto – Muarokalaban. Selain itu, BTP Padang juga telah melakukan self assesment pada jalur kereta tersebut dengan hasil masih banyak temuan yang tidak sesuai dengan standar teknis. b. Pekerjaan utilitas dan penyempurnaan lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung untuk mendukung konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung dengan progres mencapai 98,50% dimana masih terdapat bidang lahan yang masih berproses pengadaan/pembayaran untuk frontage road (progress pengadaan tanah sebesar 90% atau 479 yang telah terbayarkan dari total keseluruhan bidang sebanyak 532 bidang). Dengan kendala tersebut, perlu dilakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kelanjutan pekerjaan utilitas tersebut pada Tahun 2025. c. Kegiatan pendukung konektivitas jalur KA Makassar – Parepare diantaranya peningkatan akses dan fasilitas pendukung di beberapa stasiun (Stasiun Mandai, Stasiun Labakkang, Stasiun Ma'rang, Stasiun Tanete Rilau) belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2024 (masih dalam proses tender) dan rencana diluncurkan anggaran dan kegiatannya pada Tahun 2025. d. Kegiatan lanjutan pembangunan jalur KA Rantauprapat – Pondok S5 – Kotapinang, dimana saat ini masih dalam tahap persiapan pengoperasian KA perintis segmen Rantauprapat – Pondok S5 (tindak lanjut pengujian, safety assesment). Sedangkan untuk segmen lanjutan Pondok S5 – Kota Pinang masih dalam tahap penyelesaian pengadaan lahan melalui anggaran LMAN (progress 93,30%). e. Dukungan konektivitas di wilayah IKN, diantaranya pelaksanaan Proof Of Concept (PoC) pada Agustus s.d Oktober 2024 dan dilakukan evaluasi terkait kelayakan sebagai sarana transportasi di IKN. Pada Tahun 2024 juga sedang disusun regulasi teknis terkait Trem Otonom untuk mendukung peningkatan konektivitas.	a. Koordinasi terkait kelanjutan program/kegiatan pendukung konektivitas yang tidak dapat selesai Tahun 2024 (peningkatan akses stasiun KA Makassar – Parepare, pekerjaan utilitas dan penyempurnaan Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, kelanjutan pengadaan lahan segmen Pondok S5-Kotapinang). b. Monitoring penyelesaian readiness criteria kegiatan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban oleh PT. KAI untuk memenuhi peraturan yang berlaku. c. Evaluasi dan identifikasi secara komprehensif terkait potensi konektivitas jaringan jalur dan layanan kereta api yang terhubung dengan kawasan industri, kawasan pariwisata dan simpul transportasi darat (terminal tipe A).	Direktorat Prasarana Perkeretaapian		
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	100	1200	100	8.33	226.348.811.750	1.28	100	2.253.799.594	100%	1%	a. Pengawasan keselamatan perkeretaapian secara periodik diantaranya: 1) Identifikasi daerah rawan kecelakaan kereta api dan bencana alam di beberapa wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian, 2) Inspeksi keselamatan perkeretaapian di beberapa wilayah diantaranya wilayah Divre I Medan, Divre II Padang, Divre III Palembang dan Divre IV Tanjungkarang; 3) Pelaksanaan Safety Assessment (SA) pada pekerjaan peningkatan sistem persinyalan dan telekomunikasi perkeretaapian pada lintas Jatinegara-Bogor dan Manggarai-Jakarta Kota, serta pemeriksaan peralatan penanganan kecelakaan kereta api di DAOP I-VIII dan DIVRE I- IV; 4) Pelaksanaan audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) kepada PT. KAI (Persero) dengan nilai 77,68% (Baik). 5) Pemantauan tindak lanjut rekomendasi peningkatan keselamatan perkeretaapian yang dihasilkan. b. Pelaksanaan inspeksi/rampcheck khusus dalam rangka Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru mencakup: 1) Inspeksi/rampcheck SPM berupa SPM dalam Perjalanan KA dan SPM di Stasiun KA. 2) Inspeksi/rampcheck keselamatan di wilayah kerja PT. KAI, LRT Jabodetabek, PT. MRT, PT. KCI dan LRT Jakpro. 3) Inspeksi/rampcheck sarana di wilayah DAOP - Divre dan Divisi LRT Jabodetabek PT KAI (Persero), PT KCI, PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta. c. Pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian serta kompetensi SDM perkeretaapian baik operator maupun regulator. d. Penyampaian himbuan keselamatan mengacu pada hasil identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (BPPR), termasuk pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi keselamatan perkeretaapian. a. Peningkatan kompetensi SDM regulator melalui bimbingan teknis/pelatihan bidang keselamatan perkeretaapian untuk mendukung pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian. Selain itu, inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian (pengukuhan pada Agustus 2024) telah berperan pada kegiatan inspeksi terhadap kondisi sarana dan prasarana sehingga telah didukung dengan SDM yang kompeten. e. Penempatan kereta penolong, crane dan gerbong datar di beberapa wilayah Balai Teknik sehingga dapat segera dilaksanakan penanganan kecelakaan dan evakuasi agar jalur dapat segera dilalui.	a. Melanjutkan pengawasan keselamatan perkeretaapian secara periodik sebagai regulator, termasuk pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan/rampcheck guna memastikan kehandalan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2025. b. Identifikasi daerah rawan bencana alam dengan kondisi cuaca ekstrim di beberapa wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian serta menugaskan Satuan Pelayanan untuk melakukan pengawasan intensif termasuk koordinasi penyelesaian penanganan rintang jalan/amblesan dan penggantian jembatan yang kritis yang telah terdampak. c. Koordinasi kelanjutan kegiatan peningkatan/modernisasi fasilitas operasi perkeretaapian baik yang bersumber dari APBN/SBSN (luncuran 2024) maupun yang dilaksanakan oleh PT. KAI. d. Koordinasi persiapan penyelenggaraan IMO Tahun 2025 yang kemungkinan terdampak kebijakan penghematan anggaran.	Direktorat Keselamatan, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana Perkeretaapian		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 1				Realisasi Bulan 1		Realisasi Bulan 1		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%							
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3.740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	3	36	3.74	10.39	74.604.063.083	1.28	3.83	-	102.41%	-	Capaian IKM Bulan Januari 2025 merupakan data sementara tanpa memperhitungkan survey manual yang dilakukan oleh BPKAR Sumsel dan BPKA Sulsel. a. Pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi diantaranya terkait layanan pengujian perkeretaapian, sertifikasi sarana perkeretaapian serta sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian, sehingga terjamin ketepatan waktu penyelesaian layanan dan menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan. b. Pelaksanaan sosialisasi layanan dan pelaksanaan survei IKM kepada stakeholder, termasuk upaya penambahan jumlah responden dengan perluasan pelaksanaan survei melalui google form untuk mempermudah pengisian responden. c. Kehandalan SDM dalam memberikan layanan serta pemenuhan kualitas dan tahapan pelayanan sesuai proses bisnis/SOP yang telah ditetapkan.	a. Tindak lanjut dan monitoring pengaduan/masukan dari masyarakat/pengguna layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk analisa berkala terhadap hasil survey untuk perbaikan kualitas pelayanan pada periode berikutnya di masing-masing unit kerja. b. Optimalisasi pemanfaatan sistem TIK/digitalisasi berupa integrasi data, persetujuan terpusat dan pemantauan melalui dashboard terpadu terhadap pemberian layanan bidang perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian, lainnya).	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96.100	Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	96	1152	96.1	8.34	-	-	96.19	-	100.09%	-	Data capaian OTP bulan Januari 2025 merupakan data sementara karena data masih dalam proses pengolahan. a. Peningkatan kinerja On Time Performance LRT Jabodebek pada periode Triwulan IV mencapai sebesar 98,6%; b. Peningkatan jalur kereta api telah selesai dilaksanakan pada Tahun 2024 diantaranya Intas Padang – Bukit Putus – Pauhilma, Cikampek-Cirebon, Kertasesemaya-Arjawinangun, Maos-Cilacap, Solo-Wonogiri dan Kisaran-Mambangmuda; c. Meningkatnya nilai TQI Kategori I dan II hampir pada setiap wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) terutama pada BTP Bandung dan BTP Surabaya sehingga batas kecepatan laju kereta api dapat meningkat; d. Peningkatan pengawasan perjalanan kereta api diantaranya pada momen penyelenggaraan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru dengan pengawasan intensif baik oleh Posko Terpadu maupun Posko di daerah. e. Secara rutin melaksanakan evaluasi (triwulan) terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai dengan GAPEKA yang berlaku sehingga perjalanan KA sesuai jadwal dan keterlambatan KA dapat diminimalisir terutama andil keterlambatan dari operasional/ persilangani/ penambahan/ pelepasan sarana/lainnya. f. Peningkatan keamanan di lokasi perlintasan sebidang sebagai upaya meminimalkan gangguan operasional perjalanan kereta api dan mendukung pencapaian OTP. g. Koordinasi dengan operator perkeretaapian dalam penanganan kecelakaan kereta api (5 kejadian pada Tahun 2024), sehingga gangguan operasional KA yang terjadi dapat diminimalisir dampaknya terhadap ketepatan waktu, termasuk penempatan sarana pendukung penanganan kecelakaan yang siap operasi di beberapa lokasi strategis.	a. Lanjutkan kegiatan peningkatan jalur dan jembatan KA (diantaranya Jember – Kalisat, Semarang – Gambirang, Cirebon – Kroya) guna meningkatkan kehandalan dan kecepatan operasional kereta api termasuk menghindari gangguan perjalanan kereta api. b. Lanjutkan pembangunan jalur ganda KA (diantaranya Solo Balapan-Kaliso, Medan – Binja/elevated) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu. c. Pemantauan operasional kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan dimana terdapat tsapad yang mempengaruhi ketepatan waktu perjalanan kereta api. d. Koordinasi dengan stakeholder terkait persiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2025.	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API	%	19.000	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	1	118	1.54	1.31	-	-	1.6	-	103.9%	-	Data capaian bulan Januari merupakan data sementara dikarenakan data realisasi masih dalam proses pengolahan Analisa terkait Angkutan Penumpang: a. Peningkatan jumlah penumpang KA perkotaan yang signifikan (KRL Jabodetabek dengan rata-rata penumpang weekday sebesar 1.007.594 penumpang/hari, LRT Jabodebek dengan rata-rata penumpang weekday sebesar 83.272 penumpang/hari); b. Peningkatan animo masyarakat dalam penggunaan angkutan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan rata-rata penumpang sebesar 18.335 penumpang/hari; c. Peningkatan minat masyarakat terhadap angkutan penumpang kereta api dengan stimulasi pemberian subsidi Public Service Obligation yang terus meningkat dimana pada Tahun 2024 sebesar Rp. 4.589 Triliun, termasuk penyelenggaraan subsidi KA perintis (diantaranya LRT Sumatera Selatan, Solo – Wonogiri, Makassar – Parepare, KA Aceh, dan lainnya). d. Peningkatan jumlah penumpang KA antar kota khususnya pada momen Lebaran, Natal dan Tahun Baru termasuk momen libur panjang yang dapat meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan perjalanan. e. Peningkatan layanan kereta api di stasiun dan perjalanan KA sesuai SPM serta peningkatan akses stasiun, integrasi antar moda dan kemudahan memperoleh informasi juga mendorong peningkatan jumlah angkutan KA penumpang. f. Beberapa inovasi/peningkatan layanan kereta api didukung sosialisasi/publikasi secara masif oleh operator perkeretaapian, diantaranya perpanjangan rute perjalanan KA Bandara Internasional Adi Soemarmo menjadi Bandara Internasional Adi Soemarmo – Madiun, layanan Direct Train yang merupakan perjalanan kereta api langsung tanpa transit untuk mendukung libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (relasi Gambir- Yogyakarta PP dan Gambir-Semarang PP). Analisa Angkutan Barang: a. Tingginya frekuensi angkutan kereta api barang yang didukung dengan kapasitas prasarana perkeretaapian yang memadai khususnya mainline di pulau Jawa dan Sumatera Bagian Selatan yang dominan dengan layanan angkutan barang. b. Pengoptimalan beberapa akses jalur kereta api menuju pelabuhan/kawasan khusus sesuai demand angkutan barang. c. Dukungan kebijakan pemerintah dengan implementasi National Logistic Ecosystem secara bertahap pada Tahun 2024. d. Publikasi/sosialisasi aktif untuk memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan kereta api dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, termasuk dalam mencari potensi angkutan barang melalui mitra eksisting ataupun baru oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. e. Meningkatkan permintaan dan produksi barang yang mengakibatkan naiknya penggunaan KA Barang, terutama pada angkutan BBM dan angkutan Petikemas.	Angkutan Penumpang: a. Percepatan pengoperasian hasil-hasil pembangunan prasarana perkeretaapian diantaranya Krugeng Geukuh – Muara Satu, Rantauuprat – Pondok S5, serta layanan KA lainnya didukung dengan akses dan integrasi antar moda yang memadai. b. Penyelenggaraan layanan subsidi KA perintis sesuai kebutuhan dan layanan terus berkelanjutan, serta pengelolaan PSO Tahun 2025 yang mencakup subsidi untuk LRT Jabodebek, KA Perkotaan dan KA antar kota dengan dukungan kajian subsidi PSO tepat sasaran. c. Dukungan peningkatan stasiun kereta api guna mendukung kapasitas yang memadai terhadap layanan penumpang (diantaranya Stasiun Rangkasbitung dan Stasiun Tanah Abang). d. Evaluasi dan pemantauan kinerja layanan KA secara realtime serta pengawasan penerapan SPM secara berkala guna memastikan layanan sesuai ketentuan. Angkutan Barang: a. Tingginya frekuensi angkutan kereta api barang yang didukung dengan kapasitas prasarana perkeretaapian yang memadai khususnya mainline di pulau Jawa dan Sumatera Bagian Selatan yang dominan dengan layanan angkutan barang. b. Pengoptimalan beberapa akses jalur kereta api menuju pelabuhan/kawasan khusus sesuai demand angkutan barang. c. Dukungan kebijakan pemerintah dengan implementasi National Logistic Ecosystem secara bertahap pada Tahun 2024. d. Publikasi/sosialisasi aktif untuk memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan kereta api dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, termasuk dalam mencari potensi angkutan barang melalui mitra eksisting ataupun baru oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. e. Meningkatkan permintaan dan produksi barang yang mengakibatkan naiknya penggunaan KA Barang, terutama pada angkutan BSM dan angkutan Petikemas.	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100.000	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNPB dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM	-	379	5.06	1.34	57.886.203.750	1.28	-	-	-	-	Pencapaian Kinerja IKK Tata Kelola Pemerintahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan rata-rata antara capaian Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran dan Indeks Profesionalisme ASN. Pada bulan Januari 2025 belum dilakukan penilaian terhadap Tata Kelola Pemerintahan	Melakukan persiapan penilaian pada masing-masing komponen perhitungan Tata Kelola Pemerintahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPU
NIP 196706081990031005



MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

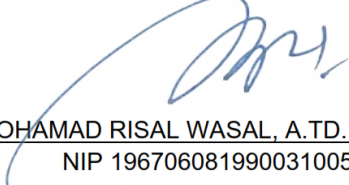
Bulan: Februari, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		Realisasi Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	-	-	0.46	-	135.537.698.500	2.56	0.46	1.846.480.800	100%	1.36%	Pencapaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah pada Februari 2025 belum ada penambahan. Pada tahun 2024 terdapat penambahan konektivitas PKW Lhokseumawe (Kecamatan Muara Satu) dengan kegiatan pendukung berupa pembangunan jalur kereta api lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu sepanjang 8 Km²/sp yang telah selesai 100% telah dilaksanakan rangkaian proses pengujian kelaikan prasarana perkeretaapian. Pada Tahun 2024 juga terdapat beberapa kegiatan pendukung peningkatan konektivitas perkeretaapian lainnya antara lain: a. Kegiatan koordinasi untuk mendukung konektivitas PKW Sawahlunto melalui penyelesaian reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban. Posisi saat ini masih dalam proses melengkapi data dukung pengujian dimana terdapat kekurangan data dukung pengujian prasarana Perkeretaapian sehingga proses pengujian belum dapat dilanjutkan. Beberapa data dukung yang sudah diserahkan sesuai PM 30 tahun 2011 belum memenuhi ketentuan sehingga belum mendapatkan persetujuan dari Direktorat Teknis diantaranya dokumen Gambar teknis (as built drawing) dan Shop Drawing. Selain itu terdapat 2 dokumen yang menjadi persyaratan pengujian Prasarana yang belum diserahkan yaitu Detail Engineering Design dan Spesifikasi Teknis. Hal lain yang telah dilaksanakan adalah pembahasan bersama BTP Padang, Balai Pengujian Perkeretaapian, PT. KAI dan Pemerintah Daerah Sawahlunto terkait percepatan penyelesaian reaktivasi jalur KA antara Sawahlunto – Muarokalaban. Selain itu, BTP Padang juga telah melakukan self assesment pada jalur kereta tersebut dengan hasil masih banyak temuan yang tidak sesuai dengan standar teknis. b. Pekerjaan utilitas dan penyempurnaan lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung untuk mendukung konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung dengan progres mencapai 98,50% dimana masih terdapat bidang lahan yang masih berproses pengadaan/pembayaran untuk frontage road (progress pengadaan tanah sebesar 90% atau 479 yang telah terbayarkan dari total keseluruhan bidang sebanyak 532 bidang). Dengan kendala tersebut, perlu dilakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kelanjutan pekerjaan utilitas tersebut pada Tahun 2025. c. Kegiatan pendukung konektivitas jalur KA Makassar – Parepare diantaranya peningkatan akses dan fasilitas pendukung di beberapa stasiun (Stasiun Mandai, Stasiun Labakkang, Stasiun Ma'rang, Stasiun Tanete Rilau) belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2024 (masih dalam proses tender) dan rencana diluncurkan anggaran dan kegiatannya pada Tahun 2025. d. Kegiatan lanjutan pembangunan jalur KA Rantauprapat – Pondok S5 – Kotapinang, dimana saat ini masih dalam tahap persiapan pengoperasian KA perintis segmen Rantauprapat – Pondok S5 (tindak lanjut pengujian, safety assessment). Sedangkan untuk segmen lanjutan Pondok S5 - Kota Pinang masih dalam tahap penyelesaian pengadaan lahan melalui anggaran LMAN (progress 93,30%). e. Dukungan konektivitas di wilayah IKN, diantaranya pelaksanaan Proof Of Concept (PoC) pada Agustus s.d Oktober 2024 dan dilakukan evaluasi terkait kelayakan sebagai sarana transportasi di IKN. Pada Tahun 2024 juga sedang disusun regulasi teknis terkait Trem Otonom untuk mendukung peningkatan konektivitas.	a. Koordinasi terkait kelanjutan program/kegiatan pendukung konektivitas yang tidak dapat selesai Tahun 2024 (peningkatan akses stasiun KA Makassar – Parepare, pekerjaan utilitas dan penyempurnaan Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, kelanjutan pengadaan lahan segmen Pondok S5-Kotapinang). b. Monitoring penyelesaian readiness criteria kegiatan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarokalaban oleh PT. KAI untuk memenuhi peraturan yang berlaku. c. Evaluasi dan identifikasi secara komprehensif terkait potensi konektivitas jaringan jalur dan layanan kereta api yang terhubung dengan kawasan industri, kawasan pariwisata dan simpul transportasi darat (terminal tipe A).	Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		Realisasi Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapiian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapiian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapiian)	100	1200	100	8.33	452.697.623.500	2.56	100	6.957.398.844	100%	1.54%	Sampai dengan bulan Februari 2025, tidak terjadi kecelakaan kereta api (data sementara) a. Pengawasan keselamatan perkeretaapiian secara periodik diantaranya: 1) Identifikasi daerah rawan kecelakaan kereta api dan bencana alam di beberapa wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapiian; 2) Inspeksi keselamatan perkeretaapiian di beberapa wilayah diantaranya wilayah Divre I Medan, Divre II Padang, Divre III Palembang dan Divre IV Tanjungkarang; 3) Pelaksanaan Safety Assessment (SA) pada pekerjaan peningkatan sistem persinyalan dan telekomunikasi perkeretaapiian pada lintas Jatinegara-Bogor dan Manggarai-Jakarta Kota, serta pemeriksaan peralatan penanganan kecelakaan kereta api di DAOP I-VIII dan DIVRE I-IV; 4) Pelaksanaan audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapiian (SMKP) kepada PT. KAI (Persero) dengan nilai 77,68% (Baik); 5) Pemantauan tindak lanjut rekomendasi peningkatan keselamatan perkeretaapiian yang dihasilkan. b. Pelaksanaan inspeksi/rampcheck khusus dalam rangka Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru mencakup: 1) Inspeksi/rampcheck SPM berupa SPM dalam Perjalanan KA dan SPM di Stasiun KA. 2) Inspeksi/rampcheck keselamatan di wilayah kerja PT. KAI, LRT Jabodebek, PT. MRT, PT. KCI dan LRT Jakpro. 3) Inspeksi/rampcheck sarana di wilayah DAOP - DIVRE dan Divisi LRT Jabodebek PT KAI (Persero), PT KCI, PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta. c. Pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapiian serta kompetensi SDM perkeretaapiian baik operator maupun regulator. d. Penyampaian himbauan keselamatan mengacu pada hasil Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR), termasuk pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi keselamatan perkeretaapiian. a. Peningkatan kompetensi SDM regulator melalui bimbingan teknis/pelatihan bidang keselamatan perkeretaapiian untuk mendukung pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapiian. Selain itu, inspektur prasarana dan sarana perkeretaapiian (pengukuhan pada Agustus 2024) telah berperan pada kegiatan inspeksi terhadap kondisi sarana dan prasarana sehingga telah didukung dengan SDM yang kompeten. e. Penempatan kereta penolong, crane dan gerbong datar di beberapa wilayah Balai Teknik sehingga dapat segera dilaksanakan penanganan kecelakaan dan evakuasi agar jalur dapat segera dilalui.	a. Melanjutkan pengawasan keselamatan perkeretaapiian secara periodik sebagai regulator, termasuk pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan/rampcheck guna memastikan kehandalan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2025. b. Identifikasi daerah rawan bencana alam dengan kondisi cuaca ekstrem di beberapa wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapiian serta menugaskan Satuan Pelayanan untuk melakukan pengawasan intensif termasuk koordinasi penyelesaian penanganan rintang jalan/amblesan dan penggantian jembatan yang kritis yang telah terdampak. c. Koordinasi kelanjutan kegiatan peningkatan/modernisasi fasilitas operasi perkeretaapiian baik yang bersumber dari APBN/SBSN (luncuran 2024) maupun yang dilaksanakan oleh PT. KAI. d. Koordinasi persiapan penyelenggaraan IMO Tahun 2025 yang memungkinkan terdampak kebijakan penghematan anggaran.	Direktorat Keselamatan, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana Perkeretaapiian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapiian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapiian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	3	36	3.74	10.39	149.208.126.167	2.56	3.83	-	102.41%	-	Capaian IKM Bulan Januari 2025 merupakan data sementara tanpa memperhitungkan survey manual yang dilakukan oleh BPKAR Sumsel dan BPKA Sulsel. a. Pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi diantaranya terkait layanan pengujian perkeretaapiian, sertifikasi sarana perkeretaapiian serta sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapiian, sehingga terjamin ketepatan waktu penyelesaian layanan dan menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan. b. Pelaksanaan sosialisasi layanan dan pelaksanaan survei IKM kepada stakeholder, termasuk upaya penambahan jumlah responden dengan perluasan pelaksanaan survei melalui google form untuk mempermudah pengisian responden. c. Kehandalan SDM dalam memberikan layanan serta pemenuhan kualitas dan tahapan pelayanan sesuai proses bisnis/SOP yang telah ditetapkan.	a. Tindak lanjut dan monitoring pengaduan/masukan/saran dari masyarakat/pengguna layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapiian termasuk analisa berkala terhadap hasil survey untuk perbaikan kualitas pelayanan pada periode berikutnya di masing-masing unit kerja. b. Optimalisasi pemanfaatan sistem TIK/digitalisasi berupa integrasi data, persetujuan terpusat dan pemantauan melalui dashboard terpadu terhadap pemberian layanan bidang perkeretaapiian (perijinan, sertifikasi, pengujian, lainnya).	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapiian, Dit. Sarana Perkeretaapiian, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	96	1152	96.1	8.34	-	-	96.19	-	100.09%	-	Data capaian OTP bulan Februari 2025 merupakan data sementara karena data masih dalam proses pengolahan. a. Peningkatan kinerja On Time Performance LRT Jabodebek pada periode Triwulan IV mencapai sebesar 98,6%; b. Peningkatan jalur kereta api telah selesai dilaksanakan pada Tahun 2024 diantaranya lintas Padang – Bukit Putus – Paulhima, Cikampek-Cirebon, Kertasemaya-Arjawinangun, Maos-Cilacap, Solo-Wonogiri dan Kisanan-Mambangmuda; c. Meningkatnya nilai TQI Kategori I dan II hampir pada setiap wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapiian (BTP) terutama pada BTP Bandung dan BTP Surabaya sehingga batas kecepatan laju kereta api dapat meningkat; d. Peningkatan pengawasan perjalanan kereta api diantaranya pada momen penyelenggaraan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru dengan pengawasan intensif baik oleh Posko Terpadu maupun Posko di daerah. e. Secara rutin melaksanakan evaluasi (triwulan) terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai dengan GAPEKA yang berlaku sehingga perjalanan KA sesuai jadwal dan keterlambatan KA dapat diminimalisir terutama andil keterlambatan dari operasional/ persilangan/ penambahan/ pelepasan sarana/lainnya. f. Peningkatan keamanan di lokasi perlintasan sebidang sebagai upaya meminimalkan gangguan operasional perjalanan kereta api dan mendukung pencapaian OTP. g. Koordinasi dengan operator perkeretaapiian dalam penanganan kecelakaan kereta api (5 kejadian pada Tahun 2024), sehingga gangguan operasional KA yang terjadi dapat diminimalisir dampaknya terhadap ketepatan waktu, termasuk penempatan sarana pendukung penanganan kecelakaan yang siap operasi di beberapa lokasi strategis.	a. Lanjutan kegiatan peningkatan jalur dan jembatan KA (diantaranya Jember – Kalisat, Semarang – Gambirang, Cirebon – Kroya) guna meningkatkan kehandalan dan kecepatan operasional kereta api termasuk menghindari gangguan perjalanan kereta api. b. Lanjutan pembangunan jalur ganda KA (diantaranya Solo Balapan-Kalioso, Medan – Binjai/elevated) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu. c. Pemantauan operasional kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan dimana terdapat tsapst yang mempengaruhi ketepatan waktu perjalanan kereta api. d. Koordinasi dengan stakeholder terkait persiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2025.	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapiian, Dit. Sarana Perkeretaapiian, BTP, BPKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 2				Realisasi Bulan 2		Realisasi Bulan 2		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API	%	19,000	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	1	118	2.955	2.5	-	-	1.6	-	54.15%	-	Data capaian bulan Februari merupakan data sementara dikarenakan data realisasi masih dalam proses pengolahan Analisa, terkait Angkutan Penumpang: a. Peningkatan jumlah penumpang KA perkotaan yang signifikan (KRL Jabodetabek dengan rata-rata penumpang weekday sebesar 1.007.594 penumpang/hari, LRT Jabodebek dengan rata-rata penumpang weekday sebesar 83.272 penumpang/hari); b. Peningkatan animo masyarakat dalam penggunaan angkutan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan rata-rata penumpang sebesar 18.335 penumpang/hari; c. Peningkatan minat masyarakat terhadap angkutan penumpang kereta api dengan stimulasi pemberian subsidi Public Service Obligation yang terus meningkat dimana pada Tahun 2024 sebesar Rp. 4.589 Triliun, termasuk penyelenggaraan subsidi KA perintis (diantaranya LRT Sumatera Selatan, Solo – Wonogiri, Makassar – Parepare, KA Aceh, dan lainnya); d. Peningkatan jumlah penumpang KA antar kota khususnya pada momen Lebaran, Natal dan Tahun Baru termasuk momen libur panjang yang dapat meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan perjalanan. e. Peningkatan layanan kereta api di stasiun dan perjalanan KA sesuai SPM serta peningkatan akses stasiun, integrasi antar moda dan kemudahan memperoleh informasi juga mendorong peningkatan jumlah angkutan KA penumpang. f. Beberapa inovasi/peningkatan layanan kereta api didukung sosialisasi/publikasi secara masif oleh operator perkeretaapian, diantaranya perpanjangan rute perjalanan KA Bandara Internasional Adi Soemarmo menjadi Bandara Internasional Adi Soemarmo – Madiun, layanan Direct Train yang merupakan perjalanan kereta api langsung tanpa transit untuk mendukung libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (relasi Gambir-Yogyakarta PP dan Gambir-Semarang PP). Analisa Angkutan Barang: a. Tingginya frekuensi angkutan kereta api barang yang didukung dengan kapasitas prasarana perkeretaapian yang memadai khususnya mainline di pulau Jawa dan Sumatera Bagian Selatan yang dominan dengan layanan angkutan barang. b. Pengoptimalan beberapa akses jalur kereta api menuju pelabuhan/kawasan khusus sesuai demand angkutan barang. c. Dukungan kebijakan pemerintah dengan implementasi National Logistic Ecosystem secara bertahap pada Tahun 2024. d. Publikasi/sosialisasi aktif untuk memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan kereta api dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, termasuk dalam mencari potensi angkutan barang melalui mitra eksisting ataupun baru oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. e. Meningkatkan permintaan dan produksi barang yang mengakibatkan naiknya penggunaan KA Barang, terutama pada angkutan BBM dan angkutan Petikemas.	Angkutan Penumpang: a. Percepatan pengoperasian hasil-hasil pembangunan prasarana perkeretaapian diantaranya Krueng Geukeuh – Muara Satu, Rantaurapat – Pondok SS, serta layanan KA lainnya didukung dengan akses dan integrasi antar moda yang memadai. b. Penyelenggaraan layanan subsidi KA perintis sesuai kebutuhan dan layanan terus berkelanjutan, serta pengelolaan PSO Tahun 2025 yang mencakup subsidi untuk LRT Jabodebek, KA Perkotaan dan KA antar kota dengan dukungan kajian subsidi PSO tepat sasaran. c. Dukungan peningkatan stasiun kereta api guna mendukung kapasitas yang memadai terhadap layanan penumpang (diantaranya Stasiun Rangkasbitung dan Stasiun Tanah Abang). d. Evaluasi dan pemantauan kinerja layanan KA secara realtime serta pengawasan penerapan SPM secara berkala guna memastikan layanan sesuai ketentuan. Angkutan Barang: a. Tingginya frekuensi angkutan kereta api barang yang didukung dengan kapasitas prasarana perkeretaapian yang memadai khususnya mainline di pulau Jawa dan Sumatera Bagian Selatan yang dominan dengan layanan angkutan barang. b. Pengoptimalan beberapa akses jalur kereta api menuju pelabuhan/kawasan khusus sesuai demand angkutan barang. c. Dukungan kebijakan pemerintah dengan implementasi National Logistic Ecosystem secara bertahap pada Tahun 2024. d. Publikasi/sosialisasi aktif untuk memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan kereta api dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, termasuk dalam mencari potensi angkutan barang melalui mitra eksisting ataupun baru oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. e. Meningkatkan permintaan dan produksi barang yang mengakibatkan naiknya penggunaan KA Barang, terutama pada angkutan BBM dan angkutan Petikemas.	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNPB dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM	-	379	6.325	1.67	115.772.407.500	2.56	-	-	-	-	Pencapaian Kinerja IKK Tata Kelola Pemerintahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan rata-rata antara capaian Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran dan Indeks Profesionalisme ASN. Pada bulan Februari 2025 belum dilakukan penilaian terhadap Tata Kelola Pemerintahan	Melakukan persiapan penilaian pada masing-masing komponen perhitungan Tata Kelola Pemerintahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPU
NIP 196706081990031005



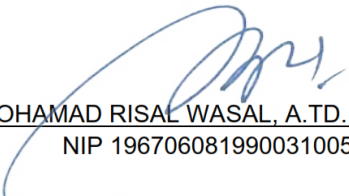
MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Maret, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 3				Realisasi Bulan 3		Realisasi Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%							
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru, reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan dan lahan)	-	-	0.46	-	203.306.547.750	3.85	0.46	2.873.423.028	100%	1.41%	Pencapaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah pada Maret 2025 belum ada penambahan. Pada tahun 2024 terdapat penambahan konektivitas PKW Lhokseumawe (Kecamatan Muara Satu) dengan kegiatan pendukung berupa pembangunan jalur kereta api lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu sepanjang 8 Km/sp yang telah selesai 100% telah dilaksanakan rangkaian proses pengujian kelakuan prasarana perkeretaapian. Pada Tahun 2024 juga terdapat beberapa kegiatan pendukung peningkatan konektivitas perkeretaapian lainnya antara lain: a. Kegiatan koordinasi untuk mendukung konektivitas PKW Sawahlunto melalui penyelesaian reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarakalaban. Posisi saat ini masih dalam proses melengkapi data dukung pengujian dimana terdapat kekurangan data dukung pengujian prasarana Perkeretaapian sehingga proses pengujian belum dapat dilanjutkan. Beberapa data dukung yang sudah diserahkan sesuai PM 30 tahun 2011 belum memenuhi ketentuan sehingga belum mendapatkan persetujuan dari Direktorat Teknis diantaranya dokumen Gambar teknis (as built drawing) dan Shop Drawing. Selain itu terdapat 2 dokumen yang menjadi persyaratan pengujian Prasarana yang belum diserahkan yaitu Detail Engineering Design dan Spesifikasi Teknis. Hal lain yang telah dilaksanakan adalah pembahasan bersama BTP Padang, Balai Pengujian Perkeretaapian, PT. KAI dan Pemerintah Daerah Sawahlunto terkait percepatan penyelesaian reaktivasi jalur KA antara Sawahlunto – Muarakalaban. Selain itu, BTP Padang juga telah melakukan self assesment pada jalur kereta tersebut dengan hasil masih banyak temuan yang tidak sesuai dengan standar teknis. b. Pekerjaan utilitas dan penyempurnaan lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung untuk mendukung konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung c. Kegiatan pendukung konektivitas jalur KA Makassar – Parepare diantaranya peningkatan akses dan fasilitas pendukung di beberapa stasiun (Stasiun Mandai, Stasiun Labakkang, Stasiun Matrang, Stasiun Tanete Rillau). d. Kegiatan lanjutan pembangunan jalur KA Rantauprapat – Pondok S5 – Kotapinang. e. Dukungan konektivitas di wilayah IKN, diantaranya pelaksanaan Proof Of Concept (PoC) pada Agustus s.d Oktober 2024 dan dilakukan evaluasi terkait kelayakan sebagai sarana transportasi di IKN. Pada Tahun 2024 juga sedang disusun regulasi teknis terkait Trem Otonom untuk mendukung peningkatan konektivitas.	a. Koordinasi terkait kelanjutan program/kegiatan pendukung konektivitas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. b. Monitoring penyelesaian readiness criteria kegiatan reaktivasi jalur kereta api Sawahlunto – Muarakalaban oleh PT. KAI untuk memenuhi peraturan yang berlaku. c. Evaluasi dan identifikasi secara komprehensif terkait potensi konektivitas jaringan jalur dan layanan kereta api yang terhubung dengan kawasan industri, kawasan pariwisata dan simpul transportasi darat (terminal tipe A).	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)	99	1200	100	8.33	679.046.435.250	3.85	99.54	29.555.723.620	99.54%	4.35%	Terjadi satu kebakaran KA yang terjadi pada 3 kereta cadangan di jalur stabilng Stasiun Yogyakarta pada 12 Maret 2025. Keberangkatan KA diestimasikan sebanyak 216.978 perjalanan pada Januari-Maret 2025 sehingga diperoleh Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA sebesar 99,54%	a. Melanjutkan pengawasan keselamatan perkeretaapian secara periodik sebagai regulator, termasuk pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan/rampcheck guna memastikan kehandalan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2025. b. identifikasi daerah rawan bencana alam dengan kondisi cuaca ekstrim di beberapa wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian serta mengusulkan Satuan Pelayanan untuk melakukan pengawasan intensif termasuk koordinasi penyelesaian penanganan rintang jalan/amblesan dan penggantian jembatan yang kritis yang telah terdampak. c. Koordinasi kelanjutan kegiatan peningkatan/modernisasi fasilitas operasi perkeretaapian baik yang bersumber dari APBN/SBSN (luncuran 2024) maupun yang dilaksanakan oleh PT. KAI. d. Koordinasi persiapan penyelenggaraan IMO Tahun 2025 yang kemungkinan terdampak kebijakan penghematan anggaran.	Direktorat Keselamatan, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	3	36	3.74	10.39	223.812.189.250	3.85	3.85	11.828.891.950	102.94%	5.29%	Capaian IKM Bulan Maret 2025 merupakan data sementara tanpa memperhitungkan survey manual yang dilakukan oleh BPKAR Sumsel dan BPKA Sulsel. a. Pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi diantaranya terkait layanan pengujian perkeretaapian, sertifikasi sarana perkeretaapian serta sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian, sehingga terjamin ketepatan waktu penyelesaian layanan dan menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan. b. Pelaksanaan sosialisasi layanan dan pelaksanaan survei IKM kepada stakeholder, termasuk upaya penambahan jumlah responden dengan perluasan pelaksanaan survei melalui google form untuk mempermudah pengisian responden. c. Kehandalan SDM dalam memberikan layanan serta pemenuhan kualitas dan tahapan pelayanan sesuai proses bisnis/SOP yang telah ditetapkan.	a. Tindak lanjut dan monitoring pengaduan/masukan/saran dari masyarakat/pengguna layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk analisa berkala terhadap hasil survey untuk perbaikan kualitas pelayanan pada periode berikutnya di masing-masing unit kerja. b. Optimalisasi pemanfaatan sistem TIK/digitalisasi berupa integrasi data, persetujuan terpusat dan pemantauan melalui dashboard terpadu terhadap pemberian layanan bidang perkeretaapian (pinjiran, sertifikasi, pengujian, lainnya).	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	96	1152	96.1	8.34	-	-	96.19	-	100.09%	-	a. Lanjutan kegiatan peningkatan jalur dan jembatan KA (diantaranya Jember – Kalisat, Semarang – Gambirang, Cirebon – Kroya) guna meningkatkan kehandalan dan kecepatan operasional kereta api termasuk menghindari gangguan perjalanan kereta api. b. Lanjutan pembangunan jalur ganda KA (diantaranya Solo Balapan-Kalioso, Medan – Binjai/elevated) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu. c. Pemantauan operasional kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan dimana terdapat taspas yang mempengaruhi ketepatan waktu perjalanan kereta api. d. Koordinasi dengan stakeholder terkait persiapan penyelenggaraan angkutan Natatu Tahun 2025.	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 3				Realisasi Bulan 3		Realisasi Bulan 3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output		Realisasi Anggaran					Capaian Output/Capaian Anggaran	
							Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%				%	%
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API	%	19,000	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	2	118	4.465	3.78	-	-	2.955	-	66.18%	-	Data capaian bulan Maret merupakan data sementara dikarenakan data realisasi masih dalam proses pengolahan Analisis terkait Angkutan Penumpang. a. Peningkatan jumlah penumpang KA perkotaan yang signifikan (KRL Jabodetabek dengan rata-rata penumpang weekday sebesar 1.007.594 penumpang/hari, LRT Jabodebek dengan rata-rata penumpang weekday sebesar 83.272 penumpang/hari); b. Peningkatan animo masyarakat dalam penggunaan angkutan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan rata-rata penumpang sebesar 18.335 penumpang/hari; c. Peningkatan minat masyarakat terhadap angkutan penumpang kereta api dengan stimulasi pemberian subsidi Public Service Obligation yang terus meningkat dimana pada Tahun 2024 sebesar Rp. 4.589 Triliun, termasuk penyelenggaraan subsidi KA perintis (diantaranya LRT Sumatera Selatan, Solo – Wonogiri, Makassar – Parepare, KA Aceh, dan lainnya). d. Peningkatan jumlah penumpang KA antar kota khususnya pada momen Lebaran, Natal dan Tahun Baru termasuk momen libur panjang yang dapat meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan perjalanan. e. Peningkatan layanan kereta api di stasiun dan perjalanan KA sesuai SPM serta peningkatan akses stasiun, integrasi antar moda dan kemudahan memperoleh informasi juga mendorong peningkatan jumlah angkutan KA penumpang. f. Beberapa inovasi/peningkatan layanan kereta api didukung sosialisasi/publikasi secara masif oleh operator perkeretaapian, diantaranya perpanjangan rute perjalanan KA Bandara Internasional Adi Soemarmo menjadi Bandara Internasional Adi Soemarmo – Madiun, layanan Direct Train yang merupakan perjalanan kereta api langsung tanpa transit untuk mendukung libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (relasi Gambir-Yogyakarta PP dan Gambir-Semarang PP). Analisis Angkutan Barang a. Tingginya frekuensi angkutan kereta api barang yang didukung dengan kapasitas prasarana perkeretaapian yang memadai khususnya mainline di pulau Jawa dan Sumatera Bagian Selatan yang dominan dengan layanan angkutan barang. b. Pengoptimalan beberapa akses jalur kereta api menuju pelabuhan/kawasan khusus sesuai demand angkutan barang. c. Dukungan kebijakan pemerintah dengan implementasi National Logistic Ecosystem secara bertahap pada Tahun 2024. d. Publikasi/sosialisasi aktif untuk memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan kereta api dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, termasuk dalam mencari potensi angkutan barang melalui mitra eksisting ataupun baru oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. e. Meningkatkan permintaan dan produksi barang yang mengakibatkan naiknya penggunaan KA Barang, terutama pada angkutan BBM dan angkutan Petikemas.	Data capaian bulan Februari merupakan data sementara dikarenakan data realisasi masih dalam proses pengolahan Analisis terkait Angkutan Penumpang. a. Peningkatan jumlah penumpang KA perkotaan yang signifikan (KRL Jabodetabek dengan rata-rata penumpang weekday sebesar 1.007.594 penumpang/hari, LRT Jabodebek dengan rata-rata penumpang weekday sebesar 83.272 penumpang/hari); b. Peningkatan animo masyarakat dalam penggunaan angkutan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan rata-rata penumpang sebesar 18.335 penumpang/hari; c. Peningkatan minat masyarakat terhadap angkutan penumpang kereta api dengan stimulasi pemberian subsidi Public Service Obligation yang terus meningkat dimana pada Tahun 2024 sebesar Rp. 4.589 Triliun, termasuk penyelenggaraan subsidi KA perintis (diantaranya LRT Sumatera Selatan, Solo – Wonogiri, Makassar – Parepare, KA Aceh, dan lainnya). d. Peningkatan jumlah penumpang KA antar kota khususnya pada momen Lebaran, Natal dan Tahun Baru termasuk momen libur panjang yang dapat meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan perjalanan. e. Peningkatan layanan kereta api di stasiun dan perjalanan KA sesuai SPM serta peningkatan akses stasiun, integrasi antar moda dan kemudahan memperoleh informasi juga mendorong peningkatan jumlah angkutan KA penumpang. f. Beberapa inovasi/peningkatan layanan kereta api didukung sosialisasi/publikasi secara masif oleh operator perkeretaapian, diantaranya perpanjangan rute perjalanan KA Bandara Internasional Adi Soemarmo menjadi Bandara Internasional Adi Soemarmo – Madiun, layanan Direct Train yang merupakan perjalanan kereta api langsung tanpa transit untuk mendukung libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (relasi Gambir-Yogyakarta PP dan Gambir-Semarang PP). Analisis Angkutan Barang a. Tingginya frekuensi angkutan kereta api barang yang didukung dengan kapasitas prasarana perkeretaapian yang memadai khususnya mainline di pulau Jawa dan Sumatera Bagian Selatan yang dominan dengan layanan angkutan barang. b. Pengoptimalan beberapa akses jalur kereta api menuju pelabuhan/kawasan khusus sesuai demand angkutan barang. c. Dukungan kebijakan pemerintah dengan implementasi National Logistic Ecosystem secara bertahap pada Tahun 2024. d. Publikasi/sosialisasi aktif untuk memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan kereta api dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, termasuk dalam mencari potensi angkutan barang melalui mitra eksisting ataupun baru oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. e. Meningkatkan permintaan dan produksi barang yang mengakibatkan naiknya penggunaan KA Barang, terutama pada angkutan BBM dan angkutan Petikemas.	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA		
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNPB dan Penyelenggaraan Pembinaan SDM	100	379	19.035	5.02	173.658.611.250	3.85	100	-	525.35%	-	Pencapaian Kinerja IKK Tata Kelola Pemerintahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan rata-rata antara capaian Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran dan Indeks Profesionalisme ASN. Pada bulan Februari 2025 belum dilakukan penilaian terhadap Tata Kelola Pemerintahan.	Melakukan persiapan penilaian pada masing-masing komponen perhitungan Tata Kelola Pemerintahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian		

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPU
NIP 196706081990031005



LAMPIRAN V

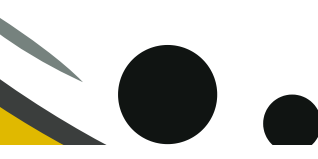
DATA DUKUNG
PER-INDIKATOR KINERJA KEGIATAN





LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1
RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN



DATA PERHITUNGAN RASIO KONEKTIVITAS TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	UNIT KERJA	PKN		PKW / KSN		PELABUHAN		BANDARA		TERMINAL TIPE A		TERHUBUNG	BLM TERHUBUNG	RASIO
		TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	LOKASI	LOKASI	
8	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	1	5	2	5	1	2	0	1	0	0	4	13	0,24
	Sulawesi Selatan	Maminasata		Pangkajene	Parepare	Garongkong (Sulawesi Selatan)	Makassar (Sulawesi Selatan)		Hasanuddin (Makassar)					
				Barru	Watampone									
					Bulukumba									
	Sulawesi Utara		Perkotaan Manado-Bitung				Bitung (Sulawesi Utara)							
	Gorontalo		Gorontalo											
	Sulawesi Tengah		Palu		Poso									
	Sulawesi Barat		Mamuju											
	Sulawesi Tenggara		Kendari		Kolaka									
	DITJEN PERKERETAAPIAN	16	18	36	34	10	19	6	10			69	81	0,460
		Jumlah PKW/PKN/PSN/SIMPUL Berdasarkan RIPNAS 2030											150	

Jakarta, April 2025
DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

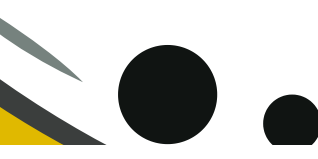

Ir. HENGKI ANGKASAWAN
NIP 196701081993031001



LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2

TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000
JUMLAH KEBERANGKATAN KERETA API



I. Capaian Kinerja Tahun 2025

A. Realisasi Perjalanan Kereta Api

Bulan			Renaksi		Program		Kumulatif	Realisasi				Capaian	
			Bulan	Bulan	Kumulatif	KA Penumpang	KA Barang	Total	Total Kumulatif	Bulan	Kumulatif	Bulan	Kumulatif
TW 1	1	Januari	95,42%	89.201	89.201	82.071	6.438	88.509	88.509	99,22%	99,22%		
	2	Februari	95,42%	77.948	167.149	76.067	6.042	82.109	170.618	105,34%	102,08%		
	3	Maret	95,42%	86.518	253.667	84.561	6.153	90.714	261.332	104,85%	103,02%		
TW 2	4	April	95,42%	83.751	337.418	-	-	-	-	-	-		
	5	Mei	95,42%	86.359	423.777	-	-	-	-	-	-		
	6	Juni	95,42%	83.478	507.255	-	-	-	-	-	-		
TW 3	7	Juli	95,42%	86.359	593.614	-	-	-	-	-	-		
	8	Agustus	95,42%	86.209	679.823	-	-	-	-	-	-		
	9	September	95,42%	83.562	763.385	-	-	-	-	-	-		
TW 4	10	Oktober	95,42%	86.347	849.732	-	-	-	-	-	-		
	11	November	95,42%	83.428	933.160	-	-	-	-	-	-		
	12	Desember	95,42%	86.684	1.019.844	-	-	-	-	-	-		

B. Jumlah Kedatangan Kereta Api Tepat Waktu (OTP)

BULAN		RENAKSI	REALISASI		KA BERANGKAT TEPAT				KA DATANG TEPAT				RATA RATA		PERSENTASE CAPAIAN	
		Bulan	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Berangkat + Datang	Kumulatif	Bulan	Kumulatif
TW 1	Januari	96,10%	88.509	88.509	6.075	81.512	87.587	87.587	5.218	79.883	85.101	85.101	88.344	88.344	97,55%	97,55%
	Februari	96,10%	82.109	170.618	5.726	75.274	81.000	168.587	4.441	73.835	78.276	163.377	79.638	165.982	96,99%	97,28%
	Maret	96,10%	90.714	261.332	5.825	83.954	89.779	258.366	4.706	82.702	87.408	250.785	88.594	254.576	97,86%	97,41%
TW 2	April	96,10%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Mei	96,10%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Juni	96,10%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
TW 3	Juli	96,10%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Agustus	96,10%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	September	96,10%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
TW 4	Oktober	96,10%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	November	96,10%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Desember	96,10%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-

Keterangan:



: Rencana Aksi (Renaksi) bulanan berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2025

: Data sementara, akan disampaikan revisi data setelah evaluasi pelaksanaan Gapeka Triwulan I 2025

IV. Matriks Upaya Peningkatan Kinerja Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan	Realisasi Per Maret 2025	Kriteria Upaya	Rekomendasi
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	95,42%	103,02%	Aktivitas	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
				Kebijakan	a. Penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	96,10%	97,41%	Aktivitas	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan c. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan perjalanan KA;.



 Awang Meindra, S.SiT., MT
 NIP 198105162002121003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 041/K53/IV/2025

Yth. : Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Dari : Plt. Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
Hal : Penyampaian Data Kecelakaan Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Persiapan Evaluasi Implementasi SAKIP
Tanggal : 28 April 2025

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor : PR.205/II/20/KI/DJKA/2025 pada tanggal 17 April 2025 perihal Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Persiapan Evaluasi Implementasi SAKIP, bersama ini disampaikan rekapitulasi data kecelakaan kereta api tahun 2025 sampai dengan bulan Maret 2025 :

A. Rekapitulasi Rincian Kecelakaan Kereta Api Tahun 2025 (Januari – Maret 2025)

NO	TANGGAL	DAOP/DIVRE	JENIS KECELAKAAN	LOKASI KECELAKAAN	KORBAN	TIM INVESTIGASI
1	15 Maret 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang	Anjlok	KM 381+9/0 Jalur III Emplasemen Stasiun Ujanmas (Ujm).	Nihil	DJKA

* Detail Kejadian Terlampir

B. Rekapitulasi Jumlah Korban Kecelakaan Kereta Api Tahun 2025 (Januari – Maret 2025)

NO.	KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH KORBAN		
			LUKA RINGAN	LUKA BERAT	MENINGGAL
1	Tabrakan antar KA	0	0	0	0
2	KA Terguling	0	0	0	0
3	KA Anjlok	1	0	0	0
4	KA Terbakar	0	0	0	0
TOTAL		1	0	0	0

C. Rekapitulasi data penyebab kecelakaan kereta api tahun 2025 :

NO.	KEJADIAN	JUMLAH	PENYEBAB			
			SARANA	PRASARANA	SDM	MASIH DALAM ANALISIS
1	Tabrakan antar KA	0	0	0	0	0
2	KA Terguling	0	0	0	0	0
3	KA Anjlok	1	1	0	0	0
4	KA Terbakar	0	0	0	0	0
TOTAL		1	1	0	0	0

Atas perkenan dan petunjuk lanjut Ibu Direktur diucapkan terima kasih.



Lucky Bindri Soegito 
NIP. 197707122002122001

LAPORAN KECELAKAAN KERETA API

1. Pada tanggal 15 Maret 2025 hari Sabtu pukul 22:30 WIB telah terjadi kecelakaan Anjlokkan Kereta Api KA 3100 (Barapati) Rangkaian Gerbong Barang nomor 458905 nomor urut 17 dari lokomotif anjlok 1 As pada pukul 22:30 WIB di KM 381+9/0 Jalur II Emplacement Stasiun Ujan Mas (Ujm) wilayah Divre III Palembang, bersama ini dapat dilaporkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kronologis kejadian

Pada pukul 22:20 WIB terima laporan PPKA Ujan Mas atas nama Eky, pada saat semboyan 1 terlihat percikan api pada rangkaian KA 3100 (Barapati) GB 458905 nomor urut 17 dari Lokomotif anjlok.

- b. Data Lokasi Kejadian Kecelakaan

KM : 381+9/0
Lokasi : Emplacement Stasiun Ujan Mas (Ujm)
Wilayah Operasi : Divre III Palembang

- c. Data Sarana

No/Nama Sarana : KA 3100 (Barapati)

Nomor Sarana : 1. CC2061527

2. GB459006

3. GB450057

4. GB459601

5. GB459704

6. GB458674

7. GB458678

8. GB458904

9. GB458679

10. GB458906

11. GB458903

12. GB459004

13. GB459502

14. GB458673

15. GB458672

16. GB458671

17. GB458676
18. GB458905 : Anjlok 1 As
19. GB458675
20. GB459002
21. GB459602
22. GB459702
23. GB459003
24. GB459703
25. GB458670
26. GB459301
27. GB459501
28. GB458677
29. GB458902
30. GB459007
31. GB458901
32. GB459005
33. GB450053

d. Akibat Kecelakaan

Korban Jiwa : Tidak Ada

e. Gangguan Operasional KA

Terdapat 10 KA terganggu / andil keterlambatan 21 Jam 45 Menit.

- 1) Ka 3100 (Barapati) Di Stasiun Ujan Mas pukul 22.26 wib s/d 04.35 wib (429 Mnt)
- 2) Ka S2 Di semb 7 Stasiun Ujan Mas pukul 23.10 wib , Datang Stasiun Ujan Mas pukul 23.56 wib s/d 23.38 wib (88 Mnt)
- 3) Ka 3772 (Mli-Sig) Di semb 7 Stasiun Ujan Mas pukul 01.05 wib , Datang Stasiun Ujan Mas pukul 01.25 wib s/d 01.55 wib (50 Mnt, Ket : Lewat Belok Jl 4)
- 4) Ka 4004 (Baratarahan) Di semb 7 Stasiun Ujan Mas pukul 01.30 wib , Datang Stasiun Ujan Mas pukul 02.12 wib s/d 02.14 wib (46 Mnt, Ket : Lewat Belok Jl 4)
- 5) Ka 3774 (Mli-Sig) DI Mrl pukul 01.03 wib s/d 01.32 wib , Datang Stasiun Ujan Mas pukul 03.07 wib s/d 03.13 wib (87 Mnt)

- 6) KA 3102 (Barapati) Di Mrl pukul 02.00 wib s/d 04.18 wib (138 Mnt)
- 7) Ka 3104 (Barapati) Ber Me pukul 02.37 wib, Dat Mrl pukul 04.30 wib s/d 05.18 wib (145 Mnt)
- 8) Ka 4008 (Baratarahan) Di sinyal Masuk Me pukul 02.35 wib s/d 04.00 wib (85 Mnt)
- 9) Ka 3101 (Barapati) Di sinyal Masuk Ujm pukul 02.14 wib s/d 03.45 wib (91 Mnt)
- 10) Ka 4135 (Baratarahan) Ls Png pukul 01.47 wib , Ls Ujm pukul 04.03 wib (128 Mnt)

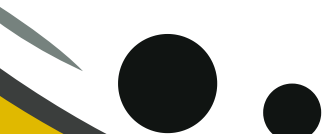
2. Demikian laporan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 3

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
BIDANG PERKERETAAPIAN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

Laman

Survei

SURVEI

-
-
- IKM/ IPK
IKM-IPK April 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2024
- IKM/ IPK
IKM-IPK November 2024
- IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2024
- < >
- 1 - 20 dari ?

SURVEI IKM-IPK FEBRUARI 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.23/17.50

98.44/100 3.94/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.24/17.50

98.50/100 3.94/4

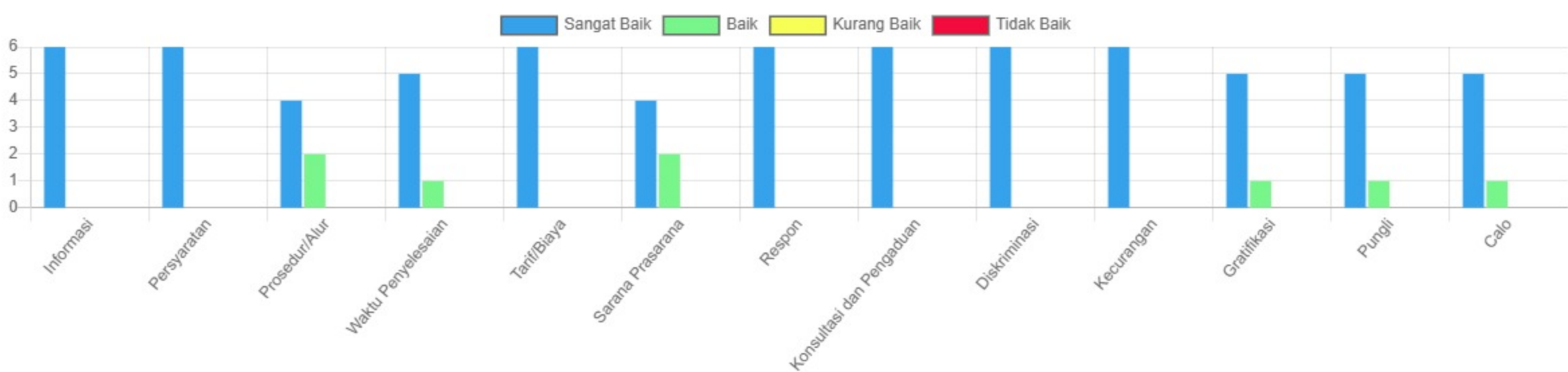


Responden

6

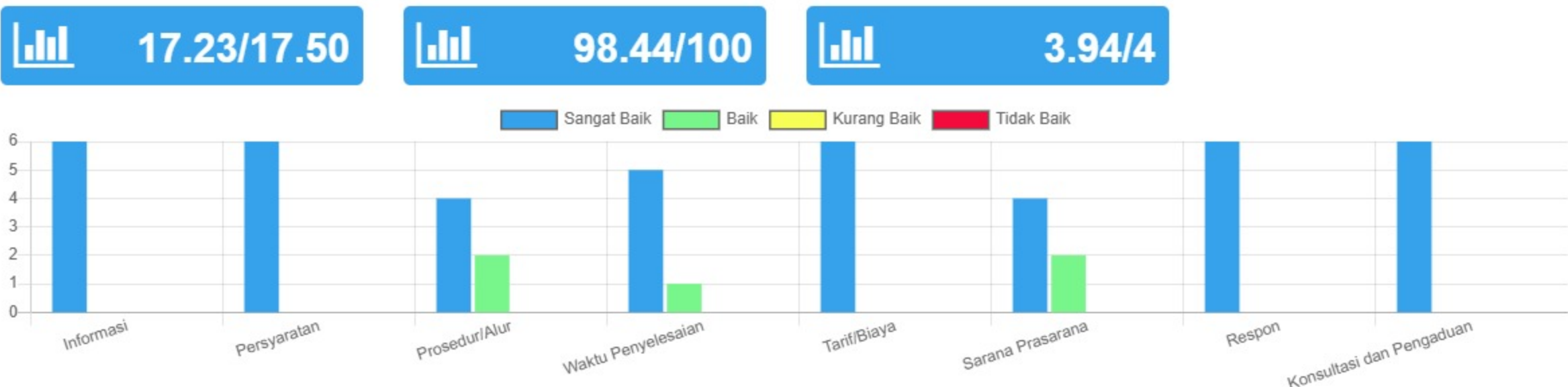
Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Locus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jn Unit Kerj Provin Wilaya
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	
Informasi	17.50	16.74	0.76	17.50	0	16.89	0.61	17.50
Persyaratan	17.50	16.76	0.74	17.50	0	16.83	0.67	17.50
Prosedur/Alur	16.63	16.80	-0.17	17.28	-0.65	16.77	-0.14	17.28
Waktu Penyelesaian	17.06	16.73	0.33	17.39	-0.33	16.56	0.50	17.39
Tarif/Biaya	17.50	16.78	0.72	17.50	0	16.67	0.83	17.50
Sarana Prasarana	16.63	16.67	-0.04	17.28	-0.65	16.58	0.05	17.28
Respon	17.50	16.80	0.70	17.50	0	16.93	0.57	17.50
Konsultasi dan Pengaduan	17.50	16.75	0.75	17.50	0	16.77	0.73	17.50

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL



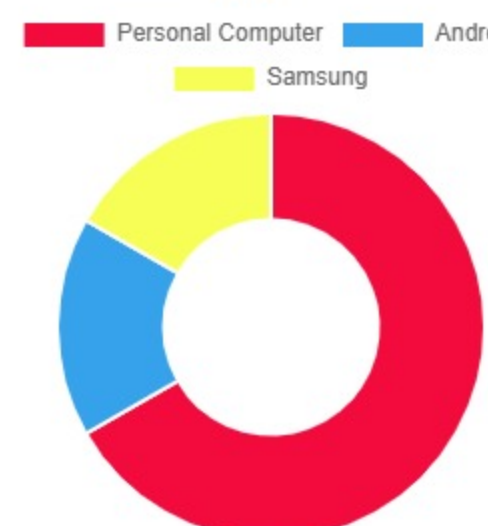
Variabel	Indeks Locus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jer Unit Kerja Provinsi Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	
Diskriminasi	17.50	16.90	0.60	17.50	0	16.97	0.53	17.50
Kecurangan	17.50	16.85	0.65	16.84	0.66	16.73	0.77	16.84
Gratifikasi	17.06	16.88	0.18	17.39	-0.33	16.69	0.37	17.39
Pungli	17.06	16.90	0.16	17.39	-0.33	16.60	0.46	17.39
Calo	17.06	16.89	0.17	17.39	-0.33	16.85	0.21	17.39

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

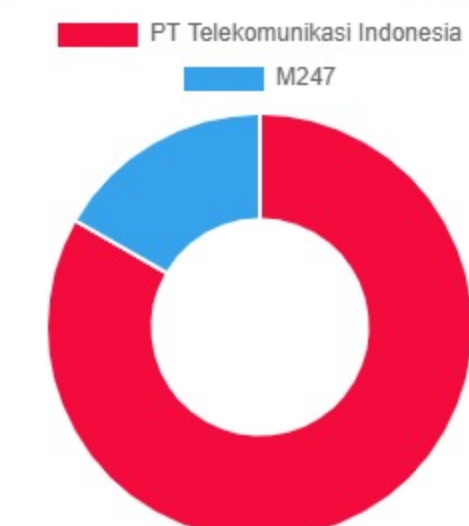
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGUNAAN PERANGKAT

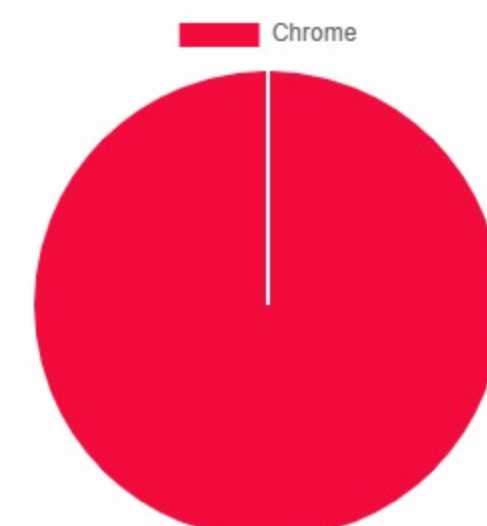
PERANGKAT



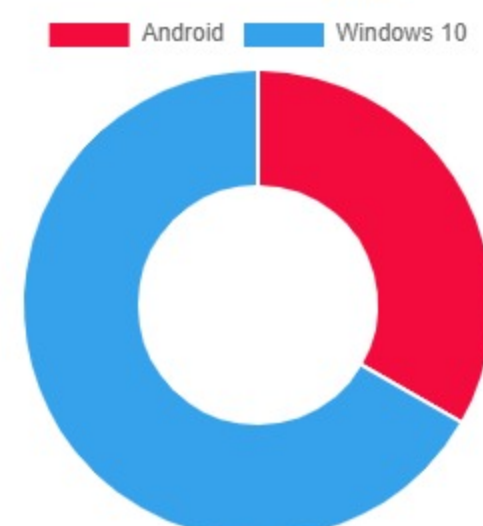
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

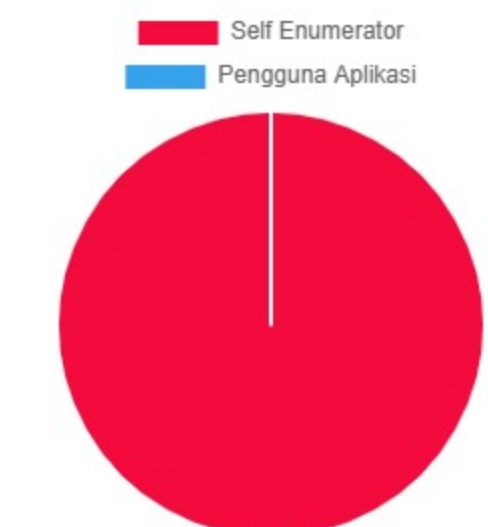


OPERATING SYSTEM

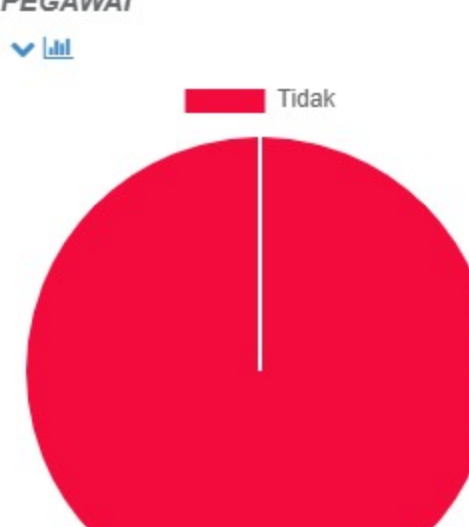


PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN



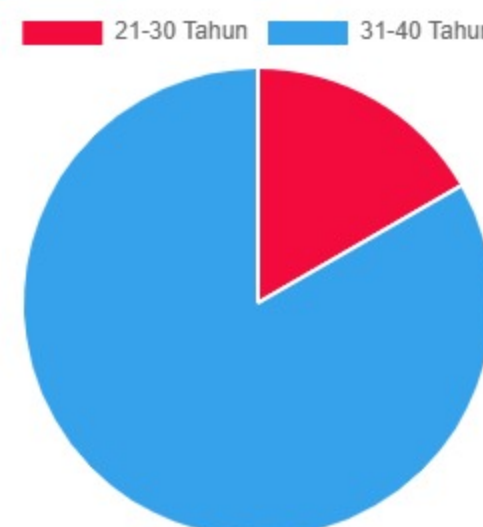
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK April 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Maret 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2024

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2024

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2024

< >
1 - 20 dari ?

SURVEI IKM-IPK MARET 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.68/17.50
(95.31/100) (3.81/4)

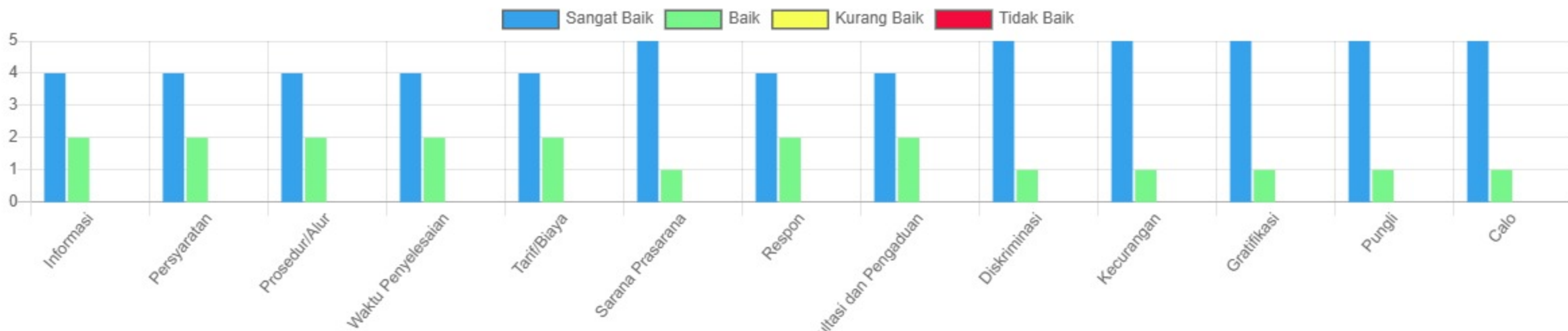
III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.06/17.50
(97.50/100) (3.90/4)



Responden
6

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.68/17.50 **95.31/100** **3.81/4**



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL

Indeks Lokus Wilayah Bebas dari Korupsi Lokus Nasional
Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional) Lokus Provinsi/ Wilayah
Lokus Provinsi/ Wilayah



Indeks Lokus Wilayah Bebas dari Korupsi Lokus Nasional
Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional) Lokus Provinsi/ Wilayah
Lokus Provinsi/ Wilayah



ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

Variabel Indeks Lokus Lokus Nasional Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional) Lokus Provinsi/ Wilayah Lokus Jenis Unit Kerja (Provinsi/ Wilayah)

	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.63	16.76	-0.13	15.27	1.36	16.58	0.05	15.27
Persyaratan	16.63	16.80	-0.17	16.37	0.26	16.75	-0.12	16.37
Prosedur/Alur	16.63	16.81	-0.18	16.26	0.37	16.70	-0.07	16.26
Waktu Penyelesaian	16.63	16.76	-0.13	16.42	0.21	16.71	-0.08	16.42
Tarif/Biaya	16.63	16.76	-0.13	16.65	-0.02	16.71	-0.08	16.65
Sarana Prasarana	17.06	16.71	0.35	15.93	1.13	16.47	0.59	15.93
Respon	16.63	16.77	-0.14	16.09	0.54	16.62	0.01	16.09
Konsultasi dan Pengaduan	16.63	16.77	-0.14	16.16	0.47	16.69	-0.06	16.16

(Nasional) Provi Wilay

	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	17.06	16.76	0.30	15.27	1.79	16.58	0.48	15.27
Persyaratan	17.50	16.80	0.70	16.37	1.13	16.75	0.75	16.37
Prosedur/Alur	17.06	16.81	0.25	16.26	0.80	16.70	0.36	16.26
Waktu Penyelesaian	17.06	16.76	0.30	16.42	0.64	16.71	0.35	16.42
Tarif/Biaya	17.50	16.76	0.74	16.65	0.85	16.71	0.79	16.65
Sarana Prasarana	16.63	16.71	-0.08	15.93	0.70	16.47	0.16	15.93
Respon	17.06	16.77	0.29	16.09	0.97	16.62	0.44	16.09
Konsultasi dan Pengaduan	17.06	16.77	0.29	16.16	0.90	16.69	0.37	16.16

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

SURVEI IKM-IPK MARET 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.12/17.50
(97.81/100) (3.91/4)

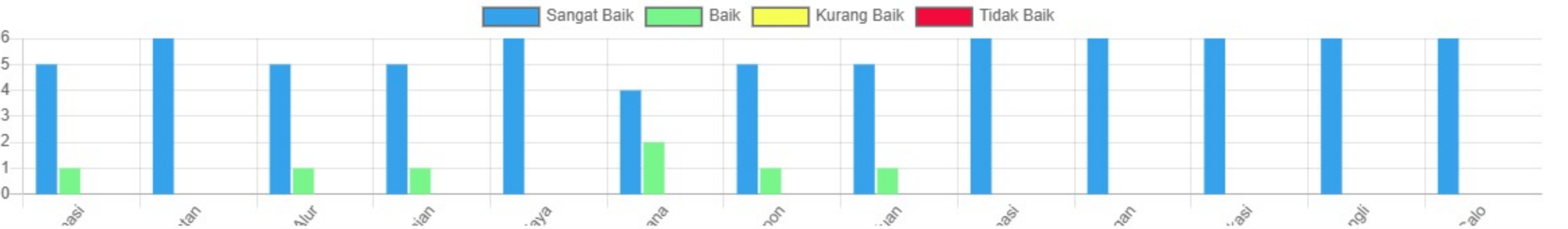
III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.50/17.50
(100/100) (4/4)



Responden
6

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

IKM/ IPK



SURVEI IKM-IPK MARET 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.12/17.50
(97.81/100) (3.91/4)

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.50/17.50
(100/100) (4/4)



Responden
6

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

IKM/ IPK




Muhammad Sofyan Hadi Mustofa
Analis Organisasi dan Tata Laksana

Laman

Survei

3AS Case Survey Management System Log out

Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

- IKM/ IPK**
IKM-IPK Februari 2025
- IKM/ IPK**
IKM-IPK Januari 2025
- IKM/ IPK**
IKM-IPK Desember 2024
- IKM/ IPK**
IKM-IPK November 2024
- IKM/ IPK**
IKM-IPK Oktober 2024

SURVEI IKM-IPK FEBRUARI 2025
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.50/17.50
100/100 4/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.50/17.50
100/100 4/4

Responden
5

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

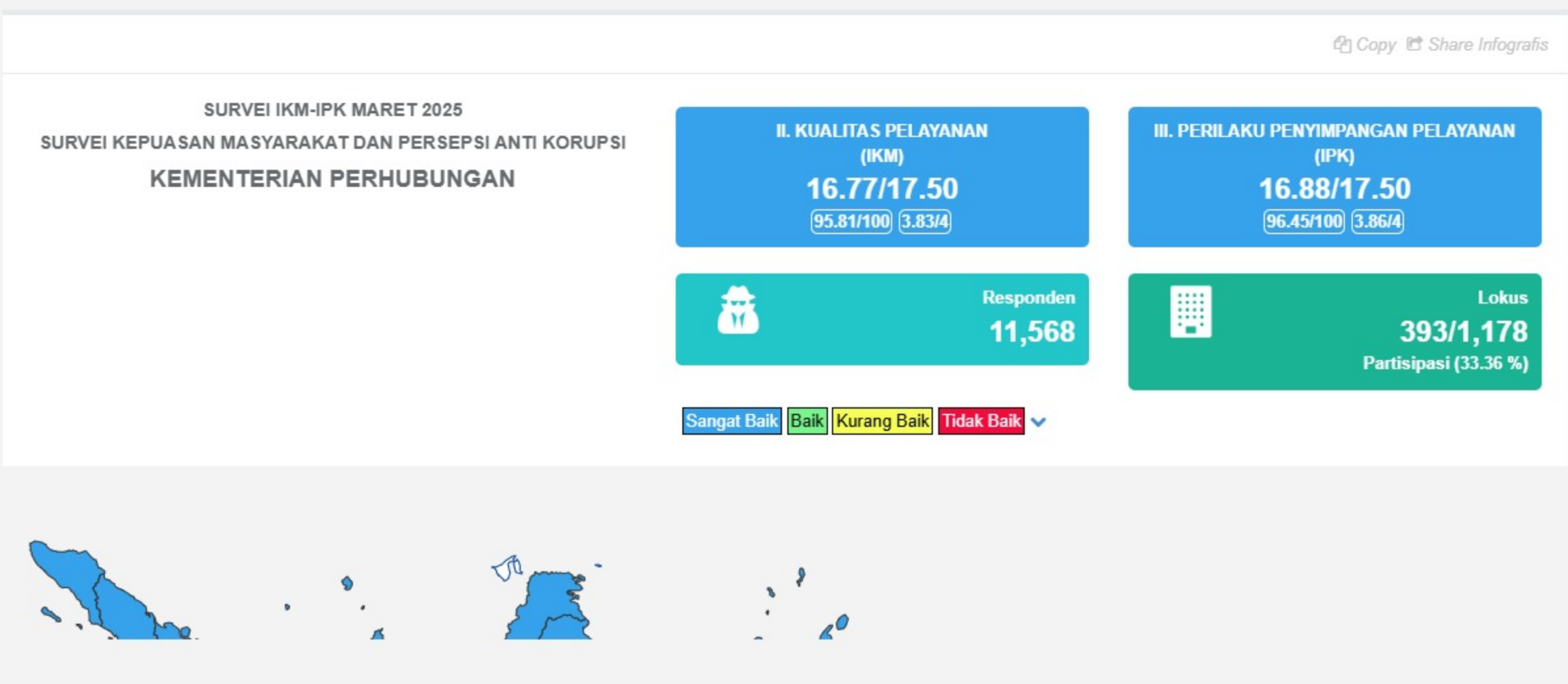
Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

Laman

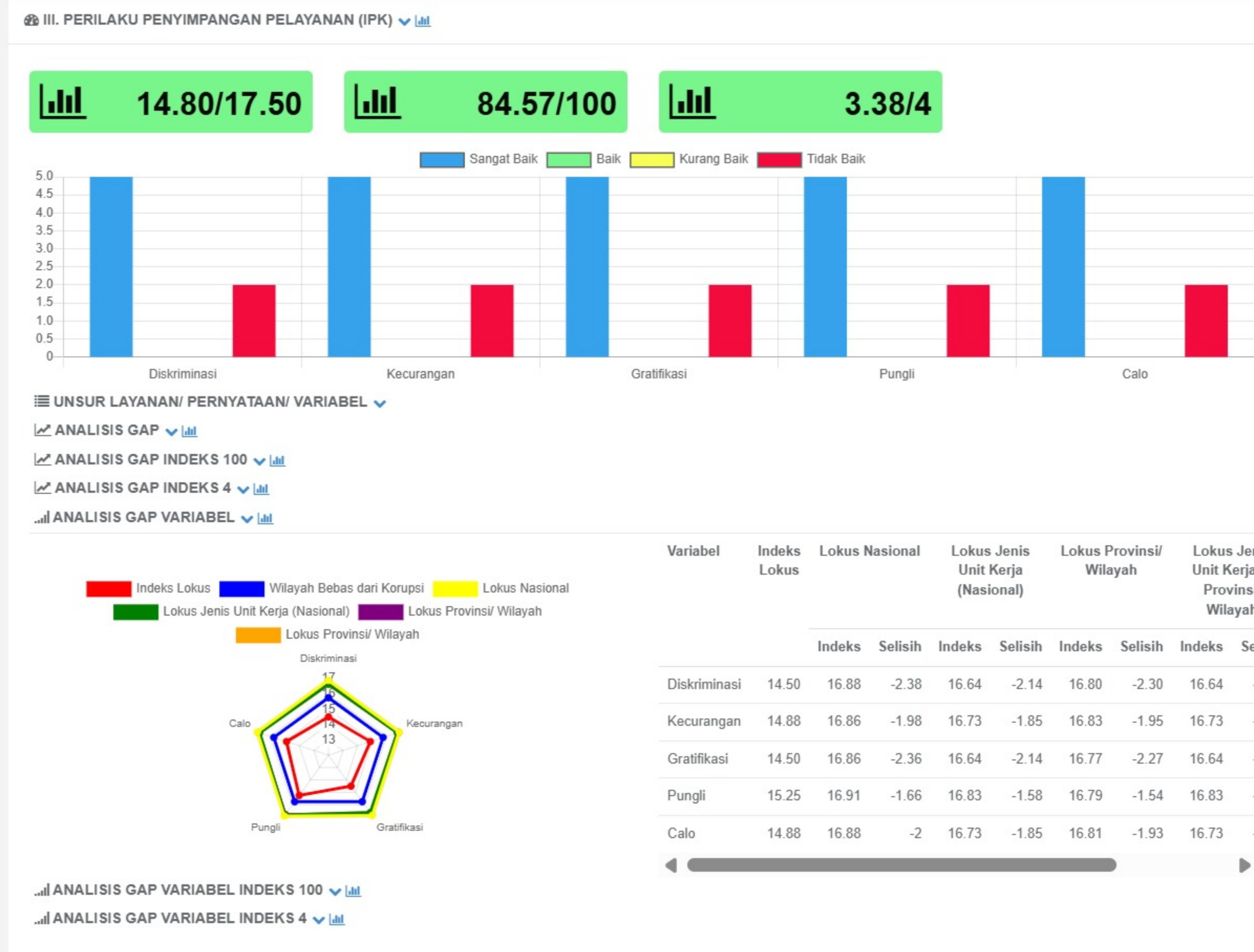
Survei

IKM/ IPK IKM-IPK April 2025
IKM/ IPK IKM-IPK Maret 2025
IKM/ IPK IKM-IPK Februari 2025
IKM/ IPK IKM-IPK Januari 2025
IKM/ IPK IKM-IPK Desember 2024



Unit Organisasi	Lokus	Nilai	Mutu
Badan Kebijakan Transportasi	3	100	Sangat Baik (A)
Badan Pengembangan SDM Perhubungan	26	93.89	Sangat Baik (A)
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	120	95.68	Sangat Baik (A)
Direktorat Jenderal Perkeretaapian	6	95.19	Sangat Baik (A)
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	89	96.95	Sangat Baik (A)
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	147	96.45	Sangat Baik (A)
Sekretariat Jenderal	2	89.52	Baik (B)

15	Balai Besar Kalibrasi fasilitas Penerbangan	99.53	3.98	Sangat Baik (A)
16	Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	97.95	3.92	Sangat Baik (A)
17	Balai Pengelola Kereta Api Ringan	100	4	Sangat Baik (A)
18	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	94.11	3.76	Sangat Baik (A)
15	Balai Besar Kalibrasi fasilitas Penerbangan	99.53	3.98	Sangat Baik (A)
16	Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	97.95	3.92	Sangat Baik (A)
17	Balai Pengelola Kereta Api Ringan	100	4	Sangat Baik (A)
18	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	94.11	3.76	Sangat Baik (A)
19	Balai Pengujian Perkeretaapian	95.59	3.82	Sangat Baik (A)
20	Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran	93.61	3.74	Sangat Baik (A)
21	Biro Perencanaan	94.05	3.76	Sangat Baik (A)
22	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	96.25	3.85	Sangat Baik (A)
23	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	96.41	3.86	Sangat Baik (A)



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

Survei

IKM/ IPK

IKM-IPK Februari 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Januari 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Desember 2024

IKM/ IPK

IKM-IPK November 2024

IKM/ IPK

IKM-IPK Oktober 2024

IKM/ IPK

IKM-IPK September 2024

IKM/ IPK

IKM-IPK Agustus 2024

<

>

1 - 20 dari ?

SURVEI IKM-IPK JANUARI 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

15.94/17.50

91.09/1003.64/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

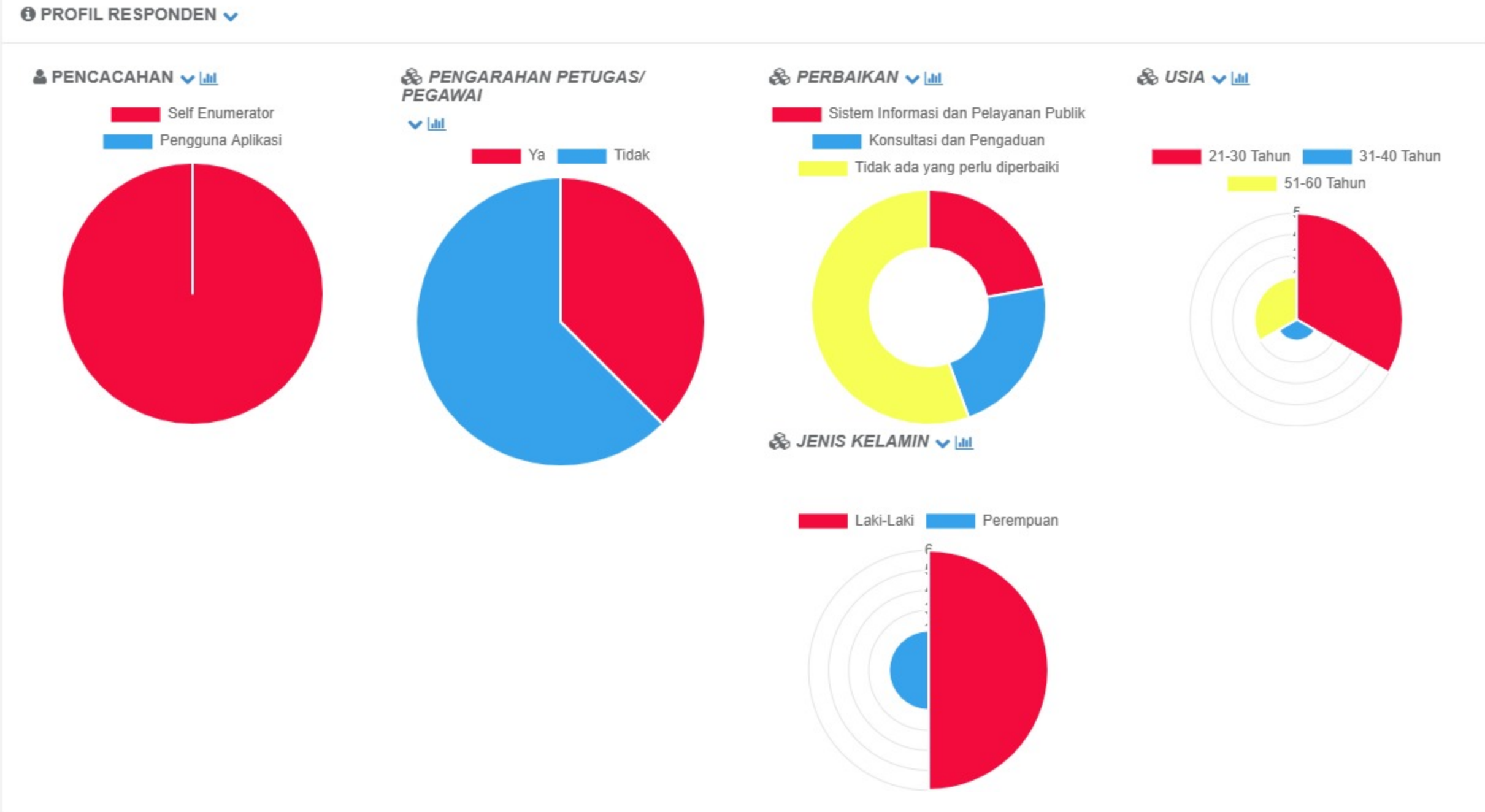
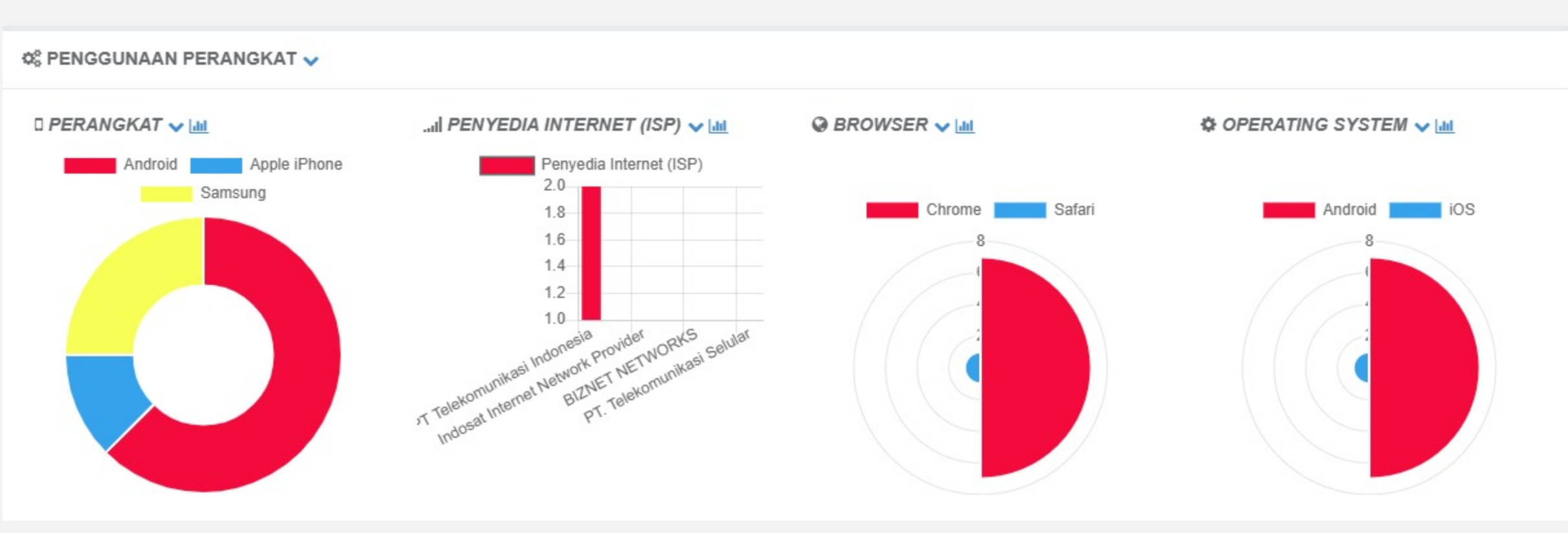
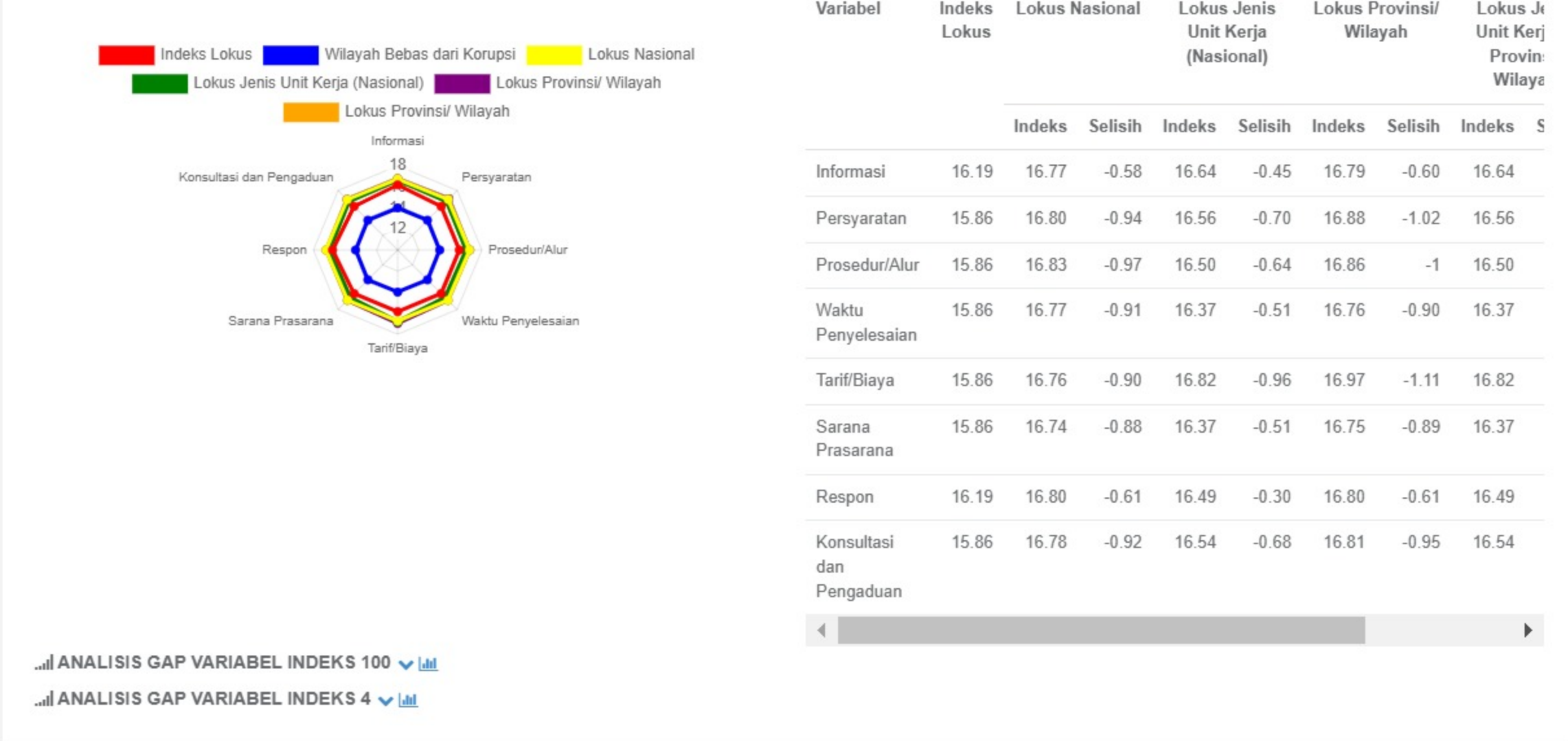
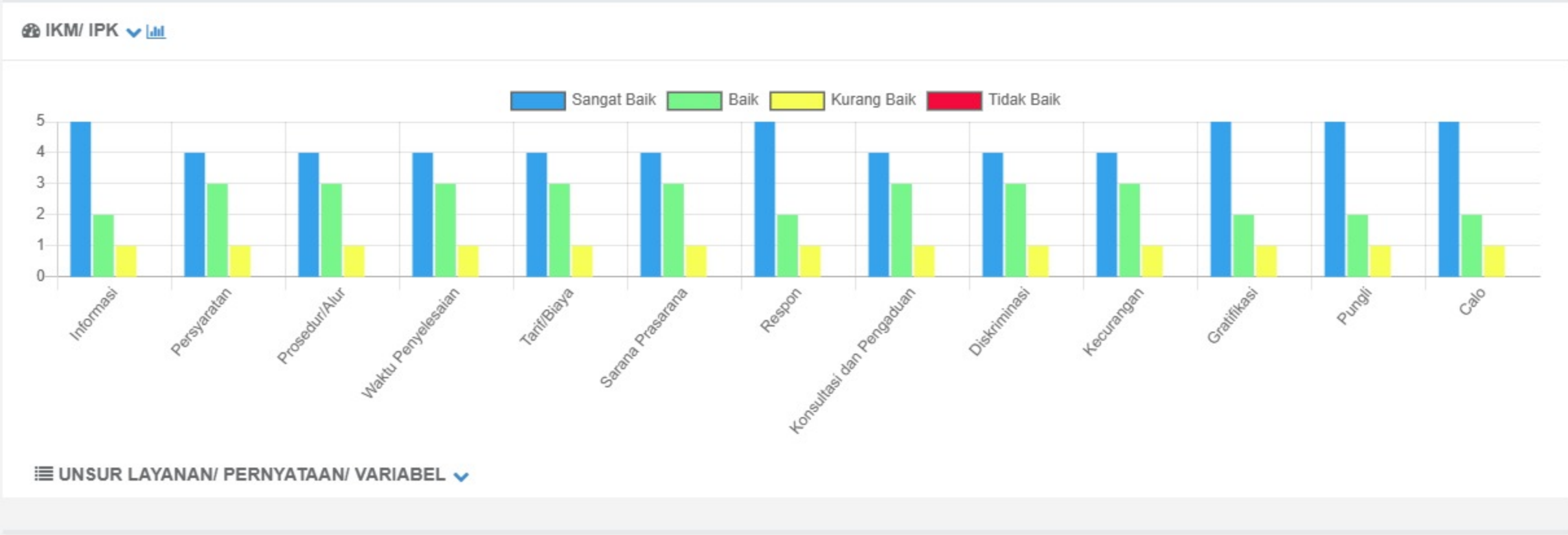
16.06/17.50

91.75/1003.67/4

Responden

8

Sangat BaikBaikKurang BaikTidak Baik




Muhammad Sofyan Hadi Mustofa
Analisis Organisasi dan Tata Laksana

Laman

Survei

3AS Case Survey Management System Log out

Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

- IKM/ IPK**
IKM-IPK April 2025
- IKM/ IPK**
IKM-IPK Maret 2025
- IKM/ IPK**
IKM-IPK Februari 2025
- IKM/ IPK**
IKM-IPK Januari 2025
- IKM/ IPK**
IKM-IPK Desember 2024

SURVEI IKM-IPK FEBRUARI 2025
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.50/17.50
100/100 4/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.98/17.50
97/100 3.88/4

Responden 1

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

IKM/ IPK

1.0 0.8

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

</


Muhammad Sofyan Hadi Mustofa
Analisis Organisasi dan Tata Laksana ▾

Laman

Survei ▾



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK

IKM-IPK April 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Maret 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Februari 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Januari 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Desember 2024

SURVEI IKM-IPK FEBRUARI 2025
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI
ANTI KORUPSI
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN**

II. KUALITAS PELAYANAN
(IKM)

16.98/17.50

97.01/100 3.88/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN
PELAYANAN
(IPK)

17.07/17.50

97.68/100 3.90/4



Responden

270

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik ▾

IKM/ IPK ▾



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

-
- IKM/ IPK
IKM-IPK Februari 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2025
- IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2024
- IKM/ IPK
IKM-IPK November 2024
- IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2024
- IKM/ IPK
IKM-IPK September 2024
- IKM/ IPK
IKM-IPK Agustus 2024

1 - 20 dari ?

SURVEI IKM-IPK JANUARI 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.37/17.50

99.24/1003.97/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.34/17.50

99.11/1003.96/4

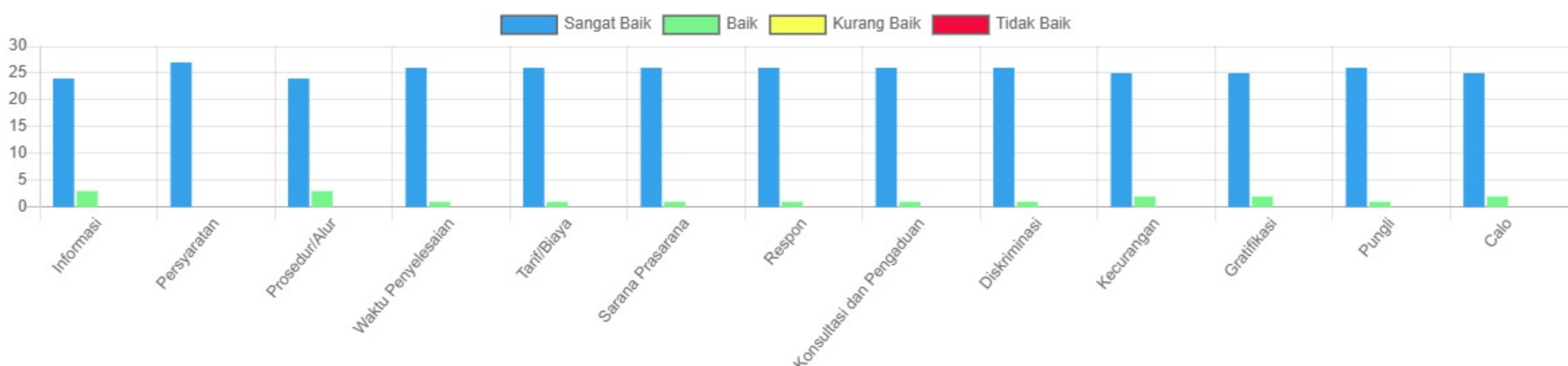


Responden

27

Sangat BaikBaikKurang BaikTidak Baik

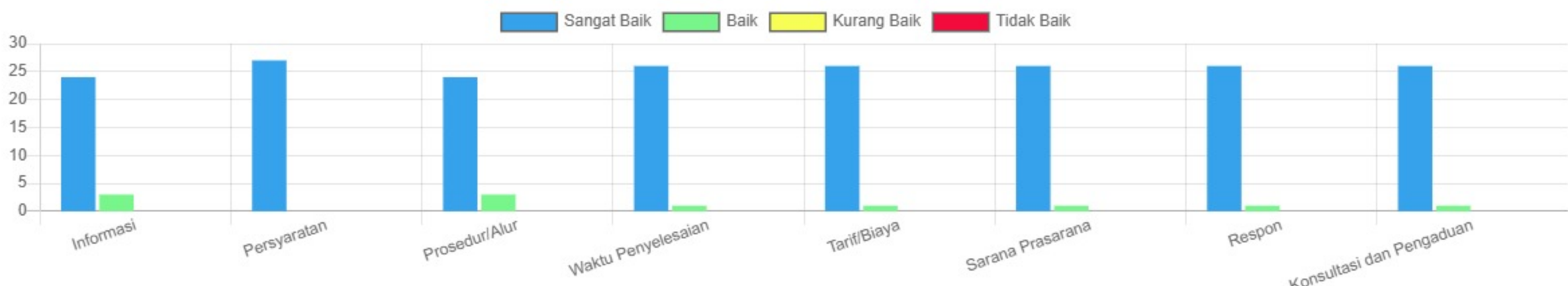
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.37/17.5099.24/1003.97/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL

Indeks LokusWilayah Bebas dari KorupsiLokus NasionalLokus Jenis Unit Kerja (Nasional)Lokus Provinsi/ WilayahLokus Provinsi/ Wilayah



ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi/ Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	
Informasi	17.21	16.77	0.44	17.14	0.07	16.79	0.42	17.14
Persyaratan	17.50	16.80	0.70	17.17	0.33	16.88	0.62	17.17
Prosedur/Alur	17.21	16.83	0.38	17.19	0.02	16.86	0.35	17.19
Waktu Penyelesaian	17.40	16.77	0.63	17.07	0.33	16.76	0.64	17.07
Tarif/Biaya	17.40	16.76	0.64	17.12	0.28	16.97	0.43	17.12
Sarana Prasarana	17.40	16.74	0.66	17.23	0.17	16.75	0.65	17.23
Respon	17.40	16.80	0.60	17.23	0.17	16.80	0.60	17.23
Konsultasi dan Pengaduan	17.40	16.78	0.62	17.23	0.17	16.81	0.59	17.23

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.34/17.5099.11/1003.96/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

ANALISIS GAP

ANALISIS GAP INDEKS 100

ANALISIS GAP INDEKS 4

ANALISIS GAP VARIABEL

Indeks LokusWilayah Bebas dari KorupsiLokus NasionalLokus Jenis Unit Kerja (Nasional)Lokus Provinsi/ WilayahLokus Provinsi/ Wilayah



ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100

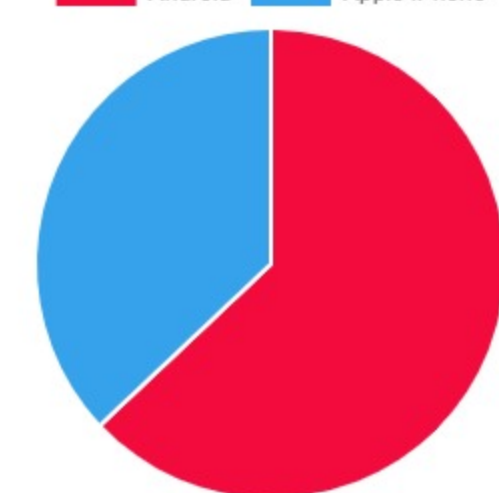
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi/ Wilayah
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	
Diskriminasi	17.40	16.93	0.47	17.29	0.11	17.08	0.32	17.29
Kecurangan	17.31	16.89	0.42	17.24	0.07	17.06	0.25	17.24
Gratifikasi	17.31	16.90	0.41	17.24	0.07	17.16	0.15	17.24
Pungli	17.40	16.94	0.46	17.23	0.17	17.17	0.23	17.23
Calo	17.31	16.86	0.45	17.18	0.13	17.13	0.18	17.18

PENGUNAAN PERANGKAT

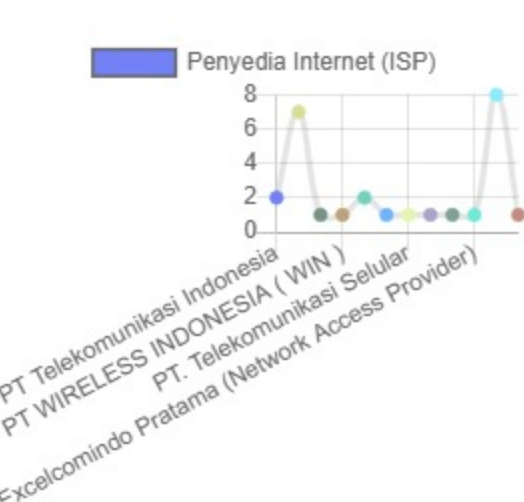
PERANGKAT

AndroidApple iPhone



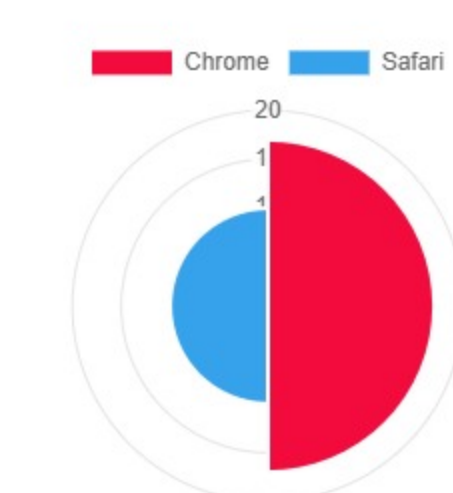
PENYEDIA INTERNET (ISP)

Penyedia Internet (ISP)



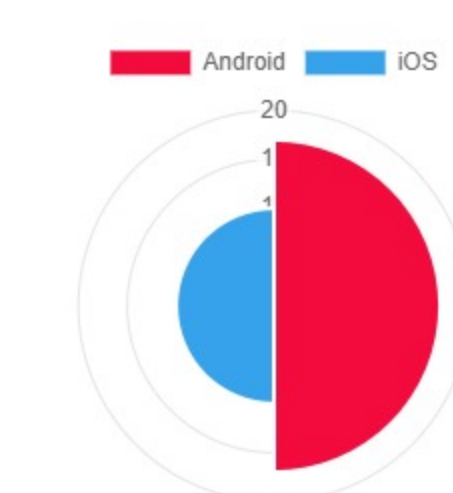
BROWSER

ChromeSafari



OPERATING SYSTEM

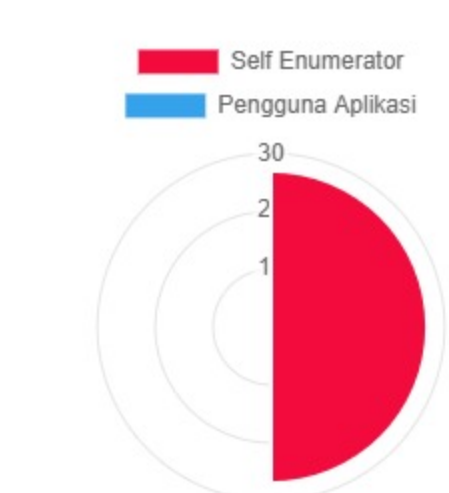
AndroidiOS



PROFIL RESPONDEN

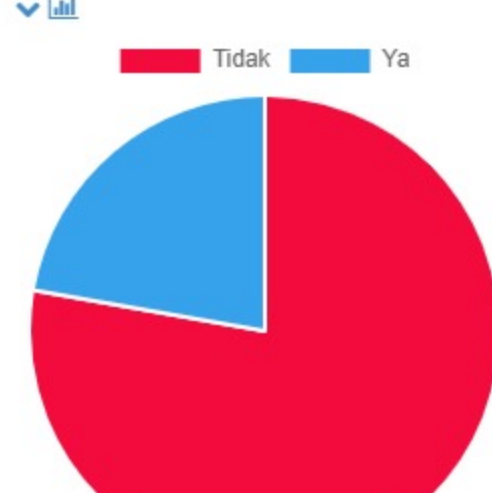
PENCACAHAN

Self EnumeratorPengguna Aplikasi



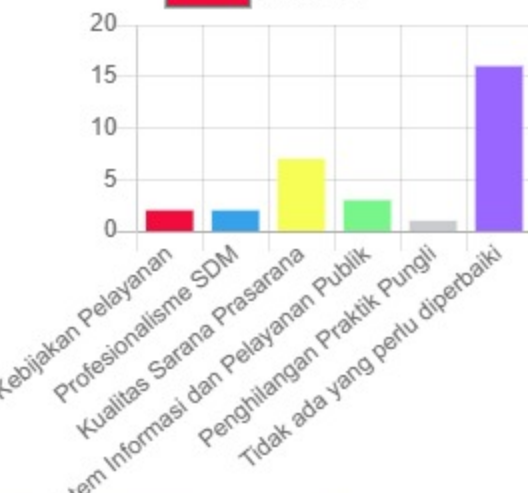
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

TidakYa



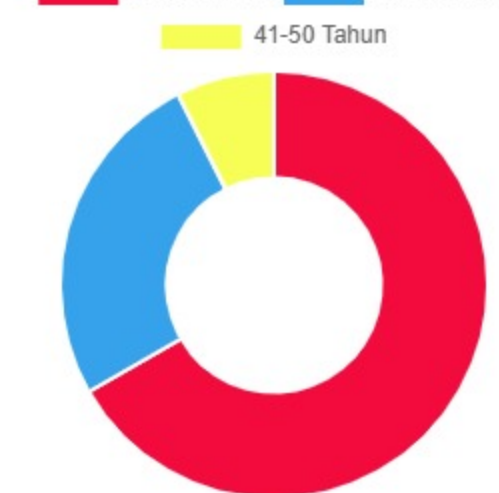
PERBAIKAN

Perbaikan



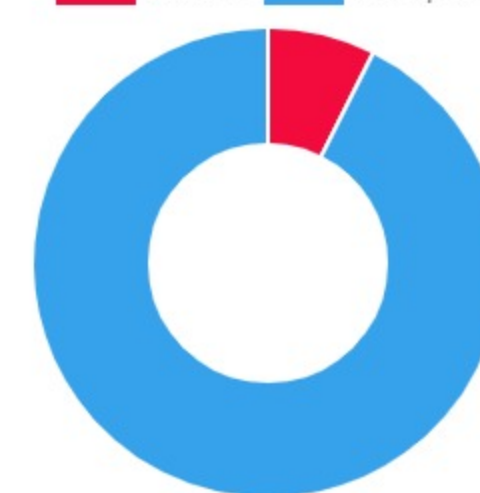
USIA

18-20 Tahun21-30 Tahun41-50 Tahun



JENIS KELAMIN

Laki-LakiPerempuan





Muhammad Sofyan Hadi Mustofa
 Analis Organisasi dan Tata Laksana -

Laman

 Survei

Dashboard

[Survei](#) / [Hasil](#) / [Dashboard](#)

IKM/ IPK

IKM-IPK April 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Maret 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Februari 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Januari 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Desember 2024

SURVEI IKM-IPK FEBRUARI 2025
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI
ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.24/17.50

98.54/100 3.94/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.27/17.50

98.67/100 3.95/4

Responden

9

Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik

IKM/ IPK

 Sangat Baik
  Baik
  Kurang Baik
  Tidak Baik



SURVEI

IKM/ IPK

IKM-IPK April 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Maret 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Februari 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Januari 2025

IKM/ IPK

IKM-IPK Desember 2024

IKM/ IPK

IKM-IPK November 2024

IKM/ IPK

IKM-IPK Oktober 2024

<

>

1 - 20 dari ?

SURVEI IKM-IPK MARET 2025

SURVEI KEPuasan MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.50/17.50

100/100 4/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50

100/100 4/4

Responden

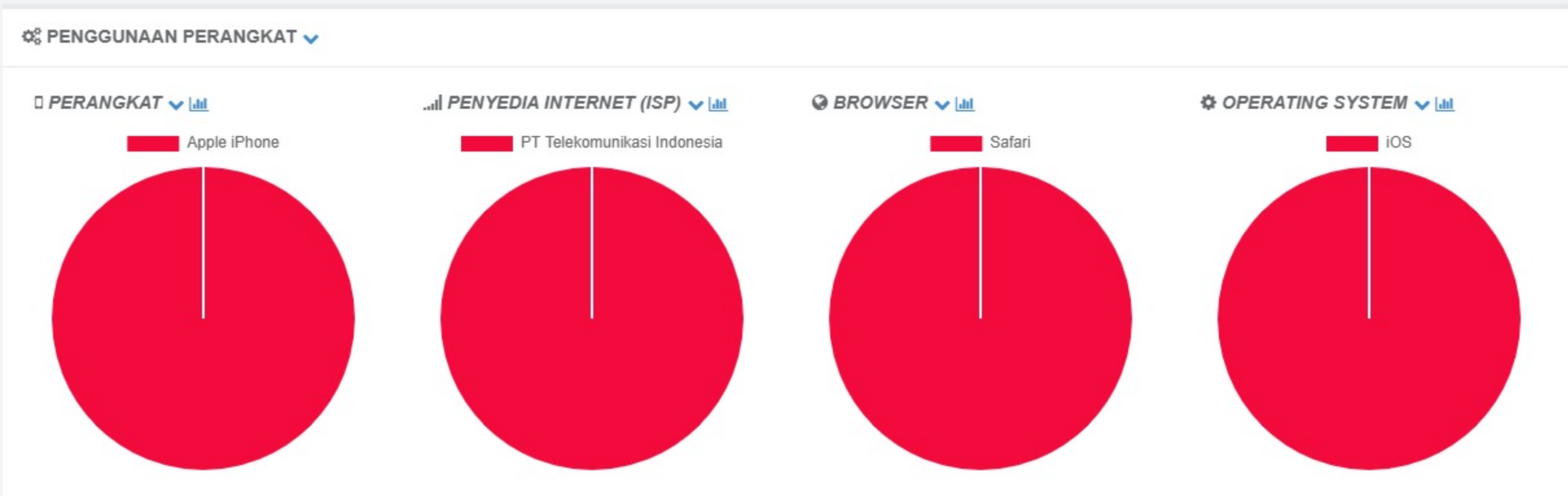
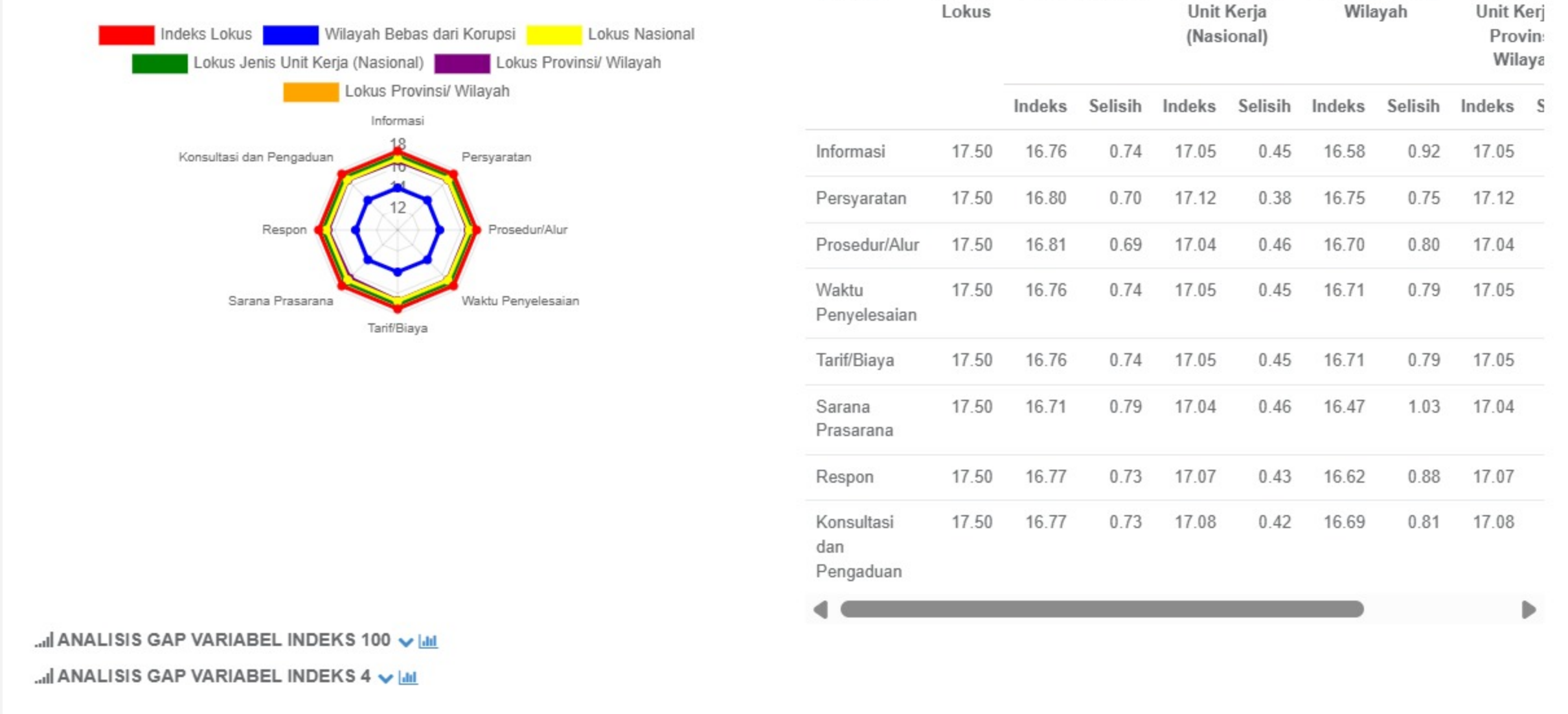
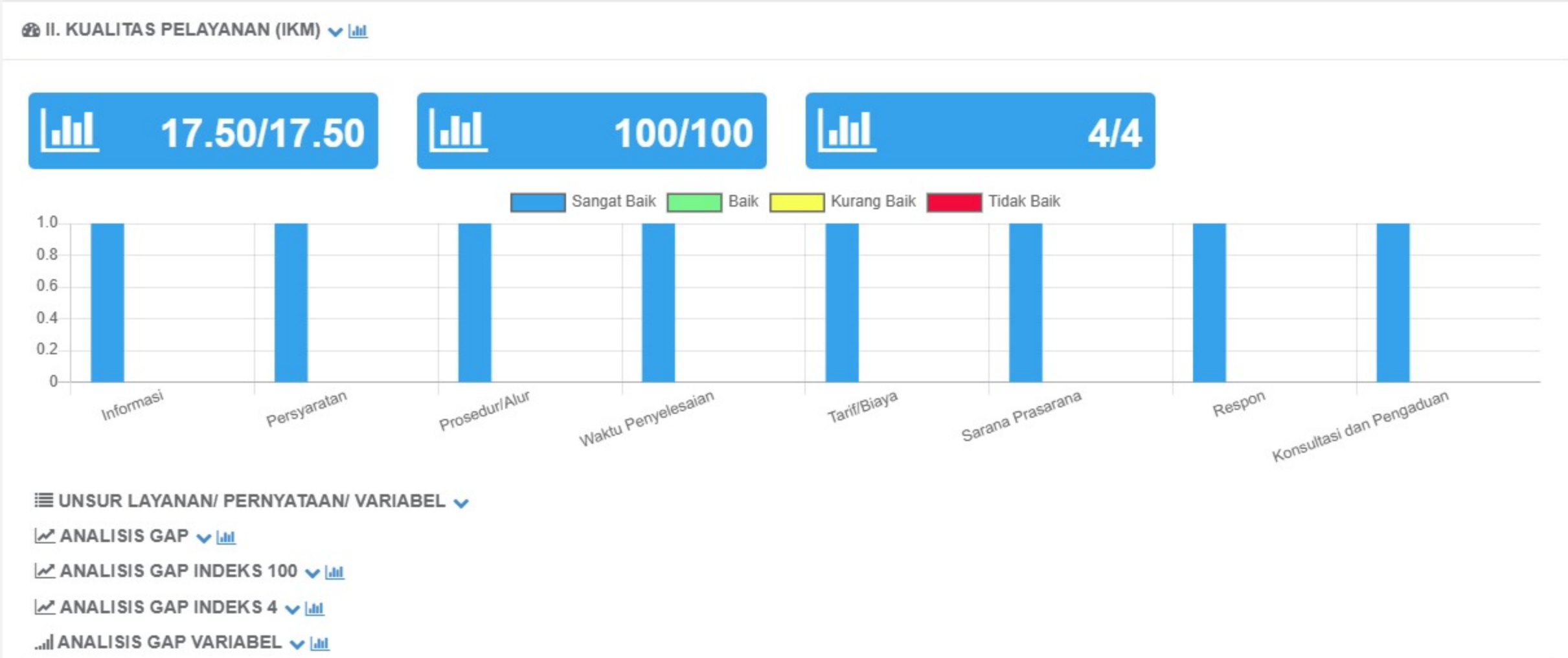
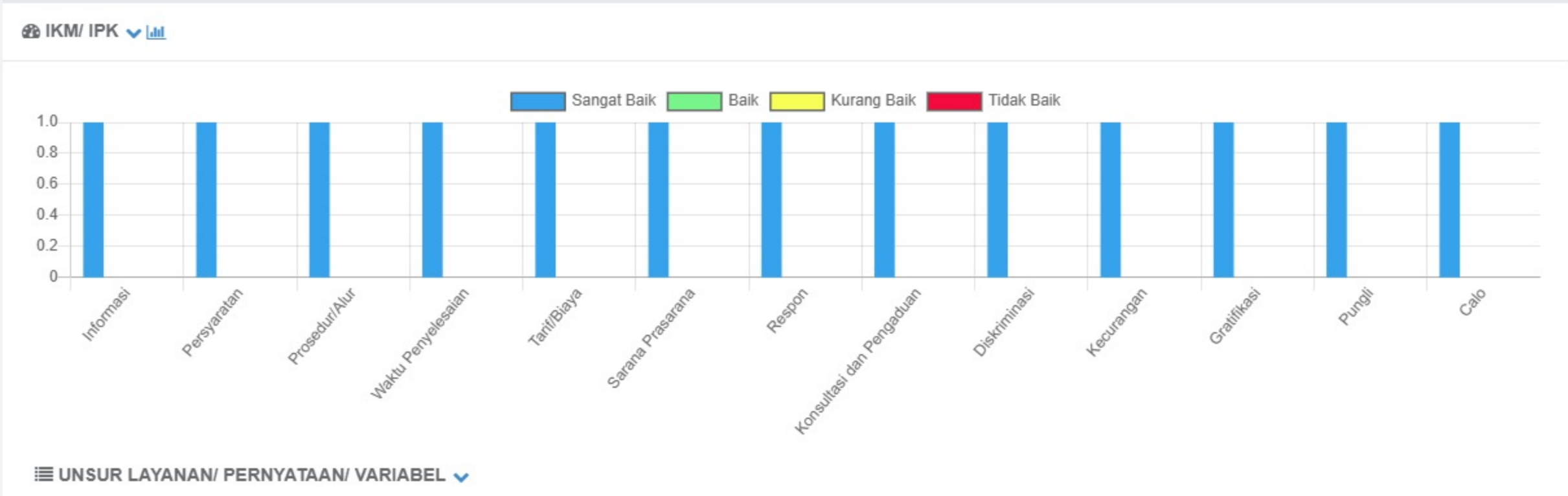
1

Sangat Baik

Baik

Kurang Baik

Tidak Baik



BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BERDASARKAN HASIL SURVEI INTERNAL BPKAR-SS TAHUN 2025													
URAIAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH / RATA-RATA
JUMLAH RESPONDEN	376	375	369										
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN (SKALA 1-100)	89,695	89,68	89,47										
KETERANGAN	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK										
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN (SKALA 1-4)	3,58	3,58	3,57										
KETERANGAN	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK										



Aditya Yuniarto
NIP. 19850609 200712 1 001

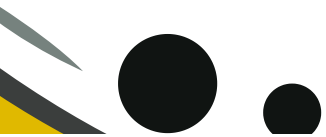


LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4

PERSENTASE *ON TIME PERFORMANCE (OTP)* TRANSPORTASI KERETA API

[HTTPS://TINYURL.COM/OTPTW12025](https://tinyurl.com/OTPTW12025)





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA
10110

TEL: 0813 6001 3838

WEBSITE: <http://djka.dephub.go.id/>
EMAIL: ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ~~0061~~ /K2.2/IV / 2025

Yth : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Dari : Kasubdit Lalu Lintas
Hal : Penyampaian Data Dukung Pencapaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025
di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Tanggal : 22 April 2025

Menunjuk Nota Dinas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor 0148/K2/IV/2025 tanggal 22 April 2025 perihal Permohonan Data Dukung Pencapaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Sementara Realisasi Perjalanan KA dibandingkan Gapeka
Capaian secara kumulatif hingga Triwulan I Tahun 2025 sebesar 103,02%, nilai tersebut telah memenuhi Target IKU Tahun 2025 sebesar 95,42%. Terpenuhinya Target IKU tersebut dipengaruhi oleh:
 - 1) Penambahan frekuensi LRT Jabodebek yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 158 KA, saat ini beroperasi sebanyak 366 KA saat *weekday* dan 270 KA saat *weekend*;
 - 2) Penambahan frekuensi LRT Sumsel yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 88 KA, saat ini beroperasi sebanyak 94 KA saat *weekday* dan 102 KA saat *weekend*; dan
 - 3) Pengoperasian KA Tambahan pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2025.
2. Capaian Sementara Kedatangan dan Keberangkatan KA Tepat Waktu
Capaian secara kumulatif hingga Triwulan I Tahun 2025 sebesar 97,41%, nilai tersebut telah memenuhi Target IKU Tahun 2025 sebesar 96,10%. Terpenuhinya Target IKU seiring dengan tingginya OTP selama Triwulan I Tahun 2025 LRT Jabodebek (99,28%), LRT Sumatera Selatan (99,57%), MRT Jakarta (99,98%), dan LRT Jakarta (99,99%).

Terhadap kedua capaian sementara tersebut, akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional periode Triwulan I Tahun 2025 sebagai verifikasi dan validasi data capaian dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan data dukung kinerja Triwulan I Tahun 2025 di Subdirektorat Lalu Lintas sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan arahan lanjut Bapak Direktur, diucapkan terima kasih.



Awang Meindra, S.SiT., MT
NIP 198105162002121003

Tembusan:

Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat LLAKE

Lampiran Nota Dinas

Nomor : 8061 / P2.2 LW / 2025

Tanggal : 22 April 2025

I. Capaian Kinerja Tahun 2025

A. Realisasi Perjalanan Kereta Api

Bulanan			Renaksi			Program						Realisasi			
			Bulanan	Bulanan	Kumulatif	Frekuensi				Capaian					
						KA Penumpang	KA Barang	Total	Total Kumulatif	Bulanan	Kumulatif				
TW 1	1	Januari	95,42%	89.201	89.201	82.071	6.438	88.509	88.509	99,22%	99,22%				
	2	Februari	95,42%	77.948	167.149	76.067	6.042	82.109	170.618	105,34%	102,08%				
	3	Maret	95,42%	86.518	253.667	84.561	6.153	90.714	261.332	104,85%	103,02%				
TW 2	4	April	95,42%	83.751	337.418	-	-	-	-	-	-				
	5	Mei	95,42%	86.359	423.777	-	-	-	-	-	-				
	6	Juni	95,42%	83.478	507.255	-	-	-	-	-	-				
TW 3	7	Juli	95,42%	86.359	593.614	-	-	-	-	-	-				
	8	Agustus	95,42%	86.209	679.823	-	-	-	-	-	-				
	9	September	95,42%	83.562	763.385	-	-	-	-	-	-				
TW 4	10	Oktober	95,42%	86.347	849.732	-	-	-	-	-	-				
	11	November	95,42%	83.428	933.160	-	-	-	-	-	-				
	12	Desember	95,42%	86.684	1.019.844	-	-	-	-	-	-				

B. Jumlah Kedatangan Kereta Api Tepat Waktu (OTP)

BULAN		RENAKSI	REALISASI		KA BERANGKAT TEPAT				KA DATANG TEPAT				RATA RATA		PERSENTASE CAPAIAN	
		Bulan	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang + Penumpang	Kumulatif	Barang + Datang	Kumulatif	Bulan	Kumulatif
TW 1	Januari	96,10%	88.509	88.509	6.075	81.512	87.587	87.587	5.218	79.883	85.101	85.101	88.344	88.344	97,55%	97,55%
	Februari	96,10%	82.109	170.618	5.726	75.274	81.000	168.587	4.441	73.835	78.276	163.377	79.638	165.982	96,99%	97,28%
	Maret	96,10%	90.714	261.332	5.825	83.954	89.779	258.366	4.706	82.702	87.408	250.785	88.594	254.576	97,86%	97,41%
TW 2	April	96,10%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Mei	96,10%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Juni	96,10%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
TW 3	Juli	96,10%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Agustus	96,10%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	September	96,10%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
TW 4	Oktober	96,10%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	November	96,10%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Desember	96,10%	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-

Keterangan:



: Rencana Aksi (Renaksi) bulanan berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Tahun 2025

: Data sementara, akan disampaikan revisi data setelah evaluasi pelaksanaan Gapeka Triwulan I 2025

II. Matriks Analisis Keberhasilan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan	Realisasi Per Maret 2025	Analisis Keberhasilan
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	95,42%	103,02%	Terpenuhinya Target IKU tersebut dipengaruhi oleh: a. Penambahan frekuensi LRT Jabodebek yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 158 KA, saat ini beroperasi sebanyak 366 KA saat <i>weekday</i> dan 270 KA saat <i>weekend</i>; b. Penambahan frekuensi LRT Sumsel yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 88 KA, saat ini beroperasi sebanyak 94 KA saat <i>weekday</i> dan 102 KA saat <i>weekend</i>; dan c. Pengoperasian KA Tambahan pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2025.
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	96,10%	97,41%	Terpenuhinya Target IKU seiring dengan tingginya OTP selama Triwulan I Tahun 2025 LRT Jabodebek (99,28%), LRT Sumatera Selatan (99,57%), MRT Jakarta (99,98%), dan LRT Jakarta (99,99%).

III. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Periode Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Dalam hal perjalanan KA di luar Gapeka yang berjalan ≥ 30 hari, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana agar mengajukan permohonan disertai dengan kajian yang disampaikan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana yang meliputi demand, waktu pelayanan, jenis pelayanan, jenis sarana, dan kapasitas angkut; c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan d. Penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	a. Telah dilakukan perubahan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional di Jawa, Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Barat, Sumatera Bagian Selatan, dan Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan perjalanan kereta api, terhitung berlaku sejak 1 Februari 2025; b. Telah dilaksanakan evaluasi harian kinerja operasi pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung. Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional periode Triwulan I Tahun 2025 sebagai verifikasi dan validasi data capaian dimaksud.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan perjalanan KA; c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.	a. Telah dilakukan perubahan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional di Jawa, Sumatera Bagian Utara, Sumatera Bagian Barat, Sumatera Bagian Selatan, dan Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan perjalanan kereta api, terhitung berlaku sejak 1 Februari 2025; b. Telah dilaksanakan evaluasi harian kinerja operasi pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung. Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional periode Triwulan I Tahun 2025 sebagai verifikasi dan validasi data capaian dimaksud.; c. Koordinasi secara aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian terhadap penanganan kejadian penyebab kelambatan perjalanan kereta api serta mengantisipasi potensi adanya rintang jalan yang dapat mengakibatkan kelambatan perjalanan kereta api.

IV. Matriks Upaya Peningkatan Kinerja Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan	Realisasi Per Maret 2025	Kriteria Upaya	Rekomendasi
1	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan Gapeka	95,42%	103,02%	Aktivitas	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
				Kebijakan	a. Penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu	96,10%	97,41%	Aktivitas	a. Menjaga agar perjalanan KA sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan c. Mendorong agar Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian mengantisipasi kelambatan perjalanan KA;.



Awang Meindra, S.SiT., MT
NIP 198105162002121003



LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 5
PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API



JUMLAH ANGKUTAN BARANG TAHUN 2025

1. REKAPITULASI ANGKUTAN BARANG PULAU JAWA

[illegible]

2. REKAPITULASI ANGKUTAN BARANG PULAU SUMATERA

[illegible]

3. JUMLAH BARANG TERANGKUT DENGAN KA

Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
BBM	207.515	187.465	213.095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608.076
PUPUK	3.810	1.380	1.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.780
SEMEN	163.879	176.334	132.597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472.810
BATUBARA	4.630.852	4.259.114	4.455.311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.345.276
HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULI	59.547	51.009	45.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.410
PETIKEMAS	367.306	386.537	452.778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.206.621
KARET & KLINKER	85.800	73.800	72.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.600
RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	19.732	20.290	18.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.912
LAINNYA (BANK INDONESIA,BEA KLB,ANGKUTAN DINAS,ANGKUTAN SATKER,MOTIS, BEA LANGSIR)	7.290	6.638	13.678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.606
TOTAL	5.545.731	5.162.567	5.405.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.114.092
		TW I	16.114.092		TW II	-		TW III	-		TW IV	-	

Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Kumulatif	5.545.731	10.708.298	16.114.092	16.114.092	16.114.092	16.114.092	16.114.092	16.114.092	16.114.092	16.114.092	16.114.092	16.114.092
Kumulatif Renstra	5.545.731	10.708.298	16.114.092	16.114.092	16.114.092	16.114.092	16.114.092	16.114.092	16.114.092	16.114.092	16.114.092	16.114.092
Realisasi	1,55%	2,98%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%


 Aditya Karsa
 NIP 198609022008121001

JUMLAH PENUMPANG KA TERANGKUT TAHUN 2025

1. KA PSO

KERETA	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KA Ekonomi Jarak Jauh	339.670	315.175	372.014										1.026.859
KA Ekonomi Jarak Sedang	595.501	530.652	531.125										1.657.278
KA Ekonomi Jarak Dekat	412.566	388.181	282.766										1.083.513
KRD Ekonomi	112.895	97.339	73.050										283.284
KA Ekonomi Lebaran	0	0											0
TOTAL	1.460.632	1.331.347	1.258.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.050.934
	Triwulan I		4.050.934	Triwulan II		0	Triwulan III		0	Triwulan IV		0	4.050.934

2. PENUMPANG KA KOMERSIL

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
Eksekutif	1.065.697	900.285	880.660										2.846.642
Bisnis	100.989	89.043	84.960										274.992
Ekonomi	1.777.800	1.384.033	1.477.159										4.638.992
Lokal Eksekutif	38.067	23.852	24.355										86.274
Lokal Bisnis	12.900	0	0										12.900
Lokal Ekonomi	92.243	107.603	111.488										311.334
Wisata Ambarawa	0	0	0										0
Priority	15.896	10.056	10.256										36.208
TOTAL	3.103.592	2.514.872	2.588.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.207.342
	TRIWULAN 1		8.207.342	TRIWULAN 2		0	TRIWULAN 3		0	TRIWULAN 4		0	8.207.342

3. PENUMPANG KA PERINTIS

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL
LRT Sumsel (Bandara-DJKA)	392.423	328.361	288.953										1.009.737
Cut Meutia (Kutablang-Muara Satu)	5.018	8.291	299										13.608
Lembah Anai (Bandara Intl Minangkabau-Kayu T	9.932	7.270	6.363										23.565
Bathara Kresna (Purwosari-Wonogiri)	12.497	17.931	12.408										42.836
Makassar-Parepare (Mandai-Garongkong/ Mang	17.943	14.965	9.453										42.361
Amir Hamzah (Binjai-Besitang)	0	0											
Nurmala (Rantau Prapat Baru-Pondok S5)	0	0											
Jumlah	437.813	376.818	317.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.132.107
	Triwulan I		1.132.107	Triwulan II		0	Triwulan III		0	Triwulan IV		0	1.132.107

-100,00%

#DIV/0!

PT KCI

4. PSO KRL

KA	Realisasi Jumlah Penumpang KRL JABODETABEK Tahun 2023												TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KRL Jabodetabek	27.936.405	27.204.191	26.973.738										82.114.334
KRL Yogyakarta	712.152	608.843	543.808										1.864.803
KA Lokal Wilayah I	380.881	345.130	288.934										1.014.945
KA Lokal Wilayah II	1.552.573	1.422.530	1.359.801										4.334.904
KA Lokal Wilayah VI	86.973	79.276	72.011										238.260
KA Lokal Wilayah VII	1.335.245	1.232.033	1.122.288										3.689.566
TOTAL	32.004.229	30.892.003	30.360.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.256.812
	Triwulan I		93.256.812	Triwulan II		0	Triwulan III		0	Triwulan IV		0	93.256.812

5. KA KOMERSIAL

KA	Realisasi Jumlah Penumpang KRL JABODETABEK Tahun 2023												TOTAL
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
KA Bandara Soetta (SHIA)	177.466	168.836	170.864										517.166
	177.466	168.836	170.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517.166
TOTAL	Triwulan I		517.166	Triwulan II		0	Triwulan III		0	Triwulan IV		0	517.166

Tahun 2023 KA Bandara Soetta (SHIA) dikelola oleh PT. KCI

PT RAILINK

6. KA PSO

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
KA Bandara YIA	148.567	120.258	121.988										390.813
Srilelawangsa K3 Premium (MDN-BIJ-KBG)	206.465	192.715	166.787										
Srilelawangsa Woojin (MDN-BIJ)	9.949	21.043	21.570										
Srilelawangsa (MDN-ARB)	94.677	82.348	72.184										
Jumlah	459.658	416.364	382.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.258.551
	Triwulan I		1.258.551	Triwulan II		0	Triwulan III		0	Triwulan IV		0	1.258.551

-100,00%

#DIV/0!

7. KA KOMERSIAL

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Yogyakarta Ekspres	81.149	81.644	68.330										231.123
Srilelawangsa (MDN-ARB-KNO)	46.379	42.157	39.920										128.456
Jumlah	127.528	123.801	108.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359.579
	Triwulan I		359.579	Triwulan II		0	Triwulan III		0	Triwulan IV		0	359.579

-100,00%

#DIV/0!

PT MRT

8. PENUMPANG MRT JAKARTA

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
MRT J	3.579.538	3.483.799	3.219.035										10.282.372
Jumlah	3.579.538	3.483.799	3.219.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.282.372
	Triwulan I		10.282.372	Triwulan II		0	Triwulan III		0	Triwulan IV		0	10.282.372

-100,00%

#DIV/0!

PT LRT JAKARTA

9. PENUMPANG LRT JAKARTA (VELODROME - KELAPA GADING)

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
LRT JAKARTA (Velodrome - K. Gading)	100.593	92.439	85.531										278.563
Jumlah	100.593	92.439	85.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.563
	Triwulan I		278.563	Triwulan II		0	Triwulan III		0	Triwulan IV		0	278.563

-100,00%

#DIV/0!

LRT JAKARTA JABODEBEK

10. PENUMPANG LRT JABODEBEK

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
LRT JABODEBEK	2.146.859	2.147.665	2.056.759										6.351.283
Jumlah	2.146.859	2.147.665	2.056.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.351.283
	Triwulan I		6.351.283	Triwulan II		0	Triwulan III		0	Triwulan IV		0	6.351.283

-100,00%

#DIV/0!

PT KCIC

Kereta	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
KCJB	530.974	476.579	346.207										1.353.760
Jumlah	530.974	476.579	346.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353.760
	Triwulan I		1.353.760	Triwulan II		0	Triwulan III		0	Triwulan IV		0	1.353.760
-100,00% #DIV/0!													

TOTAL

Uraian	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Jumlah penumpang terangkut dengan KA	44.128.882	42.024.523	40.895.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.048.469
Jumlah	Triwulan I		127.048.469	Triwulan II		0	Triwulan III		0	Triwulan IV		0	

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Kumulatif	44.128.882	86.153.405	127.048.469	127.048.469	127.048.469	127.048.469	127.048.469	127.048.469	127.048.469	127.048.469	127.048.469	127.048.469
Kumulatif Renstra	44.128.882	86.153.405	127.048.469	127.048.469	127.048.469	127.048.469	127.048.469	127.048.469	127.048.469	127.048.469	127.048.469	127.048.469
Realisasi	1,58%	3,08%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%


 Aditya Karsa
 NIP 198609022008121001



LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 6

PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <https://djka.kemenuh.go.id>
EMAIL : dijenka@kemenuh.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

NOMOR KP-DJKA 10 Tahun 2025

TENTANG

TIM PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diperlukan penyusunan dokumen penyelenggaraan SAKIP (rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan lainnya) serta pelaksanaan pengukuran, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SAKIP termasuk capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan dokumen serta pengukuran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka perlu menetapkan Tim Penyelenggaraan SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan dipandang mampu sebagai Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembar Negara Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6645);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
8. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1710);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1402);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 815).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG TIM PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Penanggungjawab:

- 1) Memberikan arahan kepada Tim dalam penyusunan dokumen serta pengukuran, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 2) Menetapkan target dan hasil evaluasi capaian kinerja;
- 3) Mengesahkan dokumen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

b. Tim Penyusun :

- 1) Mengkoordinasikan persiapan penyusunan dokumen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diantaranya dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 2) Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data kinerja sebagai bahan untuk penyusunan dokumen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 3) Menyusun dokumen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diantaranya Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Melakukan reviu/perubahan dokumen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkala apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Tim Monitoring dan Evaluasi:

- 1) Mengkoordinasikan persiapan pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala;
- 2) Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa serta mengevaluasi data/informasi kinerja sebagai bahan untuk pengukuran, monitoring dan evaluasi (per bulan dan triwulan) terhadap target dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 3) Melaksanakan pengukuran, monitoring dan evaluasi terhadap target dan capaian kinerja serta pengisian aplikasi pelaporan kinerja (*e-performance*, *e-SAKIP* reviu, *e-Monev*

Bappenas, Sistem Pelaporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan aplikasi lainnya);

- 4) Menginventarisasi dan memetakan kendala/permasalahan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 5) Memberikan rekomendasi terkait dengan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas dokumen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) periode selanjutnya ;
- 6) Melaksanakan penilaian mandiri terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 7) Melaksanakan evaluasi uraian dan perhitungan indikator kinerja dan target apabila diperlukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025.

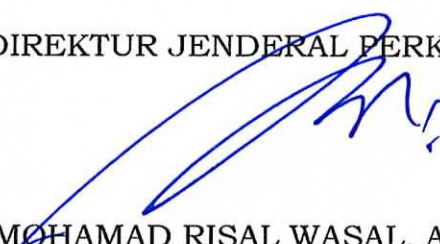
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 16 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktur Jenderal Perkeretaapian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
 NOMOR KP- DJKA 10 Tahun 2025
 TENTANG
 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARAAN
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 (SAKIP) DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

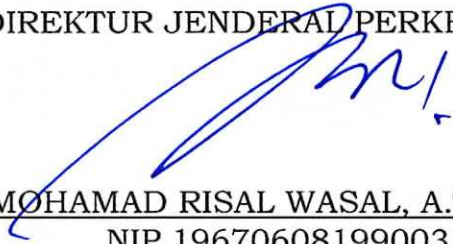
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARAAN
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
 DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025

NO	POSISI	URAIAN
I.	PENANGGUNG JAWAB	Direktur Jenderal Perkeretaapian
II.	TIM PENYUSUN	
A.	Ketua	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
B.	Wakil Ketua	1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 2. Direktur Prasarana Perkeretaapian
C.	Sekretaris	Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian
D.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian
		2. Kepala Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
		3. Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
		4. Kepala Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I, Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		5. Kepala Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II, Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		6. Kepala Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		7. Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana, Direktorat Sarana Perkeretaapian

NO	POSISI	URAIAN
		8. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara, Direktorat Sarana Perkeretaapian
		9. Kepala Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
		10. Kepala Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
		11. Koordinator Kelompok Rencana, Bagian Perencanaan
		12. Koordinator Kelompok Program, Bagian Perencanaan
		13. Koordinator Kelompok Perbendaharaan dan Barang Milik Negara, Bagian Keuangan
		14. Koordinator Kelompok Peraturan Perundang-undangan, Bagian Hukum
		15. Koordinator Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum, Bagian Hukum
		16. Koordinator Kelompok SDM dan Organisasi, Bagian SDM dan Umum
		17. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat Sarana Perkeretaapian
		18. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
III.	TIM MONITORING DAN EVALUASI	
A.	Ketua	Direktur Sarana Perkeretaapian
B.	Wakil Ketua	Direktur Keselamatan Perkeretaapian
C.	Sekretaris	Kepala Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian
D.	Anggota	1. Kepala Bagian SDM dan Umum
		2. Kepala Subdirektorat Lalu Lintas, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
		3. Kepala Subdirektorat Angkutan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA
		4. Kepala Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		5. Kepala Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi, Direktorat Prasarana Perkeretaapian

NO	POSISI	URAIAN
		6. Kepala Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
		7. Kepala Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I, Direktorat Sarana Perkeretaapian
		8. Kepala Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II, Direktorat Sarana Perkeretaapian
		9. Kepala Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
		10. Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
		11. Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan, Bagian Perencanaan
		12. Koordinator Kelompok Pelaksana Anggaran, Bagian Keuangan
		13. Koordinator Kelompok Verifikasi Anggaran, Bagian Keuangan
		14. Koordinator Kelompok Humas dan KSLN, Bagian Hukum
		15. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Bagian SDM dan Umum
		16. Koordinator Kelompok Rumah Tangga, Bagian SDM dan Umum
		17. Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
NIP 196706081990031005



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <https://djka.kemenuhub.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemenuhub.go.id

Nomor : PR.205/1/10/K1/DJKA/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Evaluasi Kinerja Berdasarkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2024

Jakarta, 28 Februari 2025

Yth. Daftar Terlampir

Sehubungan dengan penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan upaya peningkatan kinerja periode berikutnya, dengan ini disampaikan hasil evaluasi kinerja berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Evaluasi terhadap capaian kinerja masing-masing unit kerja diperoleh dari capaian kinerja berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2024 yaitu perhitungan rata-rata perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja Tahun 2024 masing-masing indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (revisi terakhir). Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2024 (%)
1	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	102,11
2	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	101,94
3	Balai Pengujian Perkeretaapian	101,93
4	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	101,92
5	Direktorat Sarana Perkeretaapian	101,81

No	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2024 (%)
6	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	101,22
7	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	101,19
8	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	101,13
9	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	101,02
10	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	100,43
11	Balai Perawatan Perkeretaapian	99,55
12	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	99,31
13	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	98,63
14	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	94,92
15	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	93,50
16	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan*	-*

Keterangan:

*) Sampai dengan 17 Februari 2025, BPKAR Sumatera Selatan belum menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2024.

**) Rincian hasil evaluasi capaian kinerja terlampir.

2. Evaluasi Kepatuhan Pelaporan Kinerja Tahun 2024

Pelaksanaan evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja Tahun 2024 mencakup evaluasi pemenuhan substansi Laporan Kinerja serta kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja yang diamanahkan oleh Kementerian PANRB (e-SAKIP reviu), Kementerian Perhubungan (e-*Performance*) dan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Sistem Pelaporan Kinerja pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian).

Untuk evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP, Kertas Kerja Evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB dan APIP serta SOP pemberian *reward and punishment* terhadap capaian kinerja unit kerja dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- Pemenuhan Pelaporan/Ketepatan Waktu (20%);
- Penyajian Informasi Kinerja (30%);
- Pemanfaatan Informasi Kinerja (50%).

Berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja Tahun 2024 diperoleh sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Tahun 2024		
		Pemenuhan Laporan Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja**	Rata-Rata Kepatuhan
1	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	97,92	100,00	98,96
2	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	94,17	100,00	97,09
3	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	94,17	98,00	96,09
4	Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya	90,00	100,00	95,00
5	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	86,25	100,00	93,13
6	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	88,33	92,67	90,50
7	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	80,42	100,00	90,21
8	Balai Pengujian Perkeretaapian	94,17	86,00	90,09
9	Direktorat Sarana Perkeretaapian	86,25	88,00	87,13
10	Balai Perawatan Perkeretaapian	72,92	98,00	85,46
11	Direktorat LLAKA	86,25	78,00	82,13
12	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	80,42	81,33	80,88
13	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	78,33	81,33	79,83
14	Balai Teknik Perkeretaapian Padang	46,67	54,00	50,34
15	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel	-*	78,67	39,34

Keterangan:

*) Sampai dengan 17 Februari 2025, BPKAR Sumatera Selatan belum menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2024.

**) Evaluasi pemanfaatan aplikasi kinerja periode Triwulan IV 2024 (posisi 14 Februari 2025)

***) Rincian hasil evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja (skala 1-100) terlampir.

Berkenaan dengan butir 1 dan 2 di atas, dengan ini disampaikan kepada:

1. Unit kerja yang telah memenuhi target kinerja Tahun 2024 (rata-rata capaian kinerja >100%), diberikan penghargaan dan terima kasih serta selanjutnya diharapkan dapat mempertahankan capaian kinerja periode berikutnya.

2. Unit kerja yang belum memenuhi target kinerja pada Tahun 2024 (rata-rata capaian kinerja <100%), agar melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja terutama pada indikator kinerja yang diidentifikasi berkinerja rendah, sehingga periode berikutnya dapat memenuhi target kinerja sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.
3. Masing-masing unit kerja agar meningkatkan kepatuhan pelaporan kinerja baik dalam pemenuhan laporan kinerja maupun kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja terkait ketepatan waktu, pemenuhan kelengkapan substansi dan pemanfaatan informasi kinerja pada periode berikutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507081991032001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Lampiran Surat

Nomor : PR.205/1/10/KI/DSKA/2025

Tanggal : 28 Februari 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian;
8. Kepala Bagian SDM dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
15. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
16. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
19. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Wahjuningrum
NIP 196507031991032001



LAPORAN PERINGKAT REALISASI BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
1	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	611,477,078,000	372,225,135,396	60.87%
2	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	44,089,025,000	18,308,896,855	41.53%
3	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,237,441,326,000	496,238,430,237	40.1%
4	KEMENTERIAN KEUANGAN	72,234,062,676,000	24,252,085,189,438	33.57%
5	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	111,241,324,000	35,907,422,381	32.28%
6	MAHKAMAH AGUNG	12,685,007,752,000	3,860,172,693,847	30.43%
7	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	122,419,152,000	32,286,717,537	26.37%
8	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	354,560,077,000	92,327,845,094	26.04%
9	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1,303,654,261,000	335,628,505,018	25.75%
10	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	6,690,346,011,000	1,700,440,077,462	25.42%
11	KEMENTERIAN AGAMA	79,102,182,306,000	20,034,027,927,488	25.33%
12	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,400,176,544,000	1,098,518,580,774	24.97%
13	KEMENTERIAN SOSIAL	79,588,005,512,000	19,764,652,658,875	24.83%
14	BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	494,614,516,000	120,641,468,746	24.39%
15	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	24,334,145,850,000	5,830,830,472,520	23.96%
16	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6,159,093,551,000	1,465,661,039,674	23.8%
17	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2,901,862,847,000	687,458,013,459	23.69%
18	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	681,880,285,000	159,633,857,492	23.41%
19	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	57,641,015,507,000	13,337,104,657,641	23.14%
20	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	6,454,781,052,000	1,464,307,426,807	22.69%
21	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	137,795,043,094,000	31,024,316,655,941	22.51%
22	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	255,591,019,000	57,141,718,379	22.36%
23	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	174,322,223,000	38,672,936,820	22.18%
24	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	54,665,836,000	12,075,398,734	22.09%
25	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	626,396,579,000	137,133,027,501	21.89%
26	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	459,766,254,000	100,568,747,569	21.87%
27	KOMISI PEMILIHAN UMUM	7,641,744,824,000	1,656,905,317,002	21.68%
28	BADAN PUSAT STATISTIK	5,712,879,143,000	1,234,953,086,710	21.62%
29	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	105,373,198,000	22,656,851,027	21.5%
30	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2,475,090,393,000	519,864,841,041	21%
31	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	187,075,848,000	39,232,767,693	20.97%
32	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	267,135,531,000	55,882,902,507	20.92%
33	KEMENTERIAN KESEHATAN	106,237,390,351,000	22,116,588,641,916	20.82%
34	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,524,203,659,000	317,021,114,202	20.8%
35	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	223,867,121,000	46,116,866,378	20.6%
36	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,070,311,831,000	217,423,583,644	20.31%
37	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	166,711,994,000	33,769,783,034	20.26%
38	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5,842,259,586,000	1,179,150,570,752	20.18%
39	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	328,488,668,000	64,546,959,585	19.65%
40	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1,853,277,516,000	364,038,198,386	19.64%
41	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	160,523,737,000	31,047,899,664	19.34%
42	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	798,342,991,000	152,268,018,599	19.07%
43	BADAN PENYELENGGARA HAJI	129,739,976,000	24,714,051,030	19.05%
44	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	156,725,426,000	29,747,372,579	18.98%
45	BADAN KARANTINA INDONESIA	1,420,516,135,000	269,223,836,720	18.95%
46	BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	1,497,578,812,000	282,906,585,596	18.89%
47	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	293,795,636,000	55,219,137,565	18.8%
48	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	15,962,130,370,000	2,992,265,164,568	18.75%
49	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2,192,387,697,000	398,416,333,863	18.17%
50	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	277,498,437,000	49,651,662,559	17.89%
51	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6,046,712,765,000	1,076,921,729,082	17.81%
52	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	230,000,000,000	40,697,728,179	17.69%
53	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1,970,952,577,000	345,791,293,756	17.54%
54	KEMENTERIAN PERTAHANAN	236,396,212,301,000	41,307,433,683,115	17.47%
55	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5,449,679,751,000	943,998,067,742	17.32%
56	KOMISI YUDISIAL RI	184,526,343,000	31,949,302,978	17.31%
57	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2,456,332,683,000	423,068,480,223	17.22%
58	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	9,896,588,491,000	1,678,681,245,006	16.96%

59	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2,522,634,571,000	427,735,041,103	16.96%
60	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	969,201,354,000	163,797,449,023	16.9%
61	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	300,654,181,000	50,556,486,547	16.82%
62	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	2,899,917,488,000	487,487,658,712	16.81%
63	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,560,935,743,000	419,565,821,094	16.38%
64	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	392,980,127,000	63,821,160,929	16.24%
65	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4,792,328,518,000	778,386,116,796	16.24%
66	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	463,856,211,000	73,119,402,283	15.76%
67	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	268,281,288,000	40,445,080,545	15.08%
68	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	352,289,126,000	52,592,777,092	14.93%
69	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,227,502,779,000	924,211,897,558	14.84%
70	KEMENTERIAN PARIWISATA	1,488,741,453,000	219,208,347,418	14.72%
71	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1,491,164,755,000	212,064,472,766	14.22%
72	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2,826,897,302,000	395,651,086,203	14%
73	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7,728,907,593,000	1,063,081,859,699	13.75%
74	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	229,919,355,000	30,883,679,477	13.43%
75	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	139,727,234,000	18,620,990,791	13.33%
76	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	1,079,782,944,000	138,503,774,101	12.83%
77	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	33,545,177,876,000	4,250,207,849,857	12.67%
78	BADAN INTELIJEN NEGARA	7,049,688,281,000	879,824,729,812	12.48%
79	KEMENTERIAN HUKUM	5,066,600,725,000	612,729,705,008	12.09%
80	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	53,494,482,000	6,307,649,856	11.79%
81	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	34,650,320,737,000	4,083,860,024,658	11.79%
82	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPPI)	374,428,347,000	42,406,432,551	11.33%
83	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	721,684,480,000	80,682,727,265	11.18%
84	LEMBAGA SANDI NEGARA	1,321,636,821,000	140,781,659,168	10.65%
85	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	279,606,498,000	25,629,316,539	9.17%
86	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,330,383,940,000	212,247,950,819	9.11%
87	BADAN PANGAN NASIONAL	366,382,625,000	29,667,675,551	8.1%
88	KEMENTERIAN KOPERASI	473,310,018,000	35,725,289,533	7.55%
89	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	2,374,348,189,000	176,914,870,300	7.45%
90	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	4,809,835,052,000	306,726,024,959	6.38%
91	KEMENTERIAN PERTANIAN	29,407,484,361,000	1,728,213,632,982	5.88%
92	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	111,670,491,792,000	6,030,506,428,862	5.4%
93	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2,071,397,065,000	102,570,587,985	4.95%
94	BADAN KEAMANAN LAUT	2,730,731,361,000	110,133,323,601	4.03%
95	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	436,812,997,000	16,666,028,092	3.82%
96	BADAN GIZI NASIONAL	71,000,000,000,000	1,473,978,878,611	2.08%
97	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,274,391,058,000	99,663,136,062	1.89%
98	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	6,395,534,826,000	103,349,649,317	1.62%
99	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	209,124,409,000	1,006,758,230	0.48%
100	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	0	-1,724,004,781	0%
101	KEMENTERIAN PARIWISATA	0	-73,567,177	0%
102	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0	-697,667,935	0%
103	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	0	0%
104	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	0	-7,915,400	0%

Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Unit

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	022.08	Ditjen Perkeretaapian	2,62	88,89	45,76

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya1Selanjutnya

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↕	Satuan Kerja ↕	NK Perencanaan Anggaran ↕	NK Pelaksanaan Anggaran ↕	Nilai Kinerja Anggaran ↕
1	022.08.445572	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	0,00	100,00	50,00
2	022.08.467005	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	6,86	100,00	53,43
3	022.08.467006	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	5,67	100,00	52,84
4	022.08.467309	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	0,00	95,14	47,57
5	022.08.467321	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	10,59	92,50	51,55
6	022.08.467337	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	4,17	100,00	52,09
7	022.08.467345	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	0,00	99,13	49,57
8	022.08.467352	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	16,67	100,00	58,34
9	022.08.467364	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	0,00	100,00	50,00
10	022.08.467373	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	52,40	92,71	72,56
11	022.08.467385	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	0,77	98,61	49,69
12	022.08.467462	PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	0,00	100,00	50,00
13	022.08.467478	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	0,00	100,00	50,00
14	022.08.467484	PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	0,00	100,00	50,00
15	022.08.467504	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	0,00	100,00	50,00
16	022.08.467515	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	0,00	100,00	50,00

Menampilkan 1 sampai 16 dari 16 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I

[Download Excel](#)

Tampilkan 25  entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Unit ↑↓	Unit Eselon I ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
1	022.01	Sekretariat Jenderal	1,48	90,33	45,91
2	022.02	Inspektorat Jenderal	1,14	100,00	50,57
3	022.03	Ditjen Perhubungan Darat	4,11	87,29	45,70
4	022.04	Ditjen Perhubungan Laut	2,47	85,37	43,92
5	022.05	Ditjen Perhubungan Udara	2,55	88,68	45,62
6	022.08	Ditjen Perkeretaapian	2,62	88,89	45,76
7	022.11	Badan Kebijakan Transportasi	1,20	99,62	50,41
8	022.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	6,81	94,23	50,52
9	022.13	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	0,00	100,00	50,00

Menampilkan 1 sampai 9 dari 9 entri

Sebelumnya **1** Selanjutnya

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

WhatsApp

MONEV | KEMENKEU

money.kemenkeu.go.id/app2025/kl/NKAUnit_kl/MDly

Download Excel

NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

Tampilkan 10 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode UEI ↑↓	UEI ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP ↑↓	CRO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	01	Sekretariat Jenderal	1.48	0.00	3.29	0.00	0.00
2	02	Inspektorat Jenderal	1.14	0.00	2.53	0.00	0.00
3	03	Ditjen Perhubungan Darat	4.11	0.00	6.23	13.09	0.00
4	04	Ditjen Perhubungan Laut	2.47	0.00	4.33	5.17	0.00
5	05	Ditjen Perhubungan Udara	2.55	0.00	4.15	6.82	0.00
6	08	Ditjen Perkeretaapian	2.62	0.00	4.19	7.32	0.00
7	11	Badan Kebijakan Transportasi	1.20	0.00	0.20	11.11	0.00
8	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	6.81	0.00	8.80	28.47	0.00
9	13	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

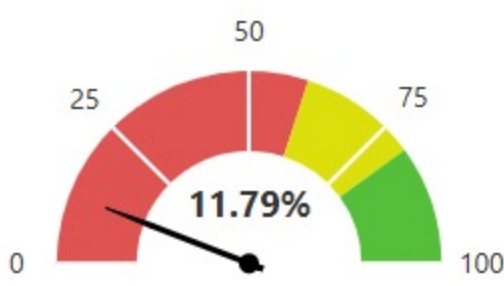
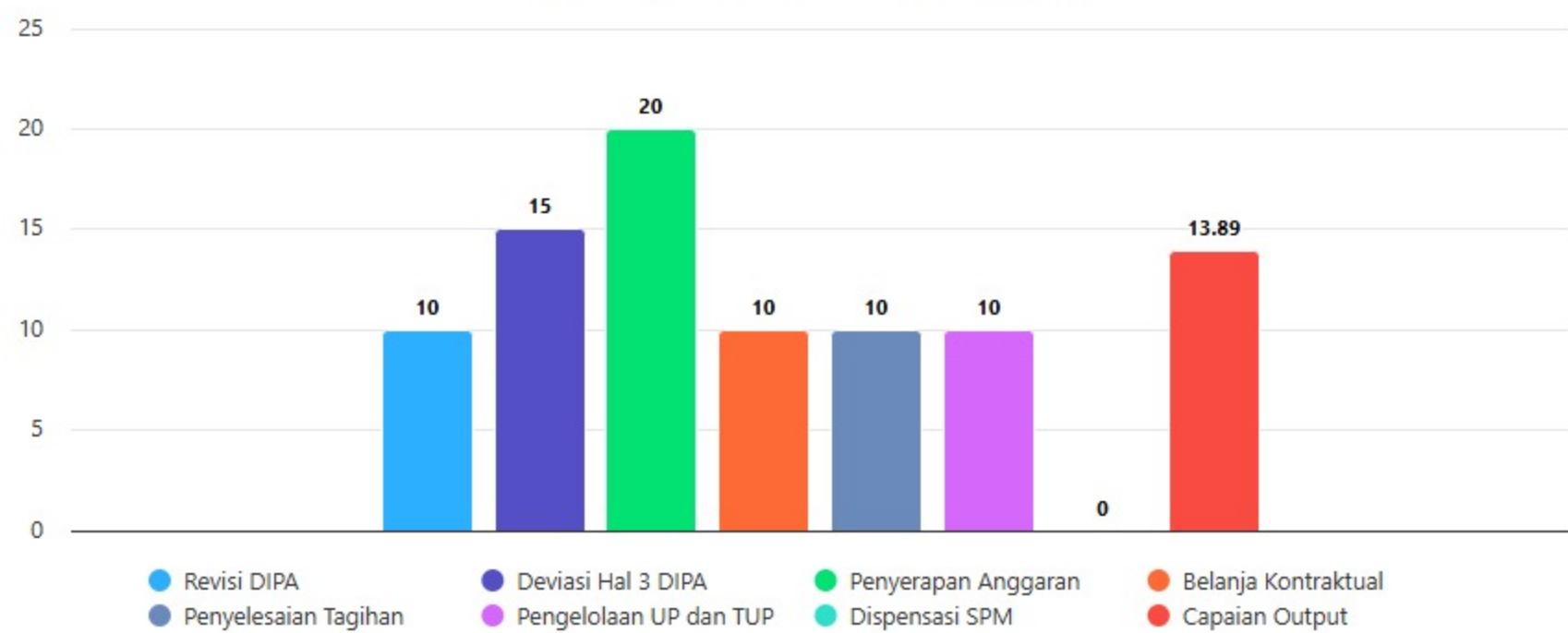
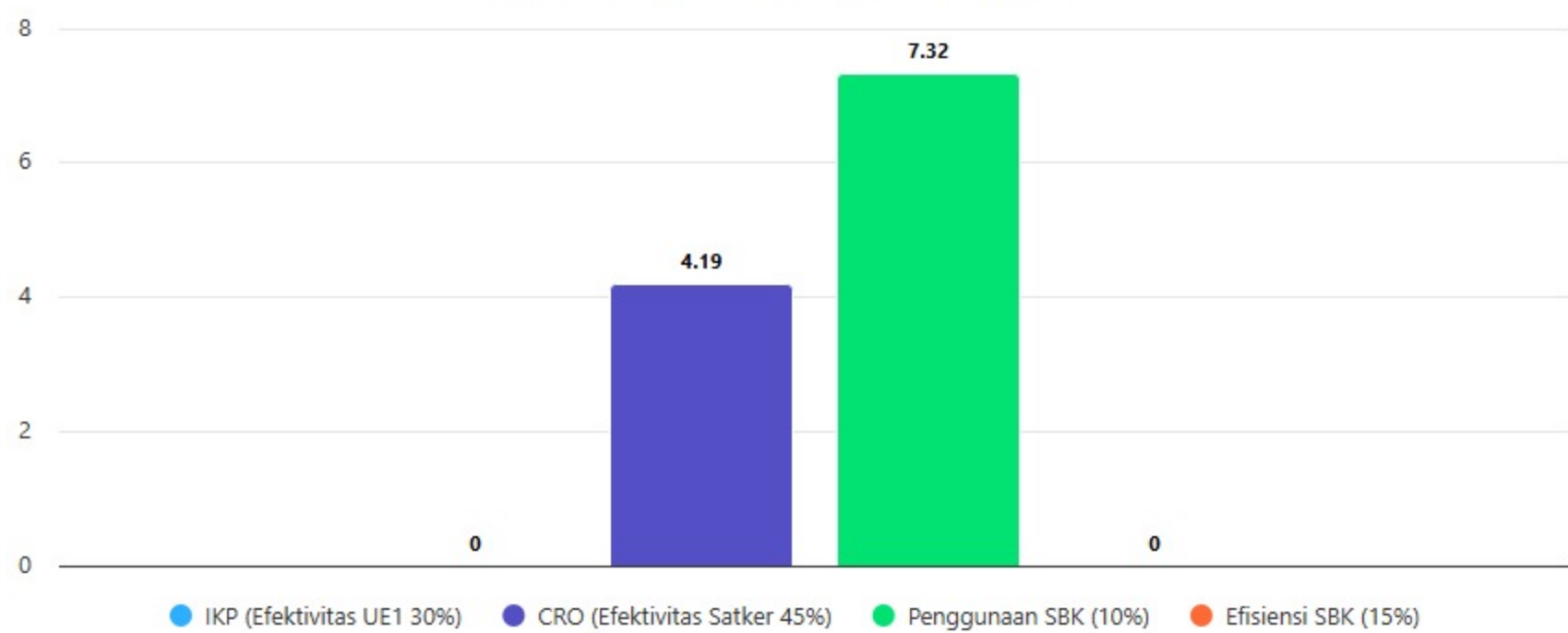
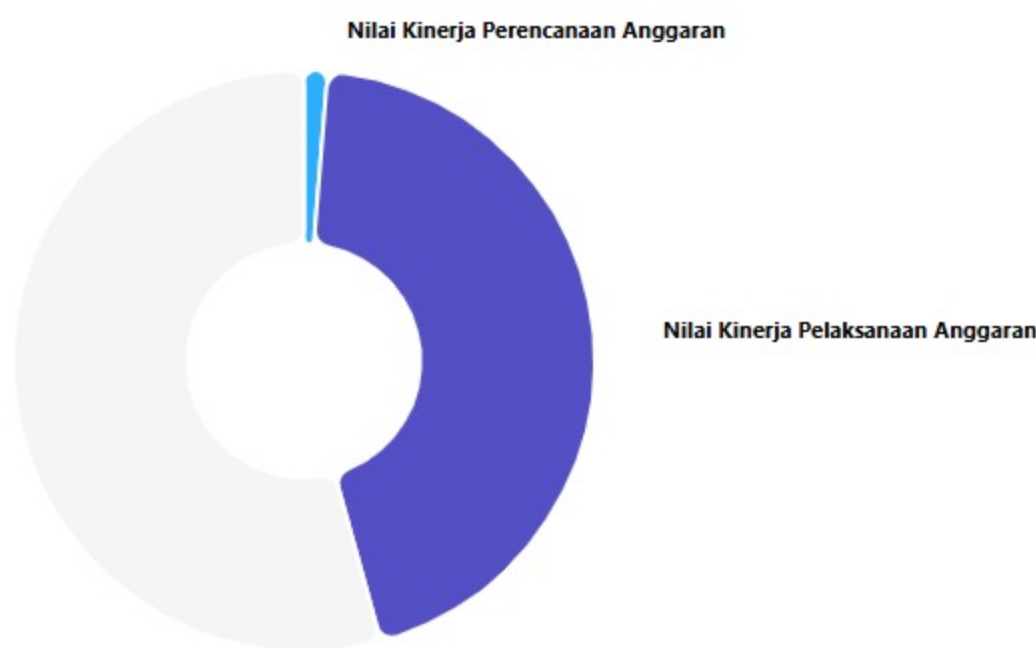
Menampilkan 1 sampai 9 dari 9 entri

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

4:00 PM

17-Apr-25



Jumlah RO sebanyak **251 RO**

- 8 RO sudah tercapai (progress = 100%)
- 121 RO dalam proses (0 < progress < 100%)
- 122 RO belum ada proses (progress = 0%)

11.79 adalah Rata-rata progress seluruh capaian RO di Satuan Kerja Ditjen perkeretaapian

Data Anomali

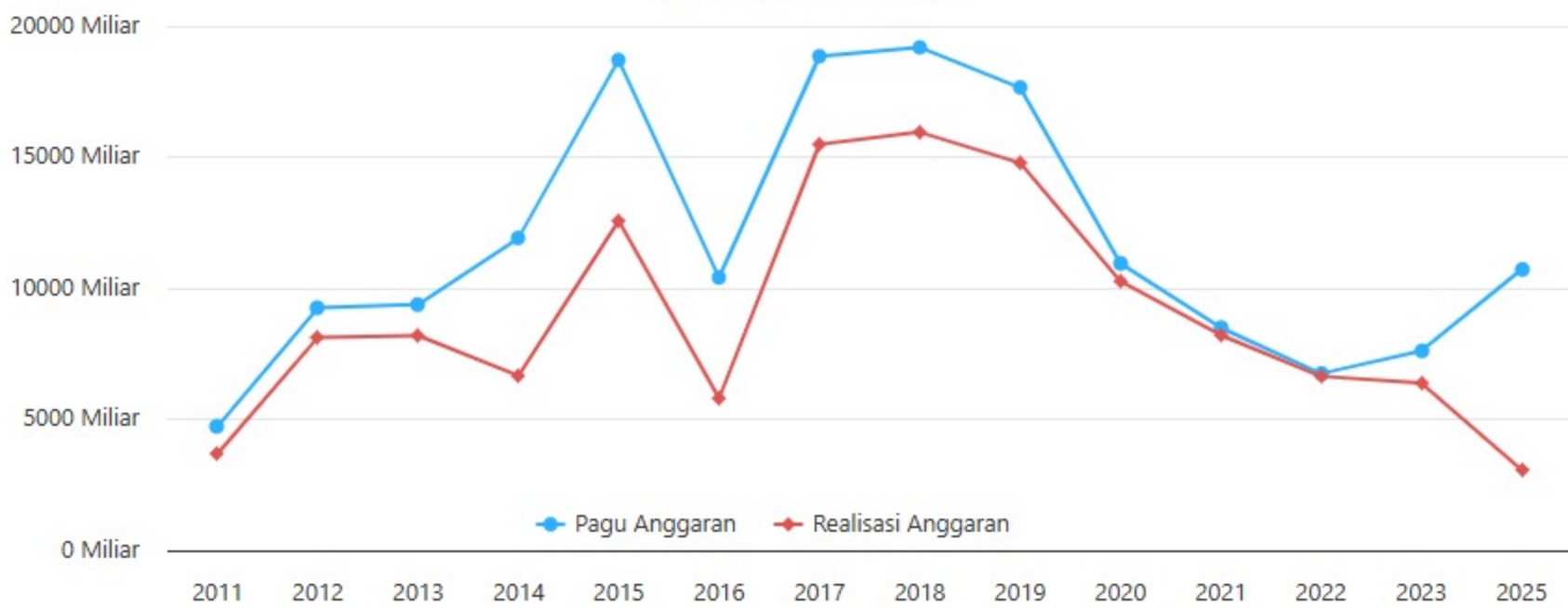
Kondisi	Keterangan	Jumlah RO	Persentase
Case 1	PCRO dilaporkan 0 meskipun telah ada realisasi anggaran	0	0%
Case 2	PCRO dilaporkan lebih rendah dari pada realisasi anggaran	0	0%
Case 3	PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) masih 0	0	0%
Case 4	PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) tidak mencapai target/volume DIPA	0	0%

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya **1** Selanjutnya

Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2025



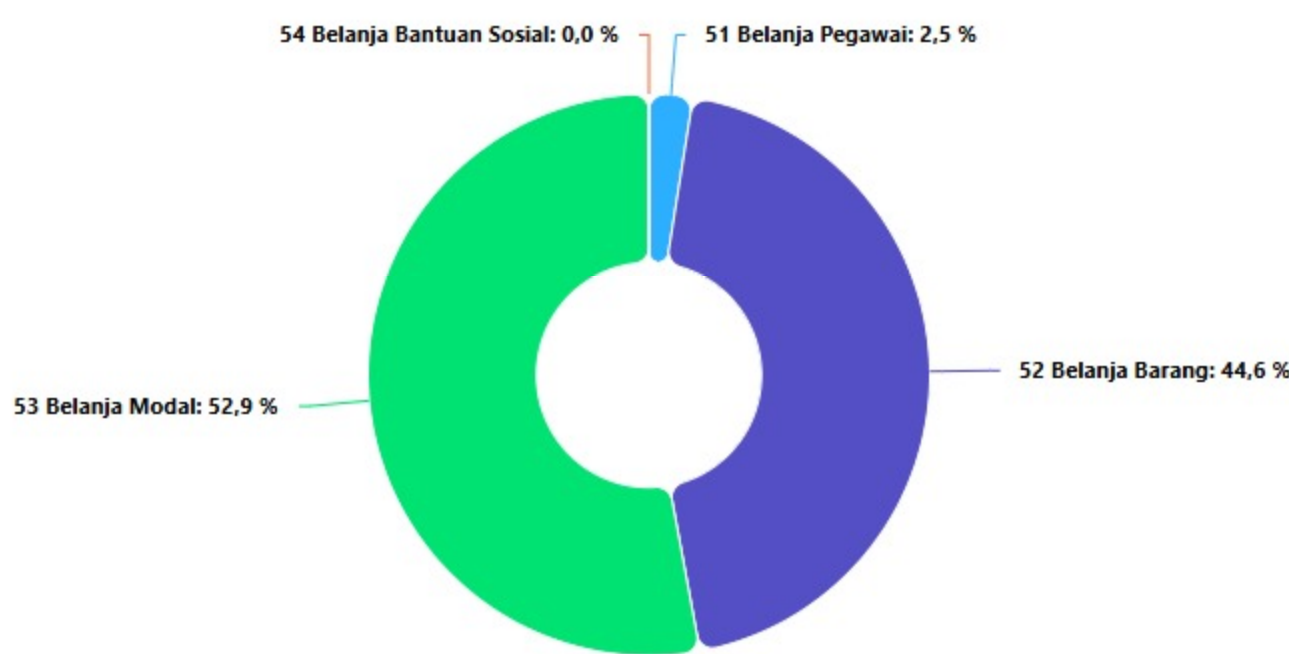
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	203.855.152.000	76.322.012.659	37.44 %
52 Belanja Barang	3.613.752.147.000	88.502.799.354	2.45 %
53 Belanja Modal	4.289.573.170.000	13.430.583.477	0.31 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

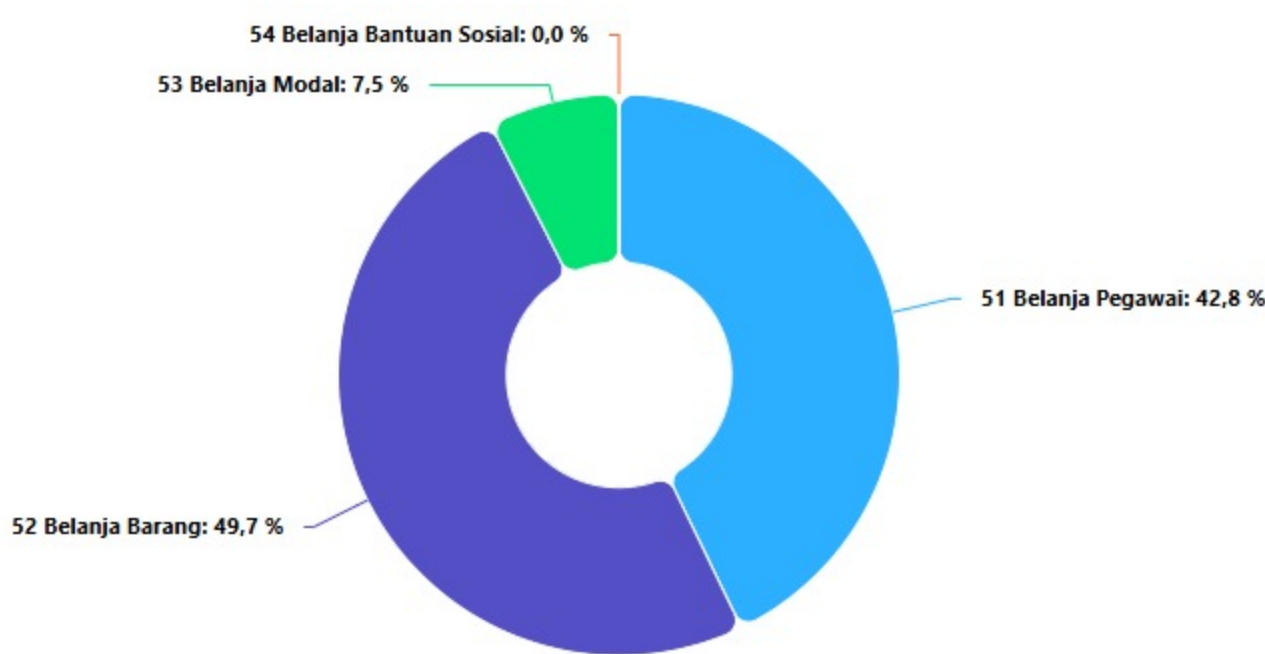
Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya **1** Selanjutnya

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



Partisipasi Satuan Kerja

[illegible]

Menampilkan 1 sampai 8 dari 16 entri

Sebelumnya **1** 2 Selanjutnya



REALISASI BELANJA ES.1 PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 03

NO	Eselon 1	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	02201 SEKRETARIAT JENDERAL	PAGU REALISASI	164,917,952,000 44,592,738,425 (27.04%)	453,226,591,000 45,504,172,763 (10.04%)	62,135,116,000 188,665,256 (0.30%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	680,279,659,000 90,285,576,444 (13.27%)
		SISA	120,325,213,575	407,722,418,237	61,946,450,744	0	0	0	0	0	0	589,994,082,556
2	02202 INSPEKTORAT JENDERAL	PAGU REALISASI	50,776,233,000 14,592,879,309 (28.74%)	63,607,141,000 4,759,811,184 (7.48%)	1,800,413,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	116,183,787,000 19,352,690,493 (16.66%)
		SISA	36,183,353,691	58,847,329,816	1,800,413,000	0	0	0	0	0	0	96,831,096,507
3	02203 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	PAGU REALISASI	810,737,460,000 207,597,036,556 (25.61%)	3,954,617,498,000 209,172,357,733 (5.29%)	1,191,567,433,000 42,817,370,039 (3.59%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	5,956,922,391,000 459,586,764,328 (7.72%)
		SISA	603,140,423,444	3,745,445,140,267	1,148,750,062,961	0	0	0	0	0	0	5,497,335,626,672
4	02204 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	PAGU REALISASI	1,889,316,695,000 544,110,086,740 (28.80%)	4,865,447,351,000 574,887,593,638 (11.82%)	3,803,586,559,000 210,693,362,909 (5.54%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	10,558,350,605,000 1,329,691,043,287 (12.59%)
		SISA	1,345,206,608,260	4,290,559,757,362	3,592,893,196,091	0	0	0	0	0	0	9,228,659,561,713
5	02205 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	PAGU REALISASI	1,169,219,327,000 317,666,899,951 (27.17%)	3,463,775,519,000 383,437,180,800 (11.07%)	1,525,684,414,000 90,901,947,594 (5.96%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	6,158,679,260,000 792,006,028,345 (12.86%)
		SISA	851,552,427,049	3,080,338,338,200	1,434,782,466,406	0	0	0	0	0	0	5,366,673,231,655
6	02208 DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	203,855,152,000 61,706,104,472 (30.27%)	3,613,752,147,000 75,768,253,645 (2.10%)	4,289,573,170,000 9,787,113,702 (0.23%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	8,107,180,469,000 147,261,471,819 (1.82%)
		SISA	142,149,047,528	3,537,983,893,355	4,279,786,056,298	0	0	0	0	0	0	7,959,918,997,181
7	02211 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	PAGU REALISASI	47,087,041,000 12,121,880,128 (25.74%)	71,806,509,000 9,498,073,755 (13.23%)	2,459,864,000 431,597,730 (17.55%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	121,353,414,000 22,051,551,613 (18.17%)
		SISA	34,965,160,872	62,308,435,245	2,028,266,270	0	0	0	0	0	0	99,301,862,387



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

8	02212 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	PAGU REALISASI	397,175,956,000 97,047,712,084 (24.43%)	2,252,184,891,000 273,356,017,999 (12.14%)	108,779,795,000 6,749,373,530 (6.20%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,758,140,642,000 377,153,103,613 (13.67%)
		SISA	300,128,243,916	1,978,828,873,001	102,030,421,470	0	0	0	0	0	0	2,380,987,538,387
9	02213 BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	PAGU REALISASI	37,957,550,000 11,447,961,921 (30.16%)	152,415,175,000 13,519,254,824 (8.87%)	2,857,785,000 (0.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	193,230,510,000 24,967,216,745 (12.92%)
		SISA	26,509,588,079	138,895,920,176	2,857,785,000	0	0	0	0	0	0	168,263,293,255
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	4,771,043,366,000 1,310,883,299,586 (27.48%)	18,890,832,822,000 1,589,902,716,341 (8.42%)	10,988,444,549,000 361,569,430,760 (3.29%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	34,650,320,737,000 3,262,355,446,687 (9.42%)
		SISA	3,460,160,066,414	17,300,930,105,659	10,626,875,118,240	0	0	0	0	0	0	31,387,965,290,313



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN TARGET & REALISASI PNPB PER AKUN (SUMBER DATA TPNBP-SPAN-SIMPONI)
TAHUN ANGGARAN 2025

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ESELON I : 08 - Ditjen Perkeretaapian
PERIODE LAPORAN : JANUARI s.d. MARET

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.300.000.000,00	135.100.000,00	135.100.000,00
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	21.099.810.000,00	1.078.515.000,00	0,00
	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	7.213.648.000,00	0,00	0,00
	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0,00	78.157.672,00	0,00
	424923 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.182.168.000,00	66.150.000,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	20,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	5.261.921.747,00	0,00
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	108.000.000,00	0,00	0,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	473.100.000,00	36.950.000,00	36.950.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	26.043.191,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	313,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	12.942.687,00	12.942.687,00
	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	434.412.000,00	434.412.000,00
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.334.137.000,00	0,00	0,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	9.777.090,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	12.407.742.731,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.519.271.310,00	0,00
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0,00	179.604.290,00	179.604.290,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	28,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	26.025.155.616,00	4.306.552,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	5.172.185.724,00	0,00
	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	55.160.000,00	55.160.000,00
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	836.938.500,00	836.938.500,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	156.817.531,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	15.753.979.203,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	6.915.961.725,00	0,00
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	80.658.000,00	80.658.000,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.252,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	12.750.849.507,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	3.669.443.442,00	100.000.000,00
	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	2.256.000,00	0,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.065.000.000,00	0,00	0,00
	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	93.000.000,00	0,00	0,00
	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	0,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	291,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	6.635.405.475,00	182.725.000,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	69.305.844,00	69.305.844,00
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	662.409.527,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	172,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	6.027.492.418,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	21.706.604.290,00	0,00
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	78.300.000.000,00	0,00	0,00
	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	26.225.000.000,00	6.477.664,00	6.477.664,00
	425135 - Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	0,00	248.614,00	248.614,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.055.060.000,00	251.055.000,00	251.055.000,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	234.546.858,00	234.546.858,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	840.000.175,00	840.000.175,00
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	57.997.924.000,00	14.675.235.000,00	0,00
	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	2.332.775.000,00	63.747.000,00	0,00
	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0,00	203.195.499,00	0,00
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425512 - Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	1.023.132.453.000,00	532.890.117.249,00	532.890.117.249,00
	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	410.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	224.474.096,00	209.898.464,00
	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0,00	32.465.912,00	32.465.912,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	868.620.908,00	0,00
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	8.349.000,00	8.349.000,00
	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.422.000.000,00	861.425.000,00	861.425.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	174.369.369,00	0,00
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	67.250.000,00	26.650.000,00	26.650.000,00
	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	841.000.000,00	1.326.000.000,00	1.326.000.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	33.426.363,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	151.978.275,00	116.529.315,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	68.016.649,00	68.016.649,00
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.500.000.000,00	0,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	197.290.118,00	197.290.118,00
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	317.435.813,00	317.435.813,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	4.375,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	6.483.759.170,00	28.800.170,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	320.735.555,00	320.735.555,00
Total		1.246.326.325.000,00	689.126.836.258,00	539.964.144.429,00



LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PER ESELON1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Bulan : 01 s.d. 03

NO	Kode Es. 1 Nama Es. 1	Pagu	Realisasi		Persentase
			Perpajakan	PNBP	Realisasi
10	02201 SEKRETARIAT JENDERAL	3,510,000,000	239,116,637	927,907,068	33.25%
11	02202 INSPEKTORAT JENDERAL	0	7,352,525	1,455	0.00%
12	02203 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1,400,066,326,000	639,082,874	361,647,712,139	25.88%
13	02204 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	5,339,531,810,000	2,035,417,514	1,773,279,010,641	33.25%
14	02205 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	1,834,852,348,000	3,437,778,466	448,590,086,970	24.64%
15	02208 DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	1,246,326,325,000	230,422,586	689,126,836,258	55.31%
16	02211 BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	0	8,647,530	0	0.00%
17	02212 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	1,393,680,517,000	17,377,033,445	354,412,196,934	26.68%
18	02213 BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	13,770,000,000	0	3,149,639,711	22.87%

**Nilai Rata-Rata Indeks Profesional ASN
Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

UNIT KERJA	RERATA KUALIFIKASI	RERATA KOMPETENSI	RERATA KINERJA	RERATA DISIPLIN	RERATA Nilai IP ASN
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	24,26	27,46	22,02	5,00	78,74
Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	24,55	23,72	22,09	5,00	75,36
Balai Pengujian Perkeretaapian	21,69	20,78	22,34	5,00	69,81
Balai Perawatan Perkeretaapian	24,31	19,04	11,44	4,95	59,74
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	23,20	15,60	17,36	5,00	61,16
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	24,10	10,59	7,01	5,00	46,70
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	24,32	17,92	17,88	5,00	65,12
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	24,27	10,95	10,26	5,00	50,48
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	24,30	22,97	23,20	5,00	75,47
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	24,08	14,95	15,53	5,00	59,55
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	24,25	17,87	18,83	5,00	65,95
Direktorat Jenderal Perkeretaapian	25,00	25,00	25,00	5,00	80,00
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	23,97	17,29	18,68	5,00	64,94
Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	23,10	19,99	20,77	5,00	68,87
Direktorat Prasarana Perkeretaapian	23,60	20,19	18,60	5,00	67,40
Direktorat Sarana Perkeretaapian	23,29	17,59	17,03	5,00	62,91
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	23,57	19,87	19,23	4,97	67,64
TOTAL RATA-RATA NILAI DJKA	23,75	18,35	17,47	4,99	64,56
	dari 25	dari 40	dari 30	Dari 4,99	dari 100



Indriati, SE, MM
NIP 198106072005022001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : *KP. 111/1/1/KI/DJKA/2025*
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Hal : Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
Tahun 2024 Posisi 7 Maret 2025

Jakarta, 24 Maret 2025

Yth. Daftar Terlampir

Menunjuk Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor: KP.111/1/1/STJ/2025 tanggal 13 Maret 2025 Hal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 Posisi 7 Maret 2025, bersama ini disampaikan posisi data tanggal 7 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Nilai IP ASN posisi tanggal 7 Maret 2025 Kementerian Perhubungan masih dalam kategori “Sangat Rendah”, dengan detail sebagai berikut:

Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Rataan Nilai IP ASN
22,76	15,55	15,83	5,00	59,13
dari 25	dari 40	dari 30	dari 5	dari 100

dan posisi untuk lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih dalam kategori “Rendah”, dengan detail sebagai berikut:

Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Rataan Nilai IP ASN
23,73	18,75	17,48	4,99	64,36
dari 25	dari 40	dari 30	dari 5	dari 100

2. Guna mempercepat peningkatan nilai IP ASN Tahun 2024 maka perlu dilakukan peningkatan nilai kategori Kompetensi dan Kinerja, yaitu:

- Nilai Kompetensi: Peningkatan dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan data Kompetensi pada aplikasi SIK yang selanjutnya diteruskan untuk integrasi dengan SIASN. Data kompetensi yang dapat diisikan antara lain Pelatihan Struktural Kepemimpinan, Pelatihan Fungsional, Pelatihan Teknis serta pelaksanaan Seminar / Workshop / Magang / Kursus / Sejenisnya. Jumlah data pegawai yang belum melakukan pengisian data pengembangan kompetensi sebagaimana terlampir dalam tautan berkas;
- Nilai Kinerja: Posisi tanggal 7 Maret 2025 masih banyak terdapat pegawai Kementerian Perhubungan yang belum menyampaikan hasil penilaian tersebut ke SIASN. Maka selanjutnya perlu percepatan untuk penyampaian data

penilaian....

penilaian kinerja Tahun 2024 hingga ke SIASN. Jumlah data pegawai yang belum menyampaikan penilaian kinerja berdasarkan data SIASN dan tata cara penyampaian sebagaimana terlampir dalam tautan berkas. Informasi *update* data nilai IP ASN setiap unit kerja berdasarkan data SIASN dapat di akses sebagaimana terdapat pada tautan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon Saudara dapat menginformasikan kepada seluruh pegawai untuk segera melaksanakan pemutakhiran data kompetensi dan kinerja pada aplikasi SIK serta memonitor pengisian data Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024. Detail data tersebut dapat di unduh pada tautan https://bit.ly/IPASN_DJKA2024.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Tembusan :
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Lampiran Surat

Nomor : KP. III / 1 / 1 / K / DJKA / 2025

Tanggal : 24 Maret 2025

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan;
6. Kepala Bagian Keuangan;
7. Kepala Bagian Hukum;
8. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
15. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
16. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
19. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian,

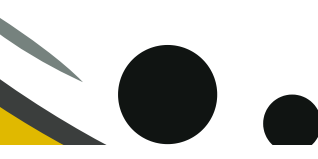


Juun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001



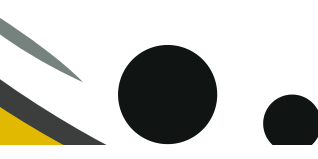
LAMPIRAN VI

DOKUMENTASI PEMBAHASAN
CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I 2025





DOKUMENTASI PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I 2025





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <https://djka.kemenhub.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205 / 1 / 17 / K1 / DJKA / 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Rapat

Jakarta, 8 April 2025

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja periode Triwulan I Tahun 2025 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan ini dimohon kehadirannya dalam rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin – Selasa / 14 s.d 15 April 2025
Pukul : Rincian Jadwal Terlampir
Tempat : Jakarta dan Aplikasi *Zoom Meeting (Hybrid)*
Acara : 1. Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi Pelaporan Kinerja (e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan SILAKI)
2. Pembahasan Capaian Kinerja Unit Kerja serta Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025
3. Persiapan Evaluasi Implementasi SAKIP Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Pimpinan Rapat : Sesditjen Perkeretaapian / Kepala Bagian Perencanaan

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Juun Endah Wahjuningrum
NIP. 196507031991032001

Tembusan:

Direktur Jenderal Perkeretaapian

Lampiran Surat Undangan

Nomor : PR.205/1/17/K1/DJKA/2025

Tanggal : 8 April 2025

1. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Bappenas (narasumber);
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktur Sarana Perkeretaapian;
5. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian;
8. Kepala Bagian SDM dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
15. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
16. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
19. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Yudi Endah Wahjuningrum
NIP 196507021991032001

JADWAL ACARA

PEMBAHASAN PELAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 & PERSIAPAN EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
Senin, 14 April 2025		
09.30 – 12.00	- Penjelasan dan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi e-SAKIP Reviu - Persiapan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2025 serta Pembahasan Progres Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya	Narasumber: Kementerian PANRB Peserta: Seluruh Unit Kerja
12.00 – 13.00	ISTIRAHAT	
13.00 – 15.00	- Pembahasan Capaian Kinerja serta Penyusunan Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025 unit kerja Direktorat Prasarana, Direktorat LLAKA, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian - Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan SILAKI	Peserta: Seluruh unit kerja
15.00 – 15.30	ISTIRAHAT	
15.30 – 17.30	- Pembahasan Capaian Kinerja serta Penyusunan Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025 unit kerja BTP Jakarta, BTP Bandung, BTP Semarang, BTP Surabaya - Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan SILAKI	Peserta: 1. BTP Jakarta 2. BTP Bandung 3. BTP Semarang 4. BTP Surabaya 5. Direktorat teknis 6. Setditjen
Selasa, 15 April 2025		
09.30 – 12.00	- Pembahasan Capaian Kinerja serta Penyusunan Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025 unit kerja BTP Medan, BTP Padang, BTP Palembang, BPKAR Sumsel - Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan SILAKI	Peserta: 1. BTP Medan 2. BTP Padang 3. BTP Palembang 4. BPKAR Sumatera Selatan 5. Direktorat Teknis 6. Setditjen
12.00 – 13.00	ISTIRAHAT	
13.00 – 15.00	- Pembahasan Capaian Kinerja serta Penyusunan Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025 unit kerja Balai Pengujian, Balai Perawatan, BPKA Sulsel, Setditjen Perkeretaapian - Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan SILAKI	Peserta: 1. Balai Pengujian 2. Balai Perawatan 3. BPKA Sulsel 4. Direktorat teknis 5. Setditjen
15.00 – 15.30	ISTIRAHAT	
15.30 – 17.30	Pembahasan Capaian Kinerja serta Penyusunan Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian	

No. ST	: ST-K1 DJKA xxx Tahun 2025
Lokasi	: Jakarta



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN

**PEMBAHASAN PELAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 & PERSIAPAN
EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

APRIL 2025

**PEMBAHASAN PELAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 & PERSIAPAN
EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.205/1/17/K1/DJKA/2025 tanggal 8 April 2025.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA xxx Tahun 2025 tanggal xx April 2025.

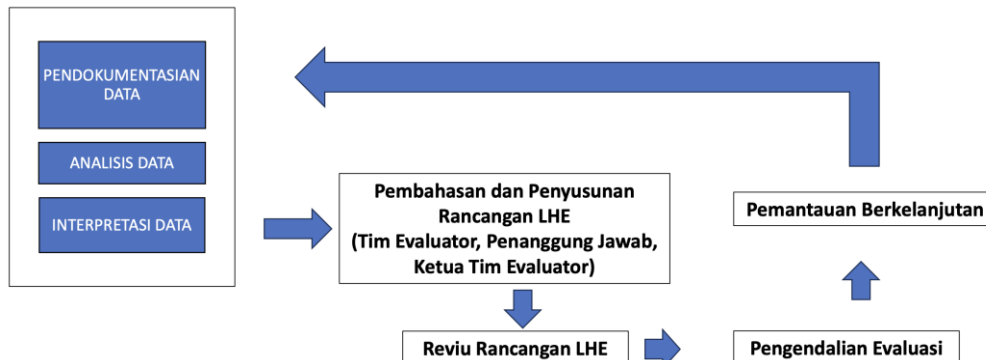
B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pimpinan Rapat : Koordinator Kel. Evaluasi dan Pelaporan
2. Tempat : Millenium Hotel Sirih, Jakarta dan *Zoom Meeting*
3. Tanggal : Senin s.d Selasa / 14 s.d. 15 April 2025
4. Peserta Rapat :
 - a. Perwakilan KemenPANRB (Narasumber);
 - b. Perwakilan Direktorat LLAKA;
 - c. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
 - d. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
 - e. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
 - f. Perwakilan Bagian-Bagian di lingkungan Setditjen Perkeretaapian;
 - g. Perwakilan Balai-Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.
5. Kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Persiapan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeringah Tahun 2025;
 - b. Pembahasan Capaian Kinerja serta Penyusunan Konsep Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025 seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - c. Pembahasan Progres Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas, e-SAKIP Reviu, e-Performance dan SILAKI;
 - d. Penjelasan dan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi e-SAKIP Reviu.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Rapat diselenggarakan dalam rangka monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja periode Triwulan I Tahun 2025 pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. Dasar hukum petunjuk teknis yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu Keputusan Nomor KM 74 Tahun 2024.
3. Ruang lingkup evaluasi penilaian SAKIP berdasarkan KM 74 Tahun 2024 yaitu:
 - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
 - b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
 - c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
 - e. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.
4. Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka kerja (*framework*) bagi seluruh tingkatan manajemen evaluasi dalam melaksanakan proses evaluasi.
5. Beberapa Teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:
 - a. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi;
 - b. Komunikasi melalui tanya jawab sederhana;
 - c. Studi Dokumentasi;
 - d. Observasi.
6. LKE sudah dikondisikan untuk dapat disampaikan melalui LHE, sehingga seharusnya dapat dengan mudah menuangkan informasi dalam LKE ke dalam LHE.
7. Pengisian LKE sudah disederhanakan dengan langsung melakukan proses penilaian pada subkomponen dengan mempertimbangkan pemenuhan kriteria, penilaian tidak lagi pada kriteria.
8. Adanya subjektivitas yang cukup tinggi dalam pengisian LKE, dibutuhkan kehandalan evaluator dalam menilai, khususnya dalam memberikan catatan penjelasan dan bukti dukung yang relevan pada setiap subkomponen yang dinilai.
9. LKE juga sudah mempertimbangkan gambaran minimum requirement yang dapat digunakan oleh evaluator dalam memprediksi atau menargetkan evaluasi ke dalam kelas apa dalam evaluasi akuntabilitas kinerja.

10. Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh Gambaran awal secara umum tentang unit kerja yang akan dievaluasi. Manfaatnya adalah untuk memberikan Gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja utama atau peran dasar unit kerja yang akan dievaluasi, memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi perhatian dalam evaluasi dan agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara berkualitas dan sesuai tujuan.
11. Susunan Tim Evaluator AKIP minimal terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua Tim dan Anggota Tim.
12. Mekanisme Evaluasi SAKIP sebagai berikut:



13. Terkait usulan tim evaluator SAKIP tingkat DJKA agar masing-masing unit kerja menyampaikan PIC yang akan menjadi evaluator.
14. Pelaksanaan evaluasi SAKIP dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat unit kerja mandiri, tingkat unit kerja Eselon II, tingkat unit kerja Eselon I dan tingkat Kemenhub oleh Inspektorat Jenderal.
15. Nilai akuntabilitas mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.
16. Variabel-variabel dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), yaitu :
 - a. Komponen Terdiri dari Perencanaan Kinerja , Pengukuran Kinerja , Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - b. Sub-komponen dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
 - c. Kriteria Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.
17. Rencana tahapan dan progres evaluasi implementasi SAKIP tahun 2025 sebagai berikut:



18. Hasil evaluasi implementasi SAKIP unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian tahun 2024 sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Nilai	Kategori
1.	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	83,65	A
2.	Setditjen Perkeretaapian	83,35	A
3.	BTP Surabaya	83,35	A
4.	Direktorat LLAKA	82,10	A
5.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	82,10	A
6.	BTP Semarang	81,70	A
7.	BTP Palembang	81,50	A
8.	Direktorat Sarana Perkeretaapian	81,20	A
9.	Balai Perawatan Perkeretaapian	81,00	A
10.	BTP Medan	80,35	A
11.	BPKAR Sumatera Selatan	80,35	A
12.	Balai Pengujian Perkeretaapian	80,30	A
13.	BPKA Sulawesi Selatan	80,25	A
14.	BTP Bandung	80,00	BB
15.	BTP Padang	79,60	BB
16.	BTP Jakarta	78,60	BB

19. Unit kerja perlu menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian paling lambat 60 hari sejak diterimanya surat tertanggal 18 Desember 2024.

20. Pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun 2024 terdapat 8 unit kerja yang masih berproses, sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Waktu Penyampaian Progres TL	Progres	Jumlah Rekomendasi	Tuntas/ Selesai TL	Proses TL	Belum TL	Keterangan
1	Setditjen KA	12 Februari 2025	v	8	8	-	-	
2	Direktorat LLAKA	-	Proses	-	-	-	-	
3	Direktorat Prasarana	-	Proses	-	-	-	-	
4	Direktorat Sarana	10 Februari 2025	v	10	7	3	-	Perlu dilengkapi data dukung
5	Direktorat Keselamatan	30 Januari 2025	v	7	7	-	-	ND kepada Sesditjen
6	BTP Jakarta	-	Proses	-	-	-	-	
7	BTP Bandung	5 Februari 2025	v	10	8	2	-	Perlu dilengkapi data dukung
8	BTP Semarang	8 April 2025	v	7	7	-	-	Surat kepada Sesditjen, perlu dilengkapi data dukung
9	BTP Surabaya	30 Januari 2025	v	7	7	-	-	
10	BTP Medan	27 Maret 2025	v	11	9	2	-	Perlu dilengkapi data dukung
11	BTP Padang	-	Proses	-	-	-	-	
12	BTP Palembang	-	Proses	-	-	-	-	
13	Balai Pengujian	-	Proses	-	-	-	-	
14	Balai Perawatan	-	Proses	-	-	-	-	
15	BPKAR Sumsel	12 Maret 2025	v	7	5	2	-	Perlu dilengkapi data dukung
16	BPKA Sulsel	-	Proses	-	-	-	-	

21. Evaluasi kinerja berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2024 (%)
1	BTP Surabaya	102,11
2	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	101,94
3	Balai Pengujian Perkeretaapian	101,93
4	BPKA Sulawesi Selatan	101,92
5	Dit. Sarana Perkeretaapian	101,81
6	Setditjen Perkeretaapian	101,22
7	BTP Bandung	101,19
8	Dit. Prasarana Perkeretaapian	101,13
9	BTP Padang	101,02
10	BTP Palembang	100,43
11	Balai Perawatan Perkeretaapian	99,55
12	Dit. Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	99,31
13	BTP Semarang	98,63
14	BTP Medan	94,92
15	BTP Jakarta	93,50
16	BPKAR Sumatera Selatan*	-*

22. Disampaikan beberapa rekomendasi untuk upaya peningkatan kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

- Percepatan proses pembayaran TAC Tahun 2024-2025 (penagihan, verifikasi dan penyetoran) oleh Badan Usaha/Operator Perkeretaapian agar segera terselesaikan sesuai ketentuan. Selain itu juga diperlukan koordinasi dengan stakeholders terkait penyelesaian beberapa permasalahan/sengketa BMN agar dapat memaksimalkan PNBP dari pemanfaatan BMN.
- Meningkatkan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 yang meliputi aspek perencanaan anggaran (capaian rincian output, penggunaan dan efisiensi standar biaya khusus) dan aspek pelaksanaan anggaran (revisi DIPA, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, dispensasi SPM, deviasi Halaman 3 DIPA, belanja kontraktual, pengelolaan UP dan TUP, serta capaian output).
- Memastikan kepada operator KA untuk penambahan sarana angkutan penumpang perintis sebagai cadangan sesuai kontrak dan ketentuan untuk menjamin keberlangsungan layanan KA perintis.
- Identifikasi dampak efisiensi anggaran Tahun 2025 terhadap target dan pencapaian kinerja unit kerja Tahun 2025.

23. Pelaksanaan evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan kinerja Tahun 2024 mencakup evaluasi pemenuhan Laporan Monitorng Capaian Kinerja serta kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja yang diamanahkan oleh Kementerian PANRB (e-SAKIP reviu), Kementerian Perhubungan (ePerformance) dan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Sistem Pelaporan Kinerja pada Portal Aplikasi).

24. Masih ada beberapa unit kerja pada aplikasi e-SAKIP revidi belum melengkapi naskah teknokratik, PK dan Tindak Lanjut LHE Tahun 2024.
25. Terkait analisa, keterangan, rencana kerja selanjutnya merupakan penilaian dan wajib diisi pada aplikasi *e-Performance*.
26. Pengisian capaian output pada aplikasi emonev kemenkeu juga perlu diisi agar bisa divalidasi.
27. e-Monev Bappenas masih menunggu *launching* dalam minggu ini belum diketahui pembaruan yang ditambahkan.
28. Waktu penyusunan laporan monitoring capaian kinerja triwulan untuk Unit Kerja Eselon I adalah 25 hari kerja.
29. Terkait Bab II Capaian Kinerja Tahunan wajib memuat Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan termasuk data *crosscutting*.
30. Capaian Kinerja agar dipastikan sesuai atau valid berdasarkan data dukung yang disampaikan pada lampiran 4.
31. Contoh perhitungan pada Satker terkait efisiensi :

$$\text{Efisiensi RO Satker} = \frac{\Sigma(\text{Alokasi Anggaran RO} \times \text{Capaian RO}) - \text{Realisasi Anggaran RO}}{\Sigma(\text{Alokasi Anggaran RO})} \times 100\%$$

32. Target agar tetap mengacu dokumen resmi yang ada apabila tidak tercapai yang penting ada justifikasi yang jelas dan bisa diterima.
33. Capaian Output rata-rata di akhir tahun untuk capaian TW I, II dan III dapat diisi Persentase Capaian ROnya.
34. Evaluasi penyesuaian target berdasarkan realisasi PNBPN biasa dilakukan per Semester akan dipertimbangkan masukan untuk dilakukan evaluasi per Triwulan.
35. Dari BTP Bandung terkait capaian arsip tahun 2025 terdapat efisiensi sehingga belum bisa dilakukan penataan arsip yang sudah non aktif agar dijelaskan di analisisnya.
36. e-Performance belum disesuaikan berdasarkan hari kerja sesuai libur Lebaran sehingga perlu diajukan *unlock* terlebih dahulu.
37. Belum ada capaian agar tetap diisikan analisisnya dan upaya peningkatan selanjutnya dan realisasinya dapat diisi strip.
38. *Benchmarking* perlu dibuatkan linknya agar dapat digunakan pada laporan Triwulan.
39. Pembahasan Capaian Kinerja TW I Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagai berikut :

No	IKK	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025
1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian	3,84%	7,69%
2	Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian	4,00%	0%
3	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA	95,42%	102,08%
4	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA	5,56%	11,12%

No	IKK	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	3.71	3,83
6	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	4,29%	3,08%
7	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	4,64%	4,46%
8	Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	-	-
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat LLAKA	-	-
10	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat LLAKA	15,00	18,09
11	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA	5%	1038,17%
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat LLAKA	-	-

- Terkait tindak lanjut hasil rekomendasi SAKIP belum mengirimkan secara formal namun sebagian besar sudah ditindaklanjuti dan berproses.
 - Capaian banyak yang di atas 110% bisa jadi pertimbangan revisi PK dan renaksi apabila Kementerian sudah dilaksanakan.
 - Perhitungan Realisasi seharusnya 50% pada IKK 1.1 Persentase Realisasi PNBP agar tidak mencapai realisasi 20.763%
 - Terkait data angkutan penumpang datanya belum dikirimkan semua operator ditargetkan tanggal 20 April 2025 sudah ada data finalnya.
 - Nilai Kinerja Anggaran perlu dikoreksi bukan menggunakan PMK 2021 lagi sudah langsung dari aplikasi e-Monev Kemenkeu agar dapat screenshoot disepakati sesuai tanggal 14 April 2025.
 - Terkait Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian realisasinya masih 0% agar menjadi *concern* percepatan terkait penetapan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian.
 - Untuk IKK yang masih strip perlu ditambahkan analisis dan rencana kerja selanjutnya.
 - Renstra yang disusun agar mengikuti data capaian tahun 2024 yang idealnya sesuai dengan kriteria SMART.
40. Pembahasan Capaian Kinerja TW I Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagai berikut :

No	IKK	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025
1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas prasarana	61,430	61,430
2	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II	95,020	95,443
3	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal	64,430	64,430
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian	3,870	3,887
5	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	47,670	48.314

No	IKK	Target TW I 2025	Realisasi TW I 2025
6	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	86,900	86,900
7	Nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-	-
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-	-
9	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	45,817	50,000
10	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian	12,029	178,004
11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Prasarana Perkeretaapian	-	-

- a. TL rekomendasi SAKIP ada 7 rekomendasi yang mayoritas sudah semua dilakukan tinggal dilengkapi data dukungnya.
 - b. Rekomendasi Itjen mendetailkan tata cara perhitungan menjelaskan rumusan angkanya tidak hanya rumusnya saja tetapi memasukan angkanya.
 - c. Terkait capaian secara keseluruhan diatas 100% namun masih terdapat anomali pada IKK Persentase Realisasi PNBP yang terdapat lonjakan pendapatan untuk perizinan sehingga butuh revisi PK disupport dengan data dukung dari Bagian Keuangan.
 - d. Terkait standar TQI untuk Sulsel menjadi identifikasi risiko dan perlu adanya pembahasan teknologi yang digunakan di Sulsel saat ini masih terkendala INPRES penghematan anggaran.
 - e. Dukungan sinkronisasi persentase FASOP dan TQI supaya bisa *inline* dengan Kantor Pusat.
 - f. e-Monev Bappenas tetap perlu diisi untuk progres pemanfaatan, realisasi fisik dan kendala atau hambatan.
 - g. Untuk NKA sudah sesuai mengambil dari eMonev Kemenkeu.
41. Direktorat Sarana Perkeretaapian menyampaikan beberapa hal diantaranya:
- a. IKK 1 Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis tidak ada capain sehingga menggunakan baseline Tahun 2020 – 2023. Diantaranya:
 - 1) Kebijakan fasilitas sarana KRL Lintas Yogyakarta-Solo (2020)
 - 2) Kebijakan fasilitas Sarana Milik Negara di Sumatera Utara (2020)
 - 3) Kebijakan DED (Detail Engineering Design) Balai Yasa Kereta Rel Listrik Yogyakarta- Solo (2022)
 - 4) Kebijakan DED (Detail Engineering Design) Depo KRL Cikarang dan SMN (2023).

IKK terkait Perencanaan Teknis masih terdapat perbedaan pandangan, pada awal Tahun 2025 tidak ada target dalam DIPA POK. Target saat ini ditetapkan berdasarkan *baseline* Tahun 2020 – 2023 dan rencana yang akan dilakukan pada Triwulan I dimana terdapat 4 rekomendasi yang perlu di sahkan. (tidak ada kegiatan pendukung, hanya fokus kepada penyelesaian atau pengesahan 4 dokumen NSPK tersebut).
 - b. IKK 2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian terealisasi sebesar

rata-rata memperoleh nilai 3,78 dari target 3,7. Analisis keberhasilan IKM perlu diperjelas uraian setiap bulannya atau perhitungannya termasuk mencantumkan banyaknya responden.

- c. IKK 3 Presentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian
Persentase capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian bulan Maret adalah sebesar 123,11%. Dengan capaian bulan Maret sebanyak 617 sertifikat, dengan rincian 321 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 296 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II.
- d. IKK 4 Presentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian terkait dengan adanya efisiensi anggaran, penyusunan NSPK tidak dapat dilaksanakan
- e. IKK 5 Presentase Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara realisasi kinerja sebesar 3,60% dari target 3,60%. Kegiatan pengoperasian SMN yang masuk dalam perhitungan IKK ini yaitu pengoperasian SMN yang biayanya dibebankan ke anggaran pengoperasian SMN yaitu sebanyak 4 unit, namun terdapat pelaksanaan kegiatan pengoperasian SMN tanpa menggunakan anggaran pengoperasian SMN yang terbagi menjadi pengoperasian SMN komersial dan non komersial dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pengoperasian SMN yang menggunakan anggaran pengoperasian SMN yaitu pengoperasian Kereta Ukur SU 3 17 01 untuk pemeriksaan dan pengukuran TQI oleh BPKASS pada 4 s.d. 7 Maret 2025
 - 2) Pengoperasian SMN Non Komersial yaitu pengoperasian Railways Crane Solo SC 3 05 01, GD 50 10 01, SN 0 08 01 untuk penanganan banjir oleh PT KAI pada tanggal 26 Januari 2025 s.d. 3 Februari 2025
 - 3) Pengoperasian SMN Komersial yaitu pengoperasian Railways Crane Bandung SC 3 05 02, GD 50 10 02, SN 0 08 02 untuk kegiatan praktek diklat perawatan sarana perkeretaapian khusus oleh STTD pada tanggal 24 Februari 2025
- f. IKK 6 Presentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck capaian sebesar 92,30% (realisasi 84 dari 91). Berdasarkan hasil pelaksanaan rampcheck sarana angkutan lebaran tahun 2025, sarana yang dilakukan rampcheck sebesar 84,4% (2051 unit) dari target 2431 unit. Selain itu, temuan yang didapat sebanyak 83 unit sarana dan telah ditindaklanjuti oleh pihak operator. Upaya peningkatan kinerja untuk kegiatan rampcheck yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap hasil rampcheck angkutan lebaran yang sudah dilakukan untuk memenuhi target pada pelaksanaan rampcheck selanjutnya. Perlu didiskusikan dengan Subdit terkait dikarenakan terdapat perbedaan pengertian, sesuai hasil diskusi terakhir nilai realisasi diperoleh dari berapa persen hasil temuan rampcheck yang sudah ditindak lanjuti oleh operator.
- g. Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian dan Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Sarana perkeretaapian akan terealisasi di Triwulan IV Tahun 2025.

- h. IKK 9 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian Direktorat Sarana Perkeretaapian pada bulan Maret 2025 dengan realisasi kinerja 43,45%.
 - i. IKK 10 Presentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian Capaian Realisasi PNBP Direktorat Sarana Perkeretaapian hingga bulan Maret 2025 adalah sebesar Rp Rp1.044.143.369 dari target sebesar Rp 1.422.000.000 dengan persentase sebesar 73,43%.
 - j. IKK 11 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian belum ada capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian pada triwulan I. Capaian kinerja triwulan I pada IKK ini terhadap target Triwulan I belum tercapai serta capaian kinerja triwulan I pada IKK ini terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 juga belum tercapai. Kegiatan ditargetkan selesai pada triwulan ke IV
 - k. Tindak Lanjut Rekomendasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja sudah mengirimkan surat penyampaian (terdapat 10 rekomendasi) perlu diperjelas dan koordinasikan lanjut untuk pembuatan BA TL Sakip kepada Bagian Perencanaan termasuk data dukung.
42. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyampaikan beberapa hal diantaranya:
- a. IKK 1 Persentasen hasil audit SMKP yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan Target TW I ditargetkan 4,16 dan direncanakan akan dilaksanakan di TW II. Pada bulan Februari 2025 telah disampaikan surat kepada PT LRT, PT KCIC dan PT Celebes Railways Indonesia terkait pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SMKP. Upaya peningkatan keselamatan yang rencana akan dilaksanakan yaitu melaksanakan audit SMKP pada PT Angkasapura Indonesia (April 2025), PT CRI (Mei 2025), PT LRT Jabodebek (Juni 2025) dan PT KCIC (Agustus 2025).
 - b. IKK 2 Persentase rekomendasi peningkatan keselamatan penyelenggaraan dan pengoperasian Kereta Api yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan Target TW I ditargetkan sebesar 5,25% dengan realisasi sebesar 3,16%. Terdapat 3 rekomendasi peningkatan keselamatan penyelenggaraan dan pengoperasian yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan. Capaian terkendala karena adanya efisiensi anggaran. Direncanakan kegiatan ketanggap darurat dan rekomendasi pengangkutan barang berbahaya (B3) pada Triwulan II 2025.
 - c. IKK 3 Persentase penindakan atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian Target TW I ditargetkan sebesar 6,29% namun belum ada realisasi dikarenakan adanya efisiensi anggaran.
 - d. IKK 4 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian Target TW I ditargetkan sebesar 2,12% dan terealisasi sebesar 1,81%. Pada bulan januari sampai dengan bulan Maret telah tercapai 651 sertifikasi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian. Ditkes dan Balai Pengujian akan melakukan koordinasi intens untuk dapat tercapai target setiap triwulannya.

- e. IKK 5 Persentase pemenuhan NSPK bidang keselamatan perkeretaapian Target TW I ditargetkan sebesar 3,36% dan terealisasi sebesar 60%. Capaian pada triwulan I dimana terdapat 9 SOP Makro Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Saat ini Ditkes akan mengusulkan untuk pembahasan RPM terhadap SOP Makro tersebut.
 - f. IKK 6 Persentase rekomendasi teknis peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti Target TW I ditargetkan sebesar 5,44% dan terealisasi sebesar 5%. Sampai dengan bulan Maret 2025 telah disampaikan 11 surat rekomendasi teknis peningkatan keamanan diperlintasan sebidang, dari 11 surat tersebut 1 surat rekomendasi telah ditindaklanjuti.
 - g. IKK 7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Ditkes Target TW I ditargetkan sebesar 3,86% dan terealisasi sebesar 3,78%.
 - h. IKK 8 Nilai AKIP belum ada target dan akan terlaksana pada Triwulan IV Tahun 2025. Kegiatan yang telah dilaksanakan saat ini yaitu telah dibuatnya SK SAKIP Direktorat Keselamatan dan telah melakukan proses upload data dukung pada aplikasi e-Sakip Reviu.
 - i. IKK 9 Tingkat penerapan MR Ditkes belum ada target dan akan terlaksana pada Triwulan IV Tahun 2025. Agar dapat diuraikan upaya – upaya yang telah dilakukan dalam penerapan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2025.
 - j. IKK 10 Nilai Kinerja Anggaran Ditkes Target TW I ditargetkan sebesar 22,94% dan terealisasi sebesar 50%. Pada bulan Maret 2025 telah terealisasi anggaran Ditkes sebesar Rp1.835.757.908,00. Adapun upaya yang dilakukan saat ini adalah melaksanakan rencana penarikan dana sesuai dengan hal III DIPA.
 - k. IKK 11 Persentase realisasi PNPB Ditkes Target TW I ditargetkan sebesar 14,40% dan terealisasi sebesar 10,39%. Sampai dengan bulan Maret telah terealisasi PNPB sebesar Rp135.100.000,00 yang diperoleh dari kegiatan sertifikasi SDM.
 - l. IKK 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal ditargetkan sampai dengan Akhir Tahun sebesar 66 dan realisasi perhitungan akan dilaksanakan pada akhir Tahun 2025.
 - m. TL Rekomendasi AKIP oleh ITJEN sudah ditindaklanjuti, namun untuk yang dari Setditjen masih dalam proses.
 - n. Data KM tempuh dan kecelakaan kereta api dari Direktorat LLAKA dan BTP agar dapat disampaikan ke Ditkes.
 - o. Agar ditambahkan justifikasi terhadap Capaian yang tidak tercapai untuk capaian kinerja TW I 2025.
43. BTP Kelas I Jakarta menyampaikan beberapa hal diantaranya:
- a. IKK 1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah BTP Kelas I Jakarta telah terealisasi sebesar 0,64 dari target sebesar 0,64. Kegiatan pendukung berupa Penertiban Lahan Jalur KA lintas Rangkasbitung – Labuan belum bisa dilaksanakan dikarenakan anggaran terkena blokir sehingga

capaian hanya pada pelaksanaan Survey Pemetaan penertiban lahan lintas Rangkasbitung – Pandeglang dan penambahan perhitungan integrasi dengan Terminal Tipe A.

- b. IKK 2 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II telah terealisasi sebesar 91,63% dari target 91%. Untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II Periode IV 2024 adalah 91,63% (617,459 Kmsp) dengan Panjang Jalur KA terukur 673,891 Kmsp.
- c. IKK 3 Persentase Fasilitas Operasi dengan teknologi handal realisasi TW I sebesar 98,88% dari target 98,88%. Adapun yang menjadi keberhasilan capaian pada Triwulan I dimana total sinyal elektrik yang ada di wilayah BTP Jakarta pada tahun 2025 terdapat 88 persinyalan dari total sinyal (mekanik dan elektrik) sebanyak 88 persinyalan.
- d. IKK 4 Pemenuhan Target angkutan angkutan kereta api masih nilai sementara per Februari 2025 dengan realisasi kumulatif angkutan sebanyak 70.343.222 Orang (1,54%) dan angkutan barang 415.043 Ton (0,57%) total keseluruhan 2,11% dengan Capaian 99,02%. Perlu dilakukan sinkronisasi data pada link <https://bit.ly/SinkronisasiDataKinerjaDJKA>
- e. IKK 5 Perhitungan Persentase Penurunan Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api dihitung pada akhir TW IV Tahun 2025 dengan mempertimbangkan penurunan sebesar 10% dari kejadian Tahun sebelumnya (Tahun 2024). Sampai dengan Triwulan I telah terjadi 9 kejadian di perlintasan sebidang.
- f. IKK 6 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian wilayah BTP Kelas I Jakarta terealisasi sebesar 100% dimana tidak ada kecelakaan pada Triwulan I 2025.
- g. IKK 7 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian akan dilakukan penilaian pada Akhir Triwulan IV. Adapun pencapaian yang telah dilakukan adalah telah menyusun LAKIP 2024, telah mengisi e-performance, penyesuaian anggaran dengan kegiatan di POK 2025, saat ini telah revisi ke-3.
- h. IKK 8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko akan dilakukan penilaian pada Akhir Triwulan IV. Adapun pencapaian yang telah dilakukan adalah telah disusun Laporan MR Triwulan I 2025 dan telah disusun SK maturitas SPIP 2025.
- i. IKK 9 Nilai Kinerja Anggaran dimana persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta berdasarkan monev.kemenkeu yaitu **37,5%**. Untuk realisasi penyerapan pada aplikasi Spanint.kemenkeu yaitu sebesar 1,93%. Disarankan dapat mengambil pada screenshot pada aplikasi per hari ini 14 April 2025.
- j. IKK 10 Persentase Realisasi PNBPN telah terealisasi sebesar Rp14.957.437.279,00 dari target PNBPN Tahun 2025 sebesar Rp2.330.000.000,00.

- k. IKK 11 Nilai Pengawasan Kearsipan akan dilakukan penilaian pada Akhir Triwulan IV Tahun 2025. Adapun upaya peningkatan kinerja adalah BTP Jakarta telah bersurat terkait usulan pemusnahan arsip inaktif dan telah dibuat SK Tim Pengelola Arsip 2025.
 - l. TL Rekomendasi Hasil SAKIP masih dalam proses penyelesaian dan beberapa rekomendasi akan diselesaikan pada Triwulan I Tahun 2025
44. BTP Kelas I Bandung menyampaikan beberapa hal diantaranya:
- a. IKK 1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Bandung sampai dengan TW I tercapai 100% hal ini dikarenakan tidak ada pekerjaan pembangunan Jalur KA yang menghubungkan jalur yang belum terhubung. Hanya terdapat studi penyusunan dokumen AMDAL Pembangunan Jalur KA Pelabuhan Patimban yang tidak dapat dilaksanakan di tahun 2024 dan dianggarkan Kembali kegiatannya di tahun 2025. Status anggaran dapat disampaikan sebagai salah satu kendala selain dengan penetapan trase.
 - b. IKK 2 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II perlu dilakukan pemilahan terkait dengan kegiatan pendukungnya. Nilai TQI koreksi dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar 88,43%. Dengan selesainya Pembangunan Jalur Ganda KA antara Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracondong - Gedebage dan Segmen Haurpugur – Cicalengka maka jalur ganda antara Kiaracondong – Cicalengka beroperasi sepenuhnya, dan ini berarti jalur ganda untuk operasi Kereta Api Bandung Raya dari Padalarang hingga Cicalengka sudah beroperasi sepenuhnya. Sementara untuk jalur ganda Paledang – Cicurug saat ini masih dilakukan beberapa pengujian dan persiapan untuk operasi jalur ganda di tahun 2025. Kedua kegiatan yang telah selesai ini diharapkan dengan perhitungan kembali pada tahun 2025 dapat meningkatkan capaian persentase IKK 2 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung.
 - c. IKK 3 Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal telah terealisasi sebesar 70,650% dari target 70,650% dimana Progres Fisik pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan Dan Telekomunikasi Jalur Ganda KA Antara Kiaracondong - Cicalengka Tahap 2 sampai dengan akhir Desember 2024 AKTUAL 100% dan telah dilakukan pengoperasian (switch over) untuk fasilitas operasi pada petak Haurpugur Cicalengka pada 31 Desember 2024.
 - d. IKK 4 Persentase Pemenuhan target angkutan KA telah terealisasi sebanyak 4.161.485 (Januari – Februari) penumpang atau 2,99% dari jumlah target renstra, sedangkan angkutan barang (Januari – Februari) sebanyak 40.090 ton atau 1,54% dari jumlah kumulatif target target renstra. Sehingga presentase angkutan BTP Bandung sebesar 2,270%.
 - e. IKK 5 Presentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang Kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kebijakan efisiensi. Upaya yang dilakukan adalah Bersurat kepada pimpinan pusat terkait keperluan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini, dikarenakan urgensi dan prioritas di tahun 2025. Dan

diusulkan pada PAGU Kebutuhan Tahun 2026, sebagai alternatif jika tidak dapat dilaksanakan di tahun 2025.

- f. IKK 6 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Sampai dengan triwulan I (akhir Maret) tidak ada kecelakaan KA diakibatkan oleh Sarana KA. Sehingga capaian pada IKK 6 sebesar 100%.
 - g. IKK 7 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung akan dilakukan penilaian pada Triwulan IV. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu penyusunan monitoring renaksi Tahun 2025.
 - h. IKK 8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko akan dilakukan penilaian pada Triwulan IV. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Pengisian Rencana Pemantauan Risiko Triwulan I, melakukan pengisian dan pelaporan Profil dan Identifikasi Risiko Tahun 2025 BTP Bandung pada Aplikasi MR Bean Portal DJKA pada bulan Februari 2025, melaksanakan Penilaian Maturitas Manajemen Risiko dalam Mendukung Pelaksanaan Pengawasan Internal Berbasis Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - i. IKK 9 Nilai Kinerja Anggran Balai Teknik Perkeretaapian belum menyampaikan realisasi.
 - j. IKK 10 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal akan dilakukan penilaian pada Triwulan IV. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu telah terbit SK Tim Pengelola Arsip BTP Kelas I Bandung.
 - k. TL Rekomendasi SAKIP terdapat 10 rekomendasi dimana 8 telah selesai atau tuntas dan 2 rekomendasi masih dalam proses.
45. BTP Kelas I Medan menyampaikan beberapa hal diantaranya:
- a. IKK 1 Rasio konektivitas BTP Medan dari total 18 PKN/PKW/Simpul Transportasi Terhubung, terdapat sebanyak 9 daerah telah terhubung. Pada Tahun Anggaran 2025, tidak terdapat pekerjaan yang menambah Rasio Konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan. Progres pekerjaan pada pengoperasian stasiun Muara Satu (Lhokseumawe) Yaitu masi melakukan tindak lanjut pada pengujian fasop dan jalbang yang dilaksanakan pada 20 Februari 2025. Update timeline perlu disampaikan untuk support Eselon I.
 - b. IKK 2 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II dimana hasil Pengukuran Jalan Rel mengacu pengukuran yang dilakukan pada periode IV tahun 2024, diperoleh hasil yang didapatkan 98,2% dari target yang ditetapkan sebesar 95,3% dengan capaian 103%.
 - c. IKK 3 Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal dimana perbandingan jumlah antara fasilitas operasi yang berbasis elektrik sebanyak 31 unit dengan jumlah keseluruhan fasilitas operasi yang beroperasi sebanyak 56 unit dengan rincian 31 sinyal elektrik dan 25 sinyal mekanik.
 - d. IKK 4 Pemenuhan target angkutan kereta api I sampai dengan bulan Februari, untuk angkutan penumpang adalah 1.042.628 Orang dan angkutan barang adalah 145.805 ton.

- e. IKK 5 Persentase Realisasi Perjalanan KA Perintis Pada bulan Februari terdapat gagal operasi sarana Cut Mutia dikarenakan *Hot Engine* pada tanggal 14,15,16 Februari 2025, sehingga realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar 96,8% (teralisasi sebesar 697 dari program 720).
 - f. IKK 6 Persentase Penurunan Kejadian gangguan Operasional Perjalanan Kereta api pada perlintasan sebidang pada Triwulan I 2025, sampai dengan Februari 2025 berjumlah 6 kejadian.
 - g. IKK 7 Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian sampai TW I Tahun 2025 tidak terdapat 0 kejadian kecelakaan KA namun data kecelakaan di wilayah BTP Kelas I Medan perlu dicek kembali.
 - h. IKK 8 Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian akan dilakukan perhitungan pada Triwulan IV.
 - i. IKK 9 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian akan dilakukan perhitungan pada Triwulan IV.
 - j. IKK 10 Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian sebesar 29,17% berdasarkan aplikasi Kemenkeu.
 - k. IKK 11 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian. Persentase perolehan PNBP sampai dengan TW I yaitu sebesar Rp. 182.914.000 bersumber dari pengembalian belanja modal dan belanja barang, hasil Temuan dari BPK, pendapatan perintis cut mutia serta pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan.
 - l. IKK 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal akan dilakukan perhitungan pada TW IV. Adapun yang telah dilakukan saat ini adalah pembuatan daftar arsip aktif, pembuatan KAK RAB terkait penataan arsip, mengikuti bimtek kearsipan, melakukan registrasi arsip aktif melalui Aplikasi SRIKANDI.
46. Balai Pengujian menyampaikan beberapa hal diantaranya:
- a. IKK 1 Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian capaian Triwulan I sebesar 237,04% dengan realisasi sebesar 5,504% dari target sebesar 2,322%.
 - b. IKK 2 Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian capaian Triwulan I sebesar 79,49% dengan realisasi sebesar 1,872% dari target sebesar 2,355%.
 - c. IKK 3 Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian capaian Triwulan I sebesar 68,52% dengan realisasi sebesar 2,425% dari target sebesar 3,539%.
 - d. IKK 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan capaian Triwulan I sebesar 99,74% dengan realisasi sebesar 3,850 dari target sebesar 3,860.
 - e. IKK 5 Nilai AKIP akan dilakukan perhitungan pada Triwulan IV Tahun 2025. Adapun hal yang telah dilaksanakan yaitu telah dilakukan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025, PK ASN Tahun 2025, SKP ASN Tahun 2025, dan dokumen RKT Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 dan telah dilakukan publikasi laporan kinerja

pada aplikasi E-Sakip Reviu, SILAKI dan akan dilengkapi kekurangan data yang belum dipublikasi.

- f. IKK 6 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian akan dilakukan perhitungan pada Triwulan IV Tahun 2025. Adapun hal yang telah dilaksanakan yaitu Telah disusun Piagam Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 dan telah disusun dokumen Manajemen Risiko Tahun 2025 berdasarkan KM 69 Tahun 2023 berdasarkan Proses Bisnis Balai Pengujian Perkeretaapian.
 - g. IKK 7 Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian capaian Triwulan I sebesar 229,29% dengan realisasi nilai sebesar 49,000 dari target sebesar 21,370.
 - h. IKK 8 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) capaian Triwulan I sebesar 101,92% dengan realisasi pendapatan sebesar Rp14.987.982.814,00.
 - i. IKK 9 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian akan dilakukan perhitungan pada Triwulan IV Tahun 2025.
 - j. Capaian yang anomali agar diuraikan secara detail analisis keberhasilan/kegagalan capaian dan upaya penanganannya.
47. BTP Kelas I Semarang menyampaikan beberapa hal diantaranya:
- a. IKK 1 Rasio Konektivitas pada Triwulan I 2025, rasio konektivitas tercapai 0.75 dengan jalur terhubung sebanyak 15 dari 20 titik konektivitas yang telah direncanakan terhubung.
 - b. IKK 2 Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II Capaian kinerja Triwulan I sebesar 100,04% dimana terealisasi sebesar 99,50% dari target 99,46% (Jalur total kategori I dan II sebanyak 1.640,992 dan Panjang jalur terukur 1.649,234)
 - c. IKK 3 Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal capaian kinerja pada Triwulan I 100%. Perbandingan antara unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik (105 unit) dengan jumlah keseluruhan unit fasilitas operasi yang beroperasi berjumlah 120 unit, dengan rincian 105 sinyal elektrik, 15 sinyal mekanik.
 - d. IKK 4 Pemenuhan target angkutan KA terealisasi sebesar 3,54% dari target 4,58% (capaian 77%). Ketidaktercapaian target ini dikarenakan data angkutan KA belum diperoleh seluruhnya dari operator KA, masih terdapat data yang belum dilaporkan dikarenakan masih menunggu berakhirnya posko angkutan lebaran.
 - e. IKK 5 Persentase realisasi perjalanan kereta api perintis capaian kinerja triwulan I sebesar 100%. Hingga TWI 2025, Perjalanan KA Perintis terealisasi sebanyak 360 frekuensi perjalanan KA, sehingga tercapai 100% dari target yang ditetapkan. Realisasi penumpang KA perintis sebesar 42.836 penumpang.
 - f. IKK 6 Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang Hingga TWI 2025 terdapat 10 gangguan

operasional diperlintasan sebidang ,namun BTP Semarang belum mentargetkan prosentase jumlah gangguan pada triwulan I dikarenakan diakumulasikan diakhir tahun.

- g. IKK 7 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian tercapai 100% pada Triwulan I. Hingga TW I 2025 belum terdapat kecelakaan kereta api. Namun terdapat kebakaran kereta api di stasiun Yogyakarta yang diakibatkan oleh sabotase manusia. Kejadian ini tidak dimasukkan ke dalam kecelakaan kereta api.
- h. IKK 8 Nilai AKIP akan dilakukan penilaian pada Triwulan IV. Kegiatan pada Triwulan I 2025 kegiatan yang sudah terlaksana yaitu:
 - 1) Penyusunan PK dan RKT Tahun 2025, Serta Laporan Capaian Kinerja TW IV dan Laporan Kinerja Tahun 2024
 - 2) Penyusunan Monitoring Renaksi Desember 2024, Januari-Februari 2025
 - 3) Pengisian Capaian Kinerja di E-performance dan Silaki.
 - 4) Penyusunan SK SAKIP, dan Laporan Tahunan
 - 5) Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Itjen
- i. IKK 9 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko akan dilakukan penilaian pada Triwulan IV. Kegiatan pada Triwulan I 2025 kegiatan yang sudah terlaksana yaitu:
 - 1) Laporan Manajemen Risiko TW IV 2024
 - 2) Laporan Tahunan Manajemen Risiko TA 2024
 - 3) Terlaksananya Wawancara Itjen sebagai Pemilik Risiko, UPR , dan Staff Pelaksana
 - 4) Mengusulkan penyampaian usulan Manajemen Risiko 2025
 - 5) Melakukan pengisian kertas kerja SPIP 2025
 - 6) Penyusunan Laporan Triwulan I Manajemen Risiko TA 2025
- j. IKK 10 Nilai Kinerja Anggaran Pada Triwulan I 2025 Nilai Kinerja Anggaran bersarkan komponen Realisasi Nilai Perencanaan Anggaran dan IKPA, antara lain NPA=0 dan IKPA 37,50. Nilai Perencanaan Anggaran belum dapat tercapai karena RO masih belum dapat diisikan.
- k. IKK 11 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Hingga TW I 2025, Realisasi PNBP BTP Semarang mencapai 100,77% dari target atau sebesar Rp31.432.105.630,00.
- l. IKK 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pada TW I 2025, BTP Semarang belum mentargetkan nilai pengawasan kearsipan karena masih akan dilakukan penilaian di triwulan IV 2025. Beberapa kegiatan pendukung yang dapat meningkatkan nilai pengawasan kearsipan antara lain:
 - 1) Pengarsipan Dokumen Surat Tugas
 - 2) Penataan Kearsipan
 - 3) Sosialisasi Aplikasi Srikandi dan Perjadin Online
 - 4) Mempersiapkan data dan kebutuhan untuk penggunaan aplikasi Srikandi
 - 5) Permohonan Reset Password Email untuk login Srikandi dan TTE
- m. Draft Renstra agar dapat diupload pada aplikasi E-Performance

- n. TL Rekomendasi ITJEN agar dilengkapi dengan link data dukung dan berkoordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian
 - o. Konektivitas agar dicek kembali apabila ada yang terintegrasi dengan Terminal Tipe A.
 - p. Data angkutan secara berkala agar diupdate/dicek melalui link <https://bit.ly/SinkronisasiDataKinerjaDJKA>
 - q. Data terkait dengan keselamatan perkeretaapian pada perlintasan sebidang agar dicek kembali dikarenakan terdapat beberapa anomali atau data yang kurang sesuai.
48. BTP Kelas I Surabaya menyampaikan beberapa hal diantaranya:
- a. IKK 1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Rasio konektivitas sampai dengan 31 Maret 2025 sebesar 0,375 dari target 0,375. Konektivitas agar dicek potensi peningkatan kapasitas dengan terminal Tipe A.
 - b. IKK 2 Persentase Pengoperasian Jalur Kereta Api Yang Sesuai Dengan TQI kategori I dan II Data TQI menggunakan pengukuran periode IV tahun 2024 diperoleh hasil 98,192%. Perbandingan antara Jalur KA yang sesuai dengan TQI I dan II (1211.142 kmsp) dengan Jalur KA keseluruhan yang beroperasi (1233.439 kmsp). Perlu dilakukan pengecekan ulang mengenai kegiatan pendukung pada TQI apakah asset masuk kedalam TQI serta perlu adanya sinkronisasi data TQI dengan Direktorat Prasarana.
 - c. IKK 3 Persentase Fasilitas Operasi Dengan Teknologi Handal capaian saat ini telah tercapai 100%, dimana perbandingan antara unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik (44 unit tanpa IB) dengan jumlah keseluruhan unit fasilitas operasi yang beroperasi (116 unit tanpa IB).
 - d. IKK 4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api dimana realisasi Penumpang Kereta Api bulan Maret sebesar 6.309.155. , sedangkan realisasi angkutan barang KA bulan Maret sebesar 1.0642.410.. Persentase Realisasi angkutan penumpang dan barang yaitu 6,416% Capaian 133,520%. Realisasi nilai angkutan agar diupdate/dicek lagi pada link <https://bit.ly/SinkronisasiDataKinerjaDJKA>
 - e. IKK 5 Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang sampai dengan bulan Maret terdapat 12 kecelakaan di perlintasan sebidang sementara target 2025 adalah adanya penurunan 10% dari periode restra sebelumnya [Periode 2020-2024 ada sebanyak 295 kecelakaan di perlintasan sebidang (rata-rata 59 kejadian/tahun)].
 - f. IKK 6 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian sampai dengan Maret tidak ada kecelakaan kereta api, dimana terdapat 6,950 perjalanan KA sehingga akumulasi perjalanan sebanyak 18,823 perjalanan KA.
 - g. IKK 7 Nilai AKIP perhitungan akan dilaksanakan pada Triwulan IV 2025. Hal yang telah dilakukan antara lain pengisian progres kegiatan Februari pada beberapa aplikasi berikut; a) e-SAKIP b) e-performance, penyusunan Monev Renaksi Februari, pemenuhan data dukung Pagu Kebutuhan 2026 pada

aplikasi e-planning, Penyusunan paparan dan matrik Pakeb 2026 sebagai efek dari adanya efisiensi 2025.

- h. IKK 8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko perhitungan akan dilaksanakan pada Triwulan IV 2025. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:
 - 1) Pengisian Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2025
 - 2) Penyusunan MR 2025 pada aplikasi MRBean
 - 3) Bulan Maret BTP Surabaya mengikuti sosialisasi KKE PM Maturitas SPIP. dilingkungan Kementerian Perhubungan
 - 4) Rapat Koordinasi terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025
 - 5) Pembahasan pemantauan MR Triwulan I dilingkungan Kementerian Perhubungan
 - 6) Proses pengisian kertas kerja pemantauan Manajemen Risiko dilingkungan Ditjen Perkeretaapian
 - 7) Penyusunan MR 2025 pada aplikasi MRBean
- i. IKK 9 Nilai Kinerja Anggaran di bulan Maret diperoleh berdasarkan perhitungan SMART yang masih dilakukan secara manual dikarenakan aplikasi SMART masih belum dapat digunakan. >>> Nilai Kinerja Anggaran bulan Maret sebesar 45,170%
- j. IKK 10 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sampai dengan bulan Maret BTP Surabaya telah melakukan pelaporan penghapusan BMN yang ada di Kantor Balai berupa 4 unit mobil senilai Rp836.938.500,00. Capaian Realisasi PNBP harus dijelaskan secara detail analisisnya, realisasi yang di sandingkan dengan target.
- k. IKK 11 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal dimana Nilai diperoleh dari penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Ditjen Perkeretaapian, dan saat ini masih belum dilakukan penilaian
- l. Aplikasi e-monev Bappenas masih menunggu launching dan perlu dilakukan pengecekan terhadap aplikasi e-sakip reviu.
- m. Perlu dicek rencana aksi untuk AKIP, Manajemen Risiko, dan Arsip seharusnya tidak ada target di Triwulan I. Termasuk nilai NKA harusnya ada target di Triwulan I.

49. Pembahasan Capaian Kinerja Balai Perawatan Perkeretaapian :

No	IKK	Target Tw I 2025	Realisasi Tw I 2025
1	Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi	100,000	99,26
2	Presentase Pemanfaatan Aset Sarana Milik Negara	-	-
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-
4	Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-

No	IKK	Target Tw I 2025	Realisasi Tw I 2025
5	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-
6	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian	6,964	22,37
7	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian	0,154	12,11
8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian	-	-

- Terdapat 1 sarana yang dikelola oleh Balai Perawatan TSO dikarenakan masih dalam proses perbaikan, tidak ada kendala dan diperkirakan perbaikan selesai pada bulan April 2025.
 - Masih Pemanfaatan masih dikoordinasikan dengan Kepala Seksi, agar dapat lebih spesifik pada sarana yang termanfaatkan (dipinjam). Disarankan untuk menambahkan pemanfaatan Dipo KRL.
 - IKM masih dalam proses kajian disarankan dapat mengambil referensi dari Balai Pengujian ataupun dari Direktorat. Kajian dijadwalkan selesai pada triwulan II 2025. Pada rencana aksi ditargetkan realisasi pada Triwulan IV 2025 namun diharapkan sudah dapat dilaksanakan pada Triwulan III 2025.
 - Surat Penyampaian Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP saat ini masih dalam proses persetujuan oleh pimpinan.
 - Indikator NKA menggunakan realisasi pada aplikasi Monev Kemenkeu.
50. Pembahasan Capaian Kinerja BPKAR Sumatera Selatan :

No	IKK	Target Tw I 2025	Realisasi Tw I 2025
1	Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	4,06	4,46
2	Persentase Kedatangan Dan Keberangkatan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tepat Waktu	99	99,55
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	3,58	3,57
4	Tingkat Keselamatan Transportasi Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	100	100
5	Nilai AKIP BPKAR Sumatera Selatan	-	-
6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BPKAR Sumatera Selatan	-	-
7	Nilai Kinerja Anggaran BPKAR Sumatera Selatan	20,25	50
8	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPKAR Sumatera Selatan	21,8	4,35
9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPKAR Sumatera Selatan	-	-

- Untuk TL Evaluasi SAKIP agar dapat ditambahkan data dukung.
- Pengisian aplikasi e-Sakip Reviu agar dilengkapi, Renstra dapat menggunakan naskah teknokratik.
- Capaian Angkutan sudah diisikan pada spreadsheet.
- Capaian OTP BPKAR Sumatera Selatan 99,55%.

- e. Indikator IKM tidak tercapai diharapkan agar dapat diuraikan pada laporan analisis kegagalannya.
- f. Proses PM Evaluasi SAKIP pada Triwulan II 2025.
- g. NKA BPKAR Sumatera Selatan sudah mencapai nilai maksimal 50, agar dapat diuraikan pada Laporan.
- h. Penandatanganan kontrak keperintisan sudah dilakukan pada 8 April 2025 dikarenakan ada efisiensi sehingga diperlukan perhitungan ulang.

51. Pembahasan Capaian Kinerja BTP Palembang :

No	IKK	Target Tw I 2025	Realisasi Tw I 2025
1	Rasio Konektivitas	0,71	0,71
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II	93,03	93,872
3	Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal	33,73	27,71
4	Pemenuhan target angkutan kereta api	4,23	4,45
5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlindungan Sebidang	10	-
6	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian	100	100
7	Nilai Kinerja Anggaran	81	46,5
8	Nilai AKIP	81,9	-
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko	15	-
10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	61	-

- a. Terkait Fasilitas Operasi ditargetkan pada triwulan I 2025 sudah tercapai dan secara fisik sudah selesai namun belum dapat dihitung sebagai capaian. Direktorat Prasarana menargetkan pada triwulan IV 2025 selesai.
- b. Kejadian gangguan pada perlindungan sebidang 4 kejadian dengan baseline tahun 2024 sebanyak 23 kejadian. Target pada Triwulan IV 2025, agar disesuaikan.
- c. Saat ini sudah ada realisasi PNBK sehingga diperlukan Revisi PK.
- d. Untuk TL Evaluasi SAKIP agar segera disampaikan.

52. Pembahasan Capaian Kinerja BTP Padang :

No	IKK	Target Tw I 2025	Realisasi Tw I 2025
1	Rasio Konektivitas	0,5	0,5
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II	84,42	84,42
3	Pemenuhan target angkutan kereta api	4,1	3,93
4	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis	24,66	24,66
5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlindungan Sebidang	-	-
6	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi perkeretaapian	100	100
7	Nilai Kinerja Anggaran	-	39,75
8	Nilai AKIP	-	-
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko	-	-
10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	-	-

- a. Tidak ada kegiatan strategis sebelum dan setelah efisiensi anggaran. Untuk kegiatan PKW Sawah Lunto agar tetap diuraikan pada laporan.
- b. Belum dilakukan penandatanganan angkutan perintis pada BTP Padang.
- c. Kegiatan keamanan dan keselamatan terkena pemotongan anggaran.
- d. Terkait dengan pengisian aplikasi agar dilengkapi.
- e. Kegiatan pemasangan EWS bisa dimasukkan dalam kegiatan pendukung gangguan pada perlintasan sebidang.
- f. Kegiatan pendukung arsip dapat dipilah dari swakelola yang dapat mendukung.

53. Pembahasan Capaian Kinerja BPKA Sulawesi Selatan :

No	IKK	Target Tw I 2025	Realisasi Tw I 2025
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	0.24	0.24
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	99	99
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Kereta Api Sulawesi Selatan	100	100
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulsel	3	2.36
5	Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Tepat Waktu	96.45	98,53
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	3.23	3.34
7	Tingkat Keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	100	100
8	Nilai AKIP Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	-	-
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	-	-
10	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	8	75
11	Persentase realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	25	26
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPKA Sulawesi Selatan	-	-

- a. Konektivitas bisa disampaikan uraian terkait penyempurnaan dengan konektivitas yang sudah terjalin.
- b. Angkutan penumpang tidak tercapai (penurunan drastis pada bulan Maret 2025) terkait dengan hal ini agar disampaikan analisisnya. Pada saat terjadi longsoran KA Makpar hanya beroperasi pada lintas Labakkang-Mandale.
- c. Terkait dengan IKM agar dapat diuraikan jumlah responden dari survey.
- d. NKA agar disesuaikan menggunakan data pada aplikasi e-Monev Kemenkeu.
- e. Terkait dengan TQI, agar dapat didetailkan per kategori serta panjang jalurnya. Akan dikoordinasikan dengan seksi terkait untuk berkoordinasi dengan Dit Prasarana.

- f. BPKA sudah bersurat kepada Direktorat Prasarana namun masih diperlukan pembahasan dikarenakan belum mencantumkan metode penentuan kategori.
- g. Pengisian aplikasi khususnya e-SAKIP Reviu agar segera dilengkapi.
- h. Diperlukan penyampaian TL Evaluasi SAKIP dari BPKA Sulsel untuk kemudian disusun BA TL Evaluasi AKIP pada hari ini.

54. Penyampaian Materi dari Narasumber Kemenenterian PANRB :

- a. Kementerian PAN-RB saat ini sedang menyusun Perpres terkait dengan penyelenggaraan SAKP (Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah) yang saat ini masih berproses di Sekretariat Negara. Inisiatif untuk menyelaraskan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai target pembangunan nasional, sedangkan RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka menengah.
- b. Dalam penyusunan dokumen perencanaan agar memperhatikan Lampiran 3 RPJMN dan diwajibkan semuanya tercantum hingga unit kerja Eselon I.
- c. Masing-masing unit kerja diharap mempersiapkan database kinerja yang baik agar dapat menjadi dasar penetapan target. Khususnya pada Kemenhub pada tahun 2024 masih terdapat penentuan target yang lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya.
- d. Direncanakan percepatan pelaksanaan evaluasi SAKIP Tahun 2025 oleh Kementerian PAN-RB pada bulan Mei 2025. Hal-hal yang perlu disiapkan yaitu:
 - 1) Pemenuhan dokumen SAKIP.
 - 2) Matriks tindak lanjut.
 - 3) Bagi IP yang memiliki aplikasi SAKIP dapat menyampaikan aksesnya kepada evaluator.
 - 4) Hal-hal positif dan praktik baik yang sudah dilakukan oleh setiap IP serta prestasi/reward yang diterima oleh IP.
- e. Format matriks tindak lanjut rekomendasi Evaluasi SAKIP

No.	Rekomendasi LHE / LHEI Tahun 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status /Progress Penyelesaian

- f. Percepatan Evaluasi SAKIP dimungkinkan menjadi kendala dikarenakan berdasarkan KM evaluasi dilakukan secara berjenjang.
- g. Beberapa dokumen yang perlu disiapkan dalam evaluasi SAKIP:
 - 1) RPJMN 2025-2029 (apabila sudah diterbitkan oleh Bappenas)
 - 2) Renstra 2025-2029 (Draf boleh dilampirkan dulu apabila belum ditetapkan)
 - 3) PK Tahun 2025
 - 4) IKU tahun 2025-2029

- 5) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan unit kerja tahun 2024
 - 6) Perjanjian kinerja terbaru
 - 7) Rencana Aksi atas PK tahun 2025
 - 8) Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal (LHEI)
 - 9) Matriks tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Kementerian dan unit kerja tahun 2024
- h. Diharapkan pendampingan penyusunan Renstra juga melibatkan BPKP agar evaluasi dari BPKP bisa sinkron.
 - i. Terkait dengan penetapan PK, ada kelonggaran dikarenakan kondisi efisiensi anggaran, periode baru Renstra dll.
 - j. RPJMN untuk sementara dapat diupload pada menu Renstra aplikasi e-SAKIP Reviu.
 - k. Terkait dengan penurunan target dapat disesuaikan kembali dengan karakteristik dari IKK, jika mutlak maka tidak bisa diturunkan targetnya dari capaian tahun sebelumnya.
 - l. Tetap dibutuhkan penetapan IKP sebagai turunan dari penetapan IKU yang dilakukan oleh Kementerian.
55. Pembahasan Capaian Kinerja Setditjen Perkeretaapian :
- Indikator Setditjen ada 13 Indikator yang mana 5 indikator di targetkan di TW I dan 8 indikator di akhir tahun
- a. Bagian Keuangan
 - 1) Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor
 - Posisi di TW I sudah 82,33% dengan rincian total temuan 498, tuntas 410 tindak lanjut proses 85, belum tindak lanjut ada 3 temuan.
 - Terdapat tambahan temuan 490 menjadi 498 agar ditambahkan list temuan yang bertambah.
 - Perlu diuraikan yang dapat diselesaikan di Triwulan I dari tindak lanjut proses dan belum tindak lanjut.
 - Upaya yang dilakukan bersurat ke Balai untuk menindaklanjuti temuan yang sudah ada, dari terbitnya LHA wajib ditindaklanjuti 60 hari kerja lewat dari itu akan ada surat teguran.
 - Surat yang bisa diajukan data dukung agar disampaikan ke Bagian Perencanaan.
 - 2) Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian
 - Tidak ada realisasi di Triwulan I, realisasi baru ada di akhir tahun anggaran.
 - Di TW I sudah membuat SK Tim Percepatan Status Penggunaan Aset.
 - Telah membuat himbauan ke Balai atau Satker untuk mengirim RAB terkait penyelesaian sertifikasi tanah.
 - Ada upaya terkait efisiensi pada sewa gedung agar dikaji ulang.
 - Mengusulkan penghapusan anggaran sewa kendaraan.

- Upaya peningkatan TW II akan diadakan Rapat Koordinasi Sertifikasi Tanah.
- Dari sub komponen penilaian IPA bisa menjadi data dukung upaya yang telah dilakukan.

3) Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian

- Posisi saat ini sudah 87,39 dan NKA sudah 43,93 serta realisasi per hari ini sudah 174 Milyar.
- Pada TW I ini sudah melakukan revisi anggaran terkait MYC buka blokir.
- Diperlukan analisis upaya yang telah dilakukan karena terdapat kebijakan efisiensi dan pemutihan.
- Acuan masih pagu awal belum pagu efektif sehingga DJKA masih paling rendah capaiannya dibandingkan unit kerja lain.
- Agar menyampaikan analisa yang menyebabkan keberhasilan sehingga mencapai target dan upaya kedepan yang perlu dilakukan.

4) Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian

- TW I data angkanya sudah mencapai 55,35%, dengan terbesar dari pembayaran TAC.
- PT KAI masih meminta keringanan pembayaran TAC untuk 2024 dan 2025.
- Khusus Setditjen PNBPnya dari sewa lahan (tanah, gedung dan bangunan) dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu tergolong masih rendah karena belum ada pemohon penyewa lahan.
- Agar disampaikan juga list sewa lahan yang dimiliki untuk dijadikan data dukung.
- Sudah dilakukan *follow up* dengan menyurati namun belum ada respon dari penyewa lahan.

b. Bagian SDMO

1) Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian

- Upaya peningkatan akan menyediakan *google form* layanan pengaduan kerusakan fasilitas yang akan ditempel pada setiap lantai berupa *barcode*.
- Diharapkan juga layanan pengaduan dimasukkan dalam PLD Ditjen Perkeretaapian.
- Hasil survei masih menunggu responden saat ini masih 90 responden yang mengisi dari minimal 160 responden.
- Untuk responden saat ini masih dilakukan di seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, TW II akan di fokuskan responden pada kantor pusat.
- Hasil survei tahun 2024 dapat menjadi rekomendasi peningkatan tahun 2025.

- Fasilitas transportasi yang diberikan ke stasiun setiap jam 4 sore.

2) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian

- Terkait rapat sosialisai penggunaan SRIKANDI dan pembahasan revisi KM 41 Tahun 2021 dapat dijadikan data dukung.
- Perlu data inventarisasi yang sudah ditindaklanjuti untuk pemilahan arsip aktif dan non aktif.
- SK Tim Pengelola arsip perlu dipercepat agar bisa menjadi upaya di TW II.
- Data dukung dapat berupa laporan rapat yang dilakukan terkait SRIKANDI atau rapat koordinasi antar TU.

3) Indeks Profesional ASN

- Hasil rata-rata IP ASN posisi 7 Maret sebesar 63,4% yang tergolong masih rendah dan masih banyak pegawai yang memiliki nilai 0 pada kinerja dan kompetensi.
- Kendala nilai IP ASN yang rendah dikarenakan belum semua pegawai melakukan klik terima penilaian di e-Kinerja dan admin e-Kinerja belum melakukan sinkronisasi ke BKN.
- Pada TW I sudah bersurat ke unit kerja terkait penyampaian IP ASN tanggal 24 Maret 2025 dan berkoordinasi dengan masing-masing admin di unit kerja.
- Terkait nilai kompetensi yang rendah disebabkan belum mengupload sertifikasi yang dimiliki dari diklat/pelatihan/sosialisasi tahun 2024 pada SIK.
- Penilaian IP ASN finalnya di bulan September 2025 dan di akhir April 2025 akan dilakukan rapat terkait monitoring nilai IP ASN.

c. Bagian Hukum

1) Persentase pencapaian target regulasi/legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian

- Posisi Triwulan I belum ada Peraturan Menteri yang diterbitkan.
- Agar disampaikan progres yang sedang berjalan dan konsep draft yang sedang dibahas serta kendalanya dan untuk rencana di TW II.
- Untuk list yang disampaikan ke Bagren agar konsisten datanya.
- Progres pembahasan, data benchmark dan rencana kedepan akan disampaikan Bagian Hukum via *Google Docs*.

2) Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian

- Posisi TW I sedang menghadapi 2 sengketa informasi publik yang masih dalam tahap sidang kedua dan akan dilanjutkan mediasi. Total 84 pekerjaan yang diminta data Barjasnya oleh LSM.
- Menghimbau Balai untuk tertib administrasi karena LSM mempertanyakan data proyeknya. Indikator ini merupakan nilai terbesar dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik.

- SK Dirjen terkait SK PPID dan Daftar Informasi Publik (DIP) sudah terbit dan disosialisasikan ke unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk membuat turunannya.
- Penilaian keterbukaan informasi publik baru akan dilakukan di TW II, III dan IV untuk dapat dibantu disampaikan indikator kriteria penilaian yang masih bisa ditingkatkan sebagai upaya rencana kedepan.

D. KESIMPULAN

1. Masing-masing unit kerja perlu menyampaikan usulan nama PIC sebagai tim evaluator SAKIP tingkat Eselon I.
2. Masing – masing unit kerja agar dalam indikator kinerja kegiatan perlu diuraikan anggaran per masing – masing indikator.
3. Pelaporan Triwulan I agar mengacu pada LKIP Tahun sebelumnya untuk menindaklanjuti catatan sebelumnya.
4. Pada masing-masing unit kerja yang belum menyampaikan surat/nota dinas TL Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP agar segera disampaikan beserta data dukungnya untuk kemudian proses lanjut penyusunan BA.
5. Terkait dengan IKK Tingkat Keselamatan, tidak ada kejadian kecelakaan KA selama triwulan I 2025.
6. Terkait dengan IKK TQI masih diperlukan konfirmasi untuk BTP Surabaya dan BPKA Sulsel.
7. Target Renaksi IKK Gangguan Operasional pada perlintasan sebidang agar disamakan pada akhir tahun.
8. Terkait dengan IKK NKA menggunakan sumber data pada aplikasi Monev Kemenkeu.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 April 2025

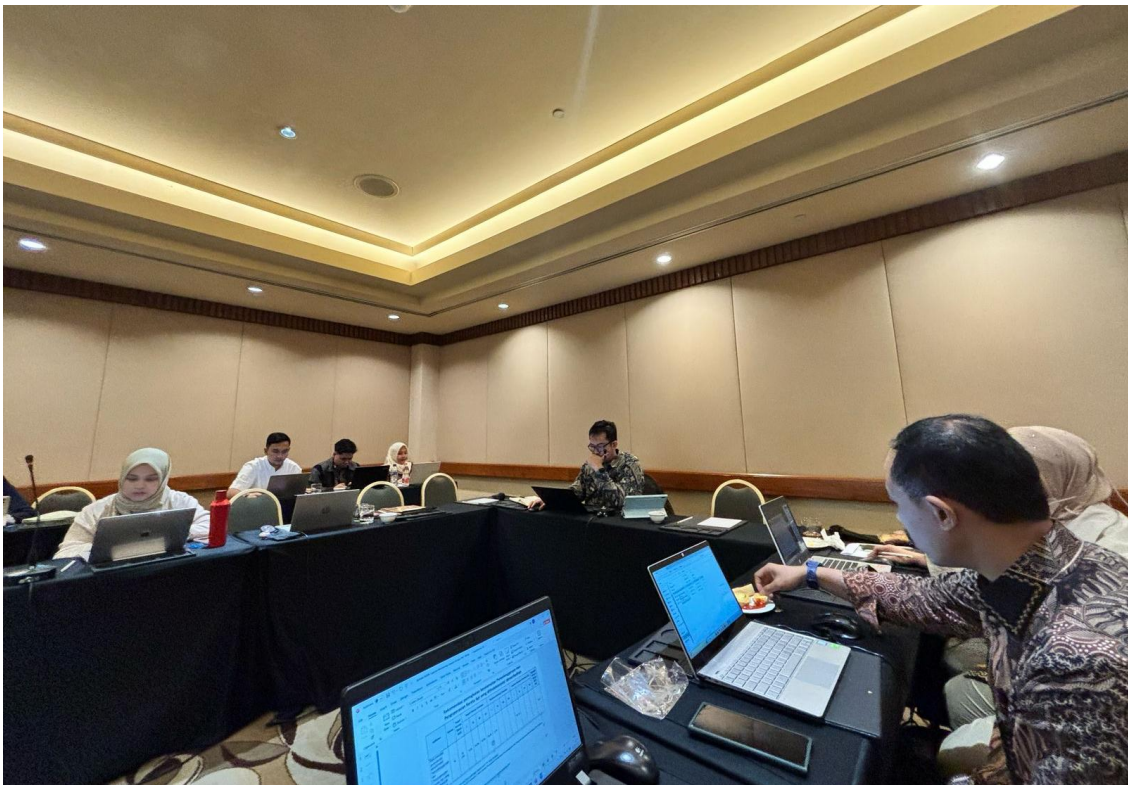
NOTULENSI



(Kel. Evaluasi dan Pelaporan)

Dokumentasi







KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <https://djka.kemenhub.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205 / 1 / 20 / K 1 / DJKA / 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Tindak Lanjut Rapat Pembahasan
Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun
2025 dan Persiapan Evaluasi
Implementasi SAKIP

Jakarta, 17 April 2025

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan hasil rapat pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Persiapan Evaluasi Implementasi SAKIP unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 14 s.d 15 April 2025, dengan ini diminta kepada masing-masing unit kerja untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja dengan melengkapi pengisian aplikasi secara berkala dan tepat waktu sesuai ketentuan mencakup:
 - a. Pengisian aplikasi e-SAKIP Reviu dengan *upload* dokumen terbaru sesuai fitur pada aplikasi diantaranya Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), Pohon Kinerja dan *Cascading*, Tindak Lanjut LHE AKIP Internal, Perencanaan Kinerja (Renstra, Perjanjian Kinerja), Laporan Monev Renaksi (Laporan Monitoring Kinerja Triwulan, Monitoring Rencana Aksi), Laporan Kinerja, Pedoman Teknis, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan **pada kesempatan pertama**;
 - b. *Pengisian* aplikasi e-*Performance* secara lengkap dan tepat waktu meliputi capaian kinerja, keterangan/analisa, rencana selanjutnya dan dokumen pendukung masing-masing indikator kinerja **setiap bulan paling lambat hari kerja kelima pada bulan berikutnya**;
 - c. Pengisian aplikasi SAKTI (terkoneksi dengan aplikasi Monev Kemenkeu) meliputi *Partisipasi* Satker dan Monitoring Capaian *Output* **pada kesempatan pertama**.
 - d. *Pengisian* fitur Sistem Pelaporan Kinerja pada Portal Aplikasi DJKA meliputi monitoring rencana aksi **setiap bulan paling lambat tanggal 25 pada bulan berikutnya** serta dokumentasi pelaporan kinerja;

- e. *Pengisian* aplikasi e-Monev Bappenas (menunggu *launching update* aplikasi yang direncanakan pada 21 April 2025).
2. Menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2024 serta melaporkan progresnya dilengkapi data dukung kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian ***pada kesempatan pertama*** (Berita Acara Hasil Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP dapat diakses pada link <https://tinyurl.com/2buwrute>).
 3. Melaksanakan persiapan evaluasi implementasi SAKIP mencakup pembentukan tim evaluator termasuk mengusulkan 1 pegawai sebagai evaluator di tingkat Eselon I, penyiapan bahan paparan untuk pra evaluasi, penyelesaian laporan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP sebelumnya, serta selanjutnya melaksanakan evaluasi mandiri masing-masing unit kerja sesuai KM 74 Tahun 2024.
 4. Melakukan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025 mengacu PM 85 Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, serta menindaklanjuti:
 - a. Hasil evaluasi kinerja dan kepatuhan pelaporan terhadap Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagaimana surat Sesditjen Perkeretaapian nomor PR.205/1/10/K1/DJKA/2025 tanggal 28 Februari 2025.
 - b. Kelengkapan substansi pelaporan berdasarkan hasil pembahasan dan tindak lanjut evaluasi implementasi SAKIP dari APIP/Tim Evaluator Internal (*outline* laporan terlampir), diantaranya:
 - 1) Analisa keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja agar lebih spesifik/tidak normatif dan sesuai kegiatan pendukung yang dilaksanakan dilengkapi informasi *crosscutting* (keterhubungan sektor/unit kerja lain).
 - 2) Uraian rekomendasi/upaya peningkatan kinerja yang juga mencakup penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran, organisasi, penempatan pegawai/jabatan.
 - 3) Analisa perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja) untuk beberapa indikator kinerja (lebih dari 50% dari jumlah indikator kinerja).
 - 4) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dan SDM sesuai format yang telah disepakati, serta melengkapi uraian perubahan/peningkatan budaya kinerja yang telah dilaksanakan.

- 5) Rencana aksi dan monitoringnya harus dilengkapi dengan kegiatan pendukung dan anggaran pada masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan.
- 6) Dokumentasi dan laporan pembahasan internal unit kerja guna menunjukkan kepedulian dan pemahaman dari pimpinan dan pegawai termasuk dilengkapi penyampaian data capaian kinerja dari sub unit kerja.
- 7) Sinkronisasi dan validasi data capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 antar unit kerja terkait (Balai, Direktorat, Setditjen) termasuk melakukan pengisian capaian kinerja pada tautan <https://bit.ly/SinkronisasiDataKinerjaDJKA>.

Laporan Monitoring Kinerja Triwulan I Tahun 2025 agar disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian ***paling lambat tanggal 25 April 2025*** guna selanjutnya *diupload* pada aplikasi e-SAKIP Reviu dan Portal Aplikasi DJKA.

5. Khusus untuk masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar menyampaikan data dukung capaian masing-masing indikator kinerja periode Triwulan I Tahun 2025 sesuai bidang tugas dilengkapi uraian analisis keberhasilan/kegagalan dan rekomendasi/upaya peningkatan kinerja untuk periode berikutnya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian/Kepala Bagian Perencanaan dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Setditjen Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Wahjuningrum

Wahjuningrum
NIP 196607031991032001

Tembusan:

Direktur Jenderal Perkeretaapian

Lampiran Surat

Nomor : PR.205/1/20/KA/DJKA/2025

Tanggal : 17 April 2025

1. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
3. Direktorat Sarana Perkeretaapian;
4. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian SDM dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



OUTLINE

LAPORAN MONITORING KINERJA TRIWULAN

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Tugas dan Fungsi
4. Struktur Organisasi
5. Perjanjian Kinerja Unit Kerja (Sasaran, Indikator, Target, Anggaran) termasuk Analisis SMART Indikator Kinerja

BAB III PENUTUP

1. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya (*termasuk upaya peningkatan Budaya Kinerja*)
2. Kesimpulan
3. Rekomendasi

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

1. Tahap Pengukuran Kinerja
2. Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan
Masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
 - A. Capaian Kinerja
 - B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (*termasuk data crosscutting*)
 - C. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional
 - D. Upaya Peningkatan Kinerja (*termasuk uraian pengaruh terhadap penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktivitas, Anggaran, Organisasi, Jabatan/Pegawai*)
3. Capaian Lainnya (apabila ada)
4. Realisasi Anggaran (Unit Kerja, Per Indikator Kinerja)
5. Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran dan SDM)

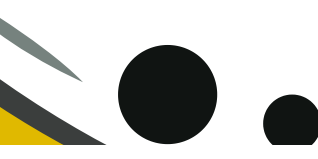
LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja termasuk Renaksi
Lampiran 2. Komitmen Pimpinan terkait Rekomendasi Peningkatan Kinerja
Lampiran 3. Monitoring Rencana Aksi Per Bulan
Lampiran 4. Data Dukung Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja
Lampiran 5. Dokumentasi dan Laporan Pembahasan Kinerja di Internal Unit Kerja termasuk nota dinas penyampaian data kinerja dari sub unit kerja

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020 (diolah)



NOTA DINAS PENYAMPAIAN DATA DUKUNG





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001-3838

WEBSITE : <http://djka.dephub.go.id/>
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 0153/K2/IV/2025

Yth : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Dari : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Tahun 2025 Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Tanggal : 25 April 2025

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/1/20/K1/DJKA/20225 tanggal 17 April 2025 perihal Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Persiapan Evaluasi Implementasi SAKIP.

Sehubungan dengan hal di atas, bersama ini disampaikan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 yang menunjukkan program dan kegiatan yang telah dicapai berdasarkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dengan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Capaian rata-rata kinerja triwulan I tahun 2025 sebesar 232,01% yang tidak memenuhi kriteria *on the right track* (capaian kinerja 90-110%), oleh karena itu diperlukan penyesuaian target pada periode triwulan II tahun 2025 dengan melakukan revisi perjanjian kinerja tahun 2025 untuk mengantisipasi capaian kinerja di atas 110%.
2. Terdapat Indikator Kinerja Kegiatan yang memerlukan penyesuaian pada target rencana aksi triwulan tahun 2025 berdasarkan evaluasi pengukuran capaian kinerja triwulan I tahun 2025, meliputi:
 - a. IKK.10 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (capaian 333%)
 - b. IKK.11 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (capaian 1042%)
3. Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp5.917.008.770 dengan persentase realisasi pencapaian sebesar 4,14% dari sisa anggaran DIPA sebesar Rp142.786.186.000 atau 19,37% dari sisa anggaran yang bisa dikelola (terkena dampak efisiensi anggaran) sebesar Rp30.551.140.000.

Adapun keberhasilan pencapaian kinerja didasarkan pada upaya peningkatan kinerja yang telah dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang bertanggung jawab atas Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

Atas perkenan dan arahan lanjut dari Bapak Direktur Jenderal Perkeretaapian, diucapkan terima kasih.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arif Anwar', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Arif Anwar, S.T., M.Sc.

NIP 197602222006041001

Tembusan :

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WIBESITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 0164/K3/IV/2025

Yth. : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Dari : Direktur Prasarana Perkeretaapian
Hal : Dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode Triwulan I Tahun 2025
Tanggal : 25 April 2025

Sebagai implementasi pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025 dan tindaklanjut Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor: PR.205/1/17/K1/DJKA/2025 tanggal 8 April 2025 perihal Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Penyusunan Laporan Kinerja serta Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2025, bersama ini disampaikan telah dilakukan monitoring dan evaluasi internal kinerja dilingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk periode triwulan I tahun 2025 dengan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Capaian kinerja di Triwulan I (Januari s.d Maret tahun 2025) terdapat 10 IKK yang *on the right track* dan 1 IKK yang tidak *on the right track* (90% s.d 110%) yaitu Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan capaian sebesar 178,004% dari target tahun 2025 dan akan dilakukan perhitungan ulang serta revisi target;
2. Sebagai upaya untuk peningkatan kinerja dengan pencapaian kinerja *on the right track* telah dituangkan rekomendasi peningkatan kinerja dilaporan Monitoring Capaian Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2025. Rekomendasi/upaya peningkatan kinerja juga sebagai pemanfaatan laporan kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian startegi dan penyesuaian anggaran dalam rangka pencapaiin kinerja;
3. Diharapkan melalui monitoring dan evalausi kinerja secara berkala, perhatian pimpinan serta kepedulian pegawai Direktorat Prasarana Perkeretapiian mampu meningkatkan kinerja dan nilai AKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, secara lengkap dan jelas capaian kinerja triwulan I tahun 2025, terlampir disampaikan Dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode Triwulan I tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perkenan persetujuan dan arahan lanjut Bapak Direktur Jenderal diucapkan terima kasih.

Hengki Angkasawan
NIP. 196701081993031001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001-3838

WEBSITE : <http://djka.dephub.go.id/>
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 0070/K4/IV/2025

Yth : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Dari : Direktur Sarana Perkeretaapian
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun
2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian
Tanggal : 25 April 2025

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: PR.205/1/20/K1/DJKA/2025 tanggal 17 April 2025 perihal Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Persiapan Evaluasi Implementasi SAKIP, bersama ini terlampir disampaikan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Direktorat Sarana Perkeretaapian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan lanjut Bapak Direktur Jenderal diucapkan terimakasih

Bambang Siswoyo
NIP 197108091997031002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <http://djka.dephub.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor : 0087 / K5 / IV / 2025

Yth. : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Dari : Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Tahun 2025 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
Tanggal : 25 April 2025

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor: PR.205/1/20/K1/DJKA/2025 tanggal 17 April 2025 perihal Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Persiapan Evaluasi Implementasi SAKIP, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian perlu menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut terlampir disampaikan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Atas perkenan dan arahan lanjut Bapak Direktur Jenderal diucapkan terima kasih.

Bernadette E.S Mayashanti
NIP 196908031998032001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : +62 813-6001-3838

WEBSITE : <https://djka.kemenhub.go.id>
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor 0336/KU/IV/2025

Yth. : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Hal : Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan I Tahun 2025
Tanggal : 25 April 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa diperlukan monitoring capaian kinerja secara berkala terhadap target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 73,62%.

Kinerja yang ditargetkan pada rencana aksi periode Triwulan I 2025 hanya terdapat pada 5 dari 13 indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, sedangkan 8 indikator kinerja lainnya ditargetkan pencapaiannya pada Triwulan IV 2025 sehubungan dengan waktu penyelesaian penilaian yaitu indikator kinerja kegiatan:

1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Perkeretaapian yang ditindaklanjuti;
2. Indeks Profesional ASN;
3. Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik;
4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian;
5. Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian;
6. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian;
7. Indeks Pengelolaan Aset Bidang Perkeretaapian;
8. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian.

Adapun uraian target dan realisasi untuk 5 indikator kinerja kegiatan yang terdapat target pada pada periode Triwulan I 2025 dilaporkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian Kinerja Triwulan I (%)
1	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	5,00	0,00	0,00
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	80,61	82,33	102,13
3	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian	Nilai	9,00	50,00	555,56 (Maks Capaian 110%)
4	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian	%	2,00	1,13	56,50
5	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,87	99,49
Rata-Rata Capaian Kinerja					73,62

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh bahwa terdapat 2 indikator kinerja kegiatan yang berkinerja rendah (kurang dari 90%) dan perlu upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya yaitu capaian legislasi dan realisasi PNBP. Selain itu dilaporkan pula realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan I 2025 sebesar Rp30.234.641.165,00 atau 15,63% dari alokasi anggaran sebesar Rp193.421.222.000,00 dimana nilai tersebut di atas rata-rata realisasi anggaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Mohon perkenan arahan lanjut Bapak Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Atas arahan dan petunjuk lanjut Bapak Direktur Jenderal diucapkan terima kasih.



Jujun Endah Wahjuningrum
NIP 196507031991032001